



LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

L K j



PAPUA BANGKIT,

MANDIRI DAN SEJAHTERA



PON XX
PAPUA
2020!
Torang Bisa!



MARET 2019

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2018 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Akuntabilitas SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Materi LKj mengandung analisis pencapaian indikator sasaran dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai Tujuan




dan Sasaran yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Papua pada masa mendatang.

Capaian Sasaran Pemerintah Provinsi Papua yang diukur melalui indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 adalah predikat “**Sangat Berhasil**”. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan LKj Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang I
melaksanakan tugas pengabdian k

Jayapura, Maret 2019
GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP, MH



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA.....	1
1.1.1. Kondisi Geografis	1
1.1.2. Kondisi Demografis	2
1.1.3. Kondisi Pemerintahan	5
1.1.4. Kondisi Perekonomian	10
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	13
1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	13
BAB II	
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	15
2.1. RENCANA STRATEGIS	15
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi.....	15
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	20
2.1.3. Strategi Pelaksanaan	24
2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018.....	27
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.....	31
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	39
3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA	43
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	186
BAB IV	
PENUTUP	203
A. SIMPULAN	203
B. UPAYA PERBAIKAN	206



LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA;
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) 2018;
3. TABEL TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2018;
4. GRAFIK TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015-2018;
5. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEPANJANG TAHUN 2018-2019 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
 - 5.1 PENGHARGAAN DARI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEBAGAI GUBERNUR YANG PEDULI OLAHRAGA, DI SURABAYA, 8 FEBRUARI 2019.
 - 5.2 PENGHARGAAN DARI ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI) KEPADA GUBERNUR PAPUA DALAM PROGRAM MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERANTAS MINUMAN KERAS (MIRAS), DI SURABAYA, 28 JANUARI 2019.
 - 5.3 PENGHARGAAN DARI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA (MENPAN DAN RB RI) KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA ATAS PRESTASI DALAM AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 DENGAN PREDIKAT B, NILAI 62.59 DI MAKASAR, 19 FEBRUARI 2019.
 - 5.4 PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA ATAS HASIL PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN KOMPETENSI PENYELENGGARA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI (ZONA HIJAU), NILAI 85.69 DI JAKARTA, 10 DESEMBER 2018 SERTA
 - 5.5 PENGHARGAAN DARI KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) REPUBLIK INDONESIA KEPADA GUBERNUR PAPUA TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK DENGAN KUALIFIKASI CUKUP INFORMATIF, DI JAKARTA, 5 NOVEMBER 2018.
6. DAFTAR TABEL
7. DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

1.1.	Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung	6
1.2.	PDRB Provinsi Papua atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan dengan	12
	dan tanpa Tambang Tahun 2011-2018 (Miliar Rupiah)	12
2.1	Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Prioritas Pembangunan Daerah	31
	Provinsi Papua Tahun 2018	31
2.2	Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2018	32
2.3	Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 (sebelum dilakukan Audit.....	36
	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	36
2.4	Rencana Anggaran Tahun 2018	36
3.1	Pengukuran Pencapaian Kinerja	39
3.2	Skala Ordinal	43
3.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1	45
3.4	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Ke-1 pada Tahun 2015 - 2018	45
3.5	Jumlah Konflik Horizontal Berdasarkan SARA Tahun 2016 – 2018	46
3.6	Data Bencana di Provinsi Papua atas Peristiwa Alam dan Non Alam Tahun 2018	46
3.7	Perkembangan Kasus Kriminalitas Yang ditangani Tahun 2015-2018	47
3.8	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2	50
3.9	Persentase Pejabat Struktural Provinsi Papua.....	51
3.10	Perkembangan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua	52
3.11	Perkembangan Jabatan Struktural Tahun 2015-2018 Provinsi Papua.....	53
3.12	Perkembangan Jabatan Fungsional Tahun 2015-2018 Provinsi Papua.....	54
3.13	Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Papua Tahun 2015-2018.....	55
3.14	Perkembangan Peningkatan Nilai SAKIP SKP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2018	59
3.15	Optimalisasi SAKIP pada Kab/Kota se Prov.Papua Tahun 2016-2018.....	60
3.16	Perkembangan LKPD Provinsi Papua oleh BPK RI Tahun 2015-2018.....	46
3.17	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3.....	65
3.18	Data Responden Survei IKM Tahun 2015-2018.....	
	di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.....	68
3.19	Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP	69
3.20	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4.....	71

3.21 Pencapaian Target LHP Yang Ditetapkan.....	72
3.22 Hasil Pemantauan Pelaksanaan LHP	73
3.23 Perkembangan Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	
Tahun 2015-2018	79
3.24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5.....	81
3.25 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua menurut Daerah	
Tahun 2002-Maret 2018.....	83
3.26 Jumlah PMKS yang tertangani di Provinsi Papua	87
3.27 Kelompok PMKS di Indonesia	87
3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6.....	90
3.29 Alokasi Dana KPS Tahun 2014 - 2017.....	92
3.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7.....	101
3.31 APK SD, SMP, SMU Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua	104
3.32 APK SD, SMP, SMU Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua	105
3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8.....	107
3.34 Jenis Kejuaraan dan Cabang Olahraga Tahun 2018	108
3.35 Perkembangan Atlet dan Club Olahraga di Provinsi Papua.....	
Tahun 2015-2018.....	109
3.36 Cabang Olahraga dan Venue PON XX Tahun 2020 Provinsi Papua	110
3.37 Jumlah Wirausaha Muda Asli Papua	113
3.38 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9.....	113
3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10.....	115
3.40 Realisasi Inventasi Perusahaan PMDN selama 4 Tahun	117
3.41 Rencana dan Realisasi Investasi Perusahaan PMA selama 4 Tahun.....	117
3.42 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11	119
3.43 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12.....	128
3.44 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi.....	
Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2015-2018.....	129
3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13.....	130
3.46 Distribusi dan Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan	
Restoran pada PDRB Papua atas dasar Harga Berlaku Tahun 2016 ¹⁾	
Tahun 2017 dan Tahun 2018*) (persen)	131
3.47 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14.....	132
3.48 PDRB Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	135

3.49 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Dasar Harga Berlaku) di Provinsi Papua selama Tahun 2014-2016	137
3.50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15	141
3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 16	149
3.52 Perkembangan Panjang Jalan Tahun 2015-2018	150
3.53 Pembangunan/Pemeliharaan Panjang Jalan Tahun 2014-2018	150
3.54 Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan Tahun 2015-2018	153
3.55 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	153
3.56 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum per Tahun di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	154
3.57 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Udara di Provinsi Papua Tahun 2015-2018	155
3.58 Arus Penumpang Angkutan Laut Yang Masuk dan Keluar Tahun 2015-2018	156
3.59 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 17	157
3.60 Perkembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi	158
3.61 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 18	160
3.62 Perkembangan Pembangunan Rumah Layak Huni yang dibangun Tahun 2017	161
3.63 Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014-2016 Oleh Instansi lain di Provinsi Papua	162
3.64 Pembangunan Rumah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2017	163
3.65 Pembangunan Rumah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2018	171
3.66 Daftar Penerima Hibah Rumah Layak Huni Tahun 2018	172
3.67 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 19	176
3.68 Persentase Rumah Tangga (RT) yang terlayani Air Bersih	177
3.69 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 20	178
3.70 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 21	180
3.71 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 22	183
3.72 Sebaran Kerusakan Hutan Lindung Tahun 2018	184



DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Papua	1
1.2	Peta Ketinggian Provinsi Papua	2
1.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua	3
	Tahun 2012- 2018	3
1.4	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Sex di Provinsi Papua .	3
	Tahun 2012- 2018	3
1.5	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	4
	Tahun 2018	4
1.6	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2018	5
1.7	Struktur Organisasi Provinsi Papua	9
1.8	Peran Sektor Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Papua dengan Tambang ...	10
	Tahun 2014-2018 (%)	10
1.9	Peran Sektor Ekonomi terhadap PDRB Provinsi Papua tanpa Tambang	11
	Tahun 2014-2018 (%)	10
2.1	Keterkaitan Visi Papua	17
2.2	Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2013-2018	28
3.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Papua Tahun 1999-2018	83
3.2	Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 dan Perubahan Persentase	
	Penduduk Miskin periode September 2017-Maret 2018 menurut Provinsi	85
3.3	Angka Kematian Ibu Tahun 2015-2018	93
3.4	Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2018.....	95
3.5	Hasil Konseling Tes HIV Provinsi Papua Tahun 2013-2018	96
3.6	Jumlah Pasien HIV (+) Baru yang dirujuk ke PDP	96
3.7	Persentase Rujukan Kasus HIV Provinsi Papua Tahun 2013-2018	97
3.8	Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan/Medis	98
3.9	Penyebaran Tenaga Bidan di Kabupaten Kota	99
3.10	Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017 di Provinsi Papua	100
3.11	Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi Sehat	
	dan Partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi Tahun 2018	120
3.12	Persentase Jenis Koperasi di Provinsi Papua	121
3.13	Data Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi Sehat dan	
	dan Partisipasi Masyarakat dalam berkoperasi	122
3.14	Perbandingan Angka Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	



Tahun 2016 dan 2017	133
3.15 Intensitas Serangan Organisme pengganggu Tanaman (OPT)	
Pada Tanaman Kakao Tahun 2017	134
3.16 Produksi Peternakan Tahun 2012-2017	135
3.17 Kontribusi PDRB masing-masing Sub Sektor	137
3.18 Perkembangan NTP Pangan Tahun 2015-2017	138
3.19 Perkembangan NTP Hortikultura Tahun 2015-2017	138
3.20 Sumber Pertumbuhan PDRB beberapa Lapangan Usaha Tahun 2014-2016	140
3.21 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua tahun 2013-2018	142
3.22 PDRB Perkapita Papua Tahun 2010 – 2018*	143
3.23 Perkembangan Gini Rasio Provinsi Papua Tahun 2013 -2017	144
3.24 Perkembangan Inflasi Provinsi Tahun 2013-2017	145
3.25 Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2018	146
3.26 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017	147
3.27 Perkembangan PAD Provinsi Papua Tahun 2013-2017	147
3.28 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua	181
3.29 Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Papua	182



RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2018. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dari target indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018.

Dari hasil pengukuran kinerja pada 22 (dua puluh dua) sasaran, dapat disimpulkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua "**Sangat Berhasil**", hal ini dapat dilihat pada capaian kinerja pelaksanaan masing-masing sasaran sebagai berikut :

- ❖ 13 sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- ❖ 5 sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- ❖ 1 sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- ❖ 3 sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan target kinerja, pengukuran dan evaluasi IKU yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2018.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

- 
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indikator kinerja sasaran.

Dari segi akuntabilitas keuangan, total anggaran belanja langsung Pemerintah Provinsi Papua tahun 2018 adalah sebesar Rp5.482.535.212.242,30 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (22 sasaran) adalah sebesar Rp4.508.253.678.632,00 atau 82,23 persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp3.486.518.018.589,46 atau 77,34 persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU.

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2018 adalah Rp14.707.910.612.685,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp9.225.375.400.442,70 dan Belanja Langsung Rp5.482.535.212.242,30. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp4.508.253.678.632,00 atau 82,23 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.486.518.018.589,46 dari realisasi belanja langsung atau 79,02 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 77,34 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 77,34 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

1.1.1 Kondisi Geografis

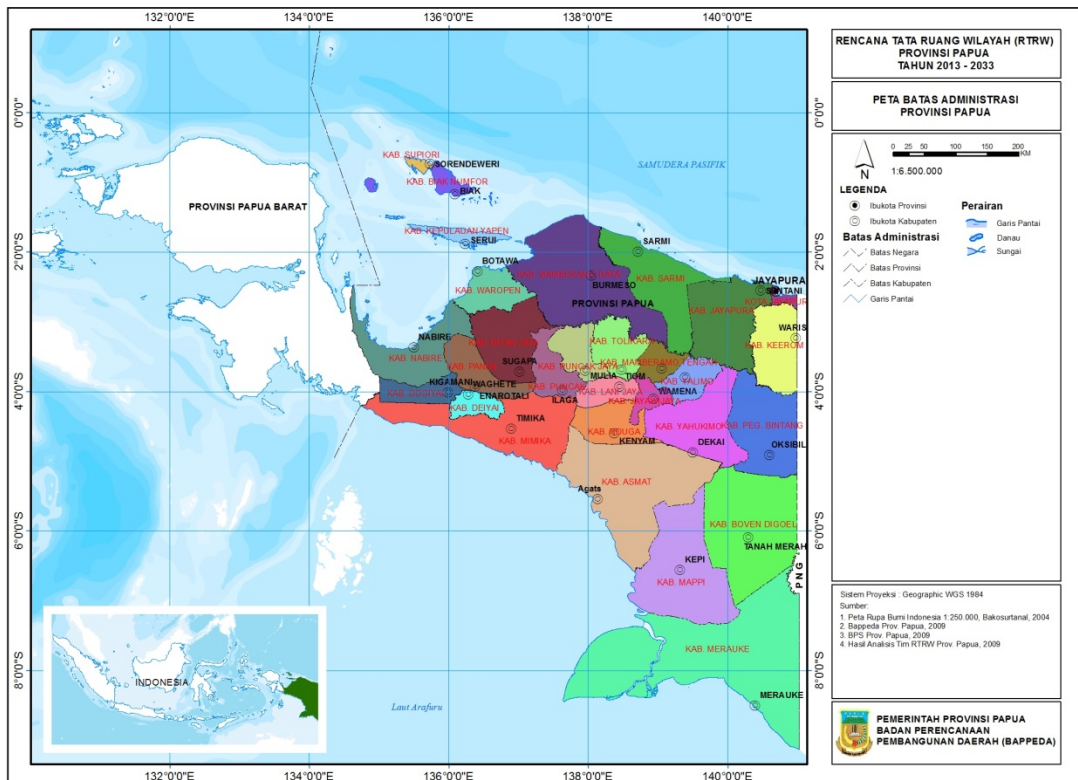
Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia dengan luas 319.036,05 km².

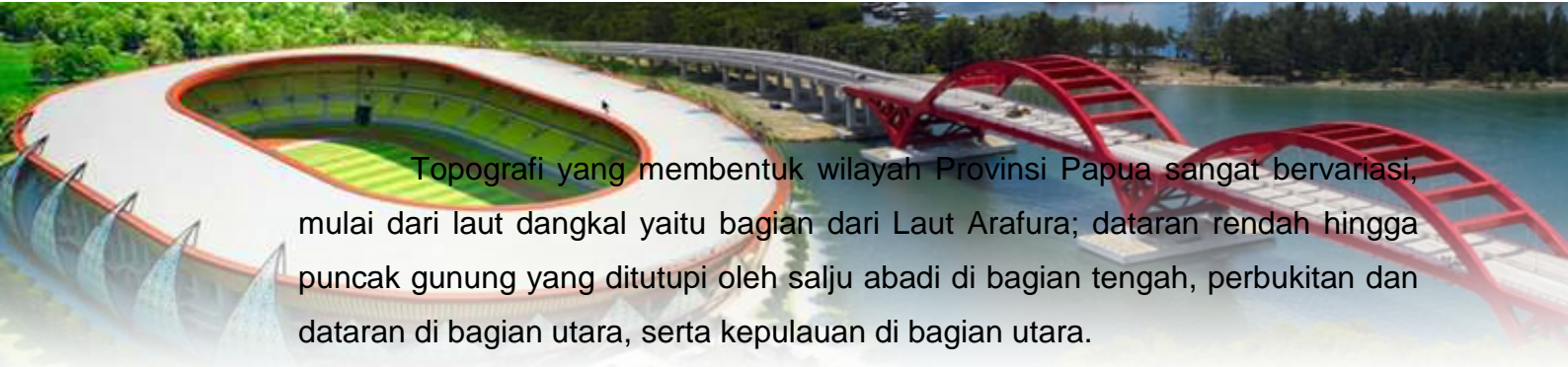
Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

- o Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- o Sebelah Selatan : Laut Arafura
- o Sebelah Barat : Papua Barat
- o Sebelah Timur : Papua New Guinea

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 01°00' LU - 09°10' LS dan 134°00' BT - 141°05' BT. Provinsi Papua hingga tahun 2018, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

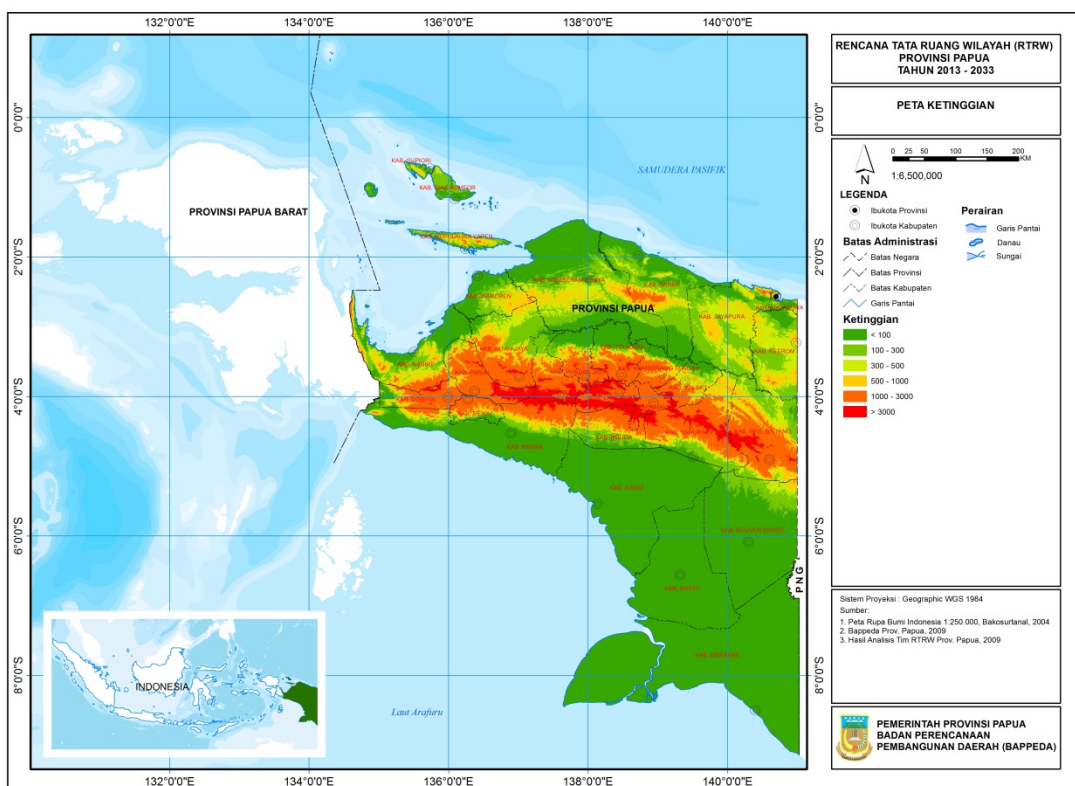




Topografi yang membentuk wilayah Provinsi Papua sangat bervariasi, mulai dari laut dangkal yaitu bagian dari Laut Arafura; dataran rendah hingga puncak gunung yang ditutupi oleh salju abadi di bagian tengah, perbukitan dan dataran di bagian utara, serta kepulauan di bagian utara.

Pada bagian tengah rangkaian pegunungan tinggi terdapat Pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang selalu diselimuti oleh salju abadi di Puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m, Puncak Trikora 5,160 m dan Puncak Yamin 5,100 m.

Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua

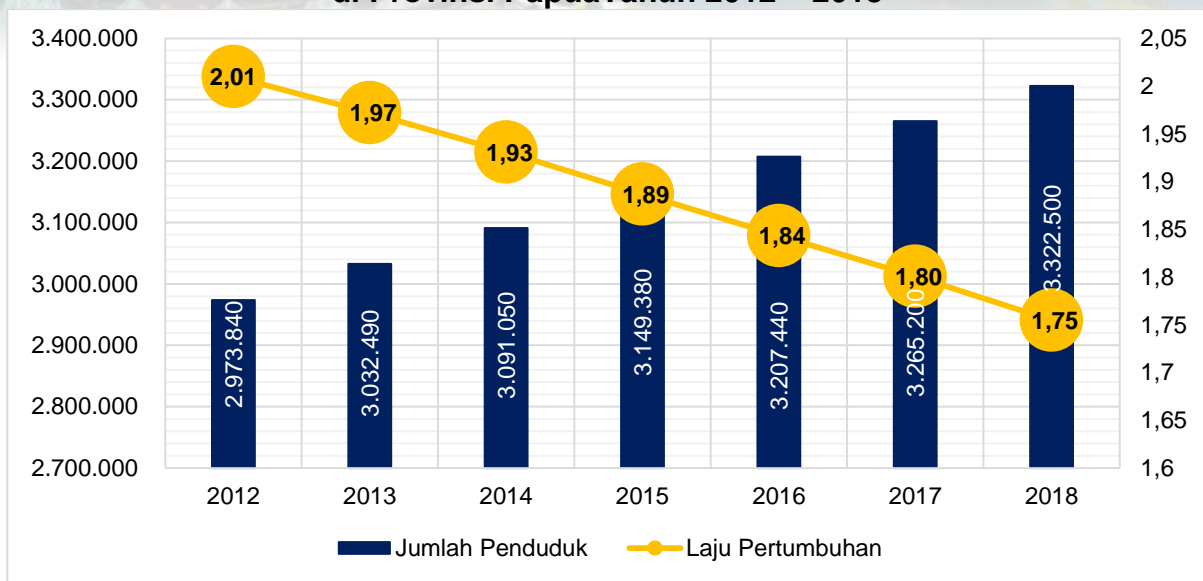


1.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Papua tahun 2018 adalah 3.322.500 juta jiwa yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 225.174 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin sebesar 110.85 yang berarti terdapat 110 laki-laki setiap 100 perempuan.

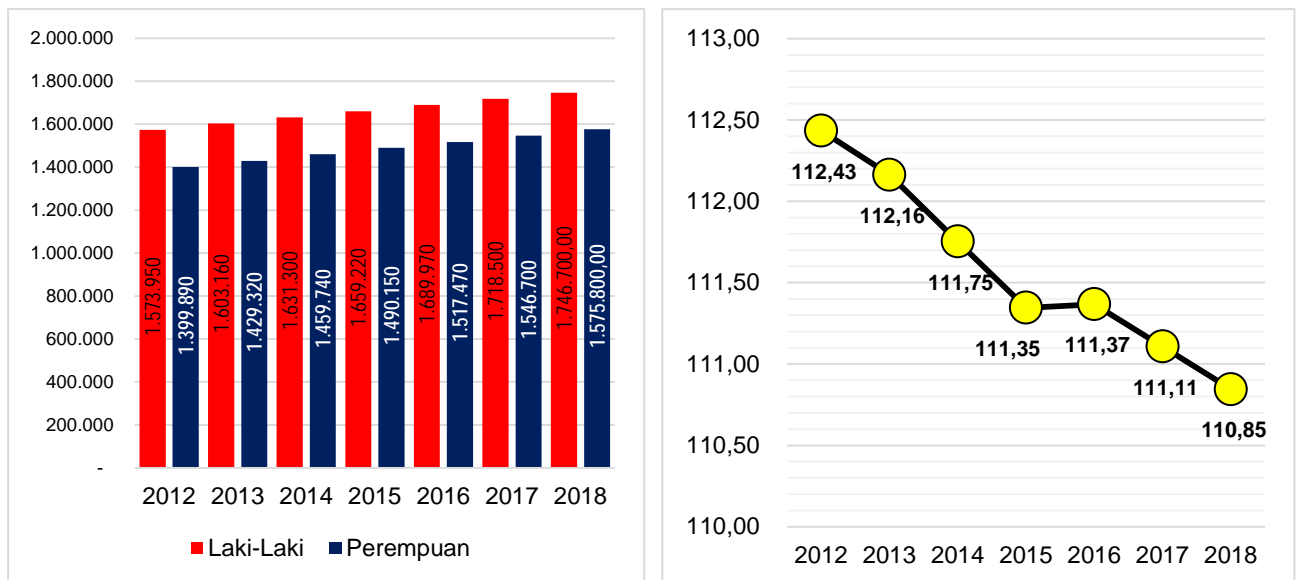


Gambar 1.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2018



Sumber : BPS 2017

Gambar 1. 4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua Tahun 2012–2018



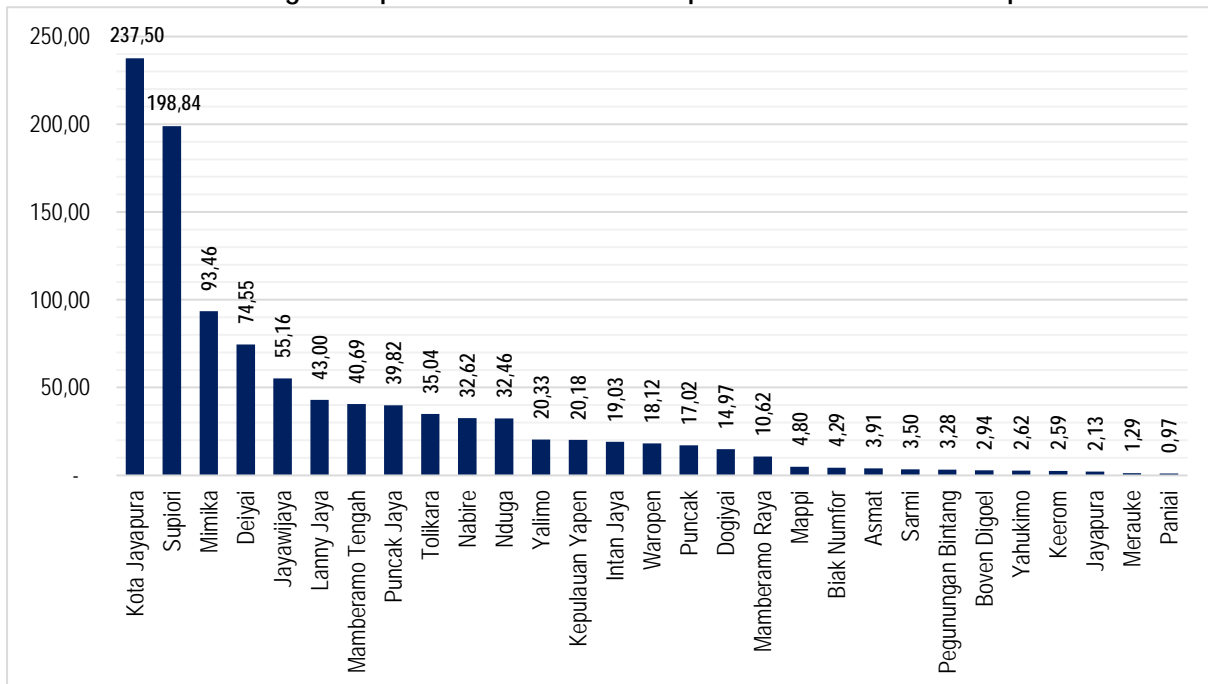
[a] Jumlah Penduduk Laki-Laki Dan Perempuan

[b] Rasio Sex



Dengan luas wilayah 319.036,05 km², kepadatan penduduk di Papua sebanyak 10,50 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Jayapura, yakni 237,50 jiwa per km², diikuti Kabupaten Supiori (198,84 jiwa per km²) dan Kabupaten Mimika (93,46 jiwa per km²). Sedangkan kepadatan terendah terjadi di Kabupaten Paniai, yakni kurang dari 0,97 jiwa per km².

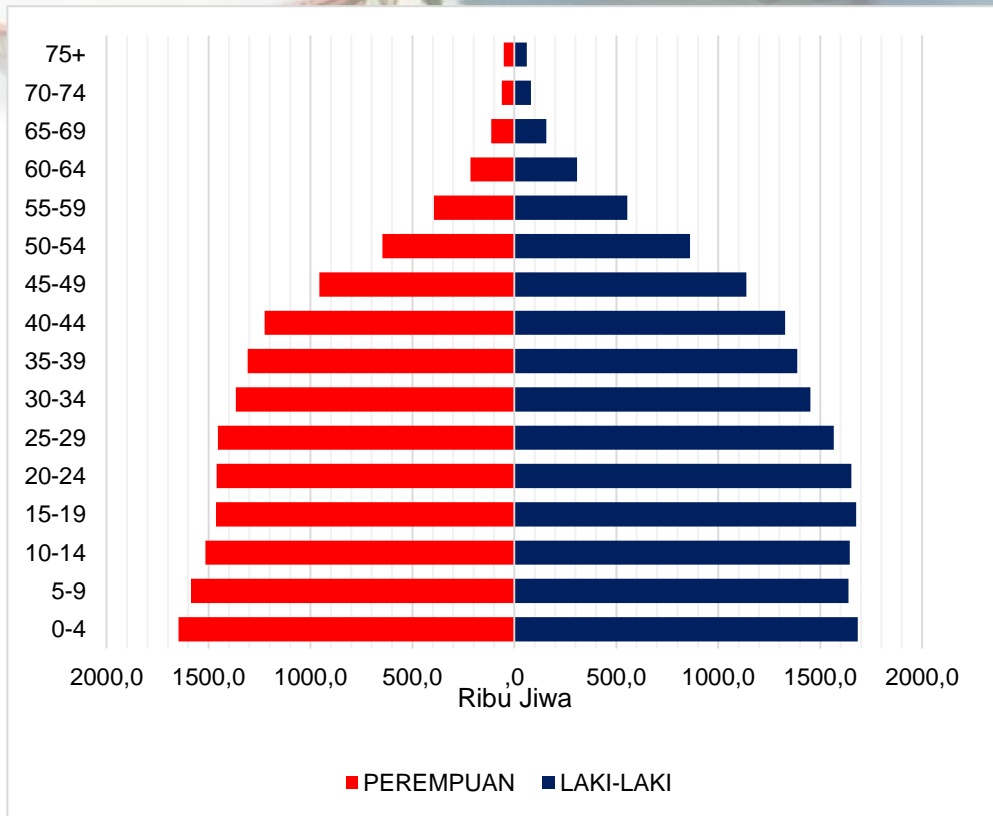
Gambar 1.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018



Penduduk Papua berdasarkan kelompok umur ternyata didominasi oleh kelompok usia muda (0-4 tahun). Kecilnya proporsi penduduk usia tua (kelompok usia 75 tahun keatas. Selain itu, komposisi penduduk seperti di atas menyebabkan rasio ketergantungan di Papua tahun 2016 cukup tinggi, yaitu sebesar **44,96** persen.



Gambar 1.6 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2018



1.1.3 Kondisi Pemerintahan

Provinsi Papua, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 558, kelurahan 110 dan desa 5.419. Rincian disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung



**KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PER KABUPATEN / KOTA SE - PROVINSI PAPUA
(PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2016)**

NO	KODE	NAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH					LUAS WILAYAH (km ²)	KETERANGAN
				KAB	KOTA	KEC	KEL	DESA		
XXXII I	91	PAPUA		28	1	558	110	5.419	319.036,05	
1	91.01	KAB. MERAUKE	MERAUKE			20	11	179	44.071,00	
2	91.02	KAB JAYAWIJAYA	WAMENA			40	4	328	7.030,66	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
3	91.03	KAB JAYAPURA	JAYAPURA			19	5	139	11.157,15	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
4	91.04	KAB. NABIRE	NABIRE			15	9	72	11.112,61	
5	91.05	KAB. KEPULAUAN YAPEN	SERUI			14	5	160	2.050,00	PERUBAHAN NAMA KAB. YAPEN WAROPEN PP NO 40/2008
6	91.06	KAB. BIAK NUMFOR	BIAK			19	14	254	2.602,00	
7	91.07	KAB PUNCAK JAYA	KOTA MULIA			26	3	302	4.989,51	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007

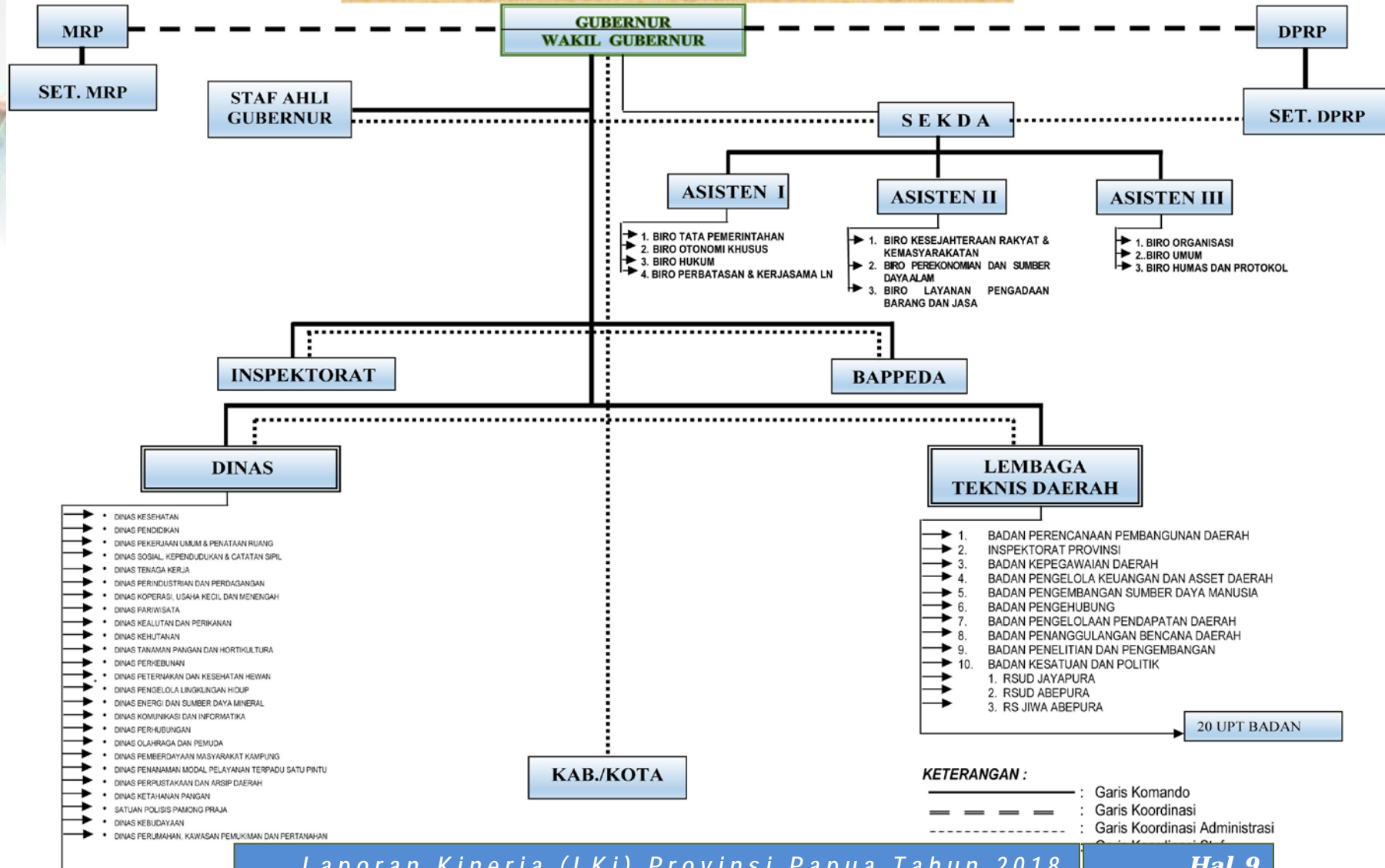
NO	KODE	NAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH					LUAS WILAYAH (km ²)	KETERANGAN
				KAB	KOTA	KEC	KEL	DESA		
8	91.08	KAB. PANIAI	ENAROTALI			23	5	216	6.525,25	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
9	91.09	KAB MIMIKA	TIMIKA			18	19	133	21.633,00	
10	91.10	KAB SARMI	SARMI			10	2	92	17.742,00	TERMASUK JUMLAH PENDUDUK KAB MAMBERAMO RAYA (KABUPATEN PEMEKARAN), DATA LUAS WIL. BERDASARKAN UU NO 19/2007
11	91.11	KAB KEEROM	WARIS			11		91	8.390,00	
12	91.12	KAB PEG BINTANG	OKSIBIL			34		277	15.682,00	
13	91.13	KAB YAHUKIMO	SUMOHAI			51	1	510	17.152,00	
14	91.14	KAB TOLIKARA	KARUBAGA			46	4	541	5.588,13	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
15	91.15	KAB WAROPEN	BOTAWA			11		100	10.977,09	DATA LUAS WIL. BERDASARKAN UU NO 19/2007
16	91.16	KAB BOVEN DIGOEL	TANAH MERAH			20		112	27.108,00	



NO	KODE	NAMA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	JUMLAH					LUAS WILAYAH (km ²)	KETERANGAN
				KAB	KOTA	KEC	KEL	DESA		
17	91.17	KAB MAPPI	KEPI			15	2	162	24.118,00	
18	91.18	KAB ASMAT	AGATS			19		221	31.983,69	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
19	91.19	KAB SUPIORI	SORENDIWERI			5		38	678,32	Data luas wilayah berdasarkan GIS PUSAT 2007
20	91.20	KAB. MAMBERAMO RAYA	BURMESO			8		69	23.813,91	UU NO 19/2007
21	91.21	KAB MAMBERAMO TENGAH	KOBAKMA			5		59	1.275,00	UU NO 3/2008
22	91.22	KAB. YALIMO	ELELIM			5		300	1.253,00	UU NO 4/2008
23	91.23	KAB LANNY JAYA	TIOM			39	1	354	2.248,00	UU NO 5/2008
24	91.24	KAB NDUGA	KENYAM			32		248	2.168,00	UU NO 6/2008
25	91.25	KAB PUNCAK	ILAGA			25		206	8.055,00	UU NO 7/2008
26	91.26	KAB DOGIYAI	KIGAMANI			10		79	4.237,40	UU NO 8/2008
27	91.27	KAB INTAN JAYA	SUGAPA			8		97	3.922,02	UU NO 54/2008
28	91.28	KAB DEIYAI	TIGI			5		67	537,39	UU NO 55/2008
29	91.29	KOTA JAYAPURA	JAYAPURA			5	25	13	935,92	

C. STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA



1.1.4 Kondisi Perekonomian

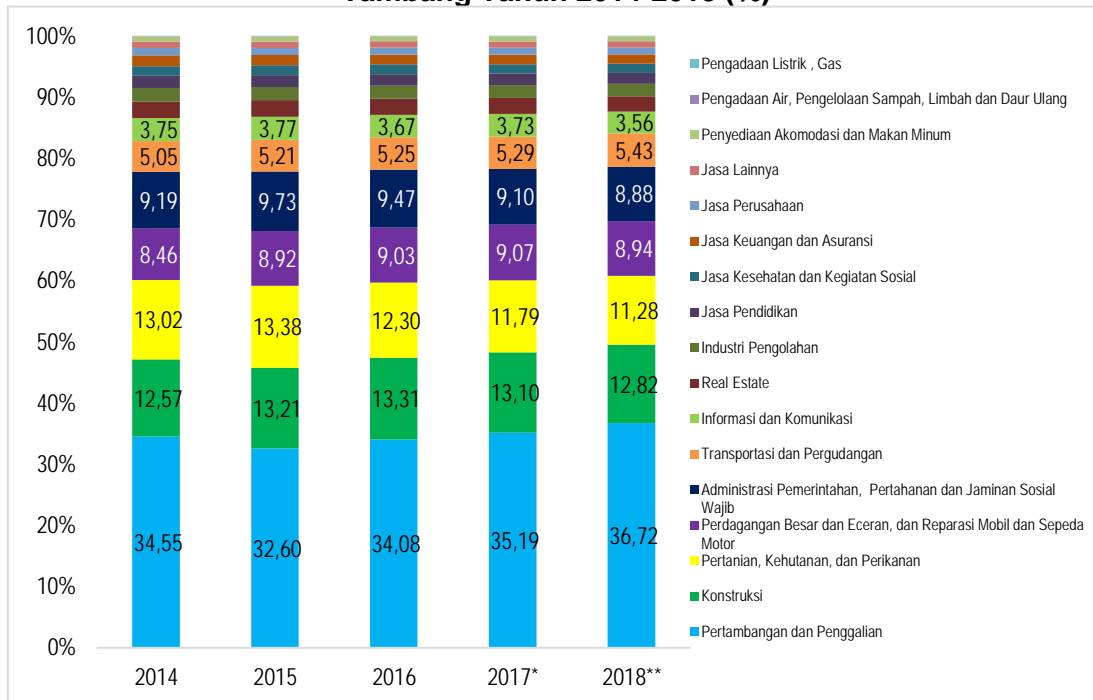
A. Struktur Ekonomi

Hingga tahun 2018, distribusi PDRB Provinsi Papua termasuk tambang belum mengalami peningkatan. Sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi nilai PDRB Papua, khususnya dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 34.55 persen di tahun 2014 menjadi 36.72 persen di tahun 2018.

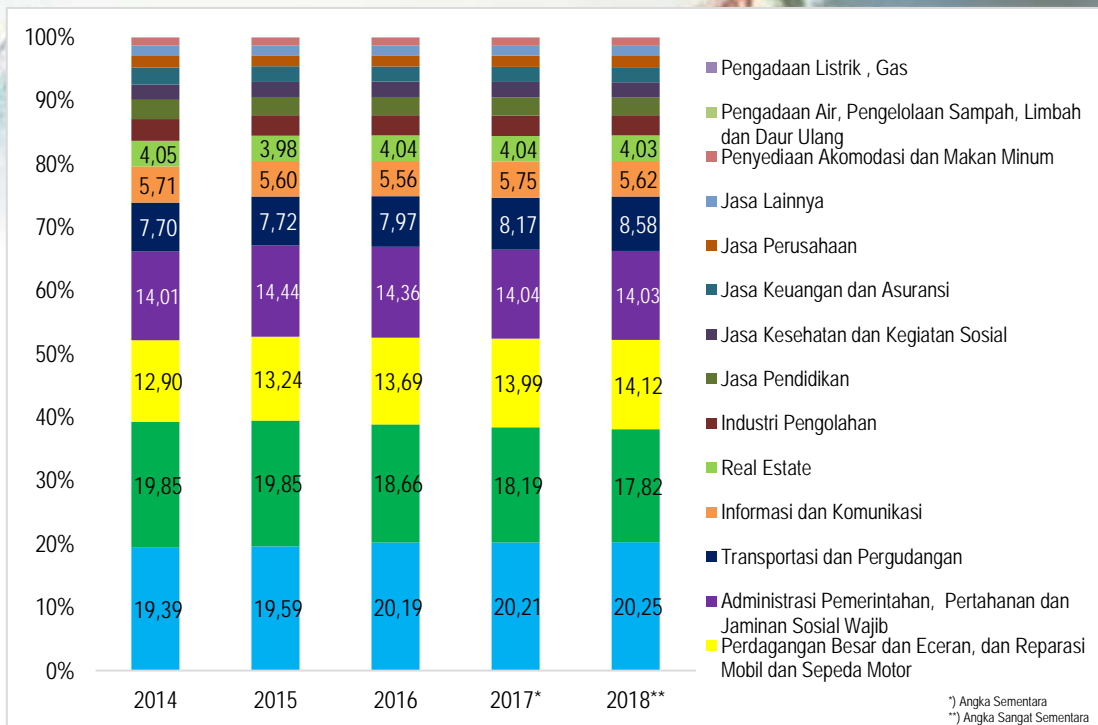
Setelah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi kedua terhadap perekonomian Papua tahun 2018, sumbangan sektor ini sebesar 12.82 persen di tahun 2018, turun jika dibanding kontribusi di tahun 2017 13,10 persen. Di urutan ketiga dan keempat, dengan peranan masing-masing sebesar 11,28 persen dan 8,94 persen adalah sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Sektor Perdagangan.

Sementara itu, lima sektor lainnya berperan di bawah 6 persen dan jasa lainnya merupakan kontributor terendah bagi total nilai tambah sektor-sektor ekonomi di Provinsi Papua tahun 2017.

Gambar 1.7 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi Papua Dengan Tambang Tahun 2014-2018 (%)



Gambar 1.8 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Provinsi Papua Tanpa Tambang Tahun 2014- 2018 (%)



Sumber : PDRB Provinsi Papua, BPS 2017

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu di wilayah tersebut. PDRB dapat menggambarkan kondisi perekonomian di suatu wilayah pada waktu tertentu.

PDRB Papua yang diukur atas dasar harga berlaku Papua mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 nilai tambah yang dihasilkan sebesar 108,2 triliun rupiah. Pada tahun 2018 nilai tambah yang dihasilkan termasuk tambang mencapai 210,6 triliun rupiah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 188,9 triliun rupiah.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Dengan dan Tanpa Tambang Tahun 2011 - 2018 (miliar rupiah)

Tahun	Dengan Tambang		Tanpa Tambang	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2	3	4	5
2011	108.188,75	106.066,72	57.867,28	56.057,78
2012	112.812,56	107.890,94	66.200,77	61.089,70
2013	119.771,97	116.428,60	74.601,83	66.115,08
2014	133.329,98	121.391,23	87.256,17	71.811,42
2015	151.201,49	130.459,90	102.200,55	77.512,22
2016	173.208,86	142.224,93	114.183,51	82.384,56
2017*	188.945,17	148.822,52	122.464,78	86.648,46
2018**	210.659,81	159.728,93	133.313,76	91.016,63

Sumber : Berita Resmi Statistik, BPS 2019

*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Sementara itu, PDRB dengan tambang atas dasar harga berlaku yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Provinsi Papua, pada tahun 2018 mencapai 210,6 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang telah mencapai 151,20 triliun rupiah. PDRB Papua atas dasar harga berlaku tahun 2018 telah mencapai 210,6 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB Papua tahun 2018 tanpa tambang bernilai 133,3 triliun rupiah.



1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

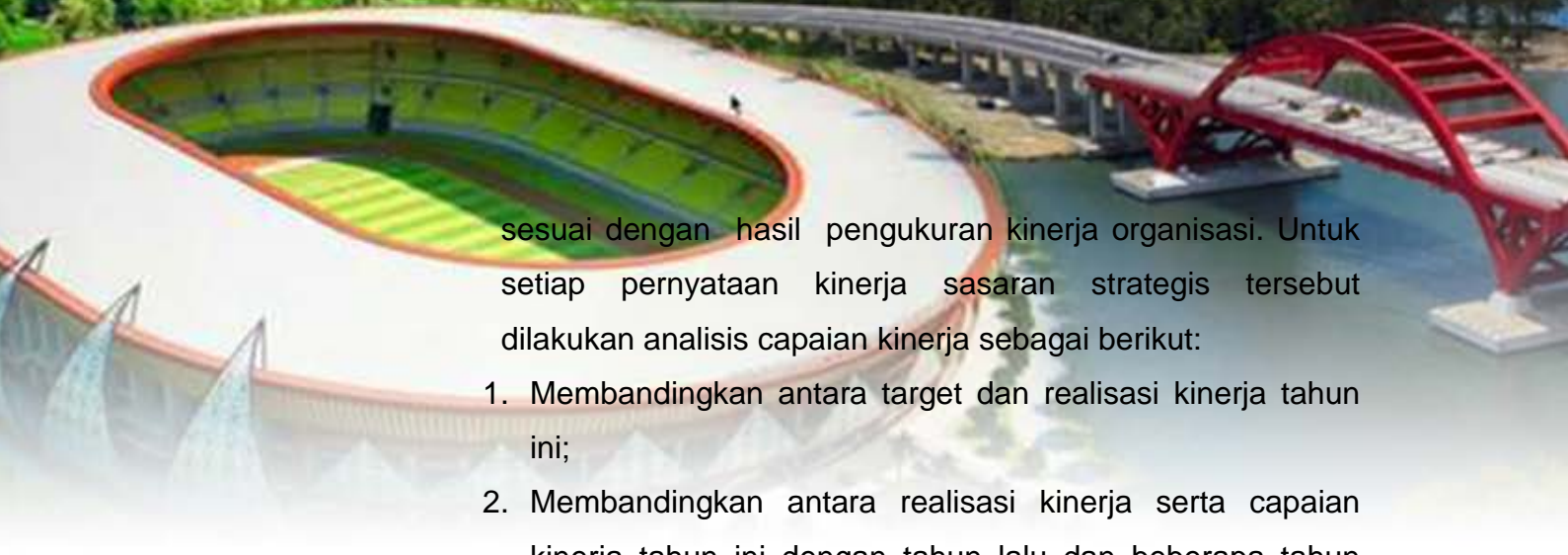
Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi



sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran, yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perjanjian Kinerja (PK)

Penghargaan-Penghargaan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Provinsi Papua untuk periode 5 tahun, yang memuat penjabaran visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pembangunan di Provinsi Papua. RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2005-2025. RPMD Provinsi Papua disahkan melalui Perdasi No. 14 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua tahun 2013 - 2018.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis baik SKPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang di terjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD).


Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Gubernur yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

”PAPUA BANGKIT, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT :

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa



menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional.

Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI :

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

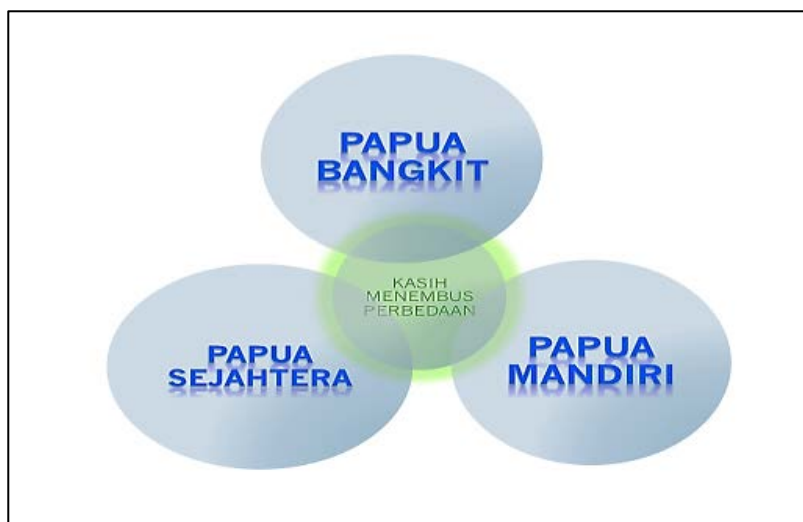
PAPUA SEJAHTERA :

Terwujudnya semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam

konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

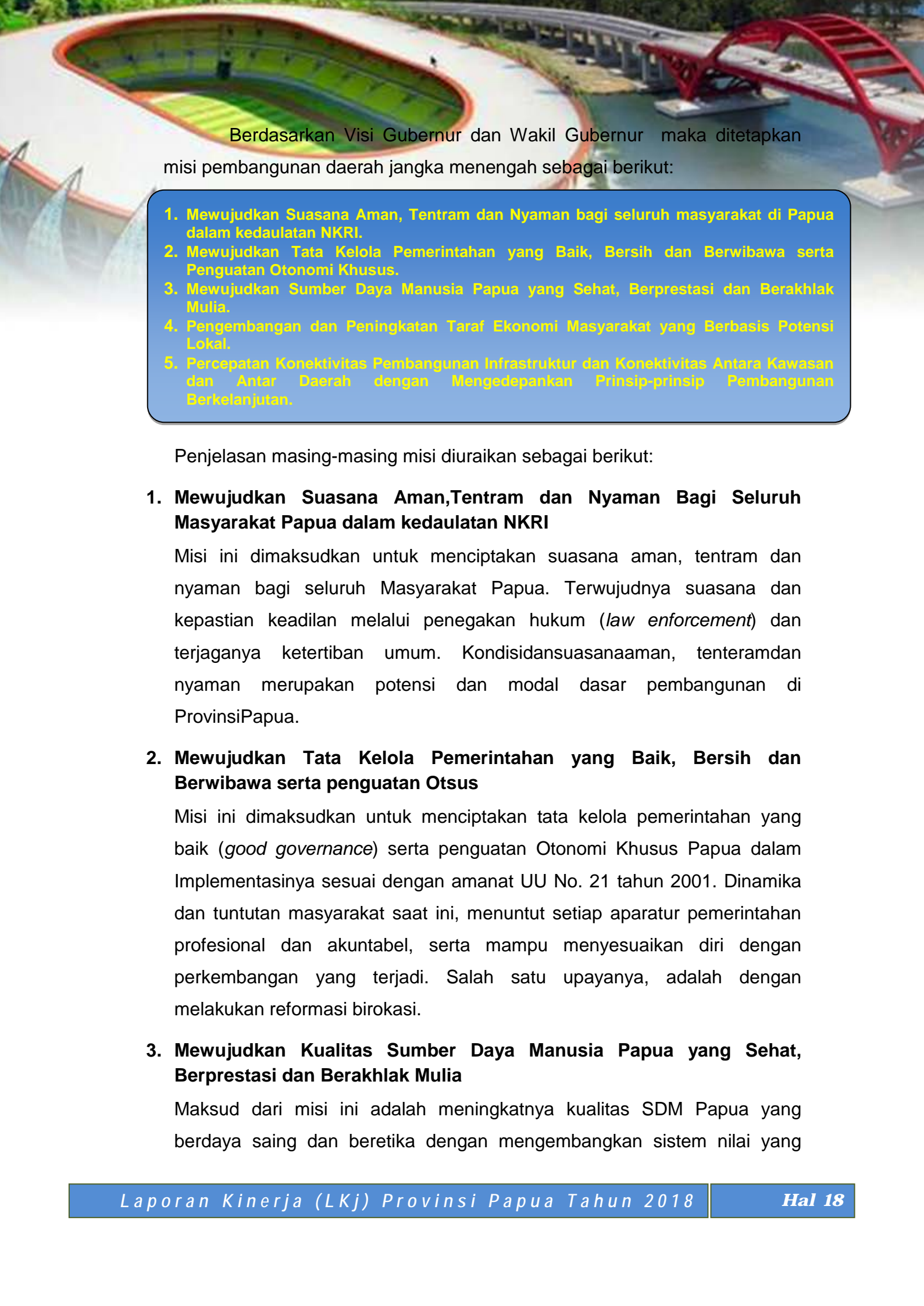
Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi Papua



Sumber : Perdasi Nomor 14 tahun 2013

Dari gambar diatas tampak jelas bahwa **PAPUA BANGKIT** merupakan landasan utama untuk mewujudkan **PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA**, selanjutnya untuk mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan**, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut **Papua Yang Baru Dalam Bingkai Peradaban Baru Papua**.



Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal.
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI


Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua. Terwujudnya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaganya ketertiban umum. Kondisidansuasanaaman, tenteramdan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di ProvinsiPapua.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta penguatan Otsus

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan Otonomi Khusus Papua dalam Implementasinya sesuai dengan amanat UU No. 21 tahun 2001. Dinamika dan tuntutan masyarakat saat ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan profesional dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upayanya, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia

Maksud dari misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika dengan mengembangkan sistem nilai yang




positif sesuai kearifan lokal budaya asli masyarakat Papua. Sebaliknya, kebiasaan masyarakat yang tidak baik perlu untuk terus diminimalisir. Sumberdaya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah **man power**. Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah: sehat, sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasike masa depan, disiplin dan berbudi.

4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

Maksud dari tujuan Misi ini adalah membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung.

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Maksud dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah diwujudkan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah, meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatnya ketersediaan energi listrik dan ramah lingkungan. Selain itu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. Penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian



daerah dengan prinsip *Community dan Commodity Based Infrastructure, Integration dan Sustainability*.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI.

Tujuan 1: Mewujudkan suasana aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan negara NKRI.

Terdapat 2 sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.
2. Meningkatnya Masyarakat Papua yang Berbudaya.

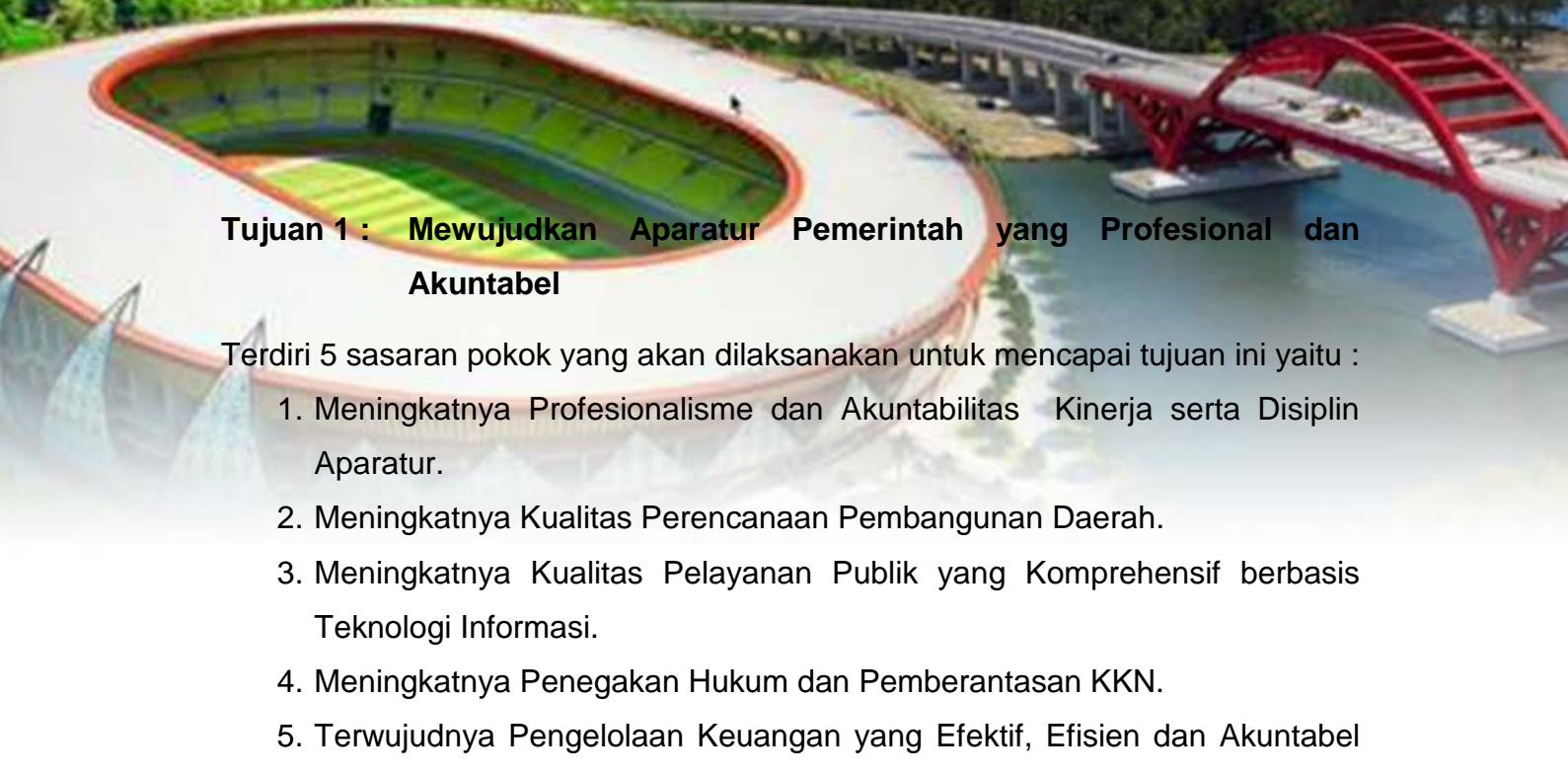
Tujuan 2 : Meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya rasa aman, tenteram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua.
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus

Untuk mewujudkan maksud dari misi ini, dilakukan melalui 5 (lima) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran pokok, yaitu :



Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel

Terdiri 5 sasaran pokok yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini yaitu :

1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.
4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.
5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.

Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harmonis

Tujuan ini dicapai dengan 3 sasaran pokok, yaitu:

1. Meningkatnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota.
2. Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat.
3. Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Lembaga Adat dan Agama (tiga tungku).


Tujuan 3 : Mewujudkan Hubungan Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Sasaran pokok untuk pencapaian tujuan ini, adalah :

1. Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Tujuan 4 : Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 2 sasaran pokok yaitu :

- 
1. Rekonstruksi Undang-undang No. 21 Tahun 2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua).
 2. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Tujuan 5 : Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-Fungsi Pemerintahan

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan dengan 3 sasaran pokok, yaitu:

1. Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan.
2. Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.
3. Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya PolaPikir (*Mindset*) Aparatur Pemerintah Daerah.

Misi 3 : Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia

Untuk mewujudkan misi ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tujuan dan 9 sasaran pokok, yaitu :


Tujuan 1 : Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan

Untuk mencapai tujuan meningkatkan layanan sosial budaya dan keagamaan dilakukan dengan 5 sasaran pokok yaitu :

1. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya masyarakat religius, meningkatnya layanan sosial yang berkualitas.
3. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan Gender dalam pembangunan.
4. Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua.

Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika

Terdapat 4 sasaran pokok untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika, yaitu:

- 
1. Meningkatnya prestasi olahraga.
 2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.
 3. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil.

Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

Untuk mewujudkan misi ini dilakukan melalui 2 tujuan dan 9 sasaran pokok :

Tujuan 1 : Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri

Untuk mencapai tujuan pertama ini dilakukan dengan 7 sasaran pokok :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah.
5. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.
7. Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah.

Tujuan 2 : Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan

Terdapat 2 sasaran pokok dalam perwujudan tujuan kedua ini, terdiri atas :

1. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perkenomian masyarakat.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mencapai maksud dari misi ini akan dilakukan atau diwujudkan melalui 2 tujuan utama dan 10 sasaran pokok :



Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah

Terdapat 6 sasaran pokok yang harus dipenuhi dalam pencapaian tujuan ini, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.
3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah.
4. Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni.
5. Meningkatnya pemenuhan air bersih.
6. Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan.

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Terdapat 4 sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini yaitu :

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia.
2. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.
3. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.


2.1.3. Strategi Pelaksanaan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

a. Prinsip Dasar Pembangunan

Untuk periode 2013-2018, terdapat 5 (lima) prinsip dasar pembangunan adalah :

1. Perlindungan (*Protection*), sesuai amanat Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi



Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

2. Keberpihakan (*Affirmative*), Afirmatif bagi orang asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
3. Pemberdayaan (*Empowerment*), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. Keberlanjutan (*Sustainability*), Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. Keterpaduan (*Integrated*), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2018 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



b. Nilai-nilai Dasar Pembangunan

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan adalah :

1. **Kecukupan (*Sustenance*)** : pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar(*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (*Self Esteem*)** : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achievement*, menghargai diri sendiri & memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*Freedom*)** : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

c. Orientasi Pembangunan

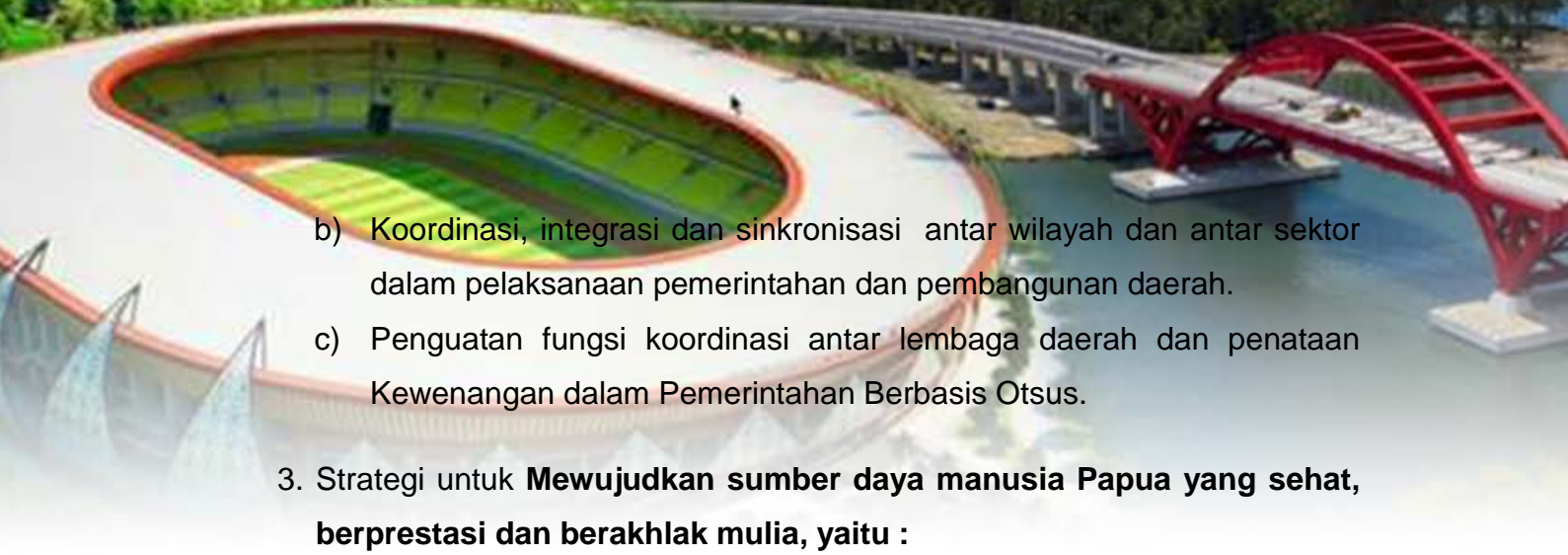
Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat (*People Centered Development*).
2. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (*Growth*), Pemerataan (*Equity*) dan Berkelanjutan (*Sustainable*).
3. Kewilayahan Dinamis Terpadu (*Spasial Dinamic Integrated*).

d. Strategi Pembangunan

Strategi untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI, yaitu :
 - a) Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat.
 - b) Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
2. Strategi untuk **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus, yaitu :**
 - a) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

- 
- b) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
 - c) Penguatan fungsi koordinasi antar lembaga daerah dan penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus.
3. Strategi untuk **Mewujudkan sumber daya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia, yaitu :**
- a) Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan.
 - b) Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.
 - c) Revitalisasi nilai-nilai budaya.
 - d) Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda.
 - e) Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.
4. Strategi untuk **Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal, yaitu :**
- a) Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah.
 - b) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.
5. Strategi untuk **Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :**
- a) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.
 - b) Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat.
 - c) Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.

2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2018

a. Tema Pembangunan tahun 2018

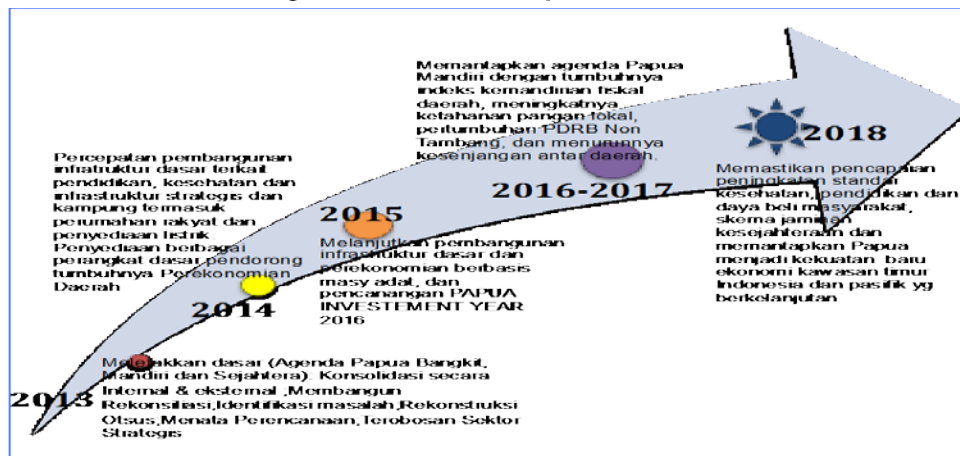
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor

46 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2018.

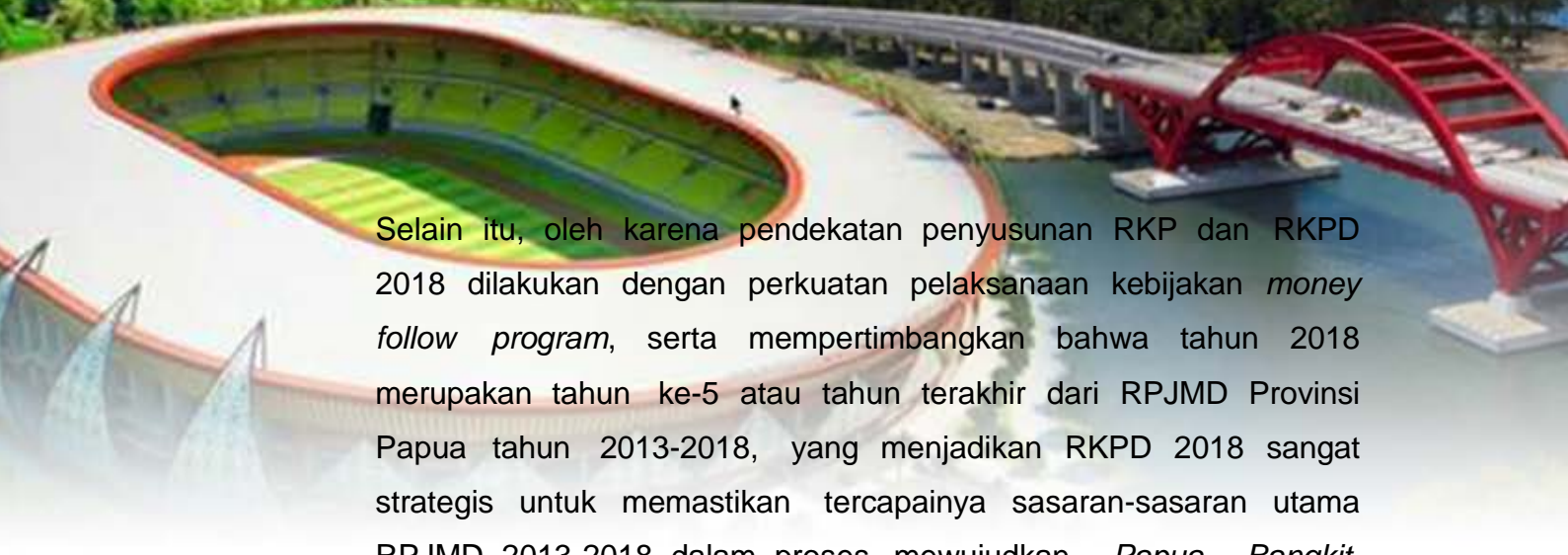
RKPD tahun 2018 merupakan tahapan ke Lima dan terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan Visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk Pembangunan tahun 2018 ini difokuskan pada upaya “memastikan agenda Papua sejahtera”, sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 di bawah ini.

Gambar 4.1

Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018



Berdasarkan isu strategis dan permasalahan pembangunan Provinsi Papua pada tahun 2018, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025, yang mana RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018 berada pada Tahap II, dengan prioritas pembangunan RPJPD pada tahap ini adalah memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan dan penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan, maka perumusan tema pembangunan yang tepat menjadi penting dalam rangka mewujudkan pembangunan lima tahunan ke-2 yang *inline* dengan tahapan pembangunan tahunan ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018.



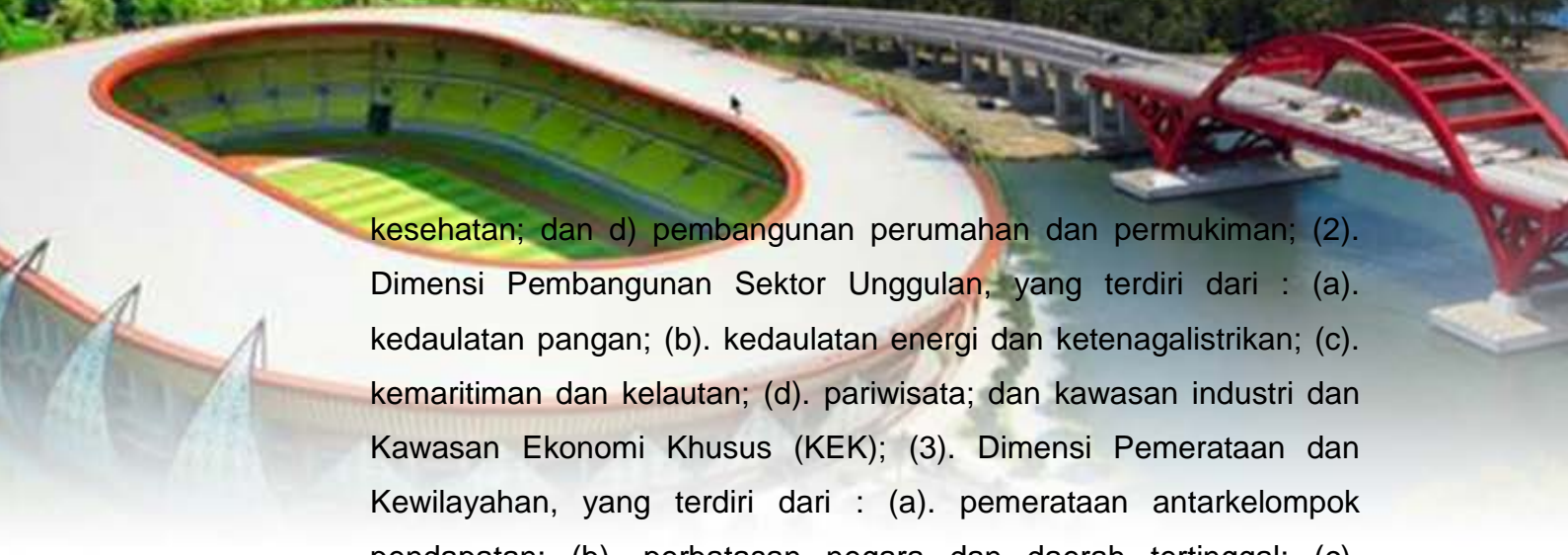
Selain itu, oleh karena pendekatan penyusunan RKP dan RKPD 2018 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow program*, serta mempertimbangkan bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, yang menjadikan RKPD 2018 sangat strategis untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama RPJMD 2013-2018 dalam proses mewujudkan *Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera*, maka secara substansial rumusan terhadap tema pembangunan tahun 2018 adalah:

“Perluasan peningkatan kualitas hidup dan pemantapan kemandirian daerah yang berdaya saing, merata dan berkelanjutan”

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 menjelaskan beberapa arahan pokok pembangunan Provinsi Papua yang diharapkan dapat terwujud, yaitu : (1). pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM yang dapat menaikkan derajat kualitas hidup; (2). pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan daya saing; (3). peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur kampung dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan kampung; (4). peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan serta (5). peningkatan pembangunan berkelanjutan.

b. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan agenda pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 melalui 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut Nawa Cita. Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : (1). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : (a) revolusi mental; (b) pembangunan pendidikan; (c) pembangunan



kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman; (2). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari : (a). kedaulatan pangan; (b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (c). kemaritiman dan kelautan; (d). pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (3). Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari : (a). pemerataan antarkelompok pendapatan; (b). perbatasan negara dan daerah tertinggal; (c). pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan (d). pengembangan konektivitas nasional.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, tema RKPD Provinsi Papua tahun 2018, dan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis yang telah di bahas pada Bab II, perkembangan aspek pembangunan daerah baik sektor maupun wilayah, serta fokus arah kebijakan tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua, maka hasil analisis menghasilkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Prioritas Pembangunan daerah
Provinsi Papua Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar. 2. Peningkatan kualitas SDM. 3. Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan Investasi. 4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah 5. Pengembangan kawasan khusus berbasis perkampungan. 6. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX 7. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. 8. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji atau **Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT)** Papua untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penyusunan Perjanjian Kinera 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD dan IKU, RKPD tahun 2018, serta APBD Provinsi Papua tahun 2018. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.


Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2018

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram, nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100.00
		2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	%	35.00
		3	Persentase jumlah bencana korban yang tertangani	%	100.00
		4	Angka kriminalitas	%	10.00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100.00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	70.00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	BB
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	95.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80.00
		2	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	75.00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100.00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	65.00
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Angka	71.00
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	35.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100.00



		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	280.00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	6.50
		4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100.00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70.00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100.00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67.00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85.00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6.00
		3	APK PAUD/TK	%	55.00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	95.00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70.00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	55.00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	80.00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48.00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	40.00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0.10
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1.00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0.15
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	25.00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100.00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100.00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100.00

8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	50.00
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	25.00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	40.00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	%	2.00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	13.00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	35.00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	100.00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.00
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	80.00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	13.00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	8.00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1,00
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1.00
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	5.00
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	6,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2.00
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	40.00
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	5.00
		2	PDRB per Kapita		60 Juta
		3	Inflasi	%	2.00
		4	Indeks Gini		0.35



		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2.50
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10,00
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	95.00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	30.00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	1 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	80.00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	20.00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	10.00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	26.00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	100.00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55.00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	55.00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100.00
22	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85.00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	5.00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	27.00

**Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)**

No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	9.225.375.400.442,70	62,73
2	Belanja Langsung	5.482.535.212.242,30	37,27
JUMLAH		14.707.910.612.685,00	100

Sumber: BPKAD Provinsi Papua Tahun 2018

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018

SASARAN		ANGGARAN	% ANGGARAN
1		2	3
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	127,341,635,198.00	2.32
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	158,436,797,137.00	2.89
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	495,939,789,888.00	9.05
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	28,935,740,000.00	0.53
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	46,836,365,427.00	0.85
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	641,417,115,323.00	11.70
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	152,054,700,000.00	2.77
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1,262,960,489,982.00	23.04
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	6,995,003,000.00	0.13
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1,500,000,000.00	0.03
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	12,388,691,301.00	0.23
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1,732,053,405.00	0.03
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	15,606,400,000.00	0.28



SASARAN		ANGGARAN	% ANGGARAN
1		2	3
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	158,499,561,856.00	2.89
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	20,478,709,454.00	0.37
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	964,999,176,828.00	17.60
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	134,044,380,333.00	2.44
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	88,600,000,000.00	1.62
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	473,125,000.00	0.01
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	127,772,850,000.00	2.33
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	2,850,000,000.00	0.05
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	58,391,094,500.00	1.07
JUMLAH ANGGARAN PRIORITAS IKU		4.508.253.678.632,00	82.23
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		5.482.535.212.242,30	

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp4.508.253.678.632,00 atau sebesar 82,23 persen dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp974.281.533.610,00 atau 17,77 persen dari total anggaran belanja langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran pembangunan dengan anggaran paling besar adalah sasaran Layanan publik meningkat, terutama pada Meningkatkan Prestasi Olahraga dengan besaran anggaran 23,04 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah yaitu sebesar 17,60 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Meningkatkan Pemenuhan Air Bersih sebesar 0,01 persen dari total anggaran belanja langsung.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

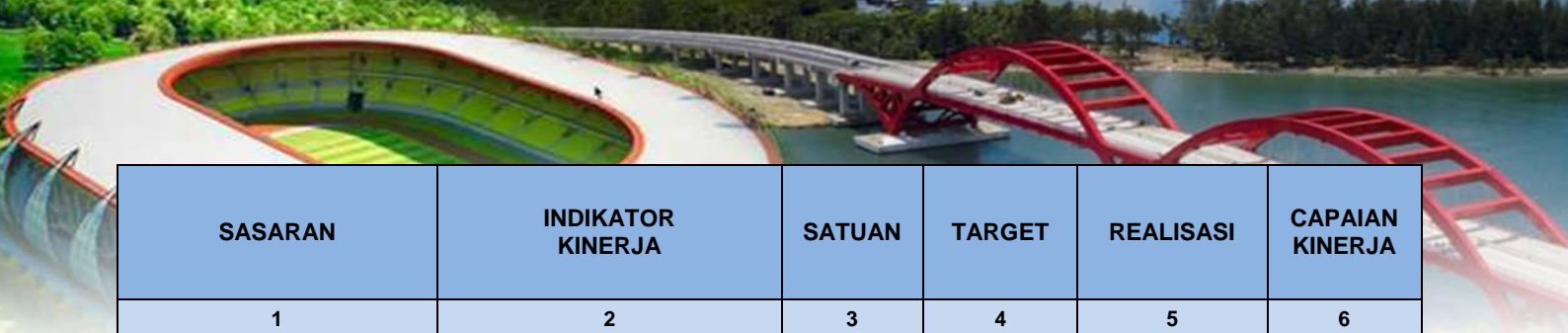
Akuntabilitas Kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

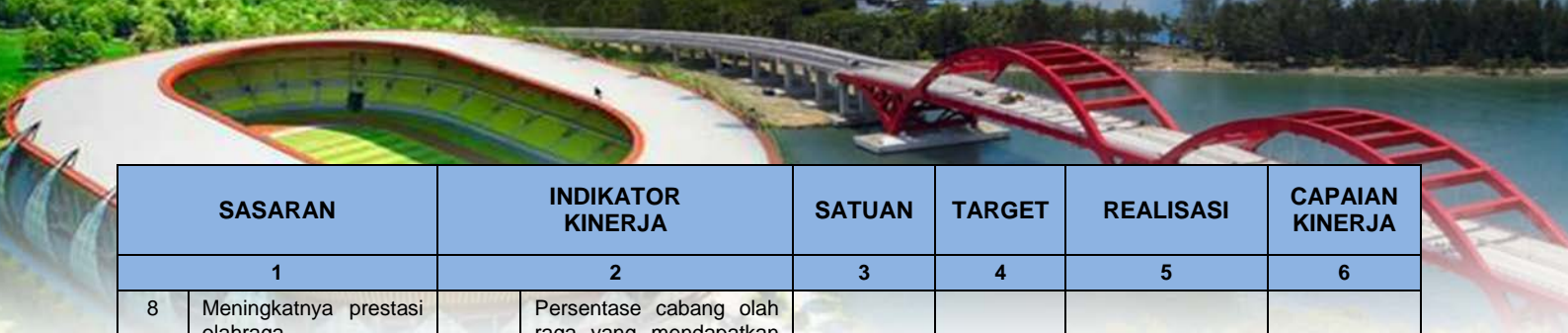
3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

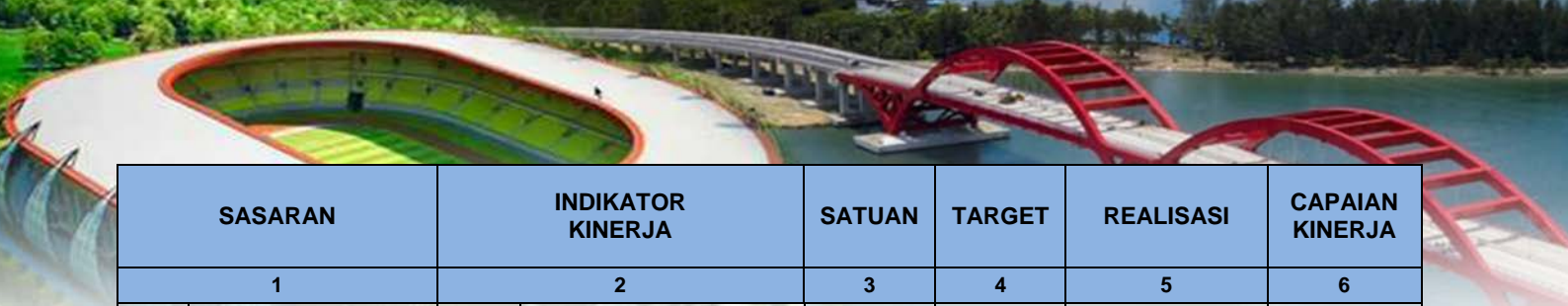
SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatnya rasa aman, tenang dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	persen	100,00	100,00	100,00
		2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	persen	35,00	8,571	408,35
		3	Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani	persen	100,00	100,00	100,00
		4	Angka kriminalitas	persen	10,00	0,17	5.882,35
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	persen	100,00	98,11	98,11
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	persen	70,00	69,09	98,07
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	BB	B	62,59
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100,00
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	Persen	95,00	74,07	77,97
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Persen	80,00	78,67	98,34
		2	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	persen	75,00	94,12	125,49
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	65,00	60,84	93,60
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	persen	71,00	72,26	101,77
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	35,00	30,76	87,88



SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
6	Terwujudnya Masyarakat Sehat yang	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	persen	100,00	100,00	100,00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	280,00	175,00	160,00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	6,50	9,00	72,22
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	persen	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	persen	70,00	51,00	72,86
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	100,00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67,00	65,10	97,16
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	persen	85,00	73,89	86,93
		2	Rata-rata lama sekolah	persen	6,00	6,33	105,5
		3	APK PAUD/TK	persen	55,00	52,34	95,16
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	persen	95,00	94,28	99,24
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	persen	70,00	73,40	104,86
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	persen	55,00	56,70	103,09
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	persen	80,00	74,80	93,50
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	persen	48,00	48,63	101,31
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	persen	40,00	42,78	106,95
		10	Angka putus sekolah SD/MI	persen	0,10	0,04	250,00
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	persen	1,00	0,11	909,09
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	persen	0,15	0,07	214,29
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	persen	25,00	28,31	113,24
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	persen	100,00	99,85	99,85
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	persen	100,00	99,96	99,96
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	persen	100,00	99,83	99,83



SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6		
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase cabang olahraga yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	persen	50,00	60,86	121,72
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	persen	25,00	150	600
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	persen	40,00	0	0
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	persen	2,00	0	0
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah sehat (berkualitas)	persen	13,00	17,35	133,46
		2.	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	persen	35,00	5,00	14,28
		3.	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	persen	100,00	96,92	96,92
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,00	3,20	106,67
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	80,00	79,11	98,88
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	persen	13,00	9,72	74,77
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	persen	8,00	7,75	96,88
14	Terwujudnya pengelolaan secara SDA lestari mendukung peningkatan pekonomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (persen)	persen	1,00	0,95	95,00
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (persen)	persen	1,00	0,87	87,00
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (persen)	persen	5,00	4,78	95,60
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	persen	6,00	2,46	41,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	persen	2,00	1,55	77,50
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	persen	40,000	36,716	91,790



SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1		2		3	4	5	6
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	persen	5,00	7,33	146,60
		2	PDRB per Kapita	Juta	60	63,40	105,67
		3	Inflasi	Persen	2,00	2,41	82,99
		4	Indeks Gini	Persen	0,35	0,38	91,15
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,50	3,20	128,00
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	persen	10,00	8,00	80,00
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	persen	95,00	37,39	39,37
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	persen	30,00	60,30	200,99
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:110	1:167	65,87
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Juta	1	4,238,562	423,86
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	persen	80,00	4,35	5,44
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	persen	20,00	0	0
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	persen	10,00	0	0
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	persen	26,00	40,00	153,85
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	persen	100,00	133,00	133,00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	persen	55,00	43,22	78,58
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	persen	55,00	0	0
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	persen	100,00	100,00	100,00
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	persen	85,00	82,64	97,22
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	persen	5,00	17,71	28,23
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	persen	27,00	25,71	95,22



3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :


Tabel 3.2 Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	$91 \geq$	Sangat berhasil
2.	$76 \geq 90$	Berhasil
3.	$66 \geq 75$	Cukup berhasil
4.	$51 \geq 65$	Kurang berhasil
5.	$0 \geq 50$	Tidak berhasil

Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Stratejik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 22 Sasaran Strategis, dan Capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatnya Rasa Aman, Tentram Dan Nyaman Dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua

Untuk mencapai Tujuan “Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua”, diwujudkan melalui kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaganya ketertiban umum. Kondisi ini merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Provinsi Papua. Oleh karena itu perlu diupayakan penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mewujudkan Sasaran “**Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua**”.. Berdasarkan capaian kinerja sasaran tersebut Pada Tahun 2018 mencapai 153.55 persen dengan skala ordinal dalam kategori “**Sangat berhasil**”.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2018 dibanding Tahun 2017 mengalami penurunan 4431,58 persen, sedangkan capaian kinerja 2017 meningkat 5982,93 persen dibanding 2016. Tahun 2016 capaian kinerja sasaran mengalami penurunan -77.63 persen dari Tahun 2015.

Terkait pencapaian Sasaran strategis ke 1 (satu) di atas, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif.
2. Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA.
3. Persentase jumlah bencana korban.
4. Angka kriminalitas.

Pengukuran target kinerja dari sasaran yang ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kinerja penilaian inilah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 pada Sasaran “**Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan ketaatan terhadap hukum seluruh masyarakat Papua**” yang terdiri atas 4(empat) indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran I

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			
		TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	Persen	15,00	19,00	78,95	18,00	65,22	27,59	18,00	39,47	45,60	35,00	8,571	408,35
3	Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani	Persen	-	-	-	-	-	-	20,00	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4	Angka kriminalitas	Persen	33,00	84,42	267,94	33,00	38,19	86,41	33,00	0,14	23571,43	10,00	0,17	5882,35
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					148,96		71,33			6054,26			1622,68	

Indikator persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif untuk tahun 2018, terealisasi kinerjanya mencapai 100% atau mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung dari 5 (lima) Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda.
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5. Program Dokumentasi Hukum

Dari kelima program tersebut menghasilkan :

- Peraturan Daerah (PERDA) : 9 dokumen
- Peraturan Gubernur (PERGUB) : 32 dokumen
- Keputusan Gubernur : 503 dokumen

Ketiga produk hukum ini telah dilakukan uji publik dan berlaku di Masyarakat. Capaian kinerja peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif untuk masa Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Ke-1 pada Tahun 2015 - 2018

No.	Produk Hukum	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
1	Peraturan Daerah (PERDA)	250	20	4	9
	Peraturan Gubernur (PERGUB)	2	85	122	32
	Keputusan Gubernur	68	475	283	503
TOTAL		320	580	409	544



Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah produk hukum pada Tahun 2016 mengalami peningkatan 260 produk hukum dibandingkan Tahun 2015 atau meningkat 181%, sedangkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan jumlah produk hukum sebanyak 171 produk hukum atau turun 70,5% dari Tahun 2016. Sedangkan tahun 2018 jumlah produk hukum meningkat 135 produk hukum atau 133%. Data ini menunjukkan adanya dinamika produk hukum yang dihasilkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Papua, hal ini dipengaruhi usulan dari SKPD atau pemerkasa atas kebutuhan suatu regulasi selain itu juga ditunjang dengan adanya kesiapan jumlah jabatan fungsional legal drafting peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja konflik horizontal berdasarkan SARA pada Tahun 2018 capaian kinerjanya adalah 408,35 persen dari 35 target yang ditetapkan, capaian kinerja penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA mengalami penurunan 3 kasus dibanding Tahun 2017, sedangkan pada Tahun 2016 mengalami penurunan 15 kasus dibanding Tahun 2017 yang mengalami peningkatan 165 persen dibanding Tahun 2016. Penurunan Konflik horisontal berdasarkan SARA Tahun 2018 terjadi di 16(enam belas) Kabupaten/Kota dan terbanyak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Jayawijaya (6 kasus), Kabupaten Jayapura (5 kasus), Kabupaten Mimika (4 kasus) dan Kabupaten Nabire (4 kasus) dengan rata-rata kasus pertikaian, pengeroyokan dan perang suku serta MIRAS.

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Papua Tahun 2018 konflik terbanyak terjadi di wilayah hukum Kota Jayapura sebanyak 7(tujuh) kasus menyusul Kabupaten Jayapura sebanyak 6 (enam) kasus dan Kabupaten Jayawijaya 5 (lima) kasus, sedangkan Kabupaten dengan jumlah konflik sedikit adalah Kabupaten Tolikara dan Keerom masing-masing 1 (satu) konflik. Hal-hal yang menjadi sebab terjadinya konflik adalah masalah **MIRAS, Penganiayaan/pengrusakan, Perselisian, Penyerangan, Sengketa Tanah, Pencurian, Perkelahian, perselingkuhan, Penganiayaan, pembunuhan dan kesalahpahaman** dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.5
Jumlah Konflik Horizontal Berdasarkan SARA Tahun 2016 – 2018

No	WILAYAH HUKUM (KABUPATEN / KOTA)	RATA - RATA PENYEBAB KONFLIK			KETERANGAN
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1	Kota Jayapura	8	7	2	MIRAS, Penganiayaan/ pengrusakan, Perselisian, Penyerangan, Sengketa Tanah, Perkelahian, perselingkuhan, pembunuhan dan Kesalahpahaman
2	Jayapura	5	6	5	
3	Mimika	6	4	4	
4	Jayawijaya	0	5	6	
5	Keerom	1	1	0	
6	Nabire	1	3	4	
7	Sarmi	0	2	0	
8	Yahukimo	0	2	2	
9	Paniai	0	3	2	
10	Puncak jaya	0	2	2	
11	Tolikara	0	1	3	
12	Asmat	0	2	1	
13	Mambramo Raya	0	0	1	
14	Pegunungan Bintang	-	-	1	
15	Lanny jaya	1	0	0	
16	Merauke	0	0	2	
JUMLAH		23 Kasus	38 Kasus	35 Kasus	

Sumber : POLDA Papua Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah kasus yang terjadi Tahun 2016 - 2017 mengalami peningkatan, Tahun 2018 jumlah kasus yang terjadi di 13 wilayah hukum Kabupaten/Kota mengalami penurunan dibanding Tahun 2017, Kabupaten yang cenderung meningkat konflik horisontal berdasarkan SARA adalah Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Mimika dan Nabire sedangkan Kabupaten yang cenderung turun jumlah konflik adalah Kota Jayapura, Paniai dan Asmat.

Tahun 2018 Konflik SARA yang sering terjadi di Kabupaten Jayawijaya terbanyak 6 konflik dalam setahun, yang diikuti Kabupaten Jayapura 5 konflik, Nabire 4 konflik, Nabire 4 konflik dan Tolikara 3 konflik, rata-rata konflik yang terjadi disebabkan akibat perselisihan/pertikaian, pengeroyokan, perang suku, MIRAS, sengketa tanah dan perselingkuhan. Berdasarkan data POLDA 2018, kasus MIRAS hanya terjadi di Jayapura, Mimika dan Nabire, yang mengalami penurunan sejalan dengan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan PERDA Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran Minuman Keras.



Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani di Provinsi Papua Tahun 2018, terjadi atas 7 (tujuh) peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sebagai akibat faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pada Tahun 2018 Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani sebagai akibat bencana alam yang terjadi dan menelan korban jiwa, kerusakan lingkungan kerugian harta benda terhadap capaian indikator ketiga adalah 100.00 persen. Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh adanya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kejadian bencana di Provinsi Papua pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Data Bencana Di Provinsi Papua Atas Peristiwa Alam Dan Non Alam Tahun 2018

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN JIWA	KERUSAKAN RUMAH	KERUSAKAN FASILITAS		
					KESEHATAN	PERIBADATAN	PENDIDIKAN
1	Banjir	7	0	0	0	0	0
2	Tanah Longsor	2	0	1	0	0	1
3	Banjir dan Tanah Longsor	4	555	132	0	0	1
4	Gelombang Pasang/Abrasi	2	0	0	0	2	0
5	Puting Beliung	2	0	11	1	2	2
6	Gempa Bumi	3	2	10	1	0	1
7	KLB	2	24	0	0	0	0
TOTAL		22	581	154	2	4	5

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kejadian pada Tahun 2018 sebanyak 22 kejadian bencana alam di Provinsi Papua, dengan korban jiwa sebanyak 581 jiwa, kerusakan rumah 154, kerusakan pada 11 fasilitas umum. Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten telah menangani seluruh kejadian melalui koordinasi intensif sehingga dapat tertangani dengan baik.

Persentase Angka Kriminalitas, terealisasi 0.17 persen dengan capaian kinerja adalah 5.882,35 persen dari jumlah kasus yang ditangani Tahun 2018 sebanyak 5.732 kasus atas keseluruhan jumlah kriminalitas yang terjadi sebanyak 8.344 kasus. Rata-rata jumlah kasus yang ditangani dari Tahun 2015-2018 mengalami peningkatan dibanding jumlah kasus yang terjadi mengalami penurunan, hal ini didukung dengan adanya pembinaan yaitu penyuluhan dan pembinaan

kamtibmas serta menguatkan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) dan siskamling yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

Data perkembangan jumlah kasus kriminalitas yang ditangani Tahun 2015-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perkembangan Kasus Kriminalitas Yang ditangani Tahun 2015-2018

N O	LOKASI	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018			
		JUMLAH KASUS	KASUS YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DITANGANI	JUMLAH KASUS	KASUS YANG DITANGANI	TARGET IKU 2018	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	JUMLAH KASUS KRIMINALITAS		24.357	8.765	3.347	8.679	4.445	8.344	5.732	10.00	5.882,35

Sumber Data : Polda Papua

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan persentasenya walau penurunan angka kriminalitas bergerak lambat.

Sasaran 2 : Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Serta Disiplin Aparatur

Sasaran Kinerja **"Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur"** merupakan sasaran yang menggambarkan kondisi dan keadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Struktural maupun fungsional dalam pemerintahan serta hasil penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah melalui evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dan juga laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam penyelenggaraan program-program pemerintah daerah serta tingkat disiplin aparatur.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur"** adalah **87.34** persen atau dalam skala ordinal adalah **"Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator sasaran.

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2

1	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA
			TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pejabat Struktural Yang Memenuhi Syarat Jabatan	Persen	100.00	99.32	96.32	100.00	96.63	96.63	100.00	97.58	97.58	100.00	98.11	98.11
2	Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional Sesuai Kebutuhan	Persen	63.67	70,79	111,18	71.00	31.00	43.66	71.18	62.96	88.67	70.00	69.09	98.07
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Oleh KEMENPAN Dan RB	Angka	B	C	66.67	CC	CC	100.00	B	B	100.00	BB	B	62.59
4	Opini BPK Atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00
5	Rata-Rata Kehadiran Pegawai	Persen	90.00	87.76	97.51	90.00	97.94	108.00	95.00	93.00	97.89	95.00	74.07	77.97
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					94.33			89.65			96.82			87.34



Indikator **Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan** ditargetkan sebesar **100 persen** dengan realisasi sebesar **98.11** persen dengan capaian kinerja sebanyak **98,11** persen dengan Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan struktural sebanyak 1.103 pejabat dan Jumlah seluruh Pejabat struktural di Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 1.326 pejabat. Target 2018 sebesar 100 persen hanya terealisasi 98.11 persen dikarenakan belum dilakukannya pelantikan pejabat bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga masih terdapat usulan calon pejabat yang belum memenuhi syarat jabatan dan ditetapkan untuk menduduki jabatan dimaksud maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan OPD agar mengusulkan calon pejabat yang memenuhi syarat jabatan. Berikut capaian kinerja dari pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan, antara lain terlihat dalam tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel. 3.9 Persentase Pejabat Struktural Provinsi Papua

Tahun	2015	2016	2017	2018
Persentase Pejabat	91.08	97.4	97.58	87.47

Peningkatan capaian kinerja setiap tahun dari 2014-2018 dipengaruhi oleh kriteria dimana semua pejabat struktural yang telah dilantik seluruhnya telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada Kementerian, Kesekretariatan, Lembaga Negara, Lembaga Nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pada tingkat nasional.

Indikator **Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan** ditargetkan sebesar **70.00 persen** dengan realisasi sebesar **69.09** persen dengan capaian kinerja sebanyak **98,7** persen dengan Jenis Jabatan Fungsional (Jafung) yang telah diisi sebanyak 35 Jafung dengan jumlah kebutuhan Jenis Jabatan



Fungsional sebanyak 55 Jafung. Adapun dampak positif dari capaian kinerja di tahun 2017 sebesar 89.61 persen dikarenakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terus berminat untuk peningkatan kapasitasnya melalui pengembangan kemampuan (skill) nya sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain dampak positif ada juga dampak negatif dimana OPD masih kurang memahami pentingnya Jabatan Fungsional Tertentu bagi PNS dalam rangka melaksanakan Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu upaya BKD Prov.Papua untuk menghadapinya dengan terus mensosialisasikan Jabatan Fungsional kepada OPD dan juga melakukan koordinasi melalui Kasubbag/urusan Kepagawaian OPD serta merekomendasikan ASN mengikuti Diklat Penunjang Jabatan Fungsional Tertentu.

Adapun perkembangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dalam kurun waktu 2015-2017 adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.10 Perkembangan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua

INDIKATOR KINERJA	TAHUN				PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	KENDALA DAN UPAYA MENGHADAPI
	2015	2016	2017	2018		
Persentase Pejabat Struktural Yang Memenuhi Syarat Jabatan	91.08	97.40	97.58	98.11	Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan : Penilaian potensi dan kompetensi JPT, Administrasi dan Pegawai dengan Anggaran sebesar Rp. 700.000.000	Kendala Jabatan Struktural adalah : masih terjadi usulan calon pejabat yang belum memenuhi syarat maka upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua adalah menginformasikan kepada Pimpinan tentang calon pejabat yang belum memenuhi syarat untuk diganti. Kendala Jabatan Fungsional adalah Secara umum PNS belum memahami Jabatan Fungsional (Jafung) yang ada pada OPD nya maka upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua adalah mensosialisasikan Jafung melalui Kasubbag / Urusan Kepagawaian OPD.
Jumlah Pejabat Struktural Yang Memenuhi Syarat Jabatan Struktural	1.154	1.234	887	1.301		
Jumlah Seluruh Pejabat Struktural Di Pemerintah Provinsi Papua	1.267	1.267	909	1.326		
Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional Sesuai Kebutuhan	61.82	63.64	65.45	69.09		
Jenis Jabatan Fungsional Yang Telah Diisi	34	35	36	38		
Jumlah Kebutuhan Jenis Jabatan Fungsional	55	55	55	55		
Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua						

Tabel. 3.11 Perkembangan Jabatan Struktural Tahun 2015-2018
Provinsi Papua

No.	TAHUN	ESELON	JUMLAH	MS	TMS
1	2015	II	54	54	0
		III	313	271	42
		IV	900	829	71
Jumlah			1267	1154	113
2	2016	II	54	54	0
		III	313	301	12
		IV	900	879	21
Jumlah			1267	1234	33
3	2017	II	56	56	0
		III	249	241	8
		IV	604	590	14
Jumlah			909	887	22
<i>Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua</i>					
Catatan :					
MS : Memenuhi Syarat					
TMS : Tidak Memenuhi Syarat					

Tabel. 3.12 Perkembangan Jabatan Fungsional Tahun 2015-2018 Provinsi Papua

NO	JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
1	PAMONG BELAJAR	Ada
2	PENGAWAS SEKOLAH	Ada
3	PUSTAKAWAN	Ada
4	ARSIPARIS	Ada
5	APOTEKER	Ada
6	ASISTEN APOTEKER	Ada
7	DOKTER	Ada
8	DOKTER PENDIDIK KLINIS	Ada
9	DOKTER GIGI	Ada
10	PENELITI	Ada
11	PERENCANA	Ada
12	PENGAWAS BENIH TANAMAN	Ada
13	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	Ada
14	TEKNIK PENGAIRAN	Ada
15	PEREKAM MEDIS	Ada
16	TEKNISI ELEKTROMEDIS	Ada
17	PENYULUH SOSIAL	Ada
18	WIDYAIWARA	Ada
19	ANALISI KEPEGAWAIAN	Ada
20	P2UPD	Ada
21	AUDITOR	Ada



NO	JABATAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
22	PERAWAT	Ada
23	SANITARIAN	Ada
24	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Ada
25	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Ada
26	PENGENDALI ORGANISASI PENGANGGU TUMBUHAN	Ada
27	BIDAN	Ada
28	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Ada
29	ADMINISTRATOR KESEHATAN	Ada
30	FISIOTERAPIS	Ada
31	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	Ada
32	INSTRUKTUR	Ada
33	NUTRISONIS	Ada
34	ANALISIS PASAR HASIL PERTANIAN	Ada
35	PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA	Ada
36	POLISI PAMONG PRAJA	Belum ada
37	ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	Belum ada
38	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA	Belum ada
39	ASESOR SDM APARATUR	Belum ada
40	AUDITOR KEPEGAWAIAN	Belum ada
41	PRANATA KOMPUTER	Belum ada
42	POLISI KEHUTANAN	Belum ada
43	INSTRUKTUR TAMBANG	Belum ada
44	OPERATOR TRANSMISI SANDI	Belum ada
45	PENGAWAS BIBIT TERNAK	Belum ada
46	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Belum ada
47	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Belum ada
48	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	Belum ada
49	PENYULUH HUKUM	Belum ada
51	SANDIMAN	Belum ada
52	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Belum ada
53	PENYULUH KEHUTANAN	Belum ada
54	PENYULUH PERTANIAN	Belum ada
55	INSTRUKTUR TAMBANG	Belum ada

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua

Indikator persentase **Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN dan RB RI)** Hasil evaluasi KEMENPAN dan RB untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2018 adalah B dengan nilai 62,59 persen dan tahun 2017 yaitu B dengan nilai 60,04 persen terjadi peningkatan nilai pada tiap komponen SAKIP.

Berikut Perkembangan SAKIP Provinsi Papua untuk tahun 2014-2018 oleh KEMENPAN dan RB RI yaitu :

Tabel 3.13 Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Papua Tahun 2015-2018

KOMPONEN YANG DINILAI		2015		2016		2017		2018	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	16,59	35	16,74	35	20,12	35	20,72
b	Pengukuran Kinerja	25	9,55	20	10,94	20	12,85	20	13,28
c	Pelaporan Kinerja	15	7,79	15	8,31	15	9,95	15	10,12
d	Evaluasi Internal	10	2,62	10	4,09	10	5,77	10	6,93
e	Capaian Kinerja	20	9,48	20	11,10	20	11,35	20	11,54
JUMLAH		100	46,03	100	51,18	100	60,04	100	62,59
			C		CC		B		B

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPAN dan RB RI maka telah diberikan catatan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Papua. Berikut Hasil evaluasi secara singkat dari KEMENPAN dan RB RI tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terlihat kian membaik. Penerapan Manajemen Kinerja tidak semata dilaksanakan formalitas saja, namun sudah mulai mampu menumbuhkan budaya kinerja, walaupun masih belum secara keseluruhan pada setiap jenjang manajerial;
2. Dokumen Akuntabilitas Kinerja meskipun belum bermanfaat secara optimal, masih terus diperbaiki diperbaiki kualitasnya di seluruh jenjang manajerial;
3. Cascading Kinerja telah disusun belum dapat digunakan untuk melakukan Efisiensi anggaran secara maksimal;
4. Evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua terhadap penerapan SAKIP OPD sudah mulai menampakkan hasil meskipun belum maksimal, Namun demikian, tim SAKIP dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Papua telah mampu mendorong penerapan SAKIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.



Berdasarkan uraian di atas serta agar penerapan Budaya Kinerja lebih efektif, Kami merekomendasikan untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal Sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap hubungan/turunan Kinerja dari Gubernur ke Perangkat Daerah sampai unit kerja terkecil, bahkan ke level individu sehingga terbentuk pohon kinerja Provinsi Papua. Kemudian berdasarkan pohon kinerja tersebut, melakukan reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran kinerja Provinsi Papua dan menjabarkan ukuran kinerja organisasi sampai ketinggian individu sebagai bahan penilaian kinerja individu.
2. Terus mendorong pembangunan Budaya Kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan, sehingga kinerja akan diwujudkan nantinya dapat menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan performance based organization agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien.
3. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi kinerja (e-Performance) yang dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan reviu capaian kinerja secara berkala;
4. Memperkuat komitmen seluruh Kepala Perangkat Daerah sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Terus meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Terus menjaga sinergitas dan kerjasama dengan seluruh kabupaten dan kota di Papua dalam meningkatkan kesadaran untuk menyampaikan Laporan kinerja tepat waktu dan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sisten AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Gubernur Papua beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun Penataan SAKIP yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua selama kurun waktu 2017-2018 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN dan RB RI), Nomor : B/603/M.AA.05/2018, Hal : Hasil atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2018, tertanggal 5 Februari 2018 dalam acara 'Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah III Tahun 2017 dan Coaching Clinic Tahun 2018' di Hotel Tentrem Yogyakarta pada 13-14 Februari 2018.

Berdasarkan Surat dimaksud serta dalam rangka menerapkan Budaya Kinerja, maka ada 5 Rekomendasi dari KEMENPAN dan RB RI kepada Pemerintah Provinsi Papua beserta seluruh Jajarannya agar melakukan perbaikan dimaksud.

Berikut ke 5 Rekomendasi dari KEMENPAN dan RB RI yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua, yaitu :

1. Mendorong penerapan budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan.

Jawab :

Dalam rangka mendorong penerapan budaya kinerja Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Berjenjang telah disusun oleh SKPD Tahun 2018 mulai Eselon II, III dan IV;
 - Penerapan TPP telah berbasis Kinerja melalui Aplikasi e-TPP (elektronik Tunjangan Perbaikan Penghasilan) bagi semua Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
 - Kinerja Harian Pegawai telah diinput kedalam Aplikasi e-SKP (elektronik Sasaran Kinerja Pegawai) serta
 - Penginputan dokumen Perencanaan Kinerja ke dalam e-LAKIP Provinsi Papua.
2. Memperkuat komitmen Kepala OPD untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan



hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Jawab :

Telah ada Komitmen kepala OPD dengan melakukan penanda tangan Perjanjian Kinerja dan juga melalui penandatanganan Pakta Integritas guna pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis sesuai dengan Ukuran/Indikator serta Program Kegiatan guna tercapainya Visi Misi OPD.

Belum ada tindak lanjut pemberian *reward and punishment* sesuai ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah Provinsi Papua.

- Melakukan reuiu program, kegiatan, komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Papua. Dan memastikan bahwa hasil reuiu ini digunakan untuk mengalokasikan anggaran hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.

Jawab :

Melakukan re-focusing pada program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan RKPD sehingga menghasilkan program dan kegiatan Prioritas yang fokus pada pencapaian Sasaran Pembangunan. (terlampir data efisiensi anggaran).



- Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP pada OPD sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Papua secara signifikan;

Jawab :

Keputusan Inspektur Provinsi Papua Nomor 700/014A/SK-ITPPROV tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP tertanggal 5 April 2016. Berikut Hasil Evaluasi SAKIP bagi SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua tahun 2015 - 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perkembangan Peningkatan Nilai SAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2017

Jumlah SKPD Yang Di Evaluasi			Nilai SAKIP SKPD		
2015	2016	2017	2015 (35,41%)	2016 (54,16%)	2017 (64,70%)
48 SKPD	48 SKPD	51 SKPD	17 SKPD Hasil SAKIPnya meningkat A = 3 SKPD BB = 8 SKPD B = 6 SKPD	26 SKPD Hasil SAKIPnya meningkat A = 3 SKPD BB = 13 SKPD B = 10 SKPD	33 SKPD Hasil SAKIPnya meningkat A = 5 SKPD BB = 14 SKPD B = 14 SKPD

Sumber : Inspektorat Provinsi Papua

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil SAKIP bagi SKPD-SKPD di lingkup Pemerintah Propinsi Papua dimana tahun 2015 sebesar 35,41% naik di tahun 2016 menjadi 54,16% dan naik lagi di tahun 2017 menjadi 64,70. Peningkatan ini terjadi karena :

1. Adanya perhatian pimpinan berupa komitmen untuk mengkawal arah strategis organisasi setiap tahun;
2. Adanya pemahaman tentang SAKIP serta
3. Adanya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD berdasarkan Evaluasi Kinerja dari Inspektorat Provinsi Papua;
5. Meningkatkan sinergitas dan kerjasama dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dalam meningkatkan kesadaran untuk menyampaikan Laporan Kinerja tepat waktu dan mengimplementasikan Sistem AKIP yang merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.

Jawab :

Setiap tahun Gubernur Papua mengirimkan Radiogram kepada Bupati Walikota se Provinsi Papua untuk mewajibkan Kepala Daerah menyusun dan mengumpulkan Laporan Kinerja Daerah secara Tepat Waktu yaitu 31 Maret setiap Tahun termasuk untuk penyusunan dan pengumpulan Laporan Kinerja (LKj) TA 2018 melalui Radiogram Gubernur Papua Nomor : T-060/0334/SET tertanggal 14 Januari 2019.

Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah Provinsi Papua dan Tim SAKIP Provinsi Papua juga telah melakukan Penguatan Kapasitas baik melalui



Kegiatan Bimtek, Lokakarya dan Sosialisasi sebagai Narasumber pada kegiatan yang dibiayai oleh Kemenpan maupun Kabupaten/Kota masing-masing serta mengintensifkan komunikasi melalui media sosial yaitu WhatsUp (WA), Email, SMS, Telepon serta Tatap Muka. Berikut data optimalisasi penguatan SAKIP pada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua :

**Tabel. 3.15 OPTIMALISASI SAKIP PADA KAB/KOTA se PROVINSI PAPUA
TAHUN 2016-2018
Melalui Program Penguatan Kapasitas Kinerja Organisasi Daerah**

TAHUN	TEMPAT KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT KEGIATAN
2016 (2 Kab)	1. Kabupaten Waropen	11 Januari 2016	Hotel Merpati Waropen
	2. Kabupaten Biak Numfor	23 - 24 Juni 2016	Hotel Irian Biak
2017 (5 Kab / Kota)	1. Kabupaten Mimika	21-22 Agustus 2017	Hotel Grand Tembaga Mimika
	2. Kota Jayapura	18-19 Oktober 2017	Ruang Rapat Bappeda Kota Jayapura
	3. Kabupaten Nabire	16 November 2017	Kantor Bupati Nabire
	4. Kabupaten Merauke	5 - 6 Desember 2017	Hotel Megaria Merauke
	5. Kabupaten Mamberamo Raya	5 - 6 Desember 2017	Kantor Bupati Mamberamo Raya
2018 (6 Kab)	1. Kabupaten Sarmi	16 Januari 2018	Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov.Papua
	2. Kabupaten Jayapura	19 Juli 2018	Hotel Grand Alizon Sentani
	3. Kabupaten Supiori	30 Juli 2018	Hotel Sapuri, Supiori
	4. Kabupaten Puncak	14 September 2018	Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov.Papua
	5. Kabupaten Keerom	21 September 2018 dan 28 November 2018	Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov.Papua dan Ruang Rapat Bappeda Kab.Keerom
	6. Kabupaten Jayawijaya	13 November 2018	Kantor Bupati Jayawijaya
Total Penguatan Optimalisasi SAKIP Pada Kabupaten / Kota Se Provinsi Papua Tahun 2016 - 2018		13/29*100%	44.82% (45%)

Penguatan Kapasitas untuk mengoptimalkan SAKIP pada Kab/Kota se Provinsi Papua masih terus dilaksanakan dengan keterlibatan Pemateri/Narasumber dari Tim



SAKIP Provinsi Papua dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota baik dalam bentuk kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi.

Indikator persentase **Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD)** menunjukkan peningkatan setiap tahun. Gubernur Papua dalam pertemuannya dengan BPK Perwakilan Papua menyatakan bahwa “Pemerintah Provinsi Papua sudah Empat kali meraih WTP. Kami yakin tahun ini (2018) kembali mendapat predikat WTP,” terang ia. BPK RI kembali memberi opini



Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2014, 2015, 2016, 2017 dan untuk Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Papua menargetkan untuk tetap mempertahankan Opini WTP oleh BPK RI.

Foto : Gubernur Papua Lukas Enembe, usai menerima kunjungan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bapak Paula Henry Simatupang bersama Rombongan di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura, Kamis (21 Maret 2019).

Adapun Indikator Opini oleh BPK RI adalah :

1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengungkapan yang memadai;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas pengendalian intern; jika tidak ada permasalahan yang signifikan dan material berpengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan (LK) terkait 4 Indikator diatas, opini nya WTP.

Berikut Realisasi Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16 Perkembangan LKPD Provinsi Papua Oleh BPK RI Tahun 2015-2018

OPINI BPK RI Atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua	2014	2015	2016	2017	2018
	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	*WTP

(*) Pemerintah Provinsi Papua Menargetkan Opini BPK RI Di Tahun 2018 Yang Baru Hasilnya Diketahui Pada Sekitar Juni 2019 Adalah Dengan Tetap Predikat WTP



Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dengan predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik artinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis AkruaI.

Adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

❖ **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas Laporan Keuangan.

❖ **Tanggungjawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Papua bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

❖ **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu Opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional Pemeriksa, termasuk



penilaian resiko salah saji yang material dalam Laporan Keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Papua. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

❖ **Opini**

Menurut Opini BPK, Laporan Keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua tanggal 31 Desember 2017 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

❖ **Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2017 dan Nomor 01.C/LHP/XIX.JYP/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Indikator persentase **rata-rata kehadiran pegawai yang ditargetkan sebesar 95,00 persen**, dengan **realisasi sebesar 74,07 persen**, maka capaian kinerja menjadi **77,97 persen**. Perhitungan capaian indikator ini didasarkan pada perhitungan data rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai absensi digital (e-TPP) pada masing-masing SKPD yang dihitung dari Januari-Desember



2018. e-TPP terdiri dari Dua komponen yaitu 1). Disiplin (50%) yang terdiri dari kehadiran dan kepatuhan, 2). Kinerja (50%) terdiri dari prestasi kerja, aktivitas kerja, kemampuan teknis dan kemampuan interpersonal. Hasil **Capaian Kinerja Tahun 2018 menjadi 77,97 persen** ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama, yaitu turun sebesar 19,92 persen. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a. Perubahan sistem pengelolaan absensi dari sistem manual ke sistem digital (absen digital);
- b. Sebagian Pegawai Negeri Sipil masih memiliki pola pikir lama (old mindset) atau kebiasaan lama (old habits) dan ada pula memiliki kesibukan yang tinggi sehingga tidak scan jari pada mesin absen digital (finger scan);
- c. Para pegawai yang ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang kantornya berada di luar Kota Jayapura belum bisa melakukan absen digital karena mesin absen digilnya belum terpasang atau belum terkoneksi secara online dengan sistem absensi pegawai;
- d. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipekerjakan pada kementerian/lembaga di Provinsi Papua.

Namun demikian kita tetap optimis bahwa tingkat kehadiran pegawai Negeri Sipil akan tinggi seiring dengan adanya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Papua pada setiap apel rutin setiap hari senin ataupun melalui Surat Gubernur Papua kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua dengan melakukan tahapan-tahapan kegiatan guna sosialisasi dan penerapan disiplin Penegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan penyempurnaan sistem absensi digital serta penambahan mesin-mesin absensi digital pada setiap SKPD maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dapat terintegrasi secara online dengan aplikasi Absensi Pegawai (e-TPP).



Yang dimaksud dengan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga Negara atau penduduk atas barang / jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi”** merupakan sasaran yang diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran yakni Indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan indikator **Presentase SKPD Yang Telah Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)**.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif Berbasis Teknologi Informasi”** adalah **111,91 persen** atau dalam skala ordinal adalah **”Sangat Berhasil”**.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.17 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015			2016			2017			2018			
		TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	-	65,18	260,72	-	-	-	25,00	65,18	260,72	80	78,67	98,34
2	Persentas SKPD yang Telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persen	41,00	58,82	84,03	50,00	10,40	20,80	70,00	58,82	84,03	75	94,12	125,49
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					76,60		20,80				172,38			111,91

Berdasarkan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, pada Tahun Anggaran 2018 ini telah dilakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dengan menggunakan Quisioner Pelayanan Publik dengan jumlah Responden 2.180 orang yang terdiri dari 24 (dua empat) Satuan



Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil survei tersebut terdapat sebanyak 1.715 orang responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan Pemerintah dan yang menyatakan kurang/tidak puas sebanyak 465 orang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah melakukan survei terhadap pelayanan publik tersebut terdiri atas :

1. Biro Organisasi
2. Biro Humas dan Protokol
3. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4. Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
5. Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sekertariat DPRD
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10. Badan Kestuan Bangsa dan Politik
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Dinas Pendidikan
13. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
15. Dinas Kehutanan
16. Dinas Koperasi dan UKM
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Perkebunan
19. Dinas Pariwisata
20. Dinas Pendidikan
21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Dinas Olah Raga dan Pemuda
23. Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
24. Dinas Pengelolah Lingkungan Hidup

Pada Tahun Anggaran 2017 SKPD yang melakukan Survei dengan menggunakan Quisioner Pelayanan Publik dengan jumlah Responden 1.074 orang yang terdiri dari 11 (sebelas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai hasil survei tersebut terdapat Responden yang menyatakan puas terhadap pelayanan Pemerintah sebanyak 700 orang dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 374 orang.




Sementara pada Tahun Anggaran 2016 jumlah Responden sebanyak 90 orang, terdiri dari 4 (empat) unit pelayanan yaitu :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Sedangkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan. (SKPD atau Unit Pelaksana IKM).
5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada (SKPD atau Unit Pelaksana IKM) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan.



Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18 Data Responden Survei IKM Tahun 2015-2018 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

SKPD	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
JUMLAH RESPONDEN	-	90	1.074	2.180

Selain Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, terdapat pula Indikator kinerja lain yaitu “Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur(SOP)”, yang pada Tahun Anggaran 2018 Persentase SKPD yang telah menyusun dan menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 48 (empat puluh delapan) SKPD hal ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015 jumlah SKPD yang memiliki SOP sebanyak 15 SKPD, dalam Tahun Anggaran 2016 jumlah SKPD yang memiliki SOP sebanyak 5 SKPD dan pada


Tahun Anggaran 2017 berjumlah 30 SKPD dan pada Tahun Anggaran 2018 berjumlah 48 SKPD.

Pelaksanaan Standard Operasional Prosedur (SOP) merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Papua Nomor14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang bertujuan :

1. Menjamin kelancaran pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
2. Mempermudah kontrol manajemen dalam memperbaiki kinerja pelayanan.
3. Mendorong terwujudnya aparatur penyelenggara pelayanan publik yang profesional, jujur dan bertanggungjawab.
4. Menjamin adanya kepastian hukum.

Pada Tahun Anggaran 2018 ini, dari 51 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua 3 SKPD dalam proses akhir penyusunan sedangkan 48 SKPD yang telah memiliki dokumen SOP adalah :

1. Biro Humas dan Protokol;
2. Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
3. Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Biro Organisasi;

- 
5. Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri;
 6. Biro Otonomi Khusus;
 7. Biro Hukum;
 8. Biro Umum;
 9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
 10. Sekretariat Majelis Rakyat Papua;
 11. Inspektorat;
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Badan Penghubung Daerah
 14. Badan Penelitian dan Pengembangan
 15. Badan Kepegawaian Daerah;
 16. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Daerah;
 17. Badan Pengembangan Sumber Daya dan Manusia;
 18. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
 19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 21. RSUD Jayapura;
 22. RSUD Abepura
 23. Dinas Pendidikan
 24. Dinas Kesehatan
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 26. Dinas Kehutanan
 27. Dinas Perkebunan
 28. Dinas Perhubungan
 29. Dinas Olahraga dan Pemuda
 30. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB;
 31. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
 32. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 33. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 34. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil;
 35. Dinas Tenaga Kerja;
 36. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 37. Dinas Pariwisata;
 38. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 39. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;



40. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup;
41. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
42. Dinas Komunikasi dan Informatika;
43. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
44. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
45. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
46. Dinas Kebudayaan;
47. Dinas Ketahanan Pangan; dan
48. Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah SKPD yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.19 Jumlah SKPD yang sudah memiliki SOP

SOP	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
JUMLAH SKPD	15	5	30	48

Selain permasalahan perubahan regulasi sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula permasalahan teknis yang menyebabkan tidak tercapainya target, yaitu :

1. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
2. Pendampingan penyusunan SOP SKPD tidak dihadiri oleh peserta sesuai permintaan Surat Gubernur, sehingga out put dari kegiatan tidak berfungsi.
3. Peserta yang menghadiri kegiatan penyusunan tidak menindaklanjuti / menginformasikan kepada pimpinan tentang keharusan penyusunan SOP pada SKPD.

Sasaran 4 : Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN**” adalah 96,80 persen atau dalam skala ordinal adalah “**Sangat Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015			2016			2017			2018			
		TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Pengaduan Dan Gugatan Masyarakat Yang Ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Persen	55,00	55,36	100,65	55,00	53,40	97,09	55,00	65,53	119,15	65,00	60,84	93,60
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					173,57			98,55			109,58			96,80

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja indikator Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Kenaikan dan penurunan terjadi pada indikator kinerja persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Penurunan capaian kinerja pada tahun 2018 disebabkan salah satu target kinerja kegiatan pemantauan yaitu pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tidak terdapat rekomendasi bernilai uang.

Capaian dari indikator kinerja sasaran **persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani** diperoleh melalui program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan kegiatannya yaitu Pemeriksaan khusus atas surat pengaduan masyarakat / Non PKPT dengan realisasi kinerja program/kegiatan sebesar 100 persen.

Tahun 2018 telah dilakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap sebanyak 5 pengaduan dari 5 pengaduan yang masuk. Surat pengaduan berupa surat



pengaduan masyarakat yang dikirimkan ke kantor Inspektorat baik secara langsung maupun melalui Gubernur Papua dan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, KPK serta pengembangan dari temuan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pengaduan masyarakat pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengaduan Masyarakat atas proses pengadaan barang/jasa Pemerintah TA. 2018 yang dilakukan oleh calon penyedia jasa yaitu:
 - 1) PT. Vita Engineer;
 - 2) PT. Urampi Indah Pratama;
 - 3) CV. Owi Mandiri.
2. Pengaduan Masyarakat oleh Sdr. Yakob Doko.
3. Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada KPK RI dan oleh KPK RI didelegasikan kepada Inspektorat untuk melakukan klarifikasi tentang dugaan TIPIKOR pekerjaan rehabilitasi gedung kantor BAPPEDA Provinsi Papua.
4. Pengaduan masyarakat tentang permohonan tindak lanjut tanggapan atas surat keberatan dari PT. Lince Romauli Raya.
5. Pengaduan Masyarakat oleh Sdri. Anny S. Tanwey, S.Pd

Persentase capaian kinerja penanganan pengaduan masyarakat tahun 2018 sebesar 100 persen, dan jumlah pengaduan bertambah apabila dibandingkan dengan tahun 2017. semuanya atau 100 persen telah ditangani melalui penugasan untuk dilakukan klarifikasi maupun pemeriksaan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Inspektorat tahun 2014-2018 adalah tercapai 100 persen.

Capaian dari indikator kinerja sasaran **Indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan** dengan target 65 persen dapat tercapai 60,84 persen. Target indikator ini terdiri dari dua komponen pengukuran yaitu penyelesaian rekomendasi keuangan dengan bobot 60 persen dan penyelesaian rekomendasi administrasi dengan bobot 40 persen. Pencapaian target yang ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Pencapaian Target LHP Yang Ditetapkan

TINDAK LANJUT	BOBOT PERSEN	TARGET PERSEN	REALISASI INDIVIDU	CAPAIAN REALISASI INDIVIDU	CAPAIAN BOBOT
Keuangan	60	55	55,19	100,35	60,84
Administrasi	40	55	66,50	120,91	40,56
CAPAIAN TL					101,40



Capaian kinerja tindak lanjut keuangan 100,35 persen. Capaian tersebut diperoleh sebagai akumulasi penyelesaian tindak lanjut berupa setoran kerugian negara/daerah dan kewajiban setor kepada negara/daerah tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada LHP tahun 2017 atas audit LKPD Provinsi Papua tidak terdapat temuan dan rekomendasi bernilai keuangan. Hal ini disebabkan semua temuan berupa pengembalian uang negara/daerah langsung diselesaikan oleh penanggungjawab temuan sebelum LHP terbit. Ini menunjukkan kinerja pengawasan sudah berjalan optimal namun perlu kerja keras untuk mempertahankan capaian tersebut. Pada tahun 2017 kegiatan tindak lanjut sangat terbantu dengan adanya program nasional untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut sampai dengan 2019 ini. Pada semester II tahun 2017 telah dilaksanakan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, dengan hasil telah dilimpahkannya seluruh temuan bernilai keuangan untuk diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui mekanisme TPTGR/TPKD sehingga seluruh rekomendasi bernilai keuangan telah dihapuskan dari daftar rekomendasi yang harus dilaporkan tindak lanjutnya kepada BPK RI. Kemudian untuk rekomendasi bersifat administrasi, dari sebanyak 985 rekomendasi, telah dinyatakan selesai sebanyak 881 rekomendasi atau 89,44 persen. Untuk capaian hasil tindak lanjut tahun 2018 berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut BPK RI pada Semester II Tahun 2018 adalah Jumlah Temuan 620; Jumlah Rekomendasi 1.328; Jumlah Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti 1.264 (95,18) dan Jumlah Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 64 (4,82%).

Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui indikator kegiatan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 Hasil Pemantauan Pelaksanaan LHP

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET
1.	Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilaksanakan	Kali	53	53	100	
Capaian Kinerja Kegiatan					100	

Capaian indikator kinerja kegiatan 100 persen karena telah dilaksanakannya kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan




Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Papua maupun pemeriksaan BPK RI.

Lebih rinci mengenai pencapaian target indikator kegiatan ini adalah sebagai berikut :

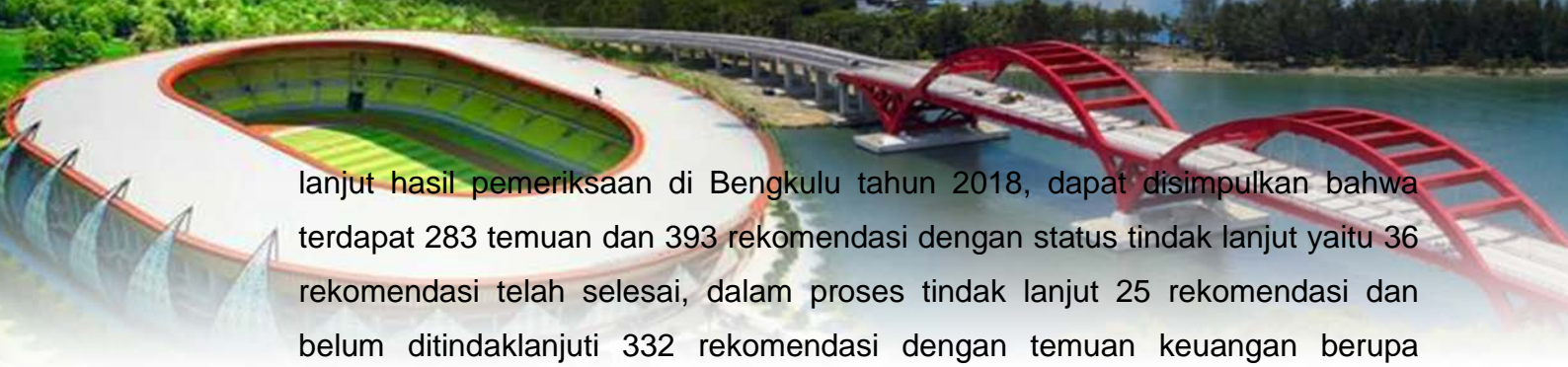
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPK RI dengan target seluruh SKPD yang telah diperiksa dan mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dan telah terealisasi atau terpantau seluruhnya atau 100 persen. Hasil dari pemantauan tindak lanjut tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua pada SKPD Provinsi Papua hingga 31 Desember 2017, pemantauan dilakukan terhadap seluruh SKPD yang telah diperiksa dengan jumlah temuan 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) temuan dan 1.021 (seribu dua puluh satu) rekomendasi, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) rekomendasi, dalam proses sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) rekomendasi dan belum ditindaklanjuti 654 (enam ratus lima puluh empat) rekomendasi. Dari sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) temuan dan 1.021 (seribu dua puluh satu) rekomendasi, jumlah rekomendasi dengan nilai kerugian daerah sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) rekomendasi senilai Rp45.915.956.043,34; telah ditindaklanjuti sebesar Rp14.772.343.178,03 dan sisa belum ditindaklanjuti Rp31.143.622.864,49 serta temuan kewajiban setor kepada negara/daerah sebanyak 116 (seratus enam belas) rekomendasi senilai Rp18.796.210.447,00 telah disetor Rp3.916.855.946,27 sisa belum disetor Rp14.879.354.500,73.
- 2) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua di Kabupaten/Kota hingga 31 Desember 2018, jumlah temuan sebanyak 542 temuan dan 720 rekomendasi, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 287 rekomendasi, dalam proses sebanyak 240 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti 186 rekomendasi dan TPTD sebanyak 7 rekomendasi. Dari sebanyak 542 temuan dan 720 rekomendasi, terdapat 116 rekomendasi dengan nilai kerugian daerah senilai Rp580.647.224.668,15 dan telah ditindaklanjuti senilai Rp554.057.451.650,31 sisa belum disetor Rp26.589.773.017,84 dan TPTD Rp285.337.410,00. Rekomendasi kewajiban setor kepada negara/daerah sebanyak 104 rekomendasi senilai



Rp269.079.391.791,41 telah disetor Rp55.810.740.637,00 sisa belum disetor Rp213.268.651.154,41 dan TPTD sebanyak Rp17.326.318.116,00.

- 3) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan tahun 2018 dan data hasil rapat pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan di Bengkulu tahun 2018, Hasil rapat pemutakhiran adalah sebagai berikut :
 - (1) Hasil pemeriksaan tahun 2011: semua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD terkait temuan sehingga laporan hasil pemeriksaan yang terbit tahun 2011 dapat dikeluarkan dari daftar tindak lanjut.
 - (2) Hasil pemeriksaan tahun 2012: semua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD terkait temuan sehingga laporan hasil pemeriksaan yang terbit tahun 2012 dapat dikeluarkan dari daftar tindak lanjut.
 - (3) Hasil pemeriksaan tahun 2013: semua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD terkait temuan sehingga laporan hasil pemeriksaan yang terbit tahun 2013 dapat dikeluarkan dari daftar tindak lanjut.
 - (4) Hasil pemeriksaan tahun 2014: semua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh SKPD terkait temuan sehingga laporan hasil pemeriksaan yang terbit tahun 2014 dapat dikeluarkan dari daftar tindak lanjut.
 - (5) Hasil pemeriksaan tahun 2015 : terdapat 22 temuan dengan jumlah rekomendasi 35, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 30 rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 5 rekomendasi. Rekomendasi kewajiban setor kepada negara/daerah sebanyak 1 rekomendasi dengan nilai Rp100.000.000,00 pada Biro Umum Setda Provinsi Papua telah disetor seluruhnya. SKPD yang belum menyelesaikan tindak lanjutnya adalah Biro Umum 1 rekomendasi, BPKAD 1 rekomendasi dan Bappeda 2 rekomendasi.
 - (6) Hasil pemeriksaan tahun 2017 : terdapat 64 temuan dengan jumlah rekomendasi 64, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 29 rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 35 rekomendasi.
- 4) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis yang dilaksanakan tahun 2018 dan data hasil rapat pemutakhiran tindak

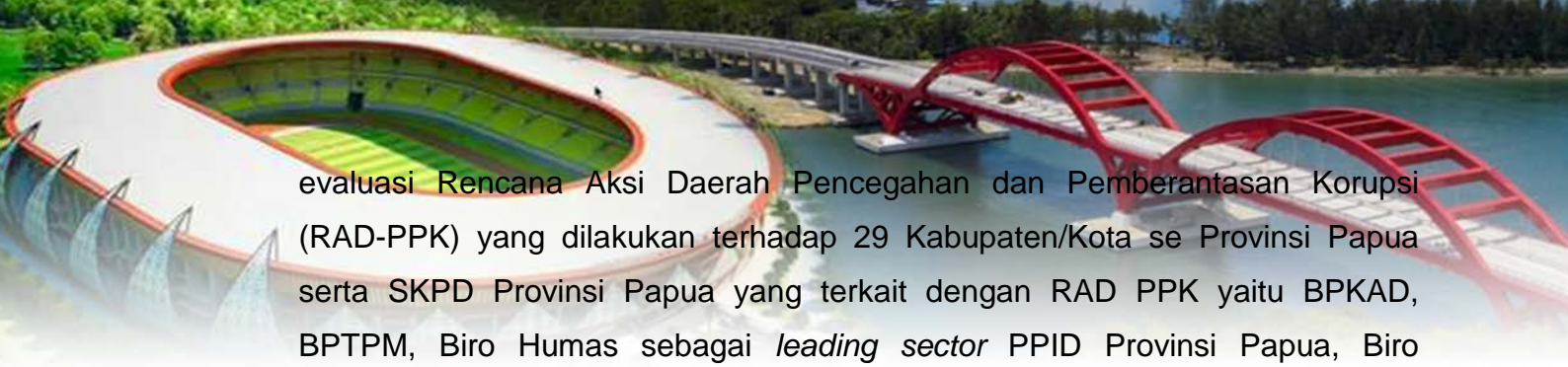


lanjut hasil pemeriksaan di Bengkulu tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa terdapat 283 temuan dan 393 rekomendasi dengan status tindak lanjut yaitu 36 rekomendasi telah selesai, dalam proses tindak lanjut 25 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti 332 rekomendasi dengan temuan keuangan berupa kerugian negara sebanyak 78 rekomendasi senilai Rp8.059.841.345,00 telah disetor Rp1.587.712.756,00 dan saldo belum disetor Rp6.455.365.580,00 Temuan keuangan berupa kewajiban setor pada negara/daerah sebanyak 6 rekomendasi senilai Rp783.627.348,00 telah disetor Rp7.300.000,00 dan sisa belum disetor Rp776.327.348,00.

- 5) Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang dilaksanakan selama tahun 2018 dan hasil rekonsiliasi data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI di Kantor BPK RI Perwakilan Papua pada bulan Desember 2018 (hasil sementara karena menunggu hasil resmi yang belum dirilis oleh BPK RI) adalah: rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara keseluruhan berjumlah 1.328 kejadian dengan nilai Rp 1.367.979.499.791,22. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi adalah: jumlah selesai atau sesuai rekomendasi sebanyak 1.072 rekomendasi atau 80,72 persen dengan nilai Rp1.237.974.985.196,38 belum sesuai/masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 74 rekomendasi atau 5,57 persen dengan nilai Rp44.613.706.030,70 belum ditindaklanjuti sebanyak 64 rekomendasi atau 4,82 persen dengan nilai Rp0,00, dan tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 118 rekomendasi atau 8,89 persen dengan nilai Rp85.390.808.564,14.

Kegiatan pendukung yang berperan dalam tercapainya target kinerja sasaran kedua ini adalah :

1. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Provinsi Papua telah dilaksanakan di Kabupaten Merauke pada bulan Juli 2018.
2. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Nasional/regional telah dilaksanakan di Bengkulu pada bulan Oktober 2018.
3. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah tingkat Provinsi telah dilaksanakan di Jayapura pada bulan November 2018.
4. Pemantauan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kegiatan penandatanganan Pakta Komitmen pada seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, pemantauan pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada saat tim pemeriksa melakukan pembinaan dan pengawasan pada SKPD, kegiatan



evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) yang dilakukan terhadap 29 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua serta SKPD Provinsi Papua yang terkait dengan RAD PPK yaitu BPKAD, BPTPM, Biro Humas sebagai *leading sector* PPID Provinsi Papua, Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta LPSE. RAD PPK dilaksanakan sebagai implementasi dari Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2016, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 356/4429/SJ, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 456/1325/SJ.

5. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (TP-TGR) dengan target dalam DPA sebanyak 4 keputusan akan diambil oleh MP TPTGR dalam menyelesaikan TLHP. Untuk sidang MP-TGR tahun 2018 telah dilakukan konfirmasi dengan SKPD yang terkait dengan data temuan kerugian daerah yang akan diselenggarakan oleh MP-TGR kemudian sarana pendukung telah disiapkan, namun sidang MP-TGR belum dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan realisasi untuk tahun 2017 adalah telah diputuskan dalam sidang DPR Papua perihal penghapusan UUDP tahun 1981/1982 s/d 2007, dan piutang kelebihan pembayaran tahun 2002 s/d 2003. Selain itu, telah diselesaikannya 1 (satu) kasus pada RSUD Jayapura sebagai tindak lanjut keputusan TP-TGR.
6. Operasionalisasi saber pungli oleh Tim Satgas Saber Pungli pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan antara lain :
 - a. Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Papua juga telah melaksanakan kegiatan Supervisi dan Asistensi pada 12 UPP Kabupaten meliputi :
 - 1) UPP Kabupaten Merauke;
 - 2) UPP Kabupaten Jayawijaya;
 - 3) UPP Kabupaten Nabire;
 - 4) UPP Kabupaten Boven Digoel;
 - 5) UPP Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 6) UPP Kabupaten Waropen;
 - 7) UPP Kabupaten Mimika;
 - 8) UPP Kabupaten Asmat;
 - 9) UPP Kabupaten Mappi;
 - 10) UPP Kabupaten Jayapura;
 - 11) UPP Kabupaten Keerom;
 - 12) UPP Kota Jayapura



b. Kegiatan yang dilaksanakan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Papua dan UPP Kabupaten :

- 1) UPP Provinsi Papua :
 - (1) Pokja Penindakan : 17 kegiatan OTT;
 - (2) Pokja Intelijen : 3 kegiatan lidik;
 - (3) Pokja Pencegahan : 29 kegiatan sosialisasi dan 12 kegiatan Supervisi dan Asistensi;
 - (4) Pokja Yustisi : 8 kegiatan gelar perkara dan 100 kegiatan sosialisasi.
- 2) UPP Kabupaten:
 - (1) UPP Kota Jayapura : 176 kegiatan sosialisasi;
 - (2) UPP Kab. Jayapura : 53 kegiatan sosialisasi & 2 OTT;
 - (3) UPP Kab. Nabire : 22 kegiatan sosialisasi;
 - (4) UPP Kab. Keerom : 20 kegiatan sosialisasi & 1 OTT;
 - (5) UPP Kab. Sarmi : 20 kegiatan sosialisasi;
 - (6) UPP Kab. Waropen : 16 kegiatan sosialisasi;
 - (7) UPP Kab. Merauke : 9 kegiatan sosialisasi;
 - (8) UPP Kab. Boven Digoel : 8 kegiatan sosialisasi;
 - (9) UPP Kab. Peg. Bintang : 6 kegiatan sosialisasi;
 - (10) UPP Kab. Kep. Yapen : 7 kegiatan sosialisasi;
 - (11) UPP Kabupaten Mappi : 15 kegiatan sosialisasi & OTT;
 - (12) UPP Kab. Tolikara : 6 kegiatan sosialisasi;
 - (13) UPP Kab. Jayawijaya : 6 kegiatan sosialisasi;
 - (14) UPP Kab. Biak Numfor : 4 kegiatan sosialisasi;
 - (15) UPP Kab. Mimika : 4 kegiatan sosialisasi;
 - (16) UPP Kab. Asmat : 1 kegiatan sosialisasi;
 - (17) UPP Kab. Mamteng : 1 kegiatan sosialisasi;
 - (18) UPP Kab. Supiori : 1 kegiatan sosialisasi;
 - (19) UPP Kab. Yahukimo : 1 kegiatan sosialisasi;

7. Monitoring dan evaluasi gratifikasi. Tahun 2018 sudah dilaksanakan melalui pendistribusian Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap seluruh OPD, namun tidak terlaksana dengan baik disebabkan SK (Surat Keputusan) Tim Satgas Pengendalian Gratifikasi belum ditandatangani sampai akhir tahun, belum dilakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi OPD di



Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dikarenakan sulitnya pengatur waktu bagi narasumber dari divisi pencegahan KPK RI. Disamping itu masih terjadi perdebatan mengenai besaran pemberian yang bukan gratifikasi mengingat kondisi di Provinsi Papua yang memiliki tingkat kemahalan tinggi terutama di daerah pegunungan, sementara Undang-undang telah menetapkan besaran/jumlah dalam kategori pemberian gratifikasi.

8. Pengelolaan data tindak lanjut hasil pengawasan ke dalam aplikasi Sistem Manajemen Hasil Pengawasan dilakukan secara rutin setiap ada laporan hasil pengawasan yang baru terbit dan setiap ada perkembangan hasil tindak lanjut baik untuk LHP Inspektorat Provinsi Papua, Inspektorat Jenderal Kementerian maupun BPK RI.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN selama tiga tahun yaitu dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.23 Perkembangan Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN Tahun 2015-2018

2015	2016	2017	2018	PENINGKATAN / PENURUNAN (%)	
137,45	499,75	559,58	425,70	2015 – 2016	(362.30)
				2016 – 2017	(59.83)
				2017 – 2018	(133.88)

Capaian kinerja sasaran strategis ini mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibanding tahun 2014 sebesar 362,30 persen. sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 362,30 persen. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 59,83 persen dibanding tahun 2016 dan tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 133.88 dibanding tahun 2017.

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN pada tahun 2018 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Inspektorat tahun 2014-2018 adalah tercapai 100 persen.

Pada tahun 2018, Inspektorat Provinsi Papua memperoleh dukungan dana untuk melaksanakan pengawasan berupa pelaksanaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur dengan kegiatan berupa pemeriksaan reguler sesuai PKPT dengan dana sebesar Rp8.076.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.449.719.900,00 atau 92,24 persen dan program peningkatan kinerja



pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan kegiatan antara lain pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, TPTGR, pemantauan SPIP dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan dana sebesar Rp10.770.560.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.290.607.486,00 atau 76,97 persen. Penambahan dana pada program ini disebabkan adanya kegiatan tambahan yaitu Operasionalisasi Tim Satgas Saber Pungli Provinsi Papua sebagai implementasi kebijakan nasional yang mewajibkan semua daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Tim Saber Pungli guna memberantas pungli.

Selain dukungan dana tersebut di atas, jumlah dan kompetensi aparat Inspektorat yang terlibat dalam kegiatan pengawasan juga sangat berperan penting terhadap keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Papua. Saat ini jumlah tenaga fungsional Inspektorat adalah sebanyak 39 orang namun jumlah ini masih kurang sehingga dalam beberapa penugasan pembinaan dan pengawasan SKPD Provinsi Papua, Inspektorat Provinsi Papua masih melibatkan pegawai non fungsional tetapi diutamakan yang telah memiliki sertifikat jabatan fungsional.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua

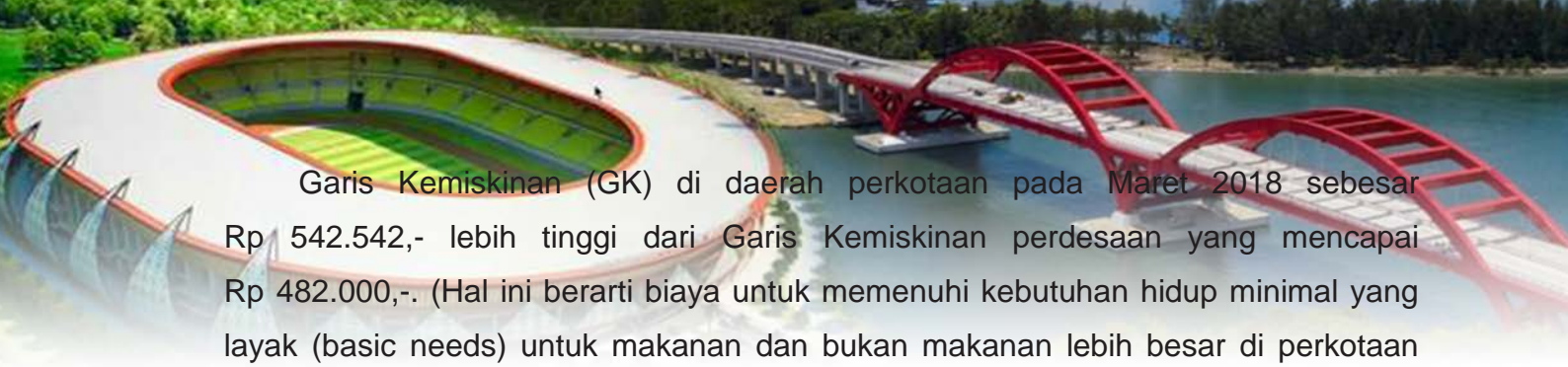
Salah satu amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah terpenuhinya hak-hak dasar orang asli Papua. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua** adalah **94.82 persen** atau dalam skala ordinal adalah **”Sangat Berhasil”**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan; Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	Persen	72,00	71,60	157,07	70,00	71,46	102,08	71,00	71,06	100,08	71,00	72,26	101,77
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	5,00	0,95	100,05	4,00	3,33	83,25	4,00	36,36	900,09	35,00	30,76	87,88
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					128,56			92,66			500,08			94,82

Indikator **persentase penduduk di atas garis kemiskinan**, ditargetkan sebesar **71.00 persen** dengan realisasi sebesar **72.26 persen** dengan capaian kinerja sebanyak **101.77 persen**. Nilai Capaian Kinerja ini menunjukkan kategori **“Sangat Berhasil”**. Selama 5 (Lima) tahun terakhir periode 2014-2018 kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Persentase penduduk miskin di Provinsi Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,02 persen poin yaitu dari 27,76 persen pada September 2017 menjadi 27,74 persen pada Maret 2018. (sumber : Keadaan Kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2018, No.39/07/94/Th.X, 16 Juli 2018 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua)



Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar Rp 542.542,- lebih tinggi dari Garis Kemiskinan perdesaan yang mencapai Rp 482.000,-. (Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan), yaitu 75 persen berbanding 25 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap GK Provinsi Papua di daerah perkotaan adalah beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang, dan telur ayam. Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK di perdesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek, dan daging babi.

Pada periode September 2017 – Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan kenaikan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.

Keadaan Kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2018

1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 1999 – Maret 2018

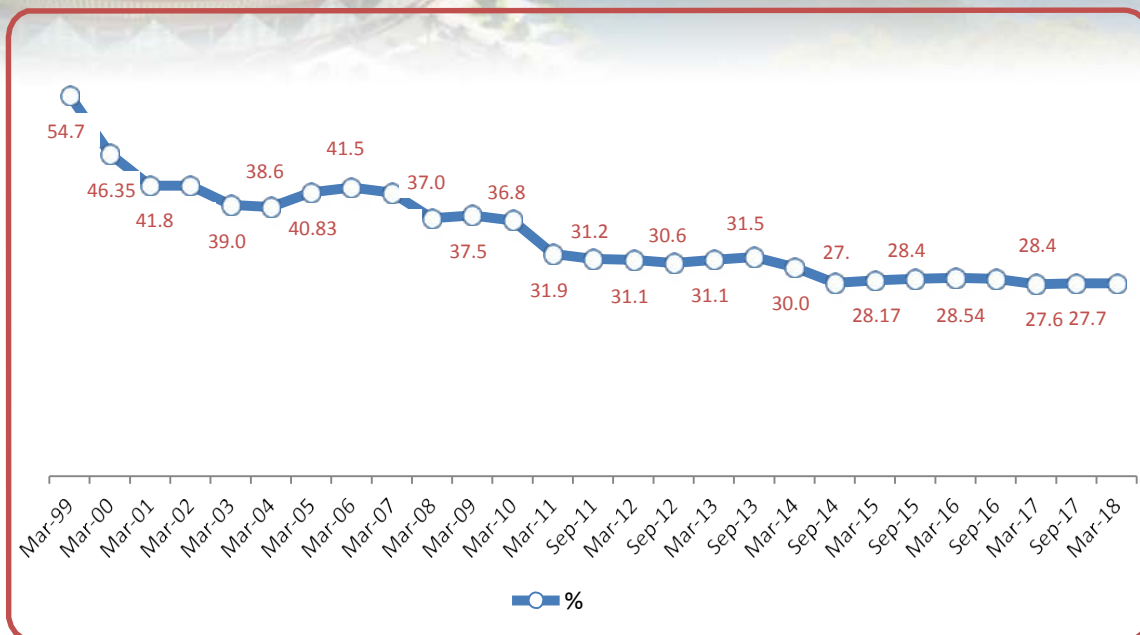
Persentase penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin yaitu dari 27,76 persen pada September 2017 menjadi 27,74 persen pada Maret 2018.

Selama sembilan belas tahun terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 27,13 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,74 pada Maret 2018.

Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) persentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.



Gambar 3.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Papua Tahun 1999-2018



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Catatan : Maret 2011-September 2013 merupakan *backcasting* dari penimbang proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 Data sebelum tahun 2006 masih penggabungan dengan Papua Barat

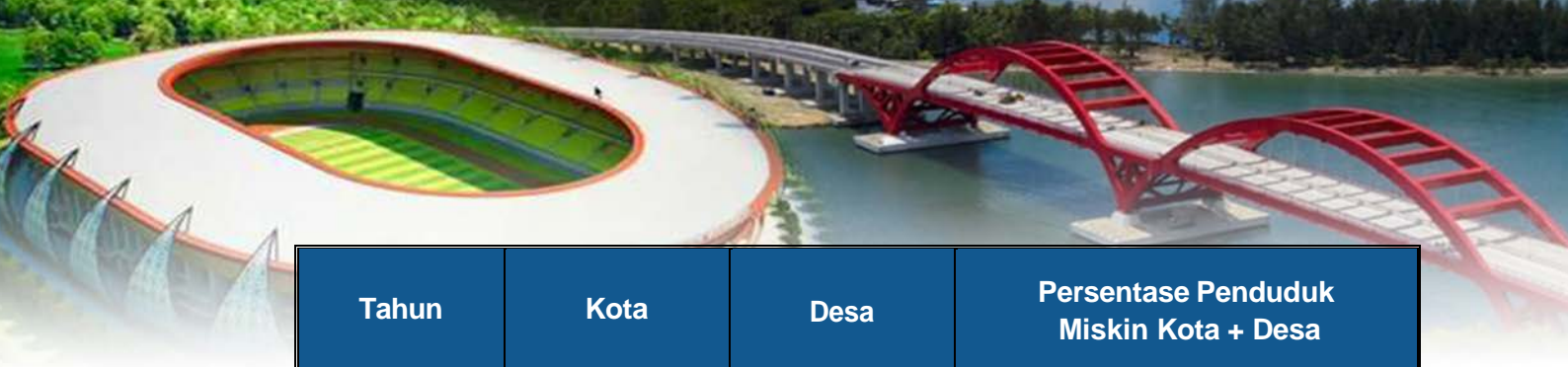
2. Tingkat Kemiskinan menurut Tipe Daerah

Dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Provinsi Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan, di mana pada Maret 2018 terdapat 36,63 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,51 persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelumnya (September 2017), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,04 persen. Untuk daerah perkotaan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen.

abel 3.25

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua menurut Daerah Tahun 2002 - Maret 2018

Tahun	Kota	Desa	Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa
2002	9,76	51,21	41,80
2003	8,32	49,75	39,03
2004	7,71	49,28	38,69
2005	9,23	50,16	40,83
2006	8,71	51,31	41,52



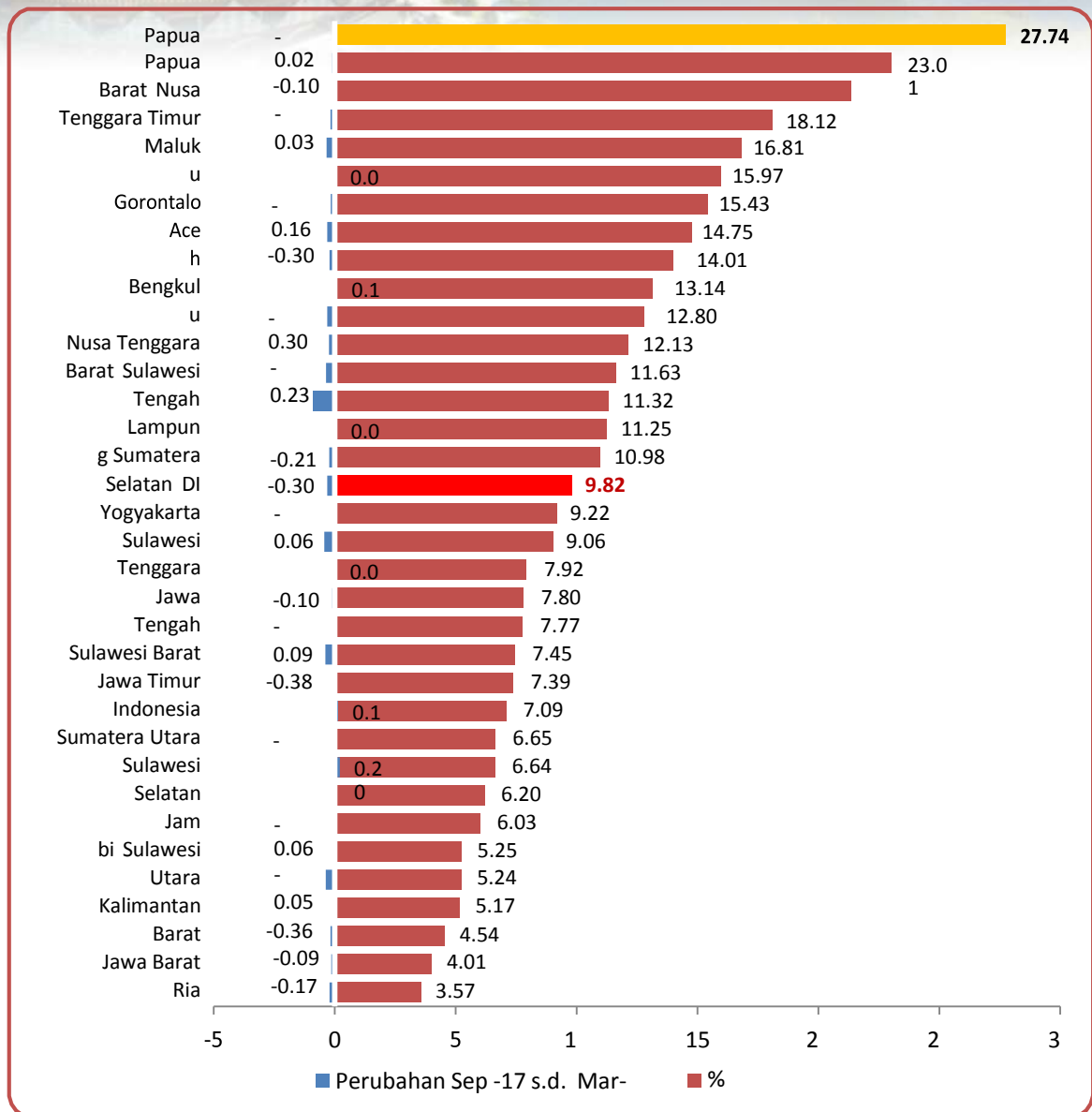
Tahun	Kota	Desa	Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa
2007	7,97	50,47	40,78
2008	7,02	45,96	37,08
2009	6,10	46,81	37,53
2010	5,55	46,02	36,80
Mar-11	4,60	41,58	31,98
Sep-11	4,75	40,53	31,24
Mar-12	4,24	40,55	31,11
Sep-12	5,81	39,39	30,66
Mar-13	6,11	39,92	31,13
Sep-13	5,22	40,71	31,52
Mar-14	4,47	38,92	30,05
Sep-14	4,46	35,87	27,80
Mar-15	4,61	36,66	28,17
Sep-15	3,61	37,34	28,40
Mar-16	4,42	37,14	28,54
Sep-16	4,21	37,07	28,40
Mar-17	4,46	36,20	27,62
Sep-17	4,55	36,56	27,76
Mar-18	4,51	36,51	27,74

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018
 Keterangan : Data sebelum tahun 2006 masih penggabungan dengan Papua Barat

3. Tingkat Kemiskinan menurut Provinsi

Gambar 2 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia berdasarkan data Susenas Maret 2018. Dari gambar tersebut tampak bahwa tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar yaitu berturut-turut 27,74 persen; 23,01 persen; dan 21,35 persen. Dari 34 provinsi, 27 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yang mencapai 0,91 persen.

Gambar 3.2
Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 dan Perubahan Persentase Penduduk Miskin Periode September 2017 – Maret 2018 menurut Provinsi



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2018 adalah Rp.499.643,-. Selama September 2017 - Maret 2018 terjadi kenaikan GK, yaitu mencapai Rp 35.507,- atau sebesar 7,63 persen.



Ditinjau menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada Maret 2018 adalah sebesar Rp.542.542,- . Nilai ini lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp 482.000,-. Hal ini berarti biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Indikator **persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**, ditargetkan sebesar **4.00 persen** dengan realisasi sebesar **30.76 persen** dengan capaian kinerja sebanyak **87.88 persen**. Nilai Capaian Kinerja ini menunjukkan kategori “**Berhasil**”. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah :

1. Dukungan Pemerintah Provinsi Papua serta dukungan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua serta *stakeholders* lainnya termasuk petugas pendamping dalam penanganan PMKS;
2. Pelaksanaan program-program di Tahun 2018 terkait PMKS seperti Program Pemberdayaan sosial, Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Rehabilitasi sosial serta Program Perlindungan & Jaminan Sosial;

Realisasi PMKS di 2018 sebesar 30,76 % mengalami penurunan jika dibanding dengan Realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar 36.36 % hal ini dikarenakan tidak semua Kelompok PMKS (26 Kelompok PMKS secara Nasional) ditangani di Provinsi Papua hanya 8 Kelompok PMKS yang terdapat di Papua dan diperlukan pendanaan yang memadai dalam menjangkau 18 Kelompok PMKS lainnya di Provinsi Papua dengan letak Geografis yang berbeda untuk setiap Kabupaten nya. Hal inilah yang berpengaruh pada pada penurunan prosentase PMKS di 2018.

Pemerintah Provinsi Papua melalui RPJMD Provinsi Papua yang dikerjakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dengan Sasaran Strategis yaitu “**Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua**”, maka telah difokuskan untuk pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pada

Pengentasan Kemiskinan; Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan Meningkatnya Aksesibilitas PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.

Berikut perkembangan capaian kinerja dalam penanganan **Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)** di Provinsi Papua adalah sebagai berikut seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.26 Jumlah PMKS yang tertangani di Provinsi Papua

No.	Jumlah Kelompok PMKS yang tertangani	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1,028	1,311	1,444	1,667
2	Lanjut Usia (Lansia)	328	548	578	648
3	Anak Terlantar	1,780	5,570	5,980	6,670
4	Penyandang Disabilitas	662	1,414	1,662	2,280
5	Tuna Sosial	453	673	538	628
6	Korban Penyalagunaan NAPZA	220	265	470	500
7	Korban Bencana Alam	340	340	590	10,222
8	Fakir Miskin	19,780	20,780	29,580	30,832

Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua -Tahun 2018

Tabel 3.27 Kelompok PMKS di Indonesia

No	26 Jenis Kelompok PMKS Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	8 Jenis Kelompok PMKS Yang Ditangani Oleh Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Papua	Keterangan
1	Anak Balita Terlantar		
2	Anak Terlantar	√	
3	Anak Berhadapan dengan HUKUM		
4	Anak Jalanan		
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)		
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan		
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus		
8	Lanjut Usia Terlantar		
9	Penyandang Disabilitas	√	
10	Tuna Susila	√	Tuna Sosial
11	Gelandangan		
12	Pengemis		
13	Pemulung		
14	Kelompok Minoritas		
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan		
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)		



17	Korban Penyalagunaan NAFZA	√	
18	Korban Trafficking		
19	Korban Tindak Kekerasan		
20	Pekerja Migran bermasalah		
21	Korban Bencana Alam	√	
22	Korban Bencana Sosial		
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		
24	Fakir Miskin	√	
25	Keluarga Bermasalah Psikologis		
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	√	
<i>Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua-Tahun 2018</i>			

Adapun kendala dalam penanganan PMKS adalah sebagai berikut :

1. Pendataan tentang PMKS di Provinsi/Kab/Kota se Provinsi Papua.

Data sangatlah penting guna mengetahui jumlah PMKS yang akan dibantu dengan tahapan sesuai aturan yaitu *by name by address* . Untuk mendapatkan data PMKS yang valid maka harus turun langsung ke lapangan dengan kondisi/medan geografis yang berat, serta sulit di jangkau serta membutuhkan waktu, tenaga dan dana, dengan demikian maka munculah program.

2. Program

Program kegiatan yang mengacu pada kondisi PMKS di Provinsi Papua sehingga menjadi acuan saat pembahasan. Mendata dan melakukan suatu program dan perencanaan sangat membutuhkan dana terlebih saat memberikan bantuan.

3. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan Program sangat diharapkan demi terjaminnya pemberdayaan PMKS baik bagi Program peningkatan kapasitas masyarakat maupun permodalan.

4. Balai Rehabilitasi Sosial

Tidak dimilikinya Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah dalam penanganan Anak Jalanan, Anak Terlantar atau korban Narkotika serta PMKS lainnya yang memerlukan penanganan rehabilitasi sosial sesegera mungkin.

5. Dana

Dari 26 Jenis PMKS hanya 8 Jenis PMKS seperti yang telah disebutkan diatas, yang dapat di data dan dapat tertangani di Provinsi Papua, karena



minimnya dukungan anggaran baik oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI) maupun Pemerintah Provinsi Papua untuk bisa mengakomodir 18 Jenis Kelompok PMKS lainnya seperti pada Tabel kedua diatas.

Untuk itu diperlukan penanganan secara komprehensif dan lintas sektor untuk penanganan PMKS ini, bukan hanya menjadi ranah dari urusan Dinas Sosial tapi juga merupakan tanggungjawab berbagai sektor yang ada.

Ada beberapa strategi pokok yang digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial sampai tahun 2018 ini, yaitu :

1. **Kampanye Sosial** yakni memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. **Kemitraan Sosial** yaitu adanya kerjasama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
3. **Partisipasi Sosial**, adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
4. **Advokasi Sosial**, yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.
5. **Desentralisasi Sosial**, yaitu dengan melakukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada aparatur dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumber daya lokal sesuai karakteristik budaya setempat.
6. **Kerjasama**, adanya kerjasama dari Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk membangun rehabilitasi anak yang cukup memadai dan memiliki sarana/prasarana yang lengkap sehingga penanganan masalah anak dapat terbantu dan mengurangi kenakalan anak.

Sasaran 6 : Terwujudnya Masyarakat yang Sehat.

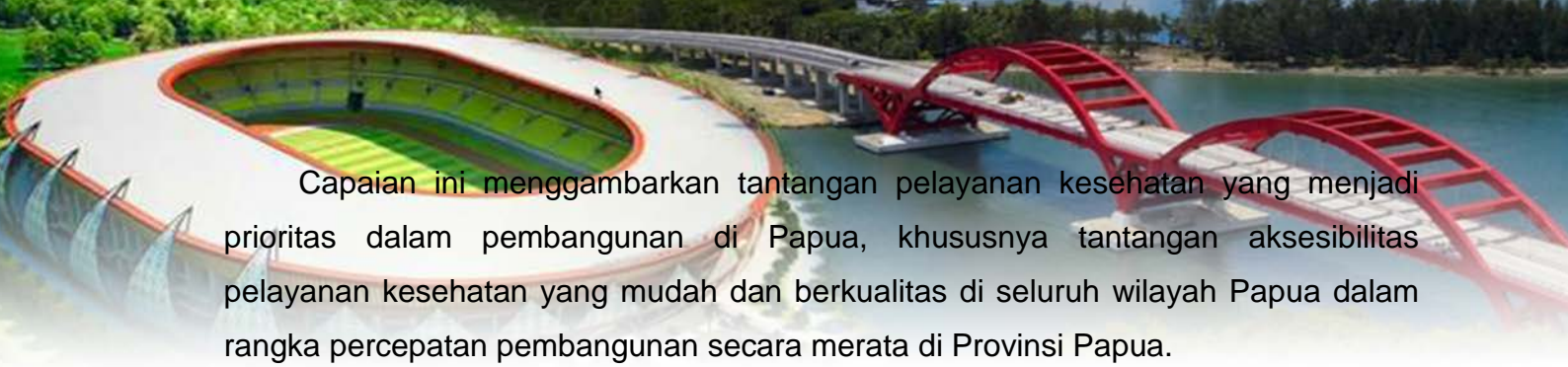
Sasaran Terwujudnya Masyarakat Sehat merupakan sasaran strategis dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dan merupakan bidang prioritas dalam pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Terwujudnya masyarakat sehat dapat diukur melalui 7 (tujuh) Indikator yaitu dari 1) Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam kartu Papua Sehat (KPS); 2) Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan; 3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup; 4) Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV; 5) Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis; 6) Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan, dan 7) Usia Harapan Hidup.

Tabel 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

No	IKU	Satuan	2015	CAPAIAN		2016	CAPAIAN		2017	CAPAIAN		2018	CAPAIAN	
			REALISASI	KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA	TARGET	REALISASI	KINERJA	
1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	/ 100.000 KH	236	178,81	400	380	105,26	300	289	103,81	280	175	160	
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	/ 1.000 KH	44	100,00	54	8	675,00	7	7	100	6,5	9	72,22	
4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	Persen	51,4	51,4	100	51,4	51,4	100	56,4	56,4	100	100	100	
5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	Persen	53,94	112,38	70	38,1	54,43	70	51	72,86	70	51	72,86	
6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Angka usia harapan hidup	Tahun	65,1	97,16	67	65,1	97,16	67	65,1	97,16	67	65,1	97,16	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				105,68			169,04			90,03			100,32	

Tahun 2018 yang merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018. Pencapaian realisasi sasaran terwujudnya masyarakat sehat yang ditargetkan sampai dengan tahun 2018 akan menggambarkan capaian keberhasilan pelaksanaan sasaran ini selama 5 tahun.

Capaian kinerja sasaran ini di tahun 2018 menunjukkan kinerja dengan predikat **“berhasil”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100,32 persen. Mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2017 yang mencapai 90,03 persen. Terdapat 4 indikator kinerja sasaran yang mencapai atau melebihi target yang dicanangkan untuk tahun 2018 dan 3 indikator pencapaian sasaran yang belum memenuhi target.



Capaian ini menggambarkan tantangan pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Papua, khususnya tantangan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas di seluruh wilayah Papua dalam rangka percepatan pembangunan secara merata di Provinsi Papua.

Persentase Penduduk Asli Papua yang terjangkau KPS mencapai target 100 persen. Penduduk asli Papua yang mendapatkan KPS dimaksudkan adalah seluruh Orang Asli Papua yang mengakses pelayanan kesehatan dari pelayanan kesehatan dasar sampai dengan rujukan akan menerima pelayanan KPS. Capaian kinerja ini dapat dilihat dari pada tahun 2014 jumlah Orang Asli Papua yang mendapatkan pelayanan KPS sebanyak 1.457.377 orang, tahun 2015 mengalami penurunan sebanyak 1.053.020 orang, tahun 2016 Kartu Papua Sehat melayani sebanyak 1.381.391 orang, tahun 2017 terlayani sebanyak 522.335 orang dan pada tahun 2018 mencapai 971.058 orang yang mendapatkan pelayanan KPS. Untuk pelaksanaan KPS diharapkan membangun basis data yang berbasis sistem informasi dalam rangka peningkatan pelayanan bagi penerima KPS dan mengukur tingkat keberhasilan dari KPS. Untuk pembiayaan KPS mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai Rp. 194,95 Milyar, di tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp. 209,26 Milyar, di tahun 2016 meningkat lagi sebesar Rp. 223,26 Milyar, tahun 2017 mencapai Rp214.990.419.658 dan tahun 2018 mencapai Rp112.318.582.866.

Beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan KPS di tahun 2018 ialah :

- 1). Belum adanya data base orang asli Papua sebagai dasar penentuan sasaran KPS sehingga hanya mengandalkan kunjungan pasien OAP di Rumah Sakit sebagai dasar penentuan sasaran ;
- 2). Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi data JKN dengan KPS; dan
- 3). Pelaporan dari kabupaten penerima KPS belum optimal.

Dari berbagai tantangan tersebut, upaya yang telah dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait data OAP serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelayanan KPS di Kabupaten / Kota.

Tabel 3.29 Alokasi Dana KPS tahun 2014 - 2017

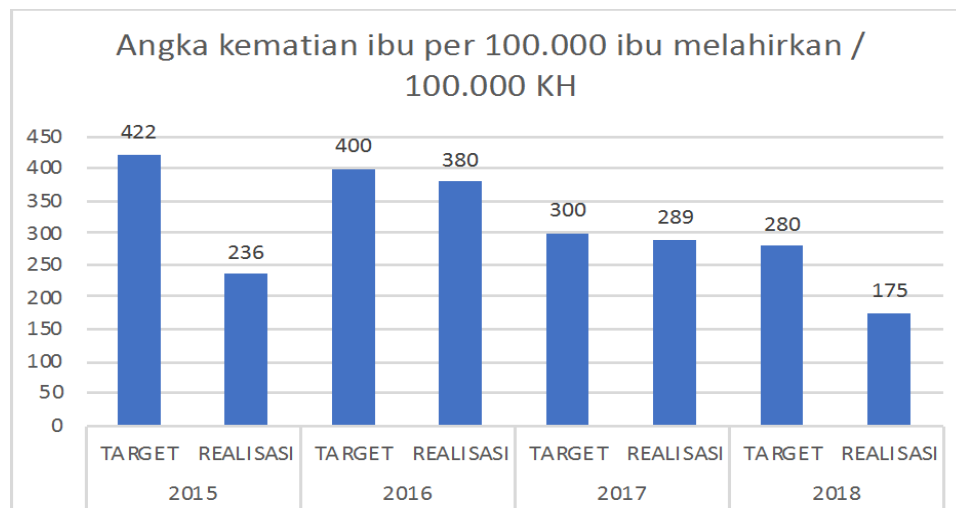
NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	KPS 2014	KPS 2015	KPS 2016	KPS 2017
REGIONAL HA ANIM					
1	SRUD Merauke	8,500,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000	7,278,150,000
	Yasanto		400,000,000	400,000,000	352,880,000
	Bunda Pengharapan		750,000,000	750,000,000	661,650,000
2	RSUD Boven Digoel	3,250,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	3,087,700,000
	RSUD Mindiptana		750,000,000	725,000,000	1,764,400,000
3	Kabupaten Mappi	2,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	3,528,800,000
4	Kabupaten Asmat	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	276,280,338
	BP.St.Odelia bayun				3,528,800,000
REGIONAL LA PAGO					
5	RSUD Jaya wijaya	13,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	9,704,200,000
	Klinik Kalvari		400,000,000	400,000,000	352,880,000
	Klinik Advent		400,000,000	400,000,000	352,880,000
6	Kabupaten Yahukimo	2,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,205,500,000
	RSUD Anggruk Yahukimo				727,666,790
7	Kabupaten Pegunungan Bintang	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,323,300,000
8	Kabupaten Tolikara				352,731,790
9	Kabupaten Nduga				
10	Kabupaten Lanny Jaya	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,323,300,000
11	Kabupaten Puncak Jaya	5,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	3,969,900,000
	RS Imanuel		1,000,000,000	1,000,000,000	
12	Kabupaten Mamberamo Tengah				
13	Kabupaten Yalimo				
14	Kabupaten Puncak				
REGIONAL MAMTA					
15	Kabupaten Jayapura	4,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	4,852,100,000
16	Kabupaten Sarmi				276,280,338
17	Kabupaten Keerom	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	2,646,600,000
18	Kabupaten Mamberamo Raya	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	882,200,000
19	Kota Jayapura				276,280,338
	RSUD Jayapura	49,000,000,000	49,000,000,000	60,000,000,000	70,000,000,000
	RS Jiwa Abepura	7,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000
	RSUD Abepura	39,000,000,000	37,000,000,000	40,000,000,000	45,000,000,000
	RS Marten Indey	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	
	RS Dian Harapan	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	
	RS Angkatan laut	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	
	RS Bhayangkara	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	
	Walihole		750,000,000	750,000,000	352,777,260
Klinik Angkatan Udara		400,000,000	400,000,000	400,000,000	

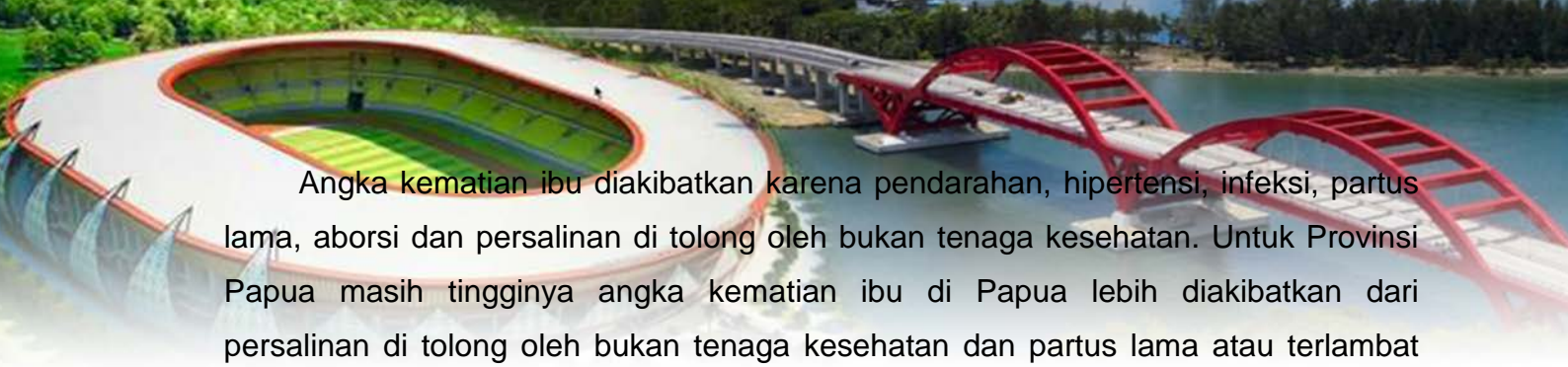
REGIONAL MEE PAGO					
20	RSUD Nabire	11,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	8,822,000,000
	Santo Rafael		300,000,000	300,000,000	264,660,000
	GSI		400,000,000	400,000,000	352,880,000
21	RSUD Paniai	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	7,939,800,000
	Klinik Santo Yosef Enarotali				276,280,338
	Balai Kesehatan Kristen Enarotali				276,280,338
22	RSUD Mimika	10,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	7,498,700,000
23	Kabupaten Dogiyay				276,280,000
24	Kabupaten Intan Jaya				
25	Kabupaten Deiyai				352,731,790
REGIONAL SAIRERI					
26	Kabupaten Kep. Yapen	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	3,969,900,000
27	Kabupaten Biak Numfor	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	7,057,600,000
28	Kabupaten Waropen				
29	Kabupaten Supiori	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,764,400,000
30	Ama, Yajasi, Maf, Tariku		3,750,000,000	3,750,000,000	3,500,000,000
31	Rujukan Luar Papua		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
32	RSUD yang operasional		3,816,700,000	3,816,700,000	3,816,700,000
JUMLAH		194,950,000,000	209,266,700,000	223,266,700,000	214,990,419,658

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2018

Angka Kematian Ibu per 100.000 Ibu melahirkan, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik. Untuk tahun 2018 indikator kinerja AKI ditargetkan sebesar 280/100.000KH dan berhasil melebihi target dengan realisasi sebesar 175/100.000KH dengan capaian kinerja 160 persen sehingga berada pada kategori **sangat berhasil**. AKI tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan AKI tahun 2017 sebesar 289/100.000KH dan AKI tahun 2016 yang mencapai 380/100.000KH.

Gambar Grafik 3.3 Angka Kematian Ibu Tahun 2015-2018





Angka kematian ibu diakibatkan karena pendarahan, hipertensi, infeksi, partus lama, aborsi dan persalinan di tolong oleh bukan tenaga kesehatan. Untuk Provinsi Papua masih tingginya angka kematian ibu di Papua lebih diakibatkan dari persalinan di tolong oleh bukan tenaga kesehatan dan partus lama atau terlambat mendapatkan pertolongan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan AKI di Provinsi Papua melalui :

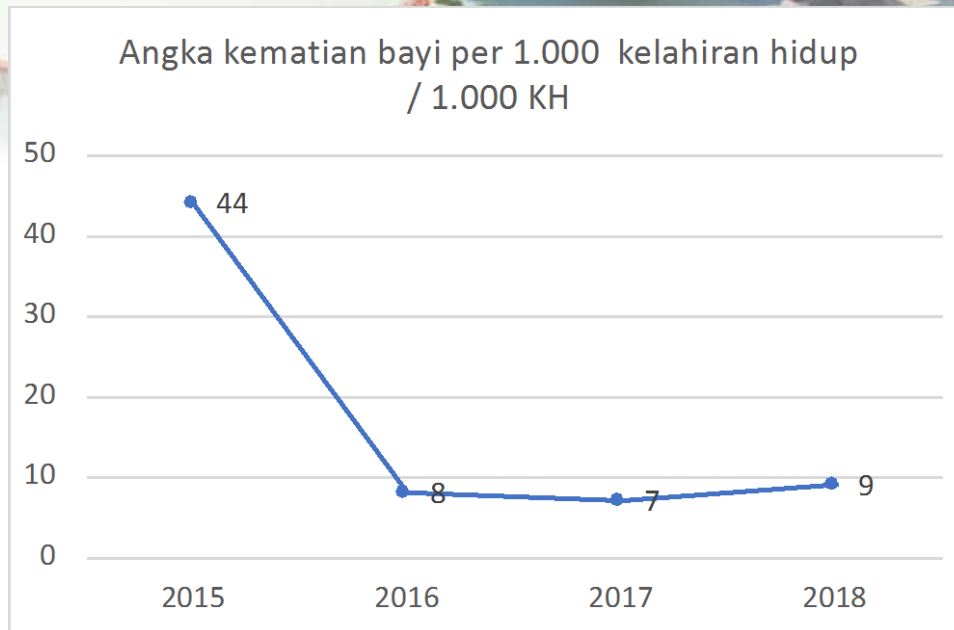
1. Pembentukan tim AMP di Kabupaten/kota dan memaksimalkan tim AMP di setiap kabupaten.
2. Kerjasama lintas Sektor dimana puskesmas mengambil dan melacak setiap kematian ibu.
3. Melakukan pembinaan dan supervisi tentang 3T (Terlambat mengambil keputusan, Terlambat mendapat penanganan dan Terlambat ke fasilitas kesehatan) dan memaksimalkan rumah tunggu kelahiran.
4. Pemberian PMT Bumil KEK, pemantauan Bumil Anemia untuk minum tablet tambah darah.
5. Peningkatan Kompetensi Bidan dalam kegawatdaruratan maternal.

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH). Realisasi kinerja indikator sasaran AKB mencapai 9/1.000KH di tahun 2018, belum mencapai target yang diharapkan sebesar 6,5/1.000KH di tahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 72,22 persen. Namun pencapaian kinerja ini pula, telah melampaui target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2018 dimana AKB mencapai 25/1.000KH.

Pencapaian AKB yang mengalami penurunan yang signifikan menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Pencapaian ini juga sangat dipengaruhi oleh sarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKB antara lain dengan Pelacakan kasus kematian maternal-perinatal, meningkatkan surveilens KIA, meningkatkan pelaksanaan kelas ibu hamil, perbaikan sistem rujukan, melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan pelatihan teknis.

Gambar Grafik 3.4 Angka Kematian Bayi Tahun 2015-2018



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua

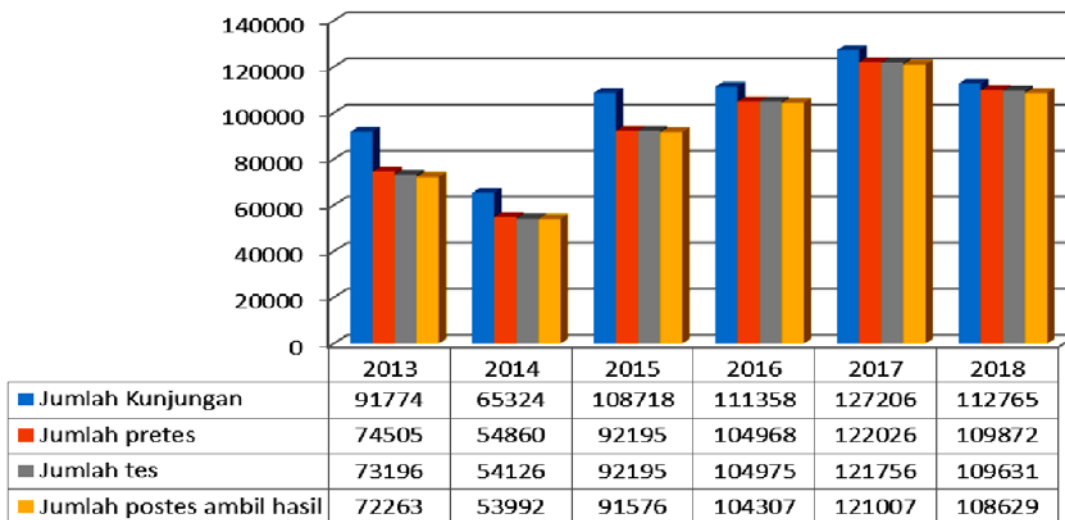
Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV. Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 100 persen, realisasinya mencapai 100 persen dengan capaian kinerja mencapai 100 persen. Ini menunjukkan indikator Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV berada dalam kriteria kinerja **berhasil** untuk tahun 2018. Terjadi kenaikan kunjungan dilayanan tes HIV dalam 5 tahun terakhir. Kesenjangan antara jumlah orang yang ikut pre tes, ikut tes sampai post tes dan ambil hasil . Hal ini menunjukkan bahwa diantara semua orang yang melakukan tes HIV, sebagian besar mengikuti post tes dan ambil hasil.

Kenaikan kinerja pada kinerja 2018 bila dibandingkan tahun 2017 dikarenakan kesenjangan antara jumlah orang yang ikut pre tes, ikut tes sampai post tes dan ambil hasil relatif sempit bahkan hampir berhimpit. Hal ini menunjukkan bahwa diantara semua orang yang melakukan tes HIV, sebagian besar mengikuti post tes dan ambil hasil.



Gambar Grafik 3.5
Hasil Konseling Tes HIV Provinsi Papua tahun 2013-2018

ANALISIS KONSELING TES HIV PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 SD TAHUN 2018

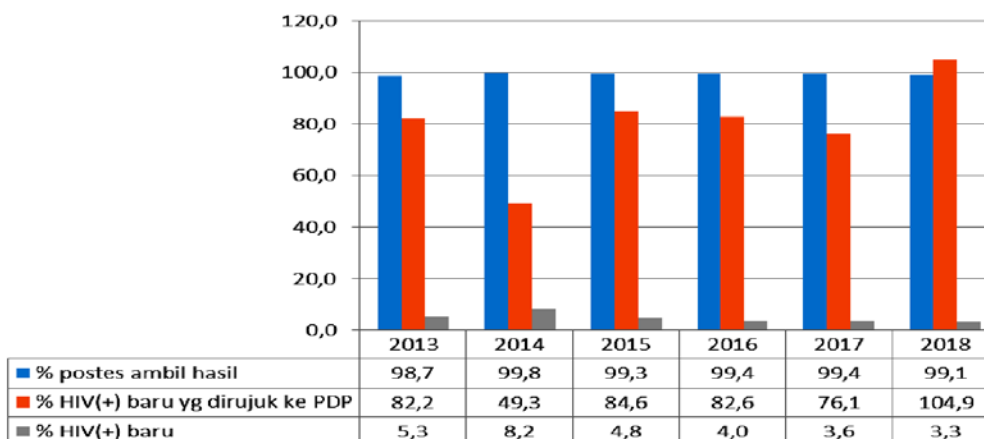


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2017

Jumlah penemuan kasus HIV(+) baru dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dibanding 1 tahun sebelumnya. Namun tidak semua pasien baru HIV (+) bisa dirujuk ke layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan, bahkan proporsinya sangat bervariasi tapi mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2018 disebabkan pasien HIV baru tahun 2017 baru dirujuk ke Layanan PDP tahun 2018. Idealnya 100% pasien baru HIV (+) harus dirujuk ke PDP untuk mendapatkan Perawatan dan Pengobatan.

Gambar Grafik 3.6
Jumlah Pasien HIV(+) baru yang dirujuk ke PDP

% KASUS BARU PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 SD TAHUN 2018

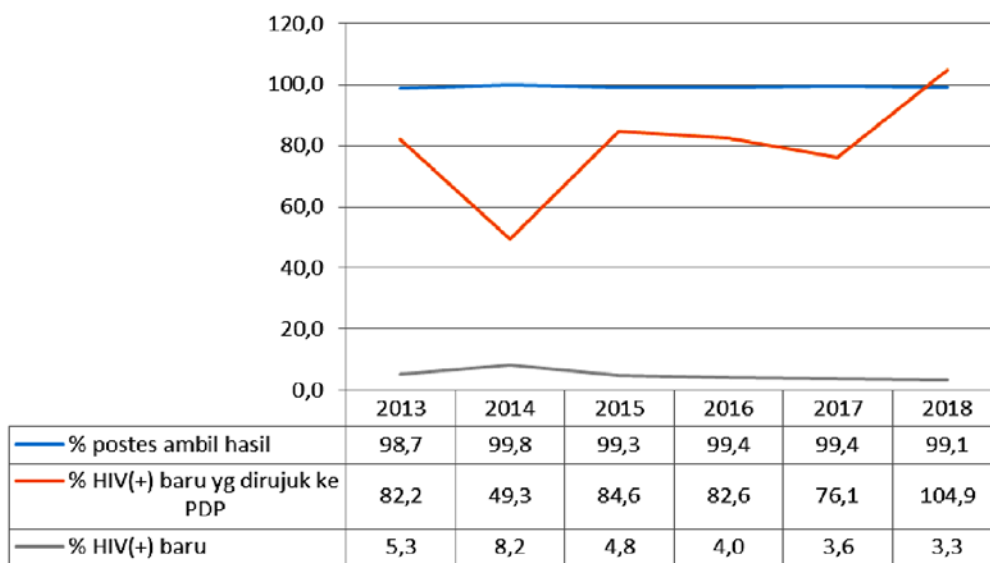


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2018



Proporsi jumlah orang yang post tes dan ambil hasil dibanding jumlah orang yang tes sudah sangat baik berkisar 99% . Proporsi pasien baru HIV (+) yang dirujuk ke PDP selama kurun waktu 2013- 2018 berkisar 49,3 % sd 104,9 %. Pada tahun 2018 rujukan pasien mencapai 104,9 %. Proporsi jumlah pasien baru HIV(+) dibandingkan jumlah orang yang di tes selama kurun waktu 2013 sd 2018 berkisar 3,3% sd 8,2 %, dimana selama 5 tahun terjadi kecenderungan proporsi yang semakin menurun dari 8,2% pada tahun 2014 menjadi 3,3% pada tahun 2018.

Gambar Grafik 3.7
% RUJUKAN KASUS HIV
PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 SD 2018



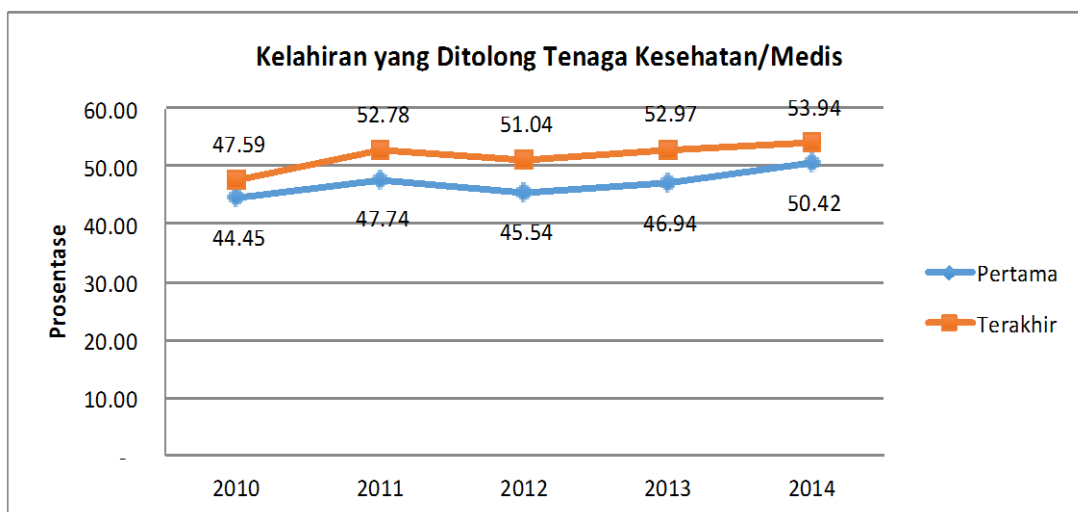
Secara kumulatif diketahui bahwa selisih antara jumlah orang yang memenuhi syarat ARV dengan jumlah orang yang pernah ARV semakin besar selisihnya, Idealnya jumlah orang yang memenuhi syarat ARV sudah syarat untuk ARV. Demikian pula selisih antara jumlah kumulatif orang yang pernah ARV dengan jumlah kumulatif orang yang sedang ARV, jumlah orang yang LFU (Lost to Follow Up) semakin bertambah besar setiap tahunnya. Kebijakan desentralisasi ARV diharapkan bisa mengurangi selisih yang terjadi baik untuk jumlah orang yang pernah dirawat di PDP dan angka LFU serta dapat semakin meningkatkan jumlah orang yang sedang ARV. Sampai tahun 2018 sudah ada 4 Kabupaten yang melaksanakan Desentralisasi ARV Kabupaten yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Mimika. Kemudian yang melaksanakan Desentralisasi ARV Provinsi yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Biak, Kabupaten Yahukimo, Kota Jayapura, Kabupaten



Paniai, dan Kabupaten Keerom. Sedang yang melaksanakan Semi Desentralisasi ARV Provinsi yaitu Kabupaten Mappi dan Kabupaten Yalimo.

Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis, dengan tingkat capaian 51 persen. Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis ditargetkan pada tahun 2018 mencapai 70 persen, realisasinya mencapai 72,86 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja kurang berhasil** untuk tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan persalinan paling banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan kompetensi keperawatan. Jadi dapat dikatakan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sudah memenuhi target dan bila tenaga kesehatan yang dimaksud harus memiliki kompetensi kebidanan maka target tidak terpenuhi. Solusi kedepan adalah tenaga kesehatan yang belum memiliki kompetensi kebidanan harus sekolah sekolah kebidanan, pelatihan kebidanan, dan perekrutan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, serta perekrutan tenaga bidan di setiap kabupaten/kota yang ditempatkan disetiap puskesmas untuk membantu persalinan.

Gambar Grafik 3.8 Kelahiran yang Ditolong Tenaga Kesehatan/Medis

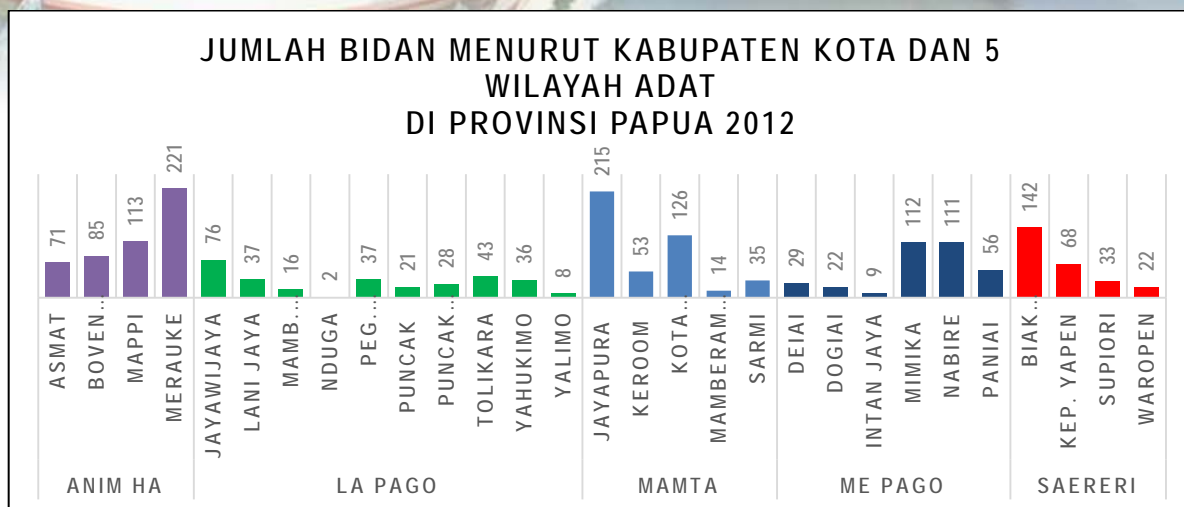


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2016

Dengan membandingkan antara bidan dan jumlah distrik maka rata-rata satu distrik akan dilayani oleh satu bidan, asumsi ini bisa dianggap mampu menjawab kebutuhan tenaga bidan apabila penyebaran bidan di setiap kabupaten merata.

Namun berdasarkan penyebaran tenaga bidan di setiap kabupaten/kota, sebagaimana grafik di bawah. Diperlukan redistribusi tenaga bidan dan tenaga kesehatan lainnya karena permasalahan yang tenaga kesehatan bukan dari kuantitas tetapi penyebaran yang tidak merata antar kabupaten/kota.

Gambar Grafik 3.9
Penyebaran Tenaga Bidan di Kabupaten/Kota



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tahun 2015

Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan.

Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan mencapai 100 persen atau 100 persen dari tari target kinerja, atau mencapai **kinerja yang sangat berhasil**. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah jumlah bayi yang gizi buruk dan gizi kurang dibagi seluruh jumlah bayi. Kondisi yang berbeda dari masing - masing wilayah maka menyebabkan keadaan kesehatan diwilayah berbeda pula. Namun hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan dalam memajukan taraf kesehatan di setiap wilayah di Provinsi Papua terbukti realisasi yang didapatkan sangat baik yaitu prevalensi kekurangan gizi pada anak balita lebih kecil dari pada yang ditargetkan.

Terdapat 2 program yang mendukung pencapaian sasaran di maksud yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Program Gizi, dengan kegiatan peningkatan surveilans Gizi dan Penguatan Intervensi Paket Gizi.

Angka Harapan Hidup. Pencapaian AHH menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik juga akan sangat mempengaruhi.

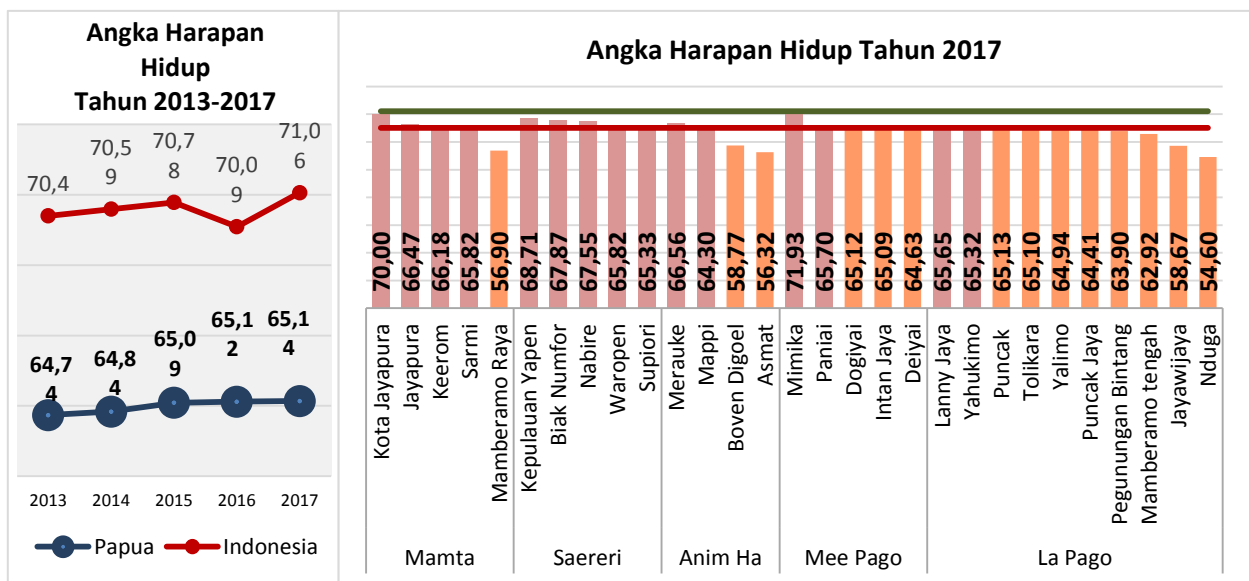


Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan, indikator penting yang perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu. Secara umum capaian AHH Provinsi Papua mengalami kecenderungan yang relatif meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai angka tertinggi di tahun 2017 sebesar 65,14 tahun, atau naik sebesar 0,4 tahun bila dibandingkan tahun 2013. Meningkatnya AHH menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua.

Angka Harapan Hidup Provinsi Papua ditargetkan pada tahun 2018 sebesar 67 tahun, realisasinya mencapai 65,1 tahun atau sebanyak 97,16 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang berhasil** untuk tahun 2018.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang kesehatan saja. AHH ini sangat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan kalori, kecukupan gizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi dan sinkronisasi antarsektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar wilayah yang masih terasa sampai saat ini.

Gambar Grafik 3.10
Angka Harapan Hidup Tahun 2013-2017 di Provinsi Papua



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2018



Rata-rata capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di 4 wilayah adat masih berada di bawah capaian AHH rata-rata Provinsi Papua. Saireri merupakan satu-satunya wilayah adat yang memiliki capaian rata-rata AHH di atas Provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan ketimpangan ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan diantara kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah dengan capaian AHH tertinggi di wilayah adat Saireri yang mencapai 68,71 tahun pada akhir tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih berada di bawah AHH Kabupaten Mimika yang mencapai 71,93 tahun hingga akhir tahun 2017. Capaian AHH Kabupaten Mimika tersebut juga berada jauh di atas rata-rata AHH Provinsi Papua. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Mimika relatif jauh lebih optimal dibandingkan dengan kabupaten / kota dalam wilayah Provinsi Papua.


Sasaran 7 : Terwujudnya Masyarakat Yang Cerdas Dan Terampil

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil**” adalah **167,68** persen atau dalam skala ordinal adalah “**Sangat Berhasil**” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 16 (enam belas) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015			2016			2017			2018			
		TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Angka Melek Huruf	%	76,00	84,84	111,63	85,00	84,84	99,81	85,00	84,84	99,81	85,00	73,89	86,93
2	Rata-Rata Lama Sekolah	%	6,90	5,76	83,48	6,00	5,99	99,83	6,00	5,99	99,83	6,00	6,33	105,5
3	APK PAUD/TK	%	12,19	10,93	84,73	10,00	37,82	378,20	20,00	52,13	260,65	55,00	52,34	95,16
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100,00	90,67	90,67	90,00	93,14	103,49	92,00	94,24	102,43	95,00	94,28	99,24
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	63,00	71,02	112,73	70,00	60,96	87,09	70,00	67,83	96,90	70,00	73,40	104,86
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	42,00	61,53	146,50	60,00	54,04	90,07	55,00	53,85	97,91	55,00	56,70	103,09
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79,00	78,36	99,19	79,00	82,69	104,67	80,00	75,85	94,81	80,00	74,80	93,50



8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	58,00	53,68	92,55	48,00	41,58	86,63	48,00	44,47	92,65	48,00	48,63	101,31
9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30,00	43,11	143,70	40,00	44,81	112,03	42,00	33,88	80,67	40,00	42,78	106,95
10	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,30	1,46	20,55	1,00	0,88	88,00	0,88	0,18	488,89	0,10	0,04	250,00
11	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,15	1,68	8,93	1,00	1,51	151,00	1,00	0,32	66,23	1,00	0,11	909,09
12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,32	1,58	17,98	1,00	1,04	104,00	1,00	0,18	555,56	0,15	0,07	214,29
13	Persentase Guru Yang Telah Bersertifikasi	%	60,00	60,00	100,00	60,00	31,00	51,67	31,00	21,23	68,48	25,00	28,31	113,24
14	Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	100,00	99,92	99,92	100,00	99,98	99,98	100,00	99,84	99,84	100,00	99,85	99,85
15	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100,00	99,98	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95	99,95	100,00	99,96	99,96
16	Persentase Angka Kelulusan SMU/SMK/MA	%	100,00	99,79	99,97	100,00	100,00	100,00	100,00	99,19	99,19	100,00	99,83	99,83
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					82,03		116,03		171,90		167,68			

Dari gambaran data di atas, secara umum persentase pencapaian sasaran kinerja dalam Empat tahun terakhir cukup menggembirakan dengan indeks rata-rata pencapaiannya berturut-turut yaitu tahun 2015 sebesar 88,2 persen (berhasil), tahun 2016 sebesar 116,03 persen (sangat berhasil), tahun 2017 sebesar 171,90 persen (sangat berhasil) dan Tahun 2018 sebesar 167,68 (sangat berhasil). Ini menunjukkan adanya pencapaian kinerja sasaran yang semakin baik dan sangat berhasil terutama kinerja sasaran dalam rangka mendorong semakin menurunnya angka putus sekolah pada tingkat SMP/MTs yang capaian targetnya sangat tinggi.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Sejalan dengan pencapaian sasaran strategis khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil di Provinsi Papua, maka ukurannya dapat dilihat antara lain melalui Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka putus sekolah, serta Persentase angka kelulusan sekolah.



Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Persentase pencapaian angka melek huruf di Provinsi Papua tahun 2018 belum ada data dari BPS sehingga menggunakan data tahun 2017 sebesar 73,89 persen. Target tahun 2018 sebesar 85,00 persen. Dengan capaian seperti itu maka persentase capaian kinerja indikator sebesar 86,93 persen.

Secara umum pencapaian kinerja angka melek huruf di Provinsi Papua dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka yang menggembirakan. Peningkatan ini terjadi disebabkan adanya kebijakan Gubernur Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua melalui kegiatan-kegiatan pusat kegiatan belajar masyarakat yang diaktifkan hingga ke kampung-kampung. Disamping itu sektor pendidikan memang merupakan salah satu prioritas terpenting yang diwujudkan dalam kepemimpinan Gubernur Papua saat ini.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2018 adalah 6,33 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah siswa SD/MI, SMP/Mts, SMU/SMK dan Mahasiswa. Target yang ditetapkan pencapaiannya pada tahun 2018 yaitu 6,00. Dengan demikian tingkat capaiannya yaitu 105,05 persen. Dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 5,99 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen. dari jumlah penduduk di Provinsi Papua usia 7 tahun ke atas.

Adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah setiap tahun menunjukkan komitmen Kepala Daerah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak Papua, pemberian beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu, meningkatkan sarana prasarana sekolah, dan pembebasan uang sekolah bagi penduduk kurang mampu.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu



jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar PAUD/TK di Provinsi Papua tahun 2018 sebesar 52,34 persen diperoleh dari jumlah siswa PAUD/TK dibandingkan dengan jumlah penduduk/anak usia PAUD yaitu 3-6 tahun. Jumlah siswa PAUD/TK adalah 150,090 sedangkan jumlah anak usia PAUD sebanyak 286.770

Angka Partisipasi Kasar SD/MI tahun 2018 adalah 94,28 persen. Angka Partisipasi Kasar SD/MI mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 94,24 persen. Angka ini diperoleh dari jumlah siswa SD/MI sebanyak 488.400. dibanding jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebanyak 460.479.

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs 73,40 persen diperoleh dari jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 134.912 dari total jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 183.800 Angka ini mengalami fluktuasi dibanding tahun - tahun sebelumnya seperti dapat dilihat pada tabel di bawah.

Angka Partisipasi Kasar SMU/SMK/MA 56,70 persen diperoleh dari jumlah siswa SMU/SMK/MA sebanyak 106.766 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA sebanyak 188.300. APK ini Dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebagaimana dalam tabel berikut.

Peningkatan atau penurunan APK ini dapat terjadi karena meningkatnya atau menurunnya jumlah siswa dengan usia yang lebih tua atau lebih muda dari standar usia masuk sekolah pada jenjang tersebut.

Di bawah ini disajikan APK SD s/d SMU di Provinsi Papua beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.31 APK SD, SMP, SMU Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua

Jenjang Sekolah	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
APK SD	90,67	93,14	94,24	94,28
APK SMP	71,02	60,96	67,83	73,40
APK SMU	52,37	54,04	53,83	56,70

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia



sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni SD/MI di Provinsi Papua tahun 2018 adalah 74,80 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 7–12 tahun di tingkat SD/MI sebanyak 365.307 anak dibanding jumlah penduduk usia sekolah SD/MI sebanyak 488.400 anak.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs 48,63 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 13-15 tahun di tingkat SMP/MTs sebanyak 89.379 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 183.800. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang hanya mencapai 44,47 persen.

Angka Partisipasi Murni SMU/SMK/MI 42,78 persen diperoleh dari jumlah siswa usia 16-18 tahun di tingkat SMU/SMK/MA sebanyak 80.547 dibanding total jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA sebanyak 188.300. APM SMU tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 33,88 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Papua dari tahun ke tahun disajikan pada tabel di bawah ini:

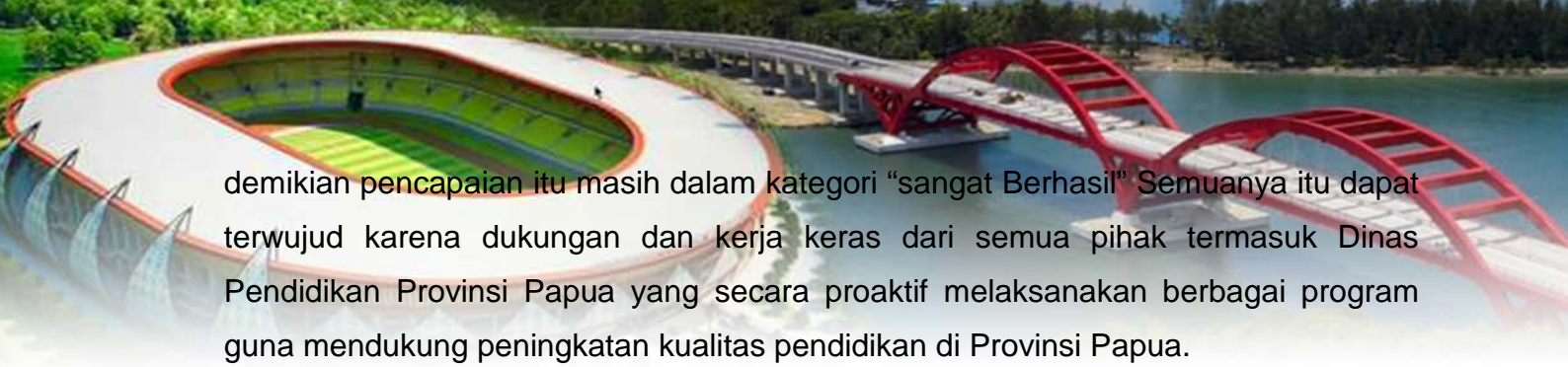
Tabel 3.32 APM SD, SMP, SMU Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua

Jenjang Sekolah	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
APM SD	72,90	78,36	82,69	75,85
APM SMP	45,88	53,68	41,58	44,47
APM SMU	36,53	43,11	44,81	33,88

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Peningkatan persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Papua terjadi karena semakin ketatnya persyaratan masuk sekolah sesuai usia pada jenjang sekolah yang bersangkutan.

Dari 16 (enam belas) Indikator sasaran pada indikator kinerja utama (IKU) Provinsi Papua rata-rata capaian kinerjanya termasuk dalam kategori berhasil dan sebagian lagi masuk dalam kategori sangat berhasil. Namun secara umum pencapaian sasaran kinerjanya adalah 167,68 persen atau kategori “**sangat berhasil**”. Dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2017 sebesar 172,55 persen maka telah mengalami sedikit penurunan sebesar 4,87 persen. Namun



demikian pencapaian itu masih dalam kategori “sangat Berhasil” Semuanya itu dapat terwujud karena dukungan dan kerja keras dari semua pihak termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Papua yang secara proaktif melaksanakan berbagai program guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Namun demikian disadari pula bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua lebih baik setiap tahunnya sangatlah besar antara lain ketersediaan guru-guru di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas masih kurang dibandingkan luas wilayah di Provinsi Papua, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif terbatas, tingkat kemahalan relatif sangat tinggi dan masih banyak lagi hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap proses peningkatan pendidikan di Provinsi Papua.

Sasaran 8 : Meningkatnya Prestasi Olahraga

Peran olahraga sangat penting dan strategis dalam kehidupan era global yang penuh perubahan, persaingan dan kompleksitas, olahraga dianggap vital terutama menyangkut pembentukan watak dan kepribadian hingga karakter anak bangsa, sebab olahraga merupakan sarana yang efektif dan efisien dalam meningkatkan disiplin, sikap sportif, jujur, tanggung jawab, kreativitas, kerjasama dan daya inovasi, serta dapat mengembangkan kecerdasan. Olahraga dapat dilakukan sebagai latihan, pendidikan, hiburan, rekreasi, prestasi profesi, politik, bisnis, industri dan berbagai aspek lain dalam kebudayaan manusia. Karena itu, olahraga sangat penting dilaksanakan dan diselenggarakan dengan baik sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua di mata dunia. Olahraga mengandung potensi positif guna membina satu individu sebagai sumber daya manusia pendukung pembangunan bangsa, sehingga pada tahun 1981 Indonesia telah mencanangkan gerakan "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat" yang dikenal dengan nama panji olahraga.

Sasaran Meningkatnya Prestasi Olahraga merupakan sasaran untuk mencapai tujuan misi 2 yaitu **Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus**. Dalam sasaran ini diukur dengan pencapaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu Persentase atlet/klub olahraga yang menerima penghargaan tingkat nasional, secara keseluruhan rata-rata




capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Prestasi Olahraga” adalah 121,72 persen atau dalam skala ordinal adalah ”Sangat Berhasil” dengan target sebesar 50.00 persen dan realisasi sebesar 60,86 persen, pencapaian kinerja tahun 2018 sebanyak 121.72 persen. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persen	17.00	24.87	146.29	25.00	74.29	294.16	30,00	56.52	188.04	50,00	60.86	121.72
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				146.29		294.16		188.04		121.72				

Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Prestasi Olahraga” merupakan Sasaran untuk mencapai tujuan Misi 3 yaitu Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia. Dalam Sasaran ini diukur dengan pencapaian 1 (Satu) Indikator Sasaran yaitu Persentase Atlet/Klub Olahraga yang menerima penghargaan di Tingkat Nasional, secara keseluruhan rata-rata Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Prestasi Olahraga” adalah 121.72 persen atau dalam Skala Ordinal adalah “Sangat Berhasil” dengan Target Indikator sebesar 50.00 persen dengan realisasi sebesar 60.86 persen dan capaian kinerja 2018 adalah 121.72 persen dibanding tahun 2017 yang capaian kinerja nya lebih yaitu sebesar 188.04 persen termasuk di banding dengan capaian kinerja 2016 sebesar 146.29 persen. Tahun 2016 dan 2017 capaian kinerja nya lebih dikarenakan bersamaan dengan pelaksanaan PON XIX di Jawa Barat dimana Pemerintah Provinsi Papua telah jauh hari mempersiapkan kualitas Pelatih dan Atlet dalam rangka untuk meningkatkan Prestasi Olahraga dalam ajang Pekan Olah Raga Nasional XIX (PON) 2016 di Jawa Barat yang lalu.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua didalam Program Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga secara khusus dalam bentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) dimana cabang Olahraga yang dibina sebanyak 13 Cabang Olahraga terdiri dari 4 cabang Olahraga : Atletik, Sepak Bola, Dayung, dan Bola Volly dengan siswa sebanyak 68 orang dibiayai melalui APBN dan 9 cabang Olahraga : Tinju, Judo, Renang, Pencak



Silat, Tae Kwon Do, Karate, Bola Basket, Gulat dan Angkat Besi dengan jumlah siswa sebanyak 64 orang, sehingga seluruh siswa dari 13 Cabang Olahraga (Cabor) sebanyak 132 orang dengan Pelatih sebanyak 15 Orang dan Asisten Pelatih sebanyak 16 orang.

Perkembangan prestasi hasil pembinaan dan pengembangan prestasi melalui 13 Cabang Olahraga (Cabor) yang ada di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) Papua selama Tahun Anggaran (TA) 2018 dapat dilihat dari hasil prestasi pada Kejuaraan Nasional antar PPLP, maupun Kejuaraan Nasional Cabang Olahraga yang telah diikuti sebagai berikut :

Tabel 3.34 Jenis Kejuaraan dan Cabang Olahraga Tahun 2018

No	JENIS KEJUARAAN DAN CABANG OLAHRAGA	JUMLAH SISWA	MEDALI YANG DIPEROLEH			
			EMAS	PERAK	PERUNGGU	JUMLAH
KEJURNAS						
1	Tinju	10 Orang	2	1	1	4
2	Judo	5 Orang	-	1	1	2
3	Renang	5 Orang	-	2	1	3
4	Karate	5 Orang	1	-	2	3
5	Tae Kwon Do	5 Orang	-	1	-	1
6	Pencak Silat	10 Orang	1	2	1	4
7	Bola Basket (Putri)	10 Orang	1	-	-	1
8	Gulat	5 Orang	-	-	-	-
9	Angkat Besi	5 Orang	-	1	-	-
10	Atletik	24 Orang	3	1	-	4
11	Sepak Bola	22 Orang	-	2	-	2
12	Dayung	10 Orang	1	1	1	3
13	Tenis Lapangan	0 Orang	-	-	-	-
14	Bola Volley (Putri)	0 Orang	-	-	-	-
15	Bola Volley Pasir	0 Orang	-	-	-	-
Jumlah		116 Orang	7	12	10	29
Sumber data : LKj Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Prov. Papua - Tahun 2018						

Adapun perkembangan Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya Prestasi Olahraga” dalam kurun waktu 2015-2017 adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.35 Perkembangan Atlet dan Club Olahraga Tahun 2015-2018 di Provinsi Papua

Indikator Kinerja	Tahun				Program Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Tahun 2018	Kendala dan Upaya Menghadapi
	2015	2016	2017	2018		
Persentase Atlet / Klub Olahraga Yang Menerima Penghargaan Tingkat Nasional						
Jumlah Atlet yang menerima penghargaan di tingkat nasional	30	57	40	35	Program : Pembinaan dan Pemasyarakatan - Kegiatan : Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat dengan Anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- - Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp. 3.587.060.000,- Program : Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga - Kegiatan : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kompetisi/Pekan Olahraga/kejuaraan Olahraga dengan Anggaran sebesar Rp. 1,474,597.000,-	Kendala yang dihadapi : - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) Papua belum memiliki Asrama yang representatif untuk kenyamanan tinggal siswa - PPLP Papua sampai saat ini belum memiliki sarana dan prasarana latihan yang memadai Upaya menghadapinya adalah dengan memanfaatkan asrama yg secara maksimal dengan sarana prasarana yang ada serta meminjam dan menyewa
Jumlah Atlet yang dibina	255	260	407	136		
Jumlah Klub Olahraga yang menerima penghargaan Tingkat Nasional	10	19	13	14		
Jumlah Klub Olahraga yang dibina	19	21	23	23		
<i>Sumber data : LKj Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Prov. Papua -Tahun 2018</i>						

Gubernur Papua : PON 2020 Para Atlet Harus Berpartisipasi



"Saya tidak ingin kejadian pada PON XIX di Jawa Barat terulang, yang mana kita terpaksa menyewa atlet untuk mewakili Papua," sampainya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe – Jubi / Agus Pabika Pemerintah Provinsi Papua kedepan nya untuk Sasaran

Stategis “Meningkatnya Prestasi Olahraga” maka saat ini sedang mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2019 dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX akan berlangsung di Provinsi Papua pada Tahun 2020.



Pemerintah Provinsi Papua memastikan penghapusan program Gerbangmas dan Prospek, untuk selanjutnya fokus pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.

Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, penghapusan dua program kerja itu dikarenakan hasil evaluasinya yang selama dijalankan, dinilai tak berhasil. Dilain pihak, seluruh kampung di Papua telah mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat.

“Tapi yang utama sebenarnya APBD 2019 provinsi ini lebih fokus pada kesiapan penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua. Sehingga dengan begitu kita harap PON bisa sukses,” terang Gubernur Lukas Enembe, usai bertemu Kepala Perwakilan BPK RI Papua, Kamis, (21/3/2019).

Ada 38 Cabang Olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang PON XX, diantaranya :

Tabel 3.36 Cabang Olahraga dan Venue PON XX Papua Tahun 2020

NO	CABANG OLAHRAGA	CLUSTER	VENUE
Aerosport			
1	1 Aeromodeling	Biak	TNI AU Manahua
	2 Gantole	Merauke	Bandara Mopah
	3 Paralayang	Jayawijaya	Distrik Kurulu
	4 Terbang Layang	Biak	TNI AU Manahua
	5 Terjun Payung	Biak	TNI AU Manahua
Akuatik			
2	6 Loncat Indah	Kab. Jayapura	Arena Aquatic Kampung Harapan
	7 Renang	Kab. Jayapura	Arena Aquatic Kampung Harapan
	8 Renang Perairan Terbuka	Kota Jayapura	Pantai Hamadi
	9 Renang Indah	Kab. Jayapura	Arena Aquatic Kampung Harapan
	10 Polo Air	Kab. Jayapura	Arena Aquatic Kampung Harapan
3	11 Anggar	Kota Jayapura	Gor, Otonom Kotaraja
Angkat Besi / Angkat Berat / Binaraga			
4	12 Angkat Besi	Kab. Jayapura	Gor Rindam
	13 Angkat Berat	Kab. Jayapura	Gor Rindam
	14 Bina Raga		
5	15 Atletik	Mimika	Stadion Atletik, Mimika Sport Complex (MSC)
Balap Sepeda			
6	16 MTB	Kab. Jayapura	Arena MTB
	17 Road Race	Kab & Kota Jayapura	Kampung Harapan-Perbatasan RI-PNG
	18 Track	Kab. Jayapura	Kampung Harapan
Baseball /Softball			
7	19 Baseball	Kab. Jayapura	Lapangan Baseball
	20 Softball	Kab. Jayapura	Lapangan Softball
8	21 Biliar	Kota Jayapura	Aula PTC

9	Bola Basket			
	2 2	Bola Basket 5x5	Mimika	Get. Bola Basket, MSC
	2 3	Bola Basket 3x3	Mimika	Get. Bola Basket, MSC
10	Bola Voli			
	2 4	Voli Indoor	Kota Jayapura	Gor Volley, Sky Lane
	2 5	Voli Pasir	Kota Jayapura	Arena GOR Volley, Sky Lane
11	2 6	Bowling	Kota Jayapura	Arena Bowling, Jl. SAM Ratulangi
12	2 7	Bridge	Kota Jayapura	Hotel Fave
13	2 8	Bulutangkis	Kota Jayapura	GOR Waringin
14	2 9	Catur	Jayawijaya	Hotel
15	3 0	Cricket	Kab. Jayapura	Arena Cricket, Doyo
16	Dayung			
	31	Canoe	Kab. Jayapura	Danau Sentani
	32	Rowing	Kab. Jayapura	Danau Sentani
	33	TBR	Kab. Jayapura	Danau Sentani
17	34	Golf	Mimika	Rimba Golf Kuala Kencana
18	35	Gulat	Kota Jayapura	Aula BAPELKES
19	Hockey			
	36	Field Hockey	Kab. Jayapura	Lapangan Hockey Distrik Doyo Lama
	37	Indoor Hockey	Kab. Jayapura	Lapangan Hockey Distrik Doyo Lama
20	38	Judo	Kota Jayapura	GOR Sekolah Guru Olahraga (SGO)
21	39	Karate	Merauke	GOR Merauke
22	40	Kempo	Biak	GOR Biak
23	41	Layar	Kota Jayapura	Pantai Hamadi
24	42	Menembak	Kab. Jayapura	Arena Menembak, Doyo Lama
25	43	Panahan	Kab. Jayapura	Arena Panahan
26	44	Panjat Tebing	Kota Jayapura	
27	45	Pencak Silat	Kab. Jayapura	GOR Toware
28	46	Selam		
		Selam Kolam	Kab. Jayapura	Arena Aquatik Kampung Harapan
		Selam Laut	Kota Jayapura	Pantai Hamadi
29	Senam			
	47	Senam Artistik	Kab. Jayapura	Istora Papua
	48	Senam Ritmik	Kab. Jayapura	Istora Papua
	49	Senam Aerobik	Kab. Jayapura	Istora Papua
30	Sepak Bola & Futsal			
	50	Sepak Bola	Kab. Jayapura (Semi Final, Final) Kota Jayapura (Semifinal) Jayawijaya (Penyisihan) Mimika (Penyisihan) Merauke (Penyisihan) Biak (Penyisihan)	Stadion Utama Papua Bangkit (Semifinal, Final) Stadion Mandala (Semifinal) Stadion Pendidikan Wamena (Penyisihan) Stadion Mimika (Penyisihan) Stadion Katalpal (Penyisihan) Stadion Cenderawasih (Penyisihan)
	51	Futsal	Mimika	GOR Mimika



31	52	Sepak takraw	Kota Jayapura	GOR Trikora Uncen
32	53	Sepatu Roda	Kota Jayapura	Arena Sepatu Roda
33	54	SKI Air	Kab. Jayapura	Danau Sentani
34	55	Taekwondo	Merauke	GOR Merauke
35	56	Tenis	Kota Jayapura	Lap. Tennis Kompleks Walikota
36	57	Tenis Meja	Kota Jayapura	GOR Otonom Kotaraja
37	58	Tinju	Kota Jayapura	GOR Cenderawasih
38	59	Wushu	Kab. Jayapura	GOR Rindam
Sumber : Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Prov.Papua				

Sasaran 9 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Tujuan **Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika dicapai melalui** Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Papua yang telah dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua sejak Tahun 2013-2018, prioritas yang diutamakan adalah peningkatan wirausaha muda asli Papua melalui sasaran **“Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan”**, dengan capaian kinerja 600 persen dengan predikat **“ Sangat Berhasil.”**

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan regulasi terkait keberpihakan kepada masyarakat adat yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua, penetapan Perdasus Nomor 18 Tahun 2008 tentang Ekonomi Berbasis Masyarakat. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Khusus di Papua dan Papua Barat untuk memberdayakan dan melindungi pengusaha asli Papua.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di yaitu memberikan bantuan berupa stimulan kepada Pengusaha Adat Pengusaha Papua (KAPP), membuka akses kemudahan bagi Wira usaha muda asli Papua untuk bersaing bersama pelaku usaha lainnya.

Pada Tahun 2018 jumlah Wira usaha muda asli Papua berjumlah 25 kelompok yang yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua tersebar di beberapa Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 3.37 Jumlah Kelompok Wirausaha Muda Asli Papua

No	Kabupaten	Jumlah kelompok	Keterangan
1	2	3	4
1	Yalimo	2	Bimtek
2	Lani Jaya	2	Bimtek
3	Sarmi	3	Bimtek
4	Jayapura	8	Bimtek
5	Deiyai	5	Bimtek
6	Waropen	1	Bimtek
7	Kepulauan Yapen	1	Bimtek
8	Keerom	1	Bimtek
9	Dogiyai	2	Bimtek
JUMLAH		25	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator peningkatan wirausaha muda asli Papua dengan target 25.00 persen sesuai perjanjian Kinerja Gubernur Papua Tahun 2018 dengan target dengan realisasi 150 persen. Bila dibanding tahun 2017 persentase capaian kinerja 2018 meningkat 287 persen, begitu pula dengan capaian kinerja 2017 meningkat 216.13 persen dari capaian kinerja 2016, berdasarkan capaian kinerja tersebut menunjukkan ada peningkatan Wirausaha Muda Papua dalam dua tahun terakhir dibanding Tahun 2016.

Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.38 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Peningkatan Wirausaha Muda Asli Papua	Persen	7,00	7,71	110,18	8,00	7,71	96,37	8,00	25,00	312,5	25,00	150	600
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				110,18		96,37		312,50		600				



Berdasarkan data tersebut nampak adanya trend peningkatan Wirausaha muda Asli Papua Tahun 2018 yang signifikan namun untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan :

1. Mempermudah izin usaha bagi pelaku usaha Muda Papua
2. Adanya regulasi dari Pemerintah Daerah yang memproteksi pelaku Usaha muda Papua
3. Secara kelembagaan Pemerintah Daerah perlu menyiapkan wadah atau lembaga khusus untuk mewadahi pelaku wirausaha disektor industri dan perdagangan.
4. Wirausaha Papua Perlu Penguatan Manajerial dan kemudahan dalam mendapatkan kredit modal usaha.
5. Menghilangkan stigma orang asli Papua yang malas, tidak mampu, dan tak bisa mengelola uang telah lama menjadi perhatian perbankan
6. Pemerintah perlu membuat pemetan kawasan khusus industri dan perdagangan.
7. Pemerintah atau lembaga lainnya perlu melakukan sosialisasi/seminar pengembangan dan penguatan Wira Usaha Muda Papua.

Namun usaha Pemerintah Daerah tersebut perlu mendapat respon positif dari Wira Usaha Muda Papua, karena pembangunan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Hal ini menjadi tantangan karena dewasa ini untuk menjadi seorang wiraswasta memerlukan bakat, pembelajaran, kesabaran dan tantangan, karena faktor kurangnya modal, minat, belum terbukanya akses geografis alam untuk mendistribusikan atau memasok hasil ke pasar, faktor keamanan serta regulasi yang tidak memihak wirausaha Muda Papua menyebabkan kendala dalam pengembangan usaha wira usaha Muda Papua, hal ini menjadi tantangan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait untuk membangun koordinasi dan membuka akses bagi pengembangan Wira Usaha Muda Papua.

Sasaran 10 : Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif

Terciptanya iklim investasi yang kondusif membuat para penanam modal/investor tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi, dan hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Semakin banyak investor atau perusahaan yang menanamkan modalnya akan berdampak positif terhadap pendapatan pajak Pemerintah Daerah/PAD pelaku usaha memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama mempunyai pola kemitraan. Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan peraturan-peraturan daerah (regulasi) yang dengan secara jelas mengatur mengenai perijinan bagi investor sehingga tidak terjadi berbagai biaya tidak resmi (pungutan liar) dengan dalih adanya pelanggaran perda, perizinan atau alasan birokratik lainnya yang dianggap merepotkan karena dapat menyebabkan daya tarik para investor baik dari dalam maupun investor asing menurun dalam berinvestasi, Pemerintah Provinsi Papua menciptakan iklim usaha yang bersahabat dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Capaian kinerja sasaran “**terwujudnya iklim investasi yang kondusif**” adalah 0 persen, predikat “**Tidak Berhasil**”. Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun dan Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun.

Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN Dari Tahun Ke Tahun	Persen	80,00	143,76	179,71	85,00	47,24	55,58	85,00	36,98	43,50	43,50	0	0
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA Dari Tahun Ke Tahun	Persen	60,00	60,31	100,52	60,00	28,26	47,10	60,00	1,33	2,21	2,21	0	0
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					140.115			51.34			22,86			



Capaian kinerja sasaran “**terwujudnya iklim investasi yang kondusif**” adalah sebanyak 0 persen. Dengan predikat “**Tidak Berhasil**” tidak tercapainya target kinerja dari 2 (dua) indikator sebagai alat ukur untuk mencapai sasaran “terwujudnya iklim investasi yang kondusif” disebabkan :

1. Data realisasi nilai investasi diperoleh berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan PMA dan PMDN. pada tahun 2018, perusahaan yang menyampaikan LKPM hanya sebanyak 9 (Sembilan) perusahaan PMDN sangat berpengaruh terhadap naik atau turunnya realisasi nilai investasi baik PMA maupun PMDN.
2. Rendahnya jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM disebabkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan secara optimal.
3. Ruang lingkup pengendalian pelaksanaan modal (Peraturan BKPM No. 7/2018) mencakup kegiatan :

- a. Pemantauan

Pemantauan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM berjalan sesuai harapan yang disebabkan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanaman modal tidak berjalan secara optimal.

- b. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

- Bimbingan Sosialisasi

Bimbingan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan “Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha” yang dilaksanakan di Jayapura dan tidak semua perusahaan PMA dan PMDN hadir dalam kegiatan tersebut.

- Dialog Investasi

Dialog investasi dilaksanakan melalui kegiatan “Temu Usaha dan Dialog Investasi” yang dilaksanakan di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan untuk menjangring permasalahan yang dihadapi penanaman modal, tidak semua perusahaan PMA dan PMDN hadir dalam kegiatan tersebut.



c. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilakukan dalam upaya evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek perusahaan PMA dan PMDN hanya dapat dilakukan di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mimika yang seharusnya di 29 (dua puluh Sembilan) kabupaten/kota se Papua.

Sasaran **Terwujudnya iklim investasi yang kondusif** adalah sasaran dalam mencapai tujuan misi 4 yaitu Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal. Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**Terwujudnya iklim investasi yang kondusif**” sebesar 0 persen dengan predikat “**tidak berhasil**”.

TABEL 3.40
Realisasi Investasi Perusahaan PMDN Selama 4 (Empat) Tahun

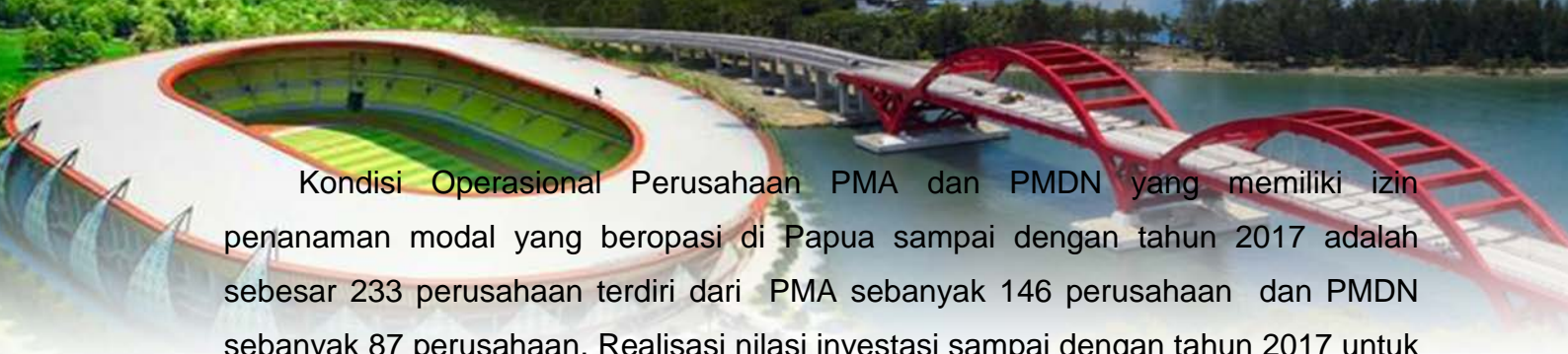
TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	REALIASAI INVESTASI*)
2015	78	46.650.707
2016	84	59.483.954
2017	87	81.479.947
2018		0

*) Nilai investasi dalam US\$. Ribu
Sumber Data : DPM & PTSP Provinsi Papua

TABEL 3.41
**Rencana Dan Realisasi Investasi Perusahaan PMA
Selama 4 (Empat) Tahun**

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	REALIASAI INVESTASI*)
2015	122	47.393.679
2016	125	70.378.818
2017	146	71.314.128
2018		0

*) Nilai investasi dalam US\$. Juta
Sumber Data : DPM & PTSP Provinsi Papua

An aerial photograph of a large, modern stadium with a distinctive red, curved roof structure. The stadium is situated on a grassy area next to a body of water. A red bridge with a curved design spans across the water, connecting the stadium area to the opposite shore. The surrounding area is lush with greenery and trees.

Kondisi Operasional Perusahaan PMA dan PMDN yang memiliki izin penanaman modal yang beroperasi di Papua sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar 233 perusahaan terdiri dari PMA sebanyak 146 perusahaan dan PMDN sebanyak 87 perusahaan. Realisasi nilai investasi sampai dengan tahun 2017 untuk perusahaan PMA sebesar US\$.71.314.128 dan PMDN Rp. 81.479.947.000.000,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan kegiatan penanaman modal dari tahun sebelumnya.

Sasaran 11 : Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Papua salah satunya diprioritaskan pada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan yang dilakukan dengan sasaran meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kapasitas dan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”** adalah **81,55** persen atau dalam skala ordinal adalah **”Berhasil”**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (lima) Indikator Kinerja yaitu Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas), Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah, dan Persentase peningkatan Usaha Kecil Menengah sebagaimana terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.42 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11

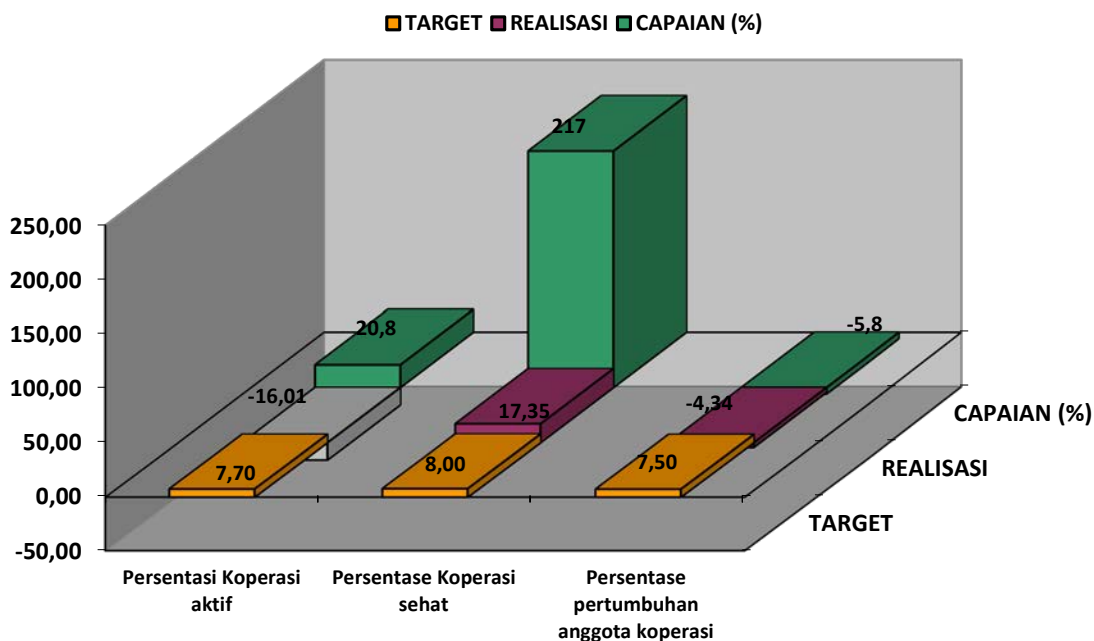
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Jumlah Koperasi Sehat (Berkualitas)	Persen	20,00	10,47	51,20	11,00	4,73	43,00	11,00	12,24	111,27	13,00	17,35	133,46
2	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil Menengah	Persen	20,00	18,75	93,75	19,00	18,00	94,73	19,00	33,33	175,42	35,00	5,00	14,28
3	Persentase Peningkatan Usaha Kecil Menengah	Persen	10,00	24,51	245,10	25,00	37,70	150,80	38,00	153,04	510,13	100,00	96,92	96,92
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					130,02			96,18			265,94			81,55

Indikator **Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)** ditargetkan sebesar **13.00 persen** dengan realisasi sebesar **17.35 persen** dengan capaian kinerja sebanyak **133.46 persen**. Nilai Capaian Kinerja ini menunjukkan kategori **“Sangat Berhasil”**. Hal yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah penataan ulang koperasi Aktif oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor

114/KEP/M.KUMKM.2/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 Perihal Pembubaran Koperasi tidak aktif di seluruh Indonesia termasuk Papua maka diadakan penataan ulang pendataan koperasi agar diperoleh data koperasi yang lebih akurat. Instruksi Menteri ini baru dilaksanakan di Papua khususnya Kab/Kota pada Tahun 2018 mengingat anggaran yang tidak tersedia ditahun sebelumnya untuk melaksanakan Instruksi tersebut.

Dengan adanya penataan ulang koperasi aktif dan sehat maka akan berdampak kepada meningkatnya koperasi yang sehat dan berkualitas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi sehingga terjadi peningkatan jumlah koperasi yang aktif.

Gambar Grafik 3.11
Realisasi sasaran meningkatnya kualitas koperasi sehat dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Tahun 2018



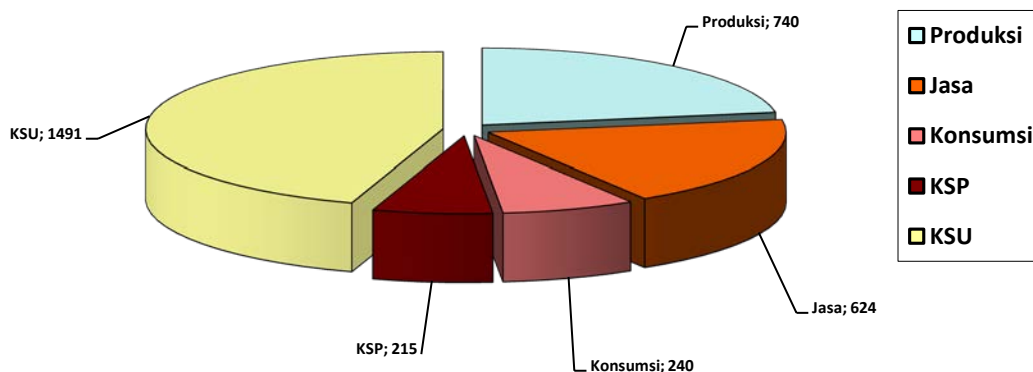
Indikator Persentase Koperasi aktif yaitu bertambahnya komposisi koperasi aktif dari total koperasi atas berkurangnya jumlah koperasi yang tidak aktif dari total koperasi. Sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki kantor koperasi.
2. Kegiatan koperasi masih berjalan.
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan.

Jumlah koperasi yang ada di Provinsi Papua pada tahun 2018 adalah 3.310 koperasi, yang terdiri dari beberapa jenis koperasi yang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar Grafik 3.12
Persentase Jenis Koperasi di Provinsi Papua



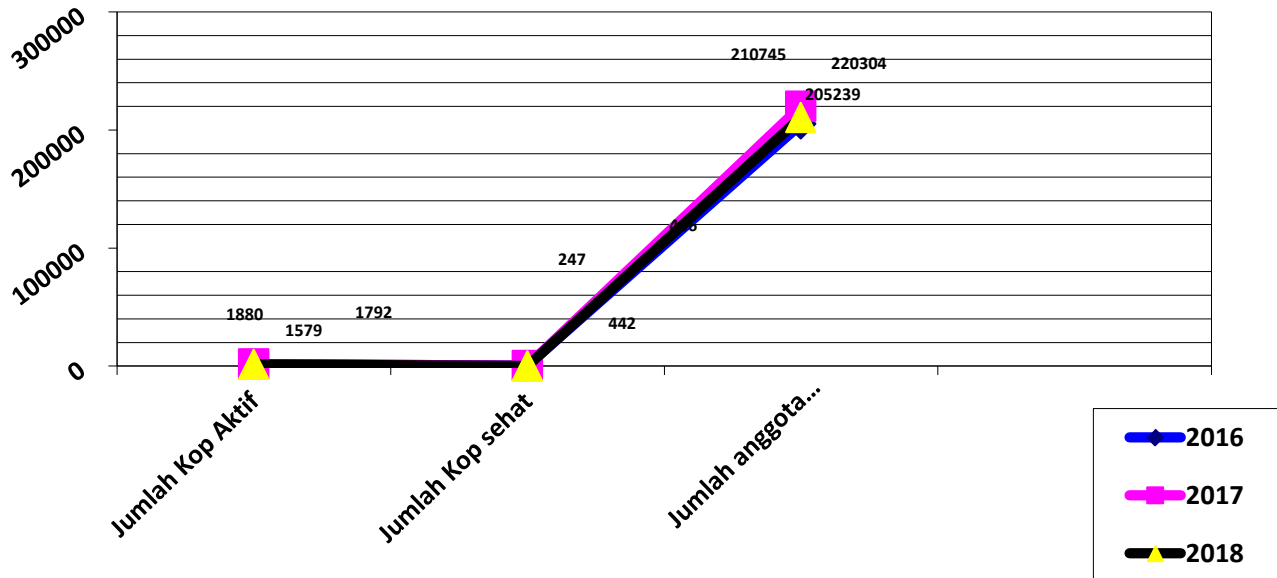
Gambar 1.3 Persentase Jenis Koperasi di Provinsi Papua

Indikator Persentase Jumlah Anggota Koperasi yaitu bertambahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi setiap tahun dimana partisipasi anggota juga sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Apalagi anggota koperasi merupakan pemilik (*owner*) sekaligus sebagai pengguna / pelanggan (*user*) koperasi. Artinya bahwa usaha koperasi memang ditujukan terutama untuk melayani kebutuhan anggota. Persentase pertumbuhan anggota koperasi Tahun 2018 ditargetkan 7.50% dari tahun sebelumnya. Pada akhir tahun ini, Persentase pertumbuhan anggota koperasi aktif turun sebesar -4.34% sehingga capaian realisasinya mencapai -5.8% dari target yang ditetapkan. Dimana pada tahun 2018 jumlah anggota koperasi mencapai 210.745 anggota koperasi dari sebelumnya tahun 2017 yang mencapai 220.304 anggota koperasi.

Indikator Persentase Koperasi Sehat (aktif dan Melaksanakan RAT) yaitu bertambahnya komposisi koperasi sehat (aktif dan Melaksanakan RAT). Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2018 sebanyak 274 unit koperasi sementara tahun 2017 sebanyak 406 Unit koperasi yang RAT.

Gambar Grafik 3.13
Data Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas koperasi sehat dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi

DATA KINERJA



Gambar 1.4 Data Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas koperasi sehat dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi

Dari kondisi diatas terlihat pada tahun 2018 indikator sasaran ke -1 dan 3 mengalami penurunan sehingga tidak mencapai target , sementara pada indikator No. 2 hasil yang dicapai melebihi target yang ada. Dari penjelasan yang ada hal ini kenyataannya masih terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan koperasi di Provinsi Papua diantaranya sebagai berikut :

1. Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi
2. Masih banyak koperasi aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azas sebuah organisasi koperasi
3. Masih kurangnya akses permodalan bagi koperasi
4. Masih banyak data yang sampai pembuatan laporan ini dibuat belum masuk atau disampaikan oleh Kab/kota ke Provinsi.
5. Tenaga SDM pembina dan pendamping Koperasi di daerah sangat kurang untuk mendampingi Koperasi-koperasi yang ada di Kab/kota karena banyak yang sudah dimutasikan ke instansi lain sehingga pembinaan kepada koperasi kurang optimal.
6. Belum semua koperasi melakukan RAT Tahun 2018 saat pembuatan laporan ini dibuat jadi data yang dipakai masih data sementara



Dalam rangka pencapaian target pada 3(tiga) indikator diatas didukung dengan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 283.300.100 terealisasi sebesar Rp. 283.166.100 atau 99.95%, dengan target kinerja jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan akan di usulkan untuk mendapatkan koperasi berprestasi sebanyak 35 Koperasi dan terealisasi sebanyak 35 Koperasi atau 100%
2. Identifikasi Keragaan Koperasi
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 406.773.223 terealisasi sebesar Rp. 406.592.723 atau 99.96%, dengan target kinerja jumlah koperasi yang diidentifikasi jenis usaha koperasi sebanyak 150 koperasi dan terealisasi sebanyak 126 Koperasi atau 84.1%
3. Monitoring Pengawasan Koperasi Pelaksana RAT
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 283.499.900 terealisasi sebesar Rp. 283.452.200 atau 99.98%, dengan target kinerja jumlah pengawasan koperasi terhadap koperasi yang RAT sebanyak 79 Koperasi dan terealisasi sebanyak 86 Koperasi atau 109%
4. Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penilaian Kesehatan KSP/USP
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 339.846.120 terealisasi sebesar Rp. 339.778.420 atau 99.98%, dengan target kinerja jumlah KSP/USP yang dibina, dipantau, diawasi dan diberikan penilaian kesehatan sebanyak 60 KSP/USP dan tereliasasi sebanyak 60 KSP/USP atau 100%
5. Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 383.200.000 terealisasi sebesar Rp. 382.544.000 atau 99.83%, dengan target kinerja jumlah anggota koperasi yang mendapatkan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian sebanyak 80 Orang dan terealisasi sebanyak 80 Orang atau 100%.



Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah dengan Target 35,00 persen, terealisasi 5.00 persen dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 14.28 persen, nilai capaian kinerja ini termasuk dalam kategori “Tidak Berhasil”.

1. Ketidakberhasilan capaian kinerja Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah disebabkan :
 - 1) Sebagian besar pengusaha industri kecil dan menengah masih sangat sulit untuk memperoleh kesempatan pinjaman modal usaha, terbentur pada persyaratan teknis perbankan yang tidak dapat dipenuhi oleh para pengusaha, khususnya industri kecil dan kerajinan;
 - 2) Jiwa kewirausahaan masih sangat rendah menyebabkan ketergantungan yang besar kepada bantuan pemerintah;
 - 3) Sebagian besar usaha industri kecil dan kerajinan masih dikelola secara tradisional dengan tingkat produktivitas yang rendah;
 - 4) Sebagaimana bahan baku dan penolong untuk proses kegiatan industri tidak tersedia di pasaran lokal, sehingga harus didatangkan dari luar daerah, hal ini dapat mengganggu kelancaran produksi;
 - 5) Persebaran industri terutama industri kecil yang tersebar luas, dengan medan yang berat sedangkan transportasi masih sulit dan mahal, menyebabkan pembinaan belum dapat dilaksanakan secara optimal;
 - 6) Sarana prasarana transportasi dan komunikasi masih terbatas menyebabkan high cost dan akibatnya produk industri kecil dipedesaan sulit menghadapi persaingan.
 - 7) Sarana dan prasarana pada UPTD Balai pengujian dan sertifikasi mutu produk industri belum memadai, sehingga pengawasan mutu komoditi ekspor harus sebagian besar dilakukan di Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang terdekat di luar Provinsi Papua.
 - 8) Faktor SDM kelompok masyarakat terkait dengan keseriusan pengelolaan usaha industri yang cenderung tidak berada dilokasi atau tempat ditemui sebab selain mendapat penyuluhan tetang usaha yang digeluti juga mendapatkan bantuan peralatan, sehingga diharapkan akan berkembang.
 - 9) Kurangnya koordinasi kelompok dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait perawatan/peremajaan peralatan mesin, sehingga peralatan mesin cepat rusak.



10) Jangkauan pembeli dengan petani belum terakses dengan baik, sehingga pengembangan industri kecil menengah lambat.

Rendahnya capaian kinerja **Persentase peningkatan jumlah industri kecil menengah** dibandingkan capaian kinerja Tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan 161.14 persen. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2017 dibanding capaian kinerja 2016 ada peningkatan 80.69 persen dari 94.73 persen begitupula dengan capaian sasaran 2015 ke 2016 mengalami peningkatan 0.98 persen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua telah melakukan pembinaan kepada 168 Industri kecil menengah melalui Program Pengembangan Industri Kecil Menengah yang pada Tahun 2018, terdiri dari :

1. Pembinaan/pengembangan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster, kegiatan pembinaan dilaksanakan di Kabupaten Lanny Jaya diikuti sebanyak 15 peserta dan Kabupaten Yalimo diikuti sebanyak 29 peserta dengan dana kegiatan sebesar Rp. 1.152.257.100,- terealisasi sebesar Rp. 1.075.495.000 , - atau 93,34%, Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi IKM.
2. Penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil menengah, kegiatan ini dilaksanakan di kota Jayapura diikuti 29 peserta dari kab/kota dengan dana kegiatan sebesar Rp. 992.958.750,- terealisasi dana sebesar Rp. 992.958.750,-, Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan industri Provinsi (RIPIP) Papua.
3. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta, kegiatan ini dilaksanakan di 29 kabupaten/Kota dengan dana kegiatan sebesar Rp. 1.104.641.250,- terealisasi dana kegiatan sebesar Rp. 1,097.966.200,- atau 99,40%, Tujuan kegiatan adalah terbentuknya suatu wadah untuk mengembangkan kerajinan bagi pengrajin asli Papua sehingga memiliki kualitas yang baik dan menjadi produk unggulan Provinsi Papua.
4. Sertifikasi HaKI, dilaksanakan di Jayapura diikuti 60 peserta dengan dana kegiatan sebesar Rp. 150.591.500,- terealisasi dana kegiatan sebesar Rp. 126.741.500,- atau 84,16%, Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kemudahan bagi IKM dan UKM untuk mendaftarkan legalitas usaha.



5. Magang peningkatan mutu bagi pengrajin noken, kegiatan dilaksanakan di kabupaten Deiyai diikuti 5 kelompok usaha, Kabupaten Waropen ikuti 1 kelompok usaha, Kabupaten Yapen 1 kelompok usaha, dengan dana kegiatan sebesar Rp. 588.858.461,- terealisasi dana sebesar Rp. 574.251.661,- atau 97,52%, Tujuan kegiatan adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi pengrajin noken.
2. Tindaklanjutan yang harus dilakukan adalah :
 - 1) Melakukan sosialisasi/penyampaian secara kelompok maupun individual melalui kegiatan mendorong pelaku industri meningkatkan potensi usaha industri makanan dan minuman skala rumah tangga guna memenuhi standard mutu sehingga dapat mencapai kenaikan daya beli masyarakat;
 - 2) Mengembangkan usaha industri kecil dan menengah dengan memberi bantuan peralatan sesuai usaha yang dikelola secara berkesinambungan sesuai dana yang tersedia;
 - 3) Memberi bantuan dengan cara subsidi guna memperoleh bahan baku penolong untuk pengembangan industri yang dikelolanya;
 - 4) Untuk daerah yang terpencil agar tidak terhalang sarana transportasi maupun komunikasi yang sulit dilaksanakan pembinaan pada daerah atau wilayah yang mudah dijangkau, sehingga memudahkan dilaksanakannya pembinaan.
 - 5) Terus berupaya meyakinkan perbankan baik melalui sosialisasi maupun koordinasi secara langsung maupun tertulis pada pihak perbankan guna kelancaran memperoleh kesempatan dalam pinjaman modal bagi pelaku-pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya;

Tujuan pembinaan adalah untuk mendorong usaha kecil menengah meningkatkan produktifitas berwira usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta kebutuhan pasar secara global diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, pelaksanaan pembinaan melalui penyuluhan dan bantuan peralatan teknologi tepat guna disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tersebut. pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan UPTD Dinas Balai Mutu Industri yang diharapkan dapat meningkatkan sumber penghasilan petani. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua pada tahun 2015 jumlah IKM sebanyak 100, Tahun 2016 berjumlah 120 IKM dan Tahun 2017 jumlah IKM sebanyak 160, dan pada tahun 2018 berjumlah 168 IKM.



Tahun 2018 difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.

Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan **Target 100.00 persen, terealisasi 96.69 persen** dengan **capaian Kinerja sebesar 96.69 persen**. Nilai Capaian Kinerja ini menunjukkan kategori **“Sangat Berhasil”**. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan tumbuhnya Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Papua pada Tahun 2017 sebesar 18.654 UKM dan Tahun 2018 meningkat menjadi 20.462 UKM (jumlah meningkat 1.808 UKM atau 9.69%) Perkembangan pertumbuhan UKM di Provinsi Papua ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut dimana Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua melakukan antara lain :

1. Memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan bagi pendamping (DAK Non Fisik);
2. Memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi Usaha Kecil (DAK Non Fisik);
3. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha Mikro Kecil Menengah serta Membuka ruang akses bagi pertumbuhan dan pengembangan Kewirausahaan.

Sasaran 12 : Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja


Salah satu alat ukur dari meningkatnya kemajauan suatu daerah adalah tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dari dua indikator tersebut peningkatan penyediaan lapangan kerja menunjukkan capaian kinerja sebesar **102,77** persen dengan kategori “**sangat berhasil**” sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.43 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,50	3,44	98,30	3,50	2,97	117,85	3,50	3,23	3,50	3,00	3,20	106,67
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	81,00	78,90	97,40	83,00	78,28	94,31	83,00	76,93	83,00	80,00	79,11	98,88
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				147,00		106,08		100,52		102,77				

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka tahun pada Tahun 2018 dengan realisasi sebesar 3.20 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2017 dengan realisasi sebesar 3.23 persen begitu juga dengan realisasi di tahun 2016 adalah sebesar 2.97 persen dan tahun 2015 realisasi nya adalah sebesar 4.44 persen artinya bahwa secara keseluruhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan pembukaan lapangan pekerjaan dari berbagai sektor baik BUMD, BUMN, serta sektor Publik lainnya di Provinsi Papua.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua tahun 2017 tidak mencapai target dari target yang ditetapkan sebesar 80,00 persen atau capaian kinerjanya sebesar 79,11 persen. Artinya penduduk Papua yang berumur 15 tahun ke atas diantaranya telah aktif dalam kegiatan ekonomi atau bekerja dan mencari pekerjaan. Namun demikian, usia ini juga masih merupakan usia sekolah sehingga dapat diasumsikan bahwa



meningkatnya angka melanjutkan pendidikan semakin baik berkontribusi dari TPAK secara keseluruhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua dalam empat tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.44 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua

INDIKATOR KINERJA		TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,44	2,97	3,23	3,20
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,90	78,28	76,93	79,11

Terhadap pencapaian kinerja baik pencapaian tingkat pengangguran terbuka ataupun pencapaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain dukungan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai ataupun dukungan sarana dan prasarana.

Sasaran 13 : Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata Dalam Perekonomian Daerah

Urusan Pariwisata merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan strategis di Provinsi Papua. Papua memiliki kekayaan multidimensional mulai dari keadaan alamnya yang menakjubkan mulai dari puncak gunung tertinggi, lembah dan ngarai yang indah, hutan terbentang luas dengan flora dan fauna unik dan endemik, pesisir pantai terbentang dan gugusan pulau yang indah, isi laut yang tiada tara, adat budaya masyarakat asli yang unik dan maka potensi wisata Papua patut ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah.

Provinsi Papua juga memiliki taman nasional, yaitu Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire sehingga Papua memiliki potensi pariwisata terlengkap di Indonesia dan dunia. Terkait sasaran di atas, ada dua indikator yang mengukur pencapaian kinerja untuk sasaran 13 ini, yaitu Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua.

Tabel 3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	Persen	10,00	9,75	97,50	10,00	12,92	129,20	13,00	12,92	99,38	13,00	9,72	74,77
2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	Persen	3,00	3,30	110,00	5,00	7,75	155,00	8,00	7,75	96,88	8,00	7,75	96,88
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					103,75			142,10			98,13			85,82

Untuk tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 85,82 persen atau menurun sebesar 12,31 persen dari tahun sebelumnya.

Terkait pencapaian dari Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2018 sumbangan sektor perdagangan mencapai 9,72 persen.

Hal ini menandakan adanya geliat pariwisata didukung dengan pertumbuhan hotel di Papua, seperti tabel berikut.

Tabel 3.46 Distribusi dan Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran pada PDRB Papua Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016¹⁾, Tahun 2017 dan Tahun 2018^{*)} (persen)

Lapangan Usaha	Distribusi			Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,03	9,07	8.94	6,91	6,24	6,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.80	0.80	0.78	6,54	6,04	6,41

Sumber: BPS Papua, 2019

Sasaran 14 : Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat” adalah **81.315 persen** atau dalam skala ordinal adalah **”Berhasil”**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.47 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SA TUAN	TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	Persen	0,90	1,00	111,11	1,30	0,95	73,08	1,50	0,94	62,67	1,00	0,95	95,00
2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	Persen	1,20	0,91	75,83	1,20	0,89	74,17	1,20	0,87	72,50	1,00	0,87	87,00
3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	4,50	5,57	123,78	4,50	5,06	112,44	5,50	4,78	86,91	5,00	4,78	95,60
4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persen	8,50	2,95	34,71	10,00	2,57	25,70	21,00	5,30	25,24	6,00	2,46	41,00
5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	2,00	1,82	91,00	2,20	1,65	75,00	3,00	1,55	51,67	2,00	1,55	77,50
6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	35,000	32,220	92,057	30,000	34,078	113,592	35,500	36,07	101,606	40,000	36,716	91,790
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					88,081			78,997			66,76			81,315

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB** (persen) ditargetkan sebesar 1,50 persen dan tercapai hanya 0,94 persen sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 62,66 persen. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami penurunan sebesar 37,34 persen jika dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 100 persen.

Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan pertumbuhan negatif yang terjadi pada seluruh lapangan usaha pekerjaan, dan ini merupakan angka sementara yang oleh karena data resmi baru akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik bulan Juni 2018.

Komoditas tanaman kakao di sentra kakao yaitu wilayah Mamta, Saireri dan La Pago pada tahun 2017 meningkat karena adanya upaya pengendalian hama serta sanitasi kebun yang selalu dijaga dan pemangkasan rutin dilakukan oleh petani kakao.

Selain kakao, produksi tanaman kopi pada penetapan angka tetap tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,009 ton atau 53,148 persen dibandingkan dengan angka produksi tahun 2016. Peningkatan produksi kopi ini dipengaruhi tingginya nilai



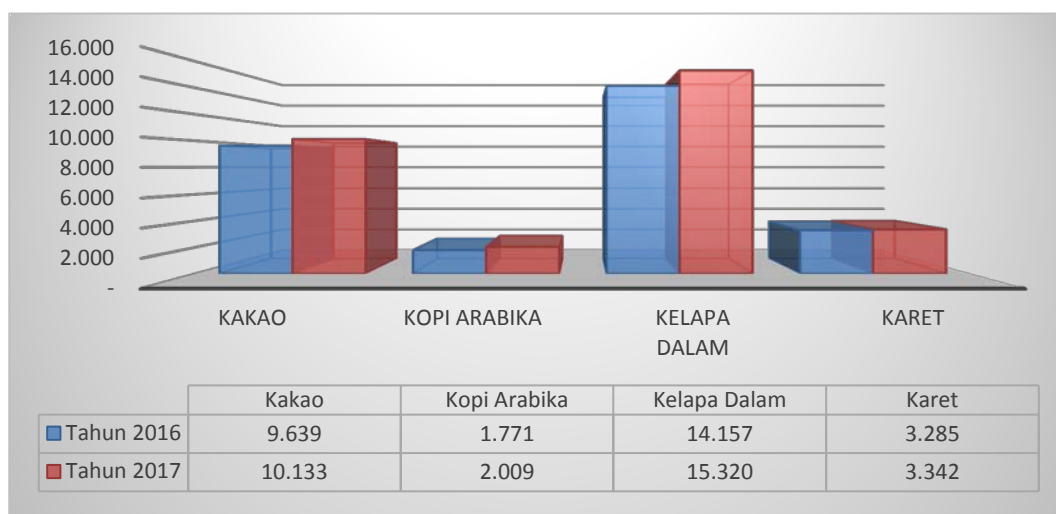
jual komoditi kopi yang merupakan komoditi ekspor sehingga minat petani kopi untuk merawat kebun kopinya menjadi lebih tinggi terutama di daerah sentra kopi yaitu wilayah La Pago dan Mee Pago.

Untuk komoditi kelapa dalam, capaian angka produksi tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 15.320 ton atau 51,973 persen dibandingkan produksi tahun 2016. Sentra produksi tananam kelapa berada pada wilayah Mamta, Saireri, Ha Anim dan Mee Pago.

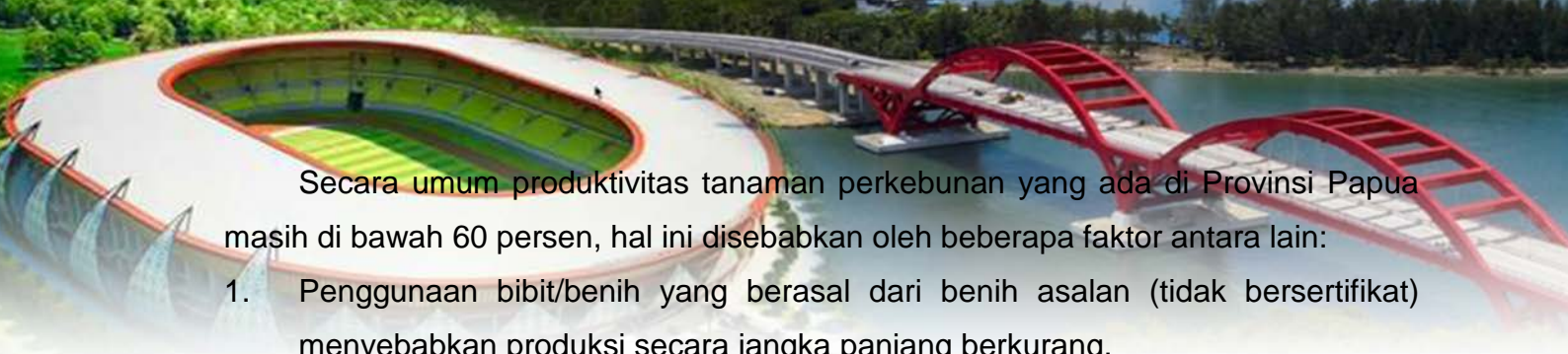
Sentra pengembangan dan produksi komoditas karet di Papua berada di wilayah Ha Anim tepatnya di Kabupaten Merauke, Boven Digul dan Mappi. Produksi karet tahun 2017 adalah 3.342 ton karet kering atau 50,43 persen dibanding tahun 2016 sebesar 3.285 ton atau 49,570 persen. Produksinya cenderung tetap karena pengaruh musim kemarau berkepanjangan dalam beberapa tahun terakhir di wilayah selatan Papua. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi karet adalah dilakukan perluasan wilayah perkebunan karet di Kabupaten Merauke seluas 150 Ha.

Angka produksi sagu tahun 2017 mencapai 24,959 ton atau 36,839 persen mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016. Hal ini disebabkan fokus petani sagu beralih ke kegiatan pengembangan tanaman khususnya kegiatan perluasan dan penataan tanaman yang bersumber dari Dana APBN seluas 750 Ha. Pengembangan komoditas sagu dilakukan di sentra-sentra yaitu wilayah Saireri, Mamta dan Mee Pago.

Gambar Grafik 3.14
Perbandingan Angka Produksi Komoditi Perkebunan (ton)
Tahun 2016 dan 2017



Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Papua



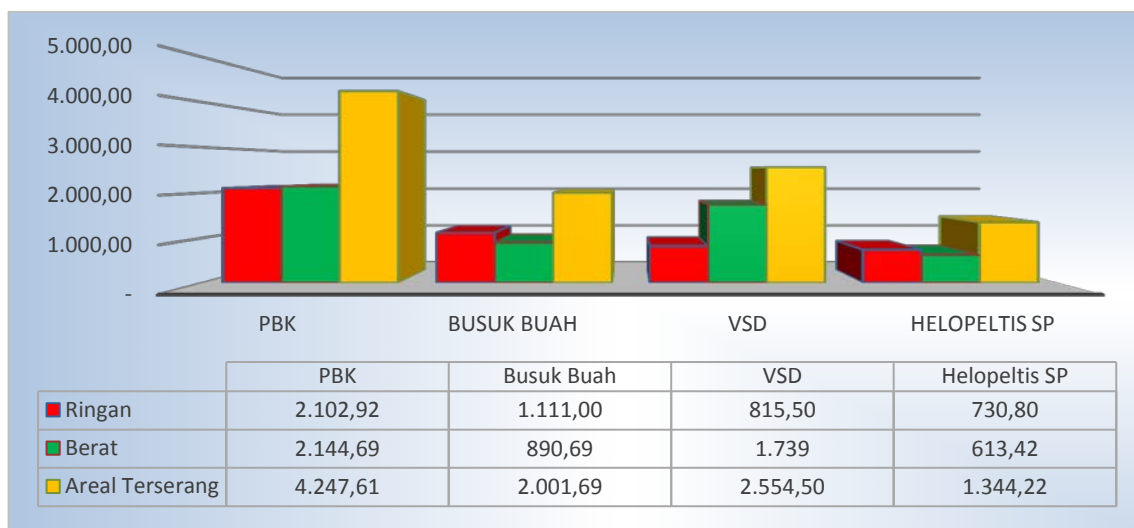
Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih di bawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
2. Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
4. Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah :

1. Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
2. Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Nabire, Waropen, Dogiyai, dan Pegunungan Bintang.
3. Rehabilitasi tanaman kakao seluas 10 Ha di Kabupaten Waropen dan 10 Ha tanaman kopi di Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Pegunungan Bintang.

Gambar Grafik 3.15
Intensitas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Pada Tanaman Kakao Tahun 2017



Sumber Data : Dinas Perkebunan Provinsi Papua

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** (persen) dari target sebesar 1,20 persen terealisasi 0,87 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 72,50 persen. Dibandingkan dengan tahun 2016 kontribusi PDRB

subsektor peternakan mengalami peningkatan. Kontribusi PDRB Subsektor Peternakan Tahun 2017 secara rinci terlihat pada tabel berikut :

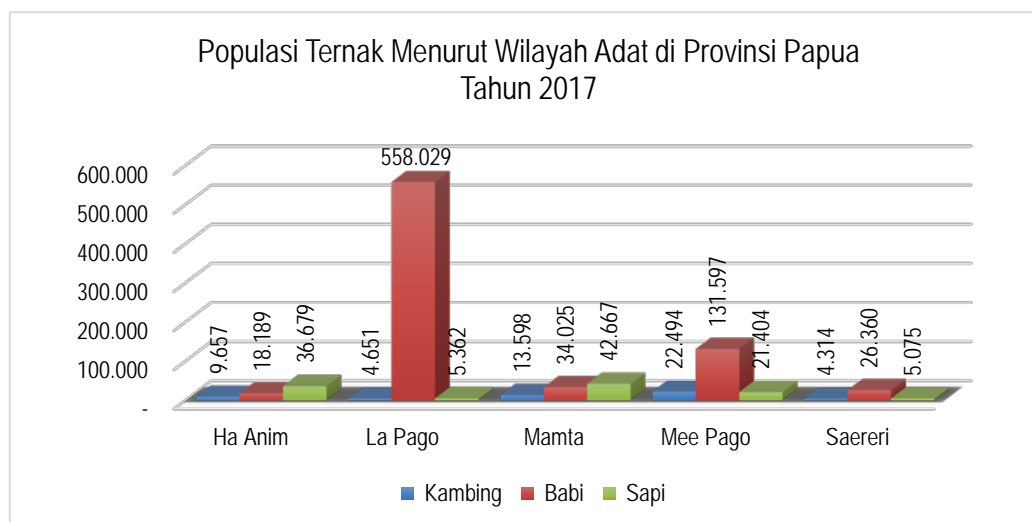
Tabel. 3.48
PDRB DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
(JUTA RUPIAH)

URAIAN		2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		20,185,964.22	21,603,759.14	21,603,759.14
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	8,924,195.46	9,521,984.96	9,521,984.96
	a. Tanaman Pangan	4,432,671.55	4,511,289.92	4,511,289.92
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	685,510.08	764,861.41	764,861.41
	c. Perkebunan Semusim	456.45	515.26	515.26
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	782,363.61	873,892.39	873,892.39
	e. Perkebunan Tahunan	1,499,548.37	1,667,518.91	1,667,518.91
	f. Peternakan	1,388,200.14	1,560,147.18	1,560,147.18
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	135,445.27	143,759.88	143,759.88
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,757,486.30	2,900,848.83	2,900,848.83
3	Perikanan	8,504,282.47	9,180,925.36	9,180,925.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		151,201,498.24	178,370,342.93	178,370,342.93

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Papua,2016/Data di Olah.

Dalam menunjang capaian output indikator kinerja tahun 2017 dilakukan kegiatan pasar murah, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan. memang dilihat bahwa pada tahun 2017 investasi sub sektor peternakan masih sangat terbatas untuk itu perlu diambil langka-langka strategi dalam menumbuhkan investasi peternakan di Provinsi Papua juga melakukan pembinaan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produk peternakan.

Gambar Grafik 3.16 Produksi Peternakan Tahun 2012-2017





Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB** (persen) ditargetkan 5,50 persen dan terealisasi 4,78 persen dengan capaian kinerja 86,91 persen.

Produksi hasil perikanan pada tahun 2016 sebesar 293.827,60 ton (Data Statistik Perikanan Provinsi Papua Tahun 2017, Sementara). Hasil tersebut menurun sebanyak 17.057,80 ton jika dibanding hasil perikanan tahun 2016 yang mencapai 310.885,40 ton. Penurunan produksi hasil perikanan antara lain disebabkan pemanfaatan lahan usaha budidaya perikanan tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016 dimana potensi lahan budidaya mencapai 11,8 juta Ha sedangkan yang dimanfaatkan sebesar 2.962,70 Ha (0,025 persen). Selain itu penurunan hasil perikanan juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah armada perikanan tangkap yaitu pada tahun 2016 sebanyak 22.050 unit sedangkan tahun 2017 hanya sebanyak 17.686 unit sehingga turun 19,79 persen dan penurunan jumlah nelayan dan pembudidaya ikan tahun 2016 sebanyak 148,571 orang sedangkan tahun 2017 sebanyak 104.713 orang atau turun 29,52 persen.

Realisasi penerimaan daerah (PAD) dari sektor perikanan tahun 2017 adalah 4,78 persen dari target yang ditetapkan sebesar 5,50 persen atau hanya tercapai 86,91 persen. Hal ini disebabkan kegiatan pengujian mutu hasil perikanan tidak terlaksana sesuai perencanaan akibat adanya moratorium larangan kapal perikanan asing beroperasi di perairan Papua.

Capaian indikator kinerja **Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB** (persen) dari target sebesar 21,00 persen terealisasi 5,30 persen dengan capaian kinerja indikator sebesar 25,24 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan dalam 17 (tujuh belas) lapangan usaha sebesar

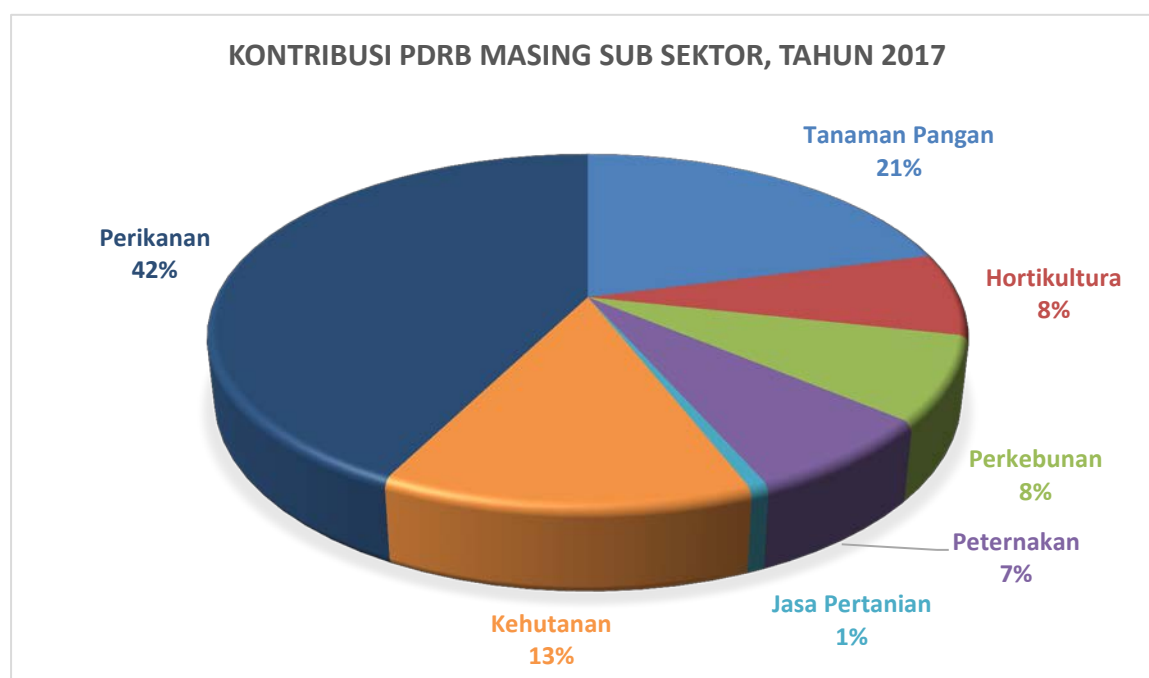
Perkembangan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu rata-rata tumbuh 11,61 persen. Untuk tahun 2017 belum diketahui oleh karena baru akan dirilis oleh BPS pertengahan Juli 2018. Perkembangan PDRB sektor pertanian di Provinsi Papua selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.49
Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
(Harga Berlaku) di Provinsi Papua selama Tahun 2014-2016

No.	Sub Sektor	Produk Domestik Regional Bruto (Rp. Juta)			Rata-Rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	
1.	Tanaman Pangan	3.967.238	4.432.672	4.511.290	6,75
2.	Hortikultura	1.332.890	1.461.070	1.638.754	10,89
3.	Perkebunan	1.369.091	1.500.005	1.668.034	10,38
4.	Peternakan	1.191.697	1.388.200	1.560.147	14,44
5.	Jasa pertanian	126.784	135.445	143.760	6,49
6.	Kehutanan	2.360.545	2.770.737	2.900.848	11,04
7.	Perikanan	7.036.968	8.661.829	9.180.925	14,54
Jumlah		17.385.212	20.349.957	21.603.759	10,65

Sementara kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura pada PDRB Provinsi Papua (Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), Tahun 2017 (data sementara) dapat dilihat pada grafik 3.15 dibawah ini :

Gambar Grafik 3.17
Kontribusi PDRB masing-masing Sub Sektor



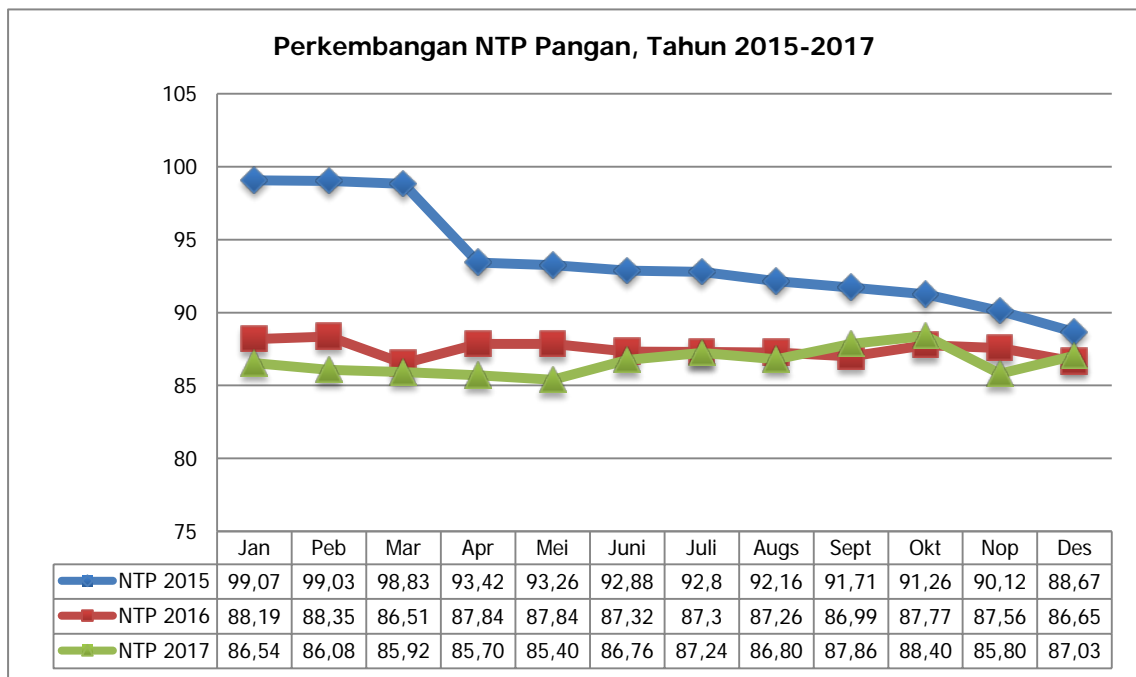
Nilai Tukar Petani (NTP) didefinisikan sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Arti angka NTP sebagai berikut :



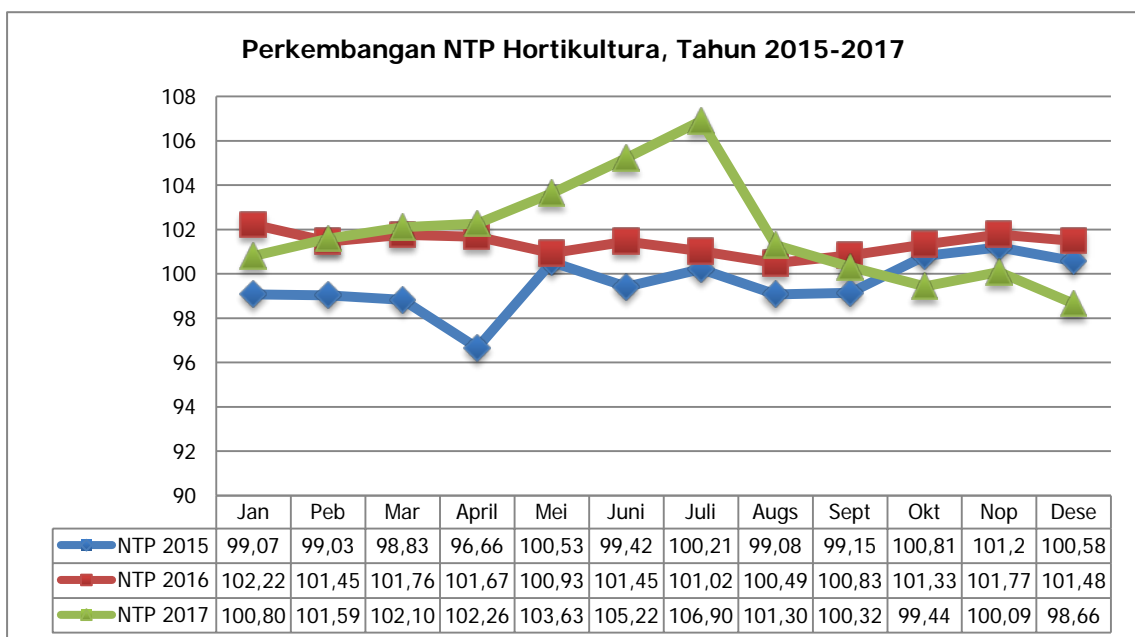
- ❖ NTP > 100, berarti petani mengalami surplus
- ❖ NTP = 100, berarti petani mengalami impas
- ❖ NTP < 100, berarti petani mengalami defisit

NTP digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani/daya beli petani dan tingkat daya saing produk pertanian/ kemampuan tukar produk pertanian dengan produk lain, Perkembangan NTP tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua selama tahun 2015-2017 dapat di lihat pada grafik 3.16 dibawah ini :

Gambar Grafik 3.18



Gambar Grafik 3.19





Berdasarkan perkembangan NTP tanaman pangan dan hortikultura pada gambar 2 dan 3, dapat disimpulkan bahwa:

- Petani yang mengusahakan produk hortikultura memiliki tingkat kesejahteraan/daya beli yang lebih baik dari petani yang mengusahakan produk tanaman pangan.
- Petani yang mengusahakan produk hortikultura mengalami surplus pendapatan (memiliki tabungan) sementara petani yang mengusahakan produk tanaman pangan cenderung defisit.
- NTP hortikultura pada tahun 2017 jauh lebih baik dari NTP tahun 2016 (pertumbuhan positif) sementara tanaman pangan mengalami pertumbuhan negatif.

Indikator ke enam dari sasaran ke 14 yaitu **Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB** (persen) tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 persen dan terealisasi sebesar 1,55 persen dengan capaian kinerja sebesar 51,66 persen.

Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan disebabkan beberapa faktor, yaitu penetapan target yang terlalu tinggi dan perubahan regulasi dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan hasil kehutanan tidak optimal karena berada pada periode transisi.

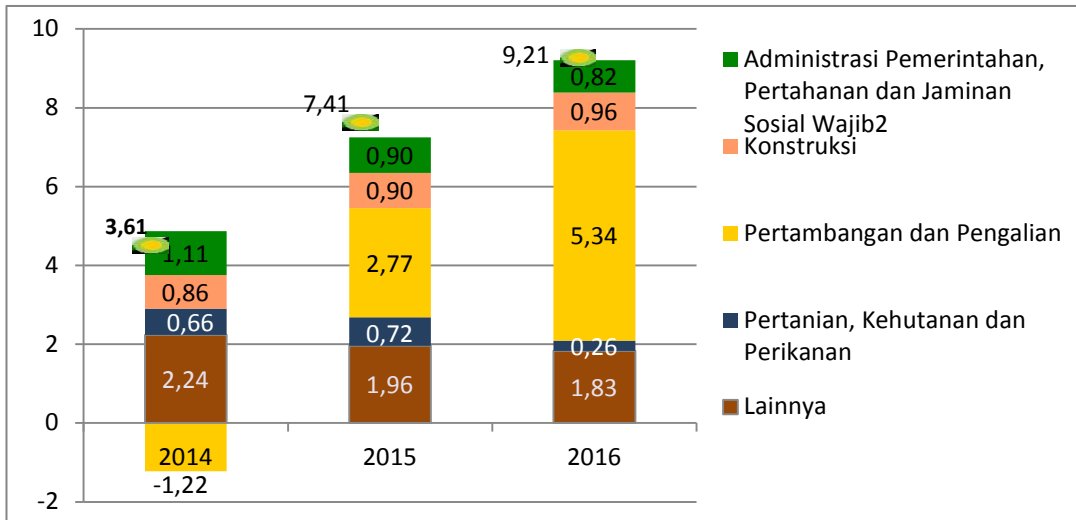
Indikator ke enam dari sasaran ke 14 yaitu **Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB** (persen) tercapai 36,07 persen dari target yang ditetapkan sebesar 35,50 persen atau realisasi kinerjanya sebesar 101,60 persen.

Dari sektor Pertambangan memperoleh penerimaan sebesar Rp191.615.410.000.000,00 dengan kontribusi PDRB Rp122.496.840.000.000,00 Sementara total PDRB Provinsi Papua adalah Rp69.118.570.000.000,00 atau dengan kata lain penerimaan dari sektor pertambangan berkontribusi sebesar 36,07 persen terhadap PDRB Provinsi Papua. Peningkatan sektor pertambangan dipengaruhi oleh program-program seperti :

1. Program pembinaan, pengawasan, perusahaan mineral dan batubara;
2. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi;
3. Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG);
4. Program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi serta

5. Program penelitian dan pengembangan pada UPTD bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Grafik 3.20
Sumber Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha
Tahun 2014 - 2016



Sumber : BPS Prov. Papua 2016

Sasaran 15 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing

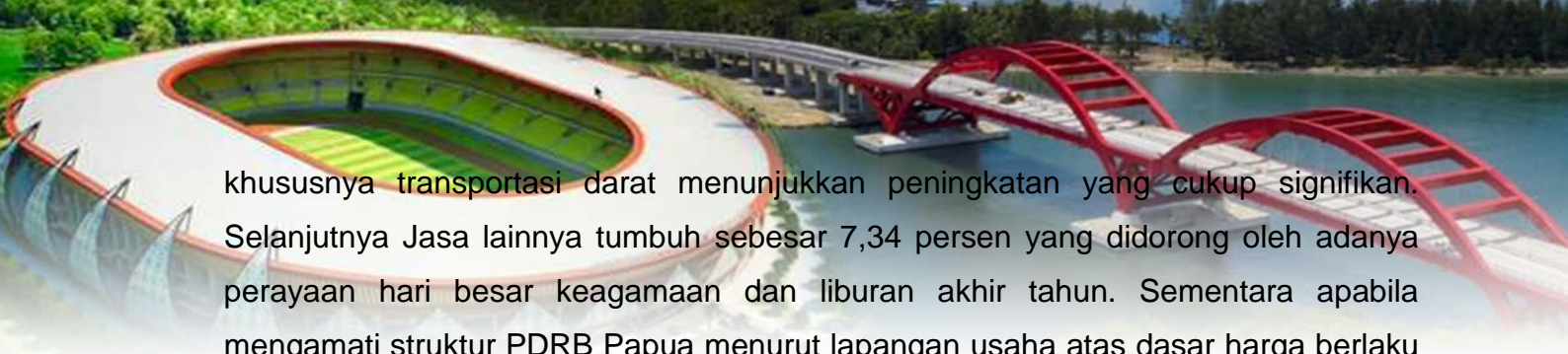
Secara keseluruhan aktivitas ekonomi Provinsi Papua menunjukkan trend baik, laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, pengendalian inflasi dan kesenjangan atau indeks gini. Demikian pula daya saing daerah menunjukkan trend yang baik dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Untuk tahun 2018 capaian kinerja sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 105,73 persen dengan predikat “ **Sangat Berhasil**”. Dari 6 (enam) indikator yang mengukur kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan dan daya saing daerah terdapat 4 indikator yang realisasi diatas target dan 2 indikator yang realisasi di bawah target. Walaupun 2 indikator yaitu Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB dan Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih di bawah target tapi masih berada pada capaian kinerja baik.

Tabel 3.50 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN												
		2015			2016			2017			2018			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan HFRB)	Persen	8,00	7,35	91,88	8,00	9,14	114,25	9,50	4,64	48,84	5,00	7,33	146,60
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	25,00	47,73	190,92	31,00	54,00	174,19	56,00	57,87	103,34	60,00	63,40	106,67
3	Inflasi	Persen	5,50	2,79	197,13	5,00	4,13	121,07	4,00	2,41	165,90	2,00	2,41	62,99
4	Indeks Gini	Persen	0,35	0,42	62,94	0,41	0,40	102,76	0,35	0,40	87,94	0,35	0,30	91,15
5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	3,54	2,20	62,15	2,50	2,09	83,59	2,50	2,10	84,09	2,50	3,20	128,00
6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	Persen	7,30	8,20	112,33	10,00	7,95	79,50	10,00	7,65	76,50	10,00	8,00	80,00
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					115,44			112,06			91,57			105,73

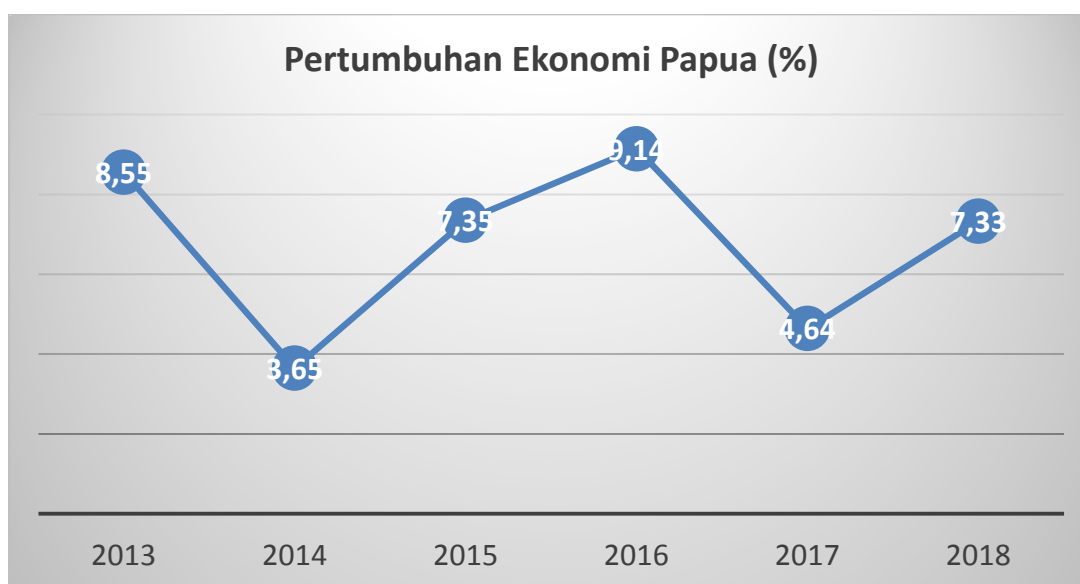
Perekonomian Papua tahun 2018 tumbuh sebesar 7,33 persen atau dengan capaian kinerja 146,60 persen. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2018. Selama tahun 2018 perekonomian Papua tumbuh 7,33 persen, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2017 yang tumbuh 4,64 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tumbuhnya semua lapangan usaha di Papua. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 10,52 persen, peningkatan ini didukung oleh produksi bijih logam selama tahun 2018 yang cukup tinggi. Kemudian diikuti Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,16 persen yang disebabkan pengguna jasa transportasi



khususnya transportasi darat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya Jasa lainnya tumbuh sebesar 7,34 persen yang didorong oleh adanya perayaan hari besar keagamaan dan liburan akhir tahun. Sementara apabila mengamati struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan; Konstruksi; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masih mendominasi PDRB Papua.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua Tahun 2018, Lapangan Usaha Pertambangan dan Pengalihan menjadi lapangan usaha dengan sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 4,39 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,56 persen; Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,51 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 persen.

Gambar Grafik 3.21
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua tahun 2013-2018



Sumber : BPS Papua, 2019

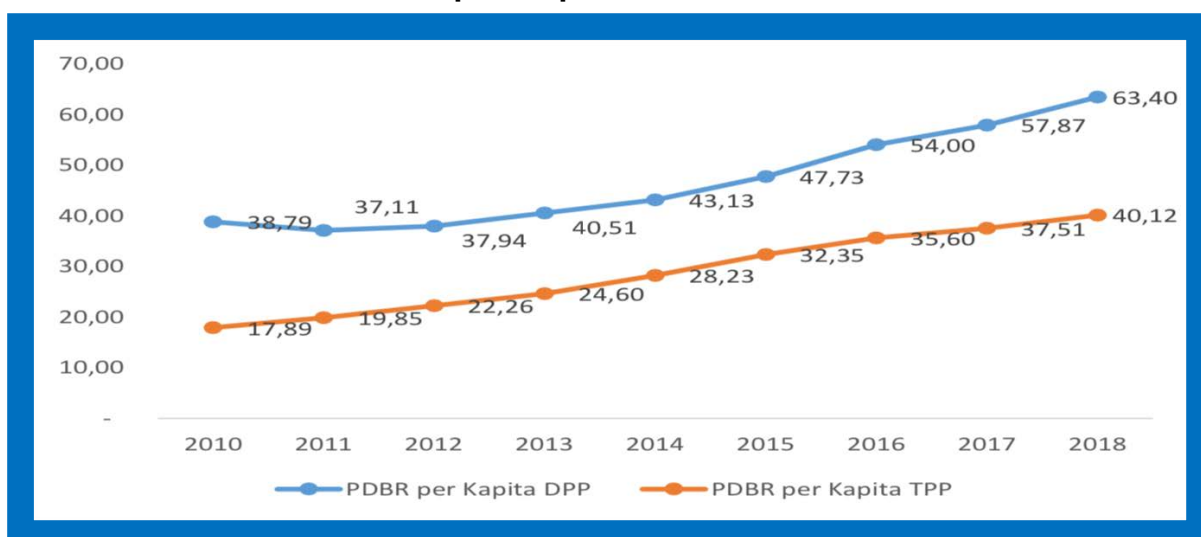
PDRB perkapita, peningkatan PDRB perkapita menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri. Peningkatan PDRB perkapita juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian, penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan,



peningkatan PDRB perkapita juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri. Peran dari pihak non negara, seperti swasta dan masyarakat adalah pilar kunci yang menyumbang pada capaian peningkatan pendapatan.

PDRB Perkapita Provinsi Papua ditargetkan pada tahun 2018 Rp 60 juta per kapita per tahun, realisasinya mencapai nilai pendapatan sebesar Rp 63,40 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 105,67 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2018. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, telah melebihi target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp 30 juta per kapita per tahun pada tahun 2018.

Gambar Grafik 3.22
PDRB Perkapita Papua Tahun 2010 – 2018^{*)}



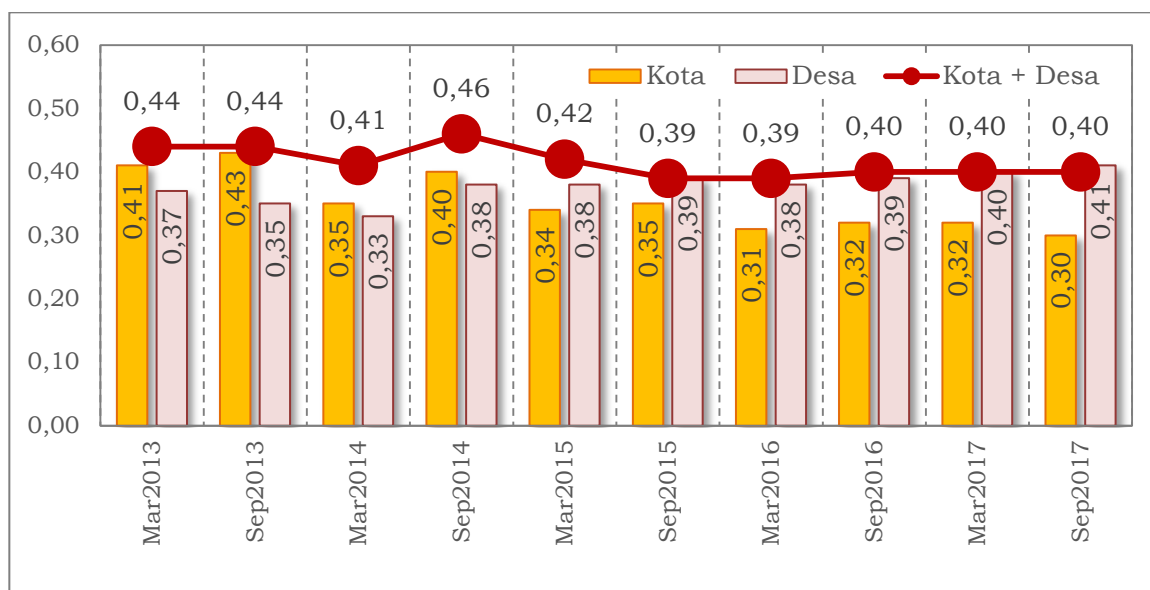
Catatan : ^{r)} Angka Yang Diperbaiki ^{*)} Angka Sementara

Nilai PDRB per kapita Papua pada Tahun 2018 sebesar Rp 63,40juta, naik dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 57,87 juta atau naik sebesar 9,57 persen. Kenaikan ini sebagian besar dikarenakan pertumbuhan pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi. Proporsi penduduk yang bekerja pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sangat kecil, maka jika ingin melihat gambaran PDRB per Kapita masyarakat Papua secara umum lebih baik dengan melihat PDRB tanpa Pertambangan dan Penggalian. Jika tanpa pertambangan dan penggalian, PDRB per kapita Tahun 2018 sebesar Rp 40,12 juta, juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 yang senilai Rp 37,51 juta namun peningkatannya lebih kecil yaitu 6,98 persen.



Walaupun sudah mencapai kinerja yang sangat baik, penting kita melihat dari bagaimana situasi pemerataan pendapatan tersebut pada masyarakat melalui **Indeks Gini atau koefisien Gini** merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai koefisien gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan Koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali. Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka Ratio Gini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Papua mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013-2017) dan cenderung mengalami perbaikan, dengan kategori termasuk ketimpangan sedang.

Gambar Grafik 3.23
Perkembangan Gini Rasio Provinsi Papua Tahun 2013 -2017



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 (data diolah)

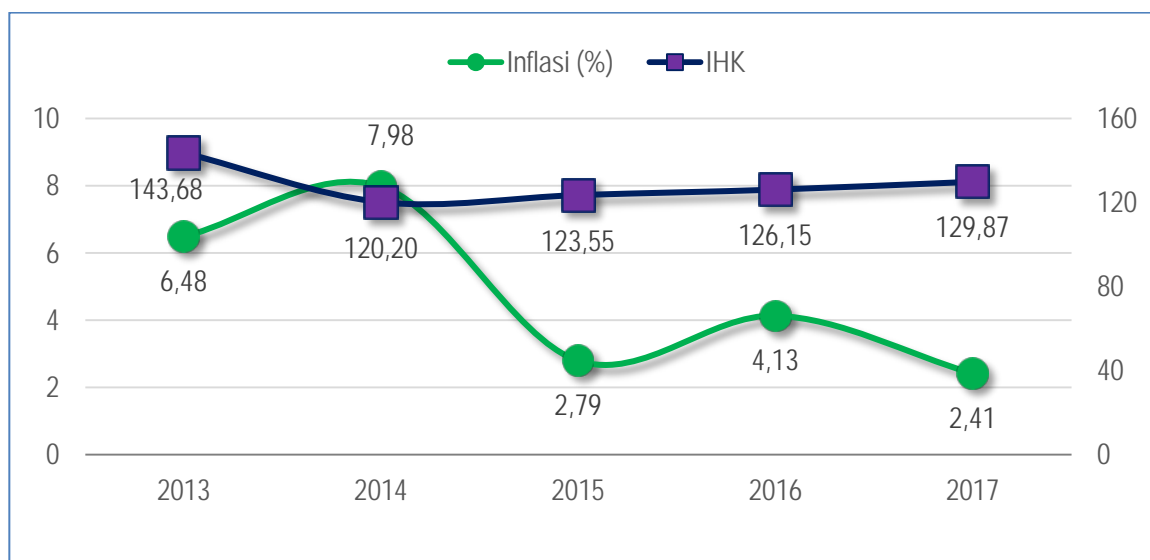
Oleh karena itu perhatian akan pentingnya upaya pemerataan hasil pembangunan tetap akan menjadi prioritas di tahun 2019 dalam menurunkan indeks ketimpangan Provinsi Papua.

Inflasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Salah satu indikator yang mengukur kinerja pembangunan Provinsi Papua adalah Nilai Inflasi. Untuk tahun 2018 nilai inflasi ditargetkan 2 persen realisasinya



mencapai 2,41 persen atau sebanyak 82,99% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja baik** untuk tahun 2018. Faktor adanya tekanan cukup tinggi inflasi di Papua adalah volative foods, seiring memasuki musim hujan pada komoditas tertentu serta curah hujan dan gelombang tinggi berdampak kenaikan harga ikan, gangguan penerbangan dan kapal sehingga berdampak pada kenaikan harga.

Gambar Grafik 3.24 Perkembangan Inflasi Provinsi Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2018

Laju inflasi dapat menjadi tolak ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi di berbagai wilayah Papua dapat dikatakan cukup terkendali karena bergerak diantara 3,98% hingga 7,04%. Inflasi tertinggi di wilayah adat Mamta tercatat di Mamberamo Raya sebesar 6,82% per tahun sepanjang periode 2014-2017. Sedangkan untuk La Pago di Jayawijaya sebesar 7,04% per tahun. Kemudian di Mee Pago di Intan Jaya sebesar 6,52% per tahun, untuk Saireri di Biak Numfor sebesar 6,82% per tahun, dan di Anim Ha pada Kabupaten Asmat sebesar 5,79% per tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup tinggi di beberapa daerah (inflasi 5-7%) antara lain masih besarnya ketergantungan konsumsi pangan dari luar daerah (terutama beras), sulitnya akses transportasi perdagangan, tingginya harga BBM dan faktor stabilitas sosial yang berpengaruh pada tingkat kelancaran distribusi barang ke berbagai daerah pegunungan dan dataran rendah sulit akses.

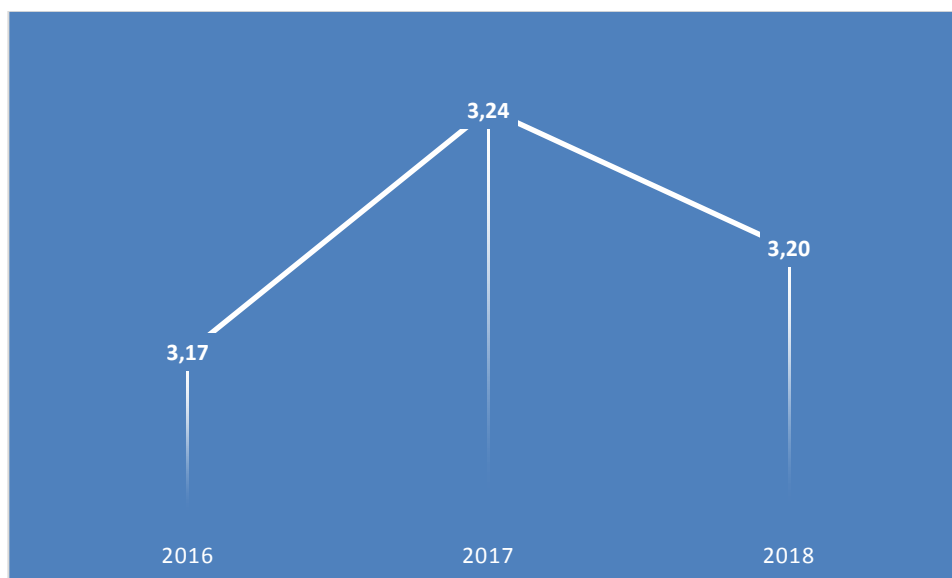
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Salah satu untuk mengukur daya saing suatu daerah yaitu meningkat dan bertumbuhnya Industri Pengolahan. Untuk tahun 2018 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap



PDRB ditargetkan 2,5 persen, realisasinya mencapai 3,20 persen atau sebanyak 128 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang sangat baik** untuk tahun 2018. Selama empat tahun terakhir kontribusi sektor Industri pengolahan tidak mengalami perkembangan secara signifikan malah cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Apabila dilihat dari pertumbuhan industri pengolahan selalu berada pada nilai yang positif, meskipun pertumbuhannya tidak mencapai dua digit.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Program Gerbangmas dan Prospek (Program Strategis Pengembangan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung) memfokuskan pada pengembangan komoditas unggulan dengan memperpanjang rantai nilai melalui mengintegrasikan Tanam, Petik, Olah dan Jual. Program prioritas ini merupakan bentuk keseriusan Provinsi Papua dalam mendorong pengembangan industry pengolahan di Papua.

Gambar Grafik 3.25
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2018

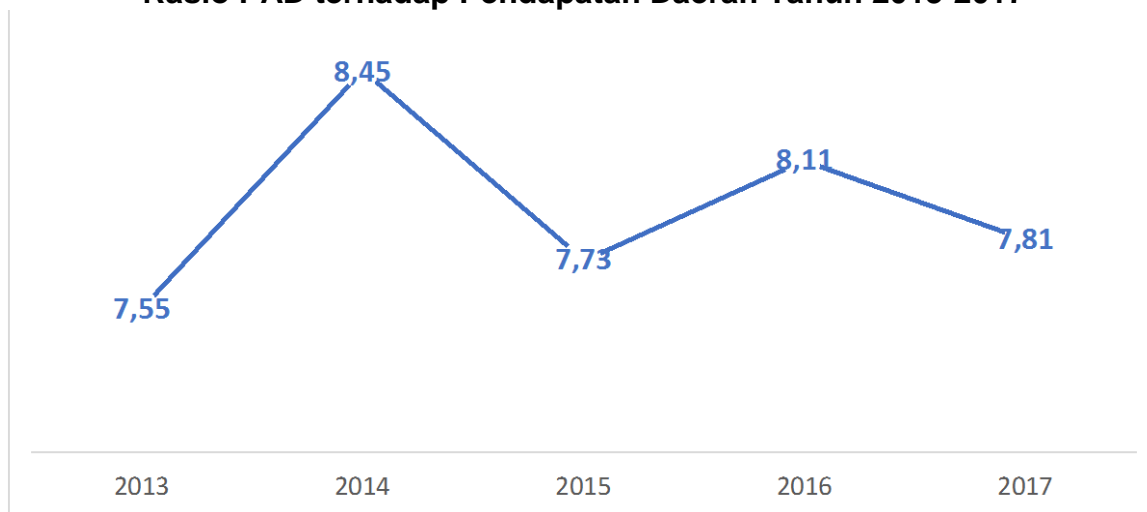


Pendapatan Asli Daerah, merupakan hakekat dari adanya Otonomi Daerah dan merupakan alat ukur bagi kemampuan dan kemandirian setiap daerah. Perkembangan pendapatan daerah terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya perekonomian Papua. Selama periode tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dari sebesar Rp 512,03 milyar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 927,2 milyar pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 8827,2 milyar dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,16 triliun dan sebesar

Rp 1,36 triliun pada tahun 2017. Sepanjang tahun 2013-2017, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen per tahun.

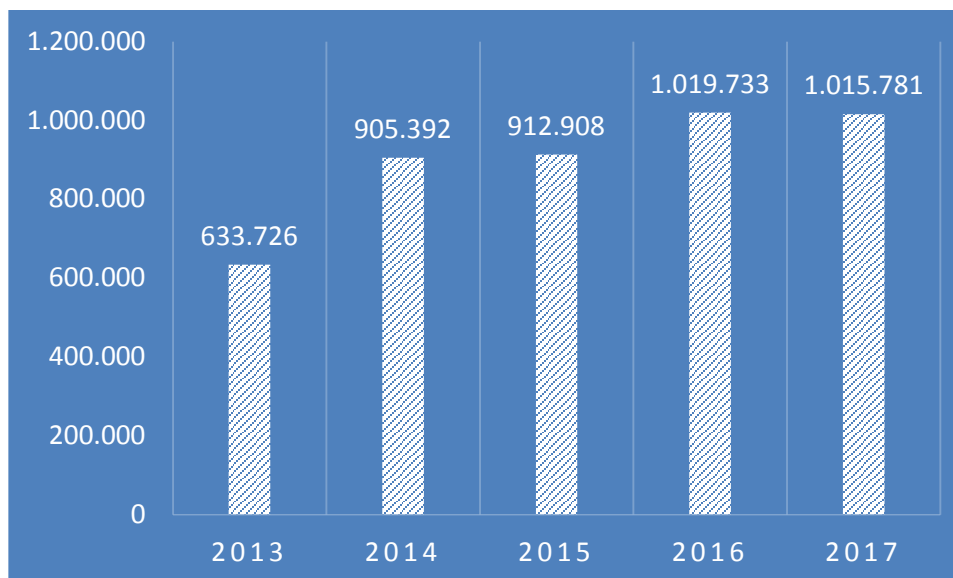
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 ditargetkan sebesar 10 persen, realisasinya mencapai 7,95 persen atau sebanyak 79,50 persen dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian **kinerja yang baik** untuk tahun 2016.

Gambar Grafik 3.26
Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



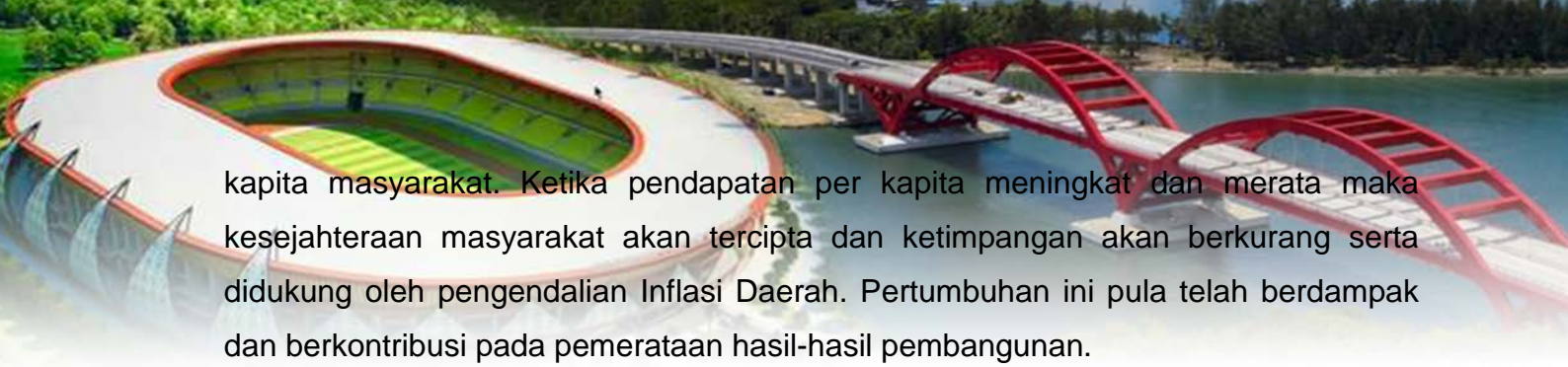
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov Papua (diolah)

Gambar Grafik 3.27
Perkembangan PAD Provinsi Papua Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prov Papua (diolah)

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Papua sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat menggambarkan dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga telah dapat meningkatkan pendapatan per



kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan berkurang serta didukung oleh pengendalian Inflasi Daerah. Pertumbuhan ini pula telah berdampak dan berkontribusi pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Sasaran 16 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya konektivitas antar wilayah**” adalah 182,52 persen atau dalam skala ordinal adalah “**Sangat Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CK	2016		CK	2017		CK	2018		CK	
		T	R		T	R		T	R		T	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Baik Dan Sedang)	Persen	30,00	27,51	91,70	30,00	21,08	70,27	30,00	97,58	325,28	95	37,39	39,37
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Persen	50,00	45,15	90,30	50,00	25,45	50,90	50,00	27,45	54,90	30	60,30	200,99
3	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasion	1:100	1:96	96,00	1:110	1:106	103,77	1:110	1:104	94,54	1:110	1:167	65,87
4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Per Tahun	Per Tahun	3,8 Juta	3,88 Juta	102,11	4 juta	3.501.758	87,54	4 Juta	736.594	18,41	1 Juta	4.238.562	423,86
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					95,03		78,12		123,28		182,52			

Indikator kinerja Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dengan target 95,00 persen terealisasi 37,39 persen atau tingkat capaian indikator sebesar 39,37 persen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018 total panjang jalan provinsi adalah 2.361.76 km dan panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 883,04 km sedangkan pada tahun 2017 panjang jalan provinsi kondisi mantap adalah 1.111,47 km, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah perubahan panjang jalan provinsi kondisi mantap tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 228,04 km karena bukan merupakan jalan



strategis provinsi serta adanya Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/368/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Papua.

Jalan sebagai salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan wilayah satu dengan lainnya di Provinsi Papua memerlukan pemeliharaan yang terus menerus serta peningkatan jalan untuk menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga aman dalam penggunaannya. Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi teknis pengelola infrastruktur pada tahun 2018 telah melaksanakan pemeliharaan jalan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Perkembangan jalan selama beberapa tahun dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.52 Perkembangan Panjang Jalan Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun (Km)			
	s/d 2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan kondisi Mantap	969,33	1.004,68	1.111,47	883,04

Capaian indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik adalah 200,99 persen dengan target sebesar 30 persen terealisasi sebesar 60,30 persen dari panjang jembatan yang kondisi mantap sebesar 3.859 Meq dari total panjang 6.400 Meq. Selain jalan, jembatan juga merupakan infrastruktur penting dalam menghubungkan wilayah satu dengan lainnya sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah.

Perkembangan pembangunan/pemeliharaan jembatan dan lokasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.53 Pembangunan/Pemeliharaan Panjang Jalan Tahun 2014-2018

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI
Tahun Anggaran 2014		
1	Pembangunan Jembatan Anggu	Kabupaten Jayapura
2	Pembangunan Jembatan Eyo Betaf	Kabupaten Jayapura
3	Pembangunan Jembatan Skuata I	Kabupaten Jayapura
4	Pembangunan Jembatan Kali Kabur I	Kabupaten Jayapura
5	Pembangunan Jembatan Uri	Kabupaten Jayapura
6	Pembangunan Jembatan Etup	Kabupaten Jayapura
7	Pembangunan Jembatan Etup	Kabupaten Jayapura



NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI
Tahun Anggaran 2014		
8	Pembangunan Jembatan Muaif I	Kabupaten Jayapura
9	Pembangunan Jembatan Muaif II	Kabupaten Jayapura
10	Pembangunan Jembatan Muaif V	Kabupaten Jayapura
11	Pembangunan Jembatan Muaif VII	Kabupaten Jayapura
12	Pembangunan Jembatan Nimbotong V	Kabupaten Jayapura
13	Pembangunan Jembatan Sungai Nawa	Kabupaten Jayapura
14	Pembangunan Jembatan Gremi	Kabupaten Jayapura
15	Pembangunan Jembatan Wesaput	Kabupaten Jayawijaya
16	Pembangunan Jembatan Ferku (Kampiraya)	Kabupaten Mimika
17	Pembangunan Jembatan S. Urpiah	Kabupaten Jayapura
18	Pembangunan Jembatan S. Wopkan	Kabupaten Jayapura
19	Pembangunan Jembatan S. Gau	Kabupaten Jayapura
20	Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua)	Kota Jayapura
21	Pembangunan Jembatan Skamto	Kabupaten Keerom
22	Pembangunan Jembatan Wosi	Kabupaten Jayawijaya
23	Pembangunan Jembatan Tagi	Kabupaten Jayawijaya
24	Pembangunan Jembatan Kaugapu SP VIII	Kabupaten Mimika
Tahun Anggaran 2015		
1	Pembangunan Jembatan Amjaran	Kabupaten Jayapura
2	Pembangunan Jembatan Muaif II	Kabupaten Jayapura
3	Pembangunan Jembatan Nimbotong V	Kabupaten Jayapura
4	Pembangunan Jembatan Gremi	Kabupaten Jayapura
5	Pembangunan Jembatan Ferku (Kampiraya)	Kabupaten Mimika
6	Pembangunan Jembatan S. Urpiah	Kabupaten Jayapura
7	Pembangunan Jembatan S. Wopkan	Kabupaten Jayapura
8	Pembangunan Jembatan S. Gau	Kabupaten Jayapura
9	Pembangunan Jembatan War (30 M')	Kabupaten Jayapura
10	Pembangunan Jembatan Ewa (25 M')	Kabupaten Jayapura
11	Pembangunan Jembatan Yardori (10 M')	Kabupaten Supiori
12	Pembangunan Jembatan Yosem (10 M')	Kabupaten Supiori
13	Pembangunan Jembatan Sungai Algonik	Kabupaten Jayapura

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI
TAHUN ANGGARAN 2015		
14	Pembangunan Jembatan Dekai Logpond	Kabupaten Yahukimo
15	Pembangunan Jembatan Sungai Woma	Kabupaten Jayawijaya
16	Pembangunan Jembatan Doyo 1	Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2016		
1	Pembangunan Jembatan Nawa	Kabupaten Jayapura
2	Pembangunan Jembatan S. Urpiah (50 M')	Kabupaten Jayapura
3	Pembangunan Jembatan S. Wopkan (40 M')	Kabupaten Jayapura
4	Pembangunan Jembatan S. Gau (50 M')	Kabupaten Jayapura
5	Pembangunan Jembatan S. War (30 M')	Kabupaten Jayapura
6	Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua) (MYC)	Kota Jayapura
7	Pembangunan Jembatan Wosi (100 M') (MYC)	Kabupaten Jayawijaya
8	Pembangunan Jembatan Ewa (25 M')	Kabupaten Jayapura
9	Pembangunan Jembatan Doyo 1	Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2017		
1	Pembangunan Jembatan Ewa (40 M') (Taja - SP V - Kwarja (106))	Kabupaten Jayapura
2	Pembangunan Jembatan Kertosari 4 (Kemiri - Depapre (111))	Kabupaten Jayapura
3	Pembangunan Jembatan Waibron (Kemiri - Depapre (111))	Kabupaten Jayapura
4	Pembangunan Jembatan Maribu (a) (Kemiri - Depapre (111))	Kabupaten Jayapura
5	Pembangunan Jembatan Pun (Bolakme - Kelila - Bokondini (167))	Kabupaten Jayawijaya
6	Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua)	Kota Jayapura
7	Pembangunan Jembatan Wosi (100 M') (Wosi - Wogi - Kimbim)	Kabupaten Jayawijaya
8	Pembangunan Jembatan S. Urpiah, 60 M' (Ruas Jalan Taja - SP V - Kwarja (106))	Kabupaten Jayapura
9	Pembangunan Jembatan Yosem (10 M') (Doubo - Sorendiwari - Amyas (135))	Kabupaten Supiori
10	Pembangunan Jembatan Yardori (10 M') (Doubo - Sorendiwari - Amyas (135))	Kabupaten Supiori
11	Pembangunan Jembatan Dekai - Logpond (Dekai - Logpon - Pattipi (160))	Kabupaten Yahukimo
12	Pembangunan Jembatan Amjaran III (40 M') (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Kabupaten Jayapura
13	Pembangunan Jembatan Plainegung (40 M') (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Kabupaten Jayapura
14	Pembangunan Jembatan Sanggai (50 M') (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Kabupaten Jayapura
15	Pembangunan Jembatan Demba I (60 M') (Botawa - Koweda - Barapasi (128))	Kabupaten Waropen
16	Pembangunan Jembatan Kauga (60 M') (Kaugapu - SP V)	Kabupaten Mimika
17	Pembangunan Jembatan Bindes I (30 M') (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	Kabupaten Jayapura



NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI
TAHUN ANGGARAN 2017		
18	Pembangunan Jembatan Kali Merah (25 M') (Arso XIV - Sawia - kwarja (114))	Kabupaten Keerom
19	Pembangunan Jembatan Anggiap (30 M') (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengan (110))	Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2018		
1	Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua)	Kota Jayapura
2	Pembangunan Jembatan Sanoba (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	Kabupaten Nabire

Perkembangan pembangunan dan pemeliharaan jembatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.54 Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun (MEq)			
	s/d 2015	2016	2017	2018
Jembatan Kondisi Mantap	3.383,50	3.558,50	3.838,50	3.859

Indikator Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari target yang ditetapkan sebesar 1:110 terealisasi 1:167 atau dengan capaian 65,87 persen. Nilai capaian tersebut diperoleh karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Provinsi Papua pada tahun 2018 sebanyak 679.530 unit. Sementara itu panjang jalan yang ada masih berada pada angka 4.077,79 Km sehingga dapat dikatakan kondisi lalu lintas jalan semakin padat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun (Unit/km)			
	s/d 2015	2016	2017	2018
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1 : 96	1:100	1:104	1:167

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun dari target yang ditetapkan sebesar 1 juta orang terealisasi 4.238.562 orang atau dengan capaian 423,86 persen. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun dari tahun 2013 sampai 2018 disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.56 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum per Tahun di Provinsi Papua Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun (orang)			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Per Tahun	577.335	197.953	283.347	2.237.230

Dari data yang disajikan pada tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan arus penumpang dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebanyak 45.470 orang atau 3,11 persen, dari 2014 ke tahun 2015 sebanyak 577,335 orang atau 38 persen, dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak 197,953 orang atau 9,5 persen tetapi mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebanyak 283,347 orang atau 12 persen dan tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebanyak 2.237.230 atau 211,80 persen dibanding tahun 2017.

Arus penumpang antar provinsi yaitu penumpang masuk ke Provinsi Papua dan keluar Provinsi Papua serta arus penumpang di dalam Provinsi Papua, melalui laut dan udara didukung dengan infrastruktur sebagai berikut:

1. Transportasi Udara

Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan menargetkan pembangunan sebanyak 9 (Sembilan) bandar udara untuk mendukung kebutuhan transportasi antar pulau maupun antar kabupaten, dari 9 target pembangunan bandar udara terealisasi sebanyak 7 bandar udara yaitu pembangunan peningkatan bandar udara Botawa di Kabupaten Waropen, peningkatan bandar udara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya, peningkatan bandar udara Fawi di Kabupaten Puncak Jaya wanggal, peningkatan bandar udara Ninia di Kabupaten Yahukimo, peningkatan bandar udara Panggema di Kabupaten Yahukimo, peningkatan bandar udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah dan peningkatan bandar udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya. Kemudian bandar udara yang tidak terealisasi sebanyak 2 yaitu bandar udara Mamit di Kabupaten Tolikara dan bandar udara Saminage di Kabupaten Yahukimo disebabkan proses pelelangan mengalami gagal lelang.

Harapan pemerintah atas dilakukannya peningkatan bandara-bandara tersebut adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga



meningkatkan kemudahan transportasi bagi masyarakat dan akhirnya dapat meningkatkan perputaran ekonomi dan sosial bagi masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Selain pemenuhan infrastruktur bandara, tersedianya maskapai penerbangan yang jumlah dan frekuensi penerbangannya semakin banyak dan melayani penerbangan keluar Papua maupun di dalam Papua juga menyebabkan semakin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan akses transportasi. Hingga tahun 2018, maskapai yang beroperasi di wilayah Papua antara lain : Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citylink Indonesia, Trigana Air Service, Sriwijaya Air, Nam Air, Enggang Air, Alda Air, AMA, Susi Air dan lain-lain. Semakin banyaknya maskapai yang beroperasi di wilayah Papua dengan frekuensi penerbangan yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi mobilitas masyarakat di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua semakin terbuka. Sayangnya data yang diperoleh mengenai frekuensi penerbangan berikut arus penumpangnya masih kurang lengkap sehingga kemungkinan besar masih banyak data yang belum tercatat dalam laporan ini. Perkembangan jumlah arus penumpang angkutan udara yang keluar dan masuk dari tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.57 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Udara di Provinsi Papua Tahun 2015-2018

No.	Jumlah arus penumpang	Tahun (MEq)			
		2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Arus Penumpang Masuk	1.486.578	1.779.183	1.851.720	1.976.082
2	Jumlah Arus Penumpang Keluar	1.593.209	1.880.882	1.751.288	2.065.448

Sumber data : Dinas Perhubungan Provinsi Papua

2. Transportasi Laut

Pulau Papua telah dikenal sebagai pulau yang banyak memiliki wilayah perairan baik laut, sungai maupun danau. Perairan tersebut sangat berperan penting dalam membuka konektifitas antar wilayah di dalam pulau Papua maupun antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua telah



mengupayakan secara maksimal untuk memanfaatkan ketersediaan perairan sebagai jalur transportasi alternatif yaitu dengan pembangunan dan peningkatan pelabuhan dengan target sebanyak 7 pelabuhan dan terealisasi sebanyak 7 pelabuhan antara lain pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen, pelabuhan Miosbipondi di Kabupaten Supiori, pelabuhan Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen, pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kabupaten Nabire, pelabuhan Kepi di Kabupaten Mappi, pelabuhan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel dan pelabuhan Pulau Wakde di Kabupaten Sarmi. Secara rinci arus penumpang yang masuk dan keluar melalui pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.58
Arus Penumpang Angkutan Laut Yang Masuk Dan Keluar Dalam Tahun 2015-2018

No.	Pelabuhan	Tahun			
		2015 (orang)	2016 (orang)	2017 (orang)	2018 (orang)
Arus Penumpang Yang Masuk					
1.	Jayapura	149.193	128.271	114.655	91.262
2.	Merauke	16.563	21.988	26.376	17.189
3.	Biak	-	27.497	37.063	-
Arus Penumpang Yang Keluar					
1.	Jayapura	144.351	119.526	106.898	73.156
2.	Merauke	16.442	17.729	20.835	15.526
3.	Biak	-	27.181	36.721	-

Sumber data : Dinas Perhubungan Provinsi Papua

Tabel di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) pelabuhan yang melaporkan data jumlah arus penumpang angkutan laut. Tahun 2018 Dinas Perhubungan Provinsi Papua sudah melakukan permintaan data melalui surat atas nama Gubernur Papua kepada semua pelabuhan dan dermaga di Kabupaten/Kota se Papua untuk menyampaikan jumlah arus penumpang baik yang masuk maupun yang keluar namun hingga pada sampai akhir tahun 2018 hanya 2 (dua) pelabuhan yang menyampaikan datanya.

Sasaran 17 : Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Air Dan Irigasi Dalam Mendukung Pengembangan Wilayah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah**” sebesar **1,70 persen** dengan predikat “**tidak berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.59 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CK T	2016		CK T	2017		CK R	2018		CK R	
		R	REALISASI		R	REALISASI		R	REALISASI		TARGET	T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Lahan Budidaya Pertanian Yang Mendapatkan Layanan Irigasi	Persen	65,00	63,80	98,15	65,00	67,33	103,58	70,00	80,16	114,51	114,51	4,35	3,80
2	Panjang Jaringan Irigasi Yang Kondisinya Baik	Persen	60,00	58,78	97,97	60,00	88,19	146,98	89,00	18,04	20,27	20,27	0	0
3	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Untuk Irigasi	Persen	65,00	6,78	10,43	15,00	28,50	190,00	28,50	6,83	23,96	23,96	0	0
4	Prosentase Cakupan Sistem Pengendalian Banjir Dan Abrasi	Persen	30,00	0,05	2,17	2,00	37,79	1889,50	2,00	26,70	1335,13	1335,13	40,00	3,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					52,18			582,52			373,47			1,70

Realisasi jaringan irigasi diwilayah provinsi Papua sebesar 4,35 persen dengan capaian kinerja 3,80 persen dengan kategori **tidak berhasil**. Pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga untuk meningkatkan hal tersebut diusahakan peningkatan pelayanan irigasi untuk mengalir sawah. Tahun 2018 Lahan pertanian didaerah Provinsi Papua seluas **43.669 ha²**, sedangkan yang dapat dialiri oleh saluran irigasi seluas **1.900**



ha² dengan **realisasi** jaringan irigasi di wilayah provinsi sebesar 4,35 persen dan capaian kinerja 3,80 persen dari target saluran irigasi sebesar 114,51 persen dengan kategori **tidak berhasil**.

Penurunan capaian kinerja disebabkan rendahnya lahan pertanian yang dapat dialiri dan penetapan target kinerja tahun 2018 sangat tinggi yaitu sebesar 114,51 persen. Penentuan target sebesar 114,51 persen karena pada tahun 2017 capaian kinerja sangat baik atau sebesar 114,51 persen dengan realisasi sebesar 80,16 dari target 70,00 persen.

Berikut perkembangan realisasi kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tertier di Provinsi Papua tahun 2014 sampai tahun 2018 yaitu :


Tabel 3.60 Perkembangan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

No	Nama Kabupaten/Kota	Tahun			
		2015 (ha)	2016 (ha)	2017 (ha)	2018 (ha)
1	Kabupaten Merauke	4.200	-	-	1.000
2	Kabupaten Jayapura	-	-	200	200
3	Kabupaten Nabire	900	500	-	500
4	Kabupaten Keerom	400	-	-	-
5	Kabupaten Mimika	200	-	-	100
6	Kota Jayapura	300	450	200	100
7	Kabupaten Mappi	200	-	-	-
8	Kabupaten Waropen	250	-	-	-
9	Kabupaten Jayawijaya	200	-	-	-
Jumlah		6.650	950	400	1.900

Sumber data : Dinas Pertanian Provinsi Papua Tahun 2018.

Realisasi indikator kinerja sasaran Jaringan irigasi yang kondisinya baik sebesar 0 persen dari target 20,27 persen dan capaian kinerja sebesar 0 persen dengan kategori **tidak berhasil**. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh pembatalan lelang mengingat waktu pelelangan dan jangka waktu pelaksanaan tidak memungkinkan. Adapun realisasi anggaran pada kegiatan irigasi yaitu hanya pembayaran honorarium PPTK dan ATK.

Realisasi indikator kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi adalah 0 persen dari target 23,96 persen dan capaian kinerjanya adalah sebesar 0 persen. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh pembatalan lelang mengingat waktu pelelangan dan jangka waktu pelaksanaan tidak memungkinkan. Adapun realisasi anggaran pada kegiatan irigasi yaitu hanya pembayaran honorarium PPTK dan ATK.



Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi adalah 40 persen dari target 1335,15 persen dengan capaian kinerjanya adalah sebesar 3 persen dengan kategori **tidak berhasil**, tahun 2018 terjadi penurunan capaian kinerja yang signifikan disebabkan target yang ditetapkan sangat besar hal ini dikarenakan capaian kinerja tahun 2017 sangat berhasil yaitu sebesar 1335,15 persen. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 daerah yang berpotensi banjir dan abrasi yang harus ditangani sebesar 25 M' dan daerah daerah banjir (abrasi) yang tertangani sebanyak 10 M' atau 40 persen.

Sasaran 18 : Meningkatkan Pemenuhan Perumahan Rakyat Yang Layak Huni.

Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari kepemilikan rumah di suatu daerah yang dimiliki oleh masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan suatu daerah menjadi barometer nya ternilai dari kepemilikan rumah masyarakat itu sendiri, sehingga bagi Pemerintah Daerah dimanapun berada termasuk di Provinsi Papua berusaha dalam peningkatan rumah warga dan mengalokasikan dana untuk rakyat agar bisa lebih hidup sejahtera serta layak nya rumah tersebut untuk berlindung bersama keluarga dengan arti kata Rumah Layak Huni bukan Rumah yang Kumuh atau Tidak Sehat. Dengan terbangunnya Rumah Layak Huni maka Pemerintah telah melakukan Sila ke 5 dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sasaran Meningkatkan pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni sesuai **Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.** Dalam sasaran ini diukur dengan pencapaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu pemenuhan Rumah Layak Huni, dengan **target sebesar 100.00 persen dan realisasi sebesar 133.00 persen, dengan capaian kinerja sebesar 133.00 persen** atau dalam skala ordinal adalah **"Sangat Berhasil"**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.61 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 18

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CK T	2016		CK T	2017		CK R	2018		CK R	
		R	REALISASI		R	REALISASI		R	REALISASI		TARGET	T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibutuhkan	Persen	5.00	5.00	100.00	40.00	52.51	131.28	50.00	217.45	434.09	100.00	133.00	133.00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				100.00		131.28		434.09			133.00			

Indikator Jumlah Rumah Layak Huni yang dibutuhkan dengan Target 100,00 persen, Realisasi 133.00 persen dengan capaian kinerja 133.00 persen dengan kategori Sangat berhasil. Kebutuhan rumah layak huni di Provinsi Papua adalah sebesar 13.000 sesuai RPJMD Provinsi Papua periode 2014-2018. Realisasi di tahun 2016 sebesar 52,51



persen atau melampaui target yaitu **13.560** dan realisasi di Tahun 2017 sebesar 217.45 persen atau melampaui target menjadi **13.874** dan di Tahun 2018 realisasi sebesar **133.00** persen atau melampaui target yaitu **14.007** dan dimana ada beberapa instansi yang mengerjakan pembangunan Rumah Layak Huni, berdasarkan data yang dihimpun oleh BAPPEDA yaitu Pembangunan Rumah Layak Huni dibangun oleh :

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Kementerian Pekerjaan Umum
3. Kementerian Sosial
4. Dinas Sosial dan Pemukiman
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
7. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri

Data **2016** menunjukkan bahwa Jumlah Rumah Layak Huni yang sudah dibangun adalah **12.690** unit (sumber data : Bappeda Provinsi Papua) dan dari Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Jumlah Rumah Layak Huni yang sudah dibangun adalah **870** unit sehingga total Jumlah Rumah Layak Huni yang sudah dibangun di tahun 2016 adalah **13.560** unit.

Jumlah Rumah Layak Huni walau sudah melampaui target di Tahun 2016, namun tetap dilaksanakan pembangunannya karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki atau menghuni rumah milik sendiri/milik keluarga. Tahun **2017** Rumah Layak Huni yang dibangun Pemerintah Provinsi Papua melalui **Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua** adalah **110 Unit** dan **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua** adalah **204 Unit**, sehingga jumlah pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2017 adalah **307** unit Layak Huni, sehingga Total Rumah Layak Huni di **tahun 2017** adalah **13.874** unit. pembangunan Rumah Layak Huni tahun 2018 adalah **133** unit Layak Huni, sehingga Total Rumah Layak Huni di **tahun 2018** adalah **14.007** unit Rumah Layak Huni.

Tabel 3.62
Perkembangan pembangunan Rumah Layak Huni yang dibangun di tahun 2017

NO	NAMA SKPD	JUMLAH (UNIT)
I	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua	
	Kota Jayapura :	
	Distrik Aurina Kampung Soa-Soa	30
	Distrik Meilli Kampung Naira	30
	Kab. Merauke :	
	Distrik Tubang Kampung Yowied	50
TOTAL		110
II	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua (rincian tabel terlampir)	
TOTAL		204

**Tabel 3.63 Pembangunan Rumah Layak Huni Tahun 2014 - 2016
Oleh Instansi Lain Di Provinsi Papua**

NO	KOTA / KABUPATEN	PELAKSANAAN KEGIATAN																					JUMLAH
		KEMENTERIAN TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			KEMENTERIAN SOSIAL			DINAS SOSIAL DAN PERMUKIMAN PROVINSI			DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI			DINAS TENAGA KERJA & KEPENDUDUKAN		PERBATASAN	KABUPATEN / KOTA			
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2013	2016	2014	2014	2015	2016	
MAMTA																							
1	Kota Jayapura				19	50					10	8	4	19	5		46		65	45	54	325	
2	Kab Jayapura				20	130	50	40			10	7	29	13	5	16	20		44	52	39	475	
3	Kab Keerom	50	50	100	15	200			54			10	3	10	8			10	42	21	52	625	
4	Kab Sarmi				16							10	4	4	3				90	35		162	
5	Kab Mamberamo Raya				35				67										32	48	105	309	
SAERERI																							
6	Kab Supiori				16		4						4	4	4	2			757	275	37	1,103	
7	Kab Waropen				21		5						6	5	4					20	106	167	
8	Kab Biak Numfor				21	10	87						6	8	4	2	5		88	88	144	463	
9	Kep Yapen				16	10	110						4	5	8				73	96	91	413	
MEEPAGO																							
10	Kab Mimika				16	30							3	6	4	3			102	80	65	309	
11	Kab Nabire				77	50							4	9	5		5		42	42	42	276	
12	Kab Paniai				28	110							6	5	4				38	38	38	267	
13	Kab Deiyai				30	120	6						6	6	7	5			-	30	-	210	
14	Kab Dogiyai				30	60	6						6	6	3		5		30	30	-	176	
15	Kab Intan Jaya				30		9						6	5	2				25	30	51	158	
LAPAGO																							
16	Kab Jayawijaya				27	52							9	11	6	10	10			12	40	177	
17	Kab Lanny Jaya				38	30	17						14	10	6						1,000	1,115	
18	Kab Nduga				26								6	6	6				50	29	43	166	
19	Kab Mamberamo Tengah				49								14	11	3				52	78	71	278	
20	Kab Tolikara				39	10							14	4		5			20	88	39	219	
21	Kab Yahukimo				39		84						15	10	7				69	196	162	582	
22	Kab Yalimo				42	10							18	8	5				50	50	50	233	
23	Kab Puncak Jaya				37	49	132						12	7	6				64	30	24	361	
24	Kab Puncak				39		27						14	7					-	29	32	148	
25	Kab Peg Bintang				11		22						11	9	5				189	146	68	461	
ANIM HA																							
26	Kab Merauke	100	100	100	15	220							3	6	3				253	246	277	1,323	
27	Kab Asmat				29		114						8	7	6				331	191	305	991	
28	Kab Boven Digoel				44	67	165						4	4	4				49	37	38	412	
29	Kab Mappi				21		40						6	6	4				50	56	75	258	
SUB TOTAL		150	150	200	846	1,208	878						249	219	131	43	91	10	2,605	2,118	3,048		
TOTAL		500			2,932			744			599			134			10		7,771			12,690	

Tabel 3.64 Pembangunan Rumah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2017

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
Program Pengembangan Perumahan					
A	Wilayah Saireri				
	Biak Numfor	8			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Kota/Karyendi		Daniel Rummaropen
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Kota/Karyendi		Mathias Ronsumbre
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Kota/Karyendi		Markus Korwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Kota/Swapodibo		Mince Ronsumbre
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Utara/Yawosi/Fanindi		Agustina Rummar
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Utara/Aman		Sakarias Smas
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Utara/Aman		Lewi Krar
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Biak Numfor		Biak Numfor/Biak Utara/Aman		Dolfinus Krar
	SUPIORI	3			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori		Supiori/Supiori Timur/Yendoker		Welmince Woof
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori		Supiori/Supiori Utara/Warsa		Yuliana Rumbino
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Supiori		Supiori/Supiori Timur/Wafor		Dorsila Binun
	WAROPEN	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen		Waropen/Urfas/Kainubuat		Noak Rogi
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen		Waropen/Urfas/Apainabo		Otis Saidui
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen		Waropen/Urfas/Apainabo		Amos Repasi
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen		Waropen/Urfas/Kainubuat		Yokbet Repasi
	KEPULAUAN YAPEN	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen		Kep. Yapen/Yapen Selatan/Aimandoa		Habel Kansai
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen		Kep. Yapen/Anataurei/Mantembu		Agustinus Muai
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen		Kep. Yapen/Anatorei/Yapan		Aser Airei
Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen		Kep. Yapen/Anatorei/Yapan		Kornelia M.Wayeri	
B	WILAYAH MAMTA				
	KOTA JAYAPURA	19			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Jayapura Utara/Kel.Imbi		Yosep Aninam
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Jayapura Utara/Kel.Tanjung Ria		Indiwan Karubaba
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Vim		Ruth N Ireeuw
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Vim		Ema Heny Raunsay



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Wahno		Pdt.A.Takayeitouw
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Wahno		Depenius Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Wahno		Wai Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Asano		Luter Tabuni/Warni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Heram/Kel.Yabansai		Freni Labene
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Heram/Kel.Yabansai		Zakarias Labene
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Heram/Kel.Yabansai		Kalinus Tabuni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Heram/Kel.Hedam		Dena Murib
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Heram/Kel.Hedam		Karil Tabuni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Asano		Ketina Wenda
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Asano		Ema Murib
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Asano		Kana Murib
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Abepura/Kel.Asano		Pidanus Kogoya
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Muaratami/Kel.Koya Barat		Rian Lengka
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kota Jayapura		Kota Jayapura/Muaratami/Kel.Koya Barat		Panus Lengka
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni Kota Jayapura (G E L)	13	Kota Jayapura		
	KAB.JAYAPURA	18			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Kayafas Yemek
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yondius Wea
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yahya Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Ameleki Enumbe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Samson Bembok
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yondimera Jikwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yamenu Wea
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Timotius Wea
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yerina Wea
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yolimes Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Edimmira Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Nus Wea
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Tupiles Enembe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Weni Helena Ohee

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Yonathan Tauna
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayapura		Kab.Jayapura/Setani Barat/Kel.Sabron Sari		Gereja Babtis
	KAB. KEEROM	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom		Kab.Keerom/Arso Kota/Dunumamoi		Sebastian Girbes
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom		Kab.Keerom/Arso Kota/Dunumamoi		Elsina Tuamis
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom		Kab.Keerom/Arso Kota/Dunumamoi		Pius Borotian
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom		Kab.Keerom/Arso Kota/Dunumamoi		Prontasius Borotian
	KAB.MAMBRAMO RAYA	13			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Simon Soririm
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Alfons Kotame
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Oskar Petoni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Manuel Pipiso
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Obet Petoni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Nataniel Petoni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Bernard Soririm
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Darius Soririm
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Habel Kotame
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Ismael Wanda
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Yafet Kotame
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Simon Petoni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya		Kab.MambramoRaya/Hilir/Trimuris		Andreas Soririm
	KAB.SARMI	6			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		Yosefina
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		H.Nefrezer
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		Bahti
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		Ludia Dimor



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		Daniel Wesiau
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi		Kab.Sarmi/ / Sewan		Martina Yarangga
C	WILAYAH LAPAGO				
	KAB.MAMBERAMO TENGAH	5			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah		Kab.Mamteng/Kelila/Dogobah		Amos Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah		Kab.Mamteng/Kelila/Dogobah		Lius Ikwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah		Kab.Mamteng/Kelila/Dogobah		Tenor Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah		Kab.Mamteng/Kelila/Dogobah		Robi Yikwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah		Kab.Mamteng/Kelila/Dogobah		Yotam Yikwa
	KAB.NDUGA	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga		Kab.Nduga/Kenyam/Nogolaid		Nahum Lokbere
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga		Kab.Nduga/Kenyam/Nogolaid		Naiten Ubruangge
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga		Kab.Nduga/Kenyam/Nogolaid		Binanggen Gwijangge
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga		Kab.Nduga/Kenyam/Nogolaid		Lapenus Kalnea
	Kab.LANNY JAYA	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya		Kab.Lanny Jaya/Pirime/Tekul		Budina Kogoya
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya		Kab.Lanny Jaya/Pirime/Tekul		Lius Wakerkwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya		Kab.Lanny Jaya/Pirime/Tekul		Yudas Wakerkwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya		Kab.Lanny Jaya/Pirime/Tekul		Yosep Wakerkwa
	KAB.YALIMO	5			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo		Kab.Yalimo/Abenaho/HUL HULE		Emina Wandik
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo		Kab.Yalimo/Abenaho/HUL HULE		Yonam Kossai
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo		Kab.Yalimo/Abenaho/HUL HULE		Ukahe Yare
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo		Kab.Yalimo/Abenaho/HUL HULE		Husomende Loko
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo		Kab.Yalimo/Abenaho/HULikma		Yosam Loho
	KAB.TOLIKARA	13			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Yamen Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Lena Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Paiby Payokwa

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Kriten Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Onelck Tabuni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Keram Pengu
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Pdt.Herbin Baminggen
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Oris Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Yopi Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Meki Baminggen
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Ponggo Pagawak
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Daniel Tabuni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara		Kab.Tolikara/Bokondini/		Alpius Pagawak
	KAB.JAYAWIJAYA	3			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya		Kab.Jayawijaya/Hibigima/Wesaput		Sayok Asso
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya		Kab.Jayawijaya/Hibigima/Wesaput		Mogoma Wetipo
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya		Kab.Jayawijaya/Hibigima/Wesaput		Tekogo Wetipo
	KAB.PUNCAK	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak		Kab.Puncak/Gome/Jengernok		Ato Tabuni
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak		Kab.Puncak/Gome/Jengernok		Derbe Murib
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak		Kab.Puncak/Gome/Jengernok		Yukingan Murib
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak		Kab.Puncak/Gome/Jengernok		Boas Tabuni
	KAB.PEGUNUNGAN BINTANG	7			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Yermias Uropmabin
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Fery Uropmabin
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Cosmas Uropmabin
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Yupensius Tapyor
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Demianus Lepki
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Demianus Bamulki
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang		Kab.Pegunungan Bintang/Oksibil/Kabiding		Kornelia Oktemka

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	KAB.YAHUKIMO	6			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Isak Lokon
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Yohanes Lokon
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Otopianus Matuan
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Alex Esema
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Yoas Esema
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo		Kab.Yahukimo/Dekai/Sumohai		Panus Siep
	KAB.PUNCAK JAYA	5			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya		Kab.Puncak Jaya/Mulia/Trikora		Timinus Telenggen
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya		Kab.Puncak Jaya/Mulia/Muliagambut		Agus Wonda
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya		Kab.Puncak Jaya/Mulia/Yaligua		Osmin Enumbi
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya		Kab.Puncak Jaya/Mulia/Pruleme		Misen Wonerengga
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya		Kab.Puncak Jaya/Mulia/Wuyuneri		Kelemas Telenggen
D	WILAYAH MEEPAGO				
	KAB.DOGIYAI	5			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai		Kab.Dogiyai/Kamuu/Mauwa		Yulita GOO
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai		Kab.Dogiyai/Kamuu/Mauwa		Martina GOO
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai		Kab.Dogiyai/Kamuu/Mauwa		Tebamadi Tebay
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai		Kab.Dogiyai/Kamuu/Mauwa		Theresia GOO
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai		Kab.Dogiyai/Kamuu/Mauwa		Yoske Tebay
	KAB.DEIYAI	6			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Yipai		Irenius Ukago
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Diyai I		Rufus Ukago
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Diyai I		Yanuaris Ukago
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Diyai I		Rosa Waine
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Onago I		Karolus Giyai
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deyyai		Kab.Deiyai/Tigibarat/Onago 2		Menase Giyai
	KAB.MIMIKA	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika		Kab.Mimika/Wania/Mowokauw Jaya		AlfiSIUS Way
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika		Kab.Mimika/Wania/Mowokauw Jaya		Eky Hombore
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika		Kab.Mimika/Wania/Kel.Wania		Stevanus Harewan
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mimika		Kab.Mimika/Wania/Nawaripi		Thomas Mauri

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	KAB.NABIRE	10			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Persila Mnubefor
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Alfred M Korwa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Dortheus Rumbiapuk
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Penina Msiren
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Sergius Arwakon
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Abriani Ngangangor
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire Rmh Pastori		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Pdt.Hengky Weona Tereigret
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire Rmh Pastori		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Pdt.Maria Mandosir,FFI
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire Rmh Pastori		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Pdt.SUDIONO
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nabire Rmh Pastori		Kab.Nabire/ /Kaliharapan		Penatua Marali Samosir
	KAB.PANIAI	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai		Kab.Paniai/ / Pugo		Germanus Bunai
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai		Kab.Paniai/ / Enarotali		Nelly M Yeimo
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai		Kab.Paniai/ / Paniai		Anakletus Doo/Nawipa
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai		Kab.Paniai/ / Kopo		Wolset Kayame
	KAB.INTAN JAYA	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya		Kab.Intan Jaya/Sugapa/Yalai		Pius Nambagani
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya		Kab.Intan Jaya/Sugapa/Yalai		Simion Nambagani
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya		Kab.Intan Jaya/Sugapa/Titigi		Welslaus Zonggonau
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya		Kab.Intan Jaya/Sugapa/Titigi		Pelipus Abugau
E	WILAYAH ANIM HA				
	KAB.BOVEN DIGOEL	5			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel		Kab.Bovendigul/Mandobo/Sokanggo		Maikel Butiyop
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel		Kab.Bovendigul/Mandobo/Sokanggo		Alosius Sokanggo
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel		Kab.Bovendigul/Mandiptana/Asso		Irenius Imbanop
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel		Kab.Bovendigul/Waropko/Kanggewot		Amalia Benarop
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel		Kab.Bovendigul/Waropko/Waropko		Karola Woknon
	KAB.MERAUKE	8			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Mearuke/Kel.Mandala		Israel.R.Mahuse
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Mearuke/Kel.Mandala		Fransiska Youmen

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	JLH UNIT	LOKASI		
			KAB / DISTRIK / KAMPUNG	TITIK KOORD	PENERIMA
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Merauke/Kel.Samka		Lukas Mahuse
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke / Merauke / Kel.Rimbajaya		Januaris Kuwok
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Kurik/Kurik		Syanuddin segang
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Kurik/Kurik		Agnes Gebse
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Kurik/Kurik		Yonas Paliama
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Merauke		Kab.Merauke/Kurik/Kurik		Yan Ndiken
	KAB.MAPPI	4			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi		Kab.Mappi/Obaa/Obaa		Monika Tokomonowir
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi		Kab.Mappi/Obaa/Obaa		Beni Efe
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi		Kab.Mappi/Obaa/Obaa		Yanuaris Agawemu
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi		Kab.Mappi/Obaa/Kepi		Yustina Dadimu
	KAB.ASMAT	6			
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Didimus Mamcan
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Longginu Daseimen
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Ferdinandus Beworpits
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Daniel Kapi
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Lambertus Apoknam
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat		Kab.Asmat/Jetsi/Warse		Petrus Binisim
	J U M L A H	204			

Tabel 3.65 Pembangunan Rumah oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2018

**JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI YANG DIBANGUN
DI 29 KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH YANG DIBANGUN
1	Kabupaten Jayapura	4
2	Kota Jayapura	10
3	Kabupaten Keerom	9
4	Kabupaten Sarmi	5
5	Kabupaten Mamberamo Raya	4
6	Kabupaten Lanny Jaya	2
7	Kabupaten Jayawijaya	4
8	Kabupaten Yalimo	4
NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RUMAH YANG DIBANGUN
9	Kabupaten Yahukimo	3
10	Kabupaten Pegunungan Bintang	2
11	Kabupaten Puncak Jaya	4
12	Kabupaten Nduga	4
13	Kabupaten Tolikara	17
14	Kabupaten Mamberamo Tengah	4
15	Kabupaten Puncak	5
16	Kabupaten Asmat	3
17	Kabupaten Mappi	4
18	Kabupaten Merauke	6
19	Kabupaten Boven Digoel	3
20	Kabupaten Waropen	3
21	Kabupaten Supiori	3
22	Kabupaten Yapen	5
23	Kabupaten Dogiyai	4
24	Kabupaten Deiyai	3
25	Kabupaten Intan Jaya	4
26	Kabupaten Biak	4
27	Kabupaten paniai	3
28	Kabupaten Mimika	4
29	Kabupaten Nabire	3
	J U M L A H	133
Sumber : Laporan kinerja (LKj) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2018		



Tabel 3.66
DAFTAR NAMA - NAMA

**PENERIMA HIBAH RUMAH RAKYAT LAYAK HUNI TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA**

NO.	NAMAPENERIMA RUMAH / HIBAH	LOKASI	KET
1	2	3	4
WILAYAH ADAT MANTA			
KAB. KEEROM			
1.	Pdt. Frans Mambrasar, S.Th	Kamp. Dukwia Kec. Arso Barat	2 Unit Rumah untuk Sinode
2.	Hans Sudumeru	Kampung Kwimi Kec. Arso	
3.	Rose Wellip	Kampung Kwimi Kec. Arso	
4.	Samuel Saiwe	Kampung Umuat, Kec. WEB.	
5.	David Solowop	Kampung Kwimi Kec. Arso	
6.	Peter Wellip	Kampung Kwimi Kec. Arso	
7.	Theo Asso	Jl. Poros-Arso VI, Kamp. Yummua	
KOTA JAYAPURA			
8.	Pdt. Hiskia Rollo, S.Th, MM	Jln. Argapura No. 21	4 Unit Rumah Untuk Sinode
9.	Hadiman Asso	Angkasa AURI	
10.	Oktofina Aksamina. A.	Aspol SPN Basae G	
11.	Johan Godelief Nussy	Jl. Gereja Moria Kotaraja	
12.	Yohanis Victor Rumere	Kamp. YPK Kotaraja Dalam	
13.	Chem Rontini	Jl. Ahmad Yani No. 59	
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA			
14.	Oktaviana Mgop	Kampung Burmeso	
15.	Yustina Tasti	Kampung Burmeso	
16.	Alberth Tasti	Kampung Burmeso	
17.	Volex Tasti	Kampung Burmeso	
KABUPATEN JAYAPURA			
18.	Barnabas Awoitau	Kampung Yokiwa	
19.	Hermana Yelipele	Kam. Doyo Baru	
20.	Theofilus Deda	Kampung Harapan	
21.	Novilus T. Yoku	Jln. Kuburan Sentani	
KABUPATEN SARMI			
22.	Oktovianus Weiraso	Kelurahan Amsira Kec. Ferkame	
23.	Yosefina Wanewar	Kelurahan Amsira Kec. Ferkame	
24.	Henok Wasis	Kelurahan Amsira Kec. Ferkame	
25.	Marice Numbre	Kelurahan Amsira Kec. Ferkame	
26.	Andrias Wasis	Kelurahan Amsira Kec. Ferkame	
WIL. ADAT LAPAGO			
KABUPATEN LANNY JAYA			
27.	Michel Bram Douw	Kamp. Kabiga An Dis. Buguk Gonak	

28	Dekina Wakerkwa	Kampung Telul Atas	
KABUPATEN JAYAWIJAYA			
29.	Resmin Kogoya	Kampung Sinagma	
30.	Batagima Tabuni	Kampung Kimbim	
31.	Wemina Kogoya	Kampung Hituima	
32	Yunus Tabuni	Kampung Kimbim	
KABUPATEN YALIMO			
33.	Yulius Kobak	Kampung Tanah Pasir	
34.	Jon Peyon	Kampung Elilim Lama	
35.	Ruth Peyon	Kampung Tanah pasir	
36	Melkius Kenelak	Kampung Holuwon 2	
KABUPATEN YAHUKIMO			
37	Derki Mirin	Kamp. Orisin Distrik Sela	
38	Selendam Busub	Kamp. Korupun Distrik Korupun	
39	Yames Busup	Kamp. Korupun Distrik Korupun	
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG			
40	Kristina Banglip Uropmabin	Desa malbib Silibib Kec. Oksibil	
41	Bisilia Uropmabin	Desa Kabiding Kec. Oksibil	

KABUPATEN PUNCAK JAYA			
42	Yailes Telenggen	Kel. Muliambut Distrik Pagaleme	
43	Kolari Wonerengga	Kel. Urgele Distrik Gurage	
44	Doeri Wonda	Wuyukwi Distrik Mulia	
45	Marina Wonda	Kel. Wunagelo Distrik Yamo	
KABUPATEN NDUGA			
46	Anta Kolie	Kenyem	
47	Dise Murif	Kenyam	
48	Irumina Kogeya	Dakbira	
49	Wali Waseyangge	Keyam	
KABUPATEN TOLIKARA			
50.	Dena Weya	Kamp. Kanggime Distrik Kanggime	
51.	Yobenus Weya	Kampung Kagi Distrik Telenggeme	
52.	Pileki Wakur	Kampung Kanggime	
53	Antonia Wakur	Kampung Paongga	
54.	Seli Weya	Kampung Wesaput	
55.	Amira Wanimbo	Kamp. Ilokama Distrik Wesaput	
56.	Antoweyi Kogoya	Kamp. Karubaga Distrik Karubaga	
57.	Tadina Karoba	Kampung Mamit	
58.	Ubena Enembe	Kampung Usir Distrik Mulia	
59.	Kundi Enumbi	kampung usir Distrik Mulia	
60.	Nuriana Gombo	Kampung Bugi	
61.	Yosean Enumbi	Kamp. Yowo Distrk Kembu	
62.	Patiyus Weya	Kampung Tolikara	
63	Meta Weya	Kampung Wesaput Distrik Wesaput	
64	Mina Wenda	Kamp. Kembu Distrik Kembu	
65	Hanna Yigibalon	Kamp. Karubaga Distrik karubaga	

66	Limus Wakur	Kampung Wesaput Distrik Wesaput	
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH			
67	Pdt. Kiname Yikwa	Kampung Pekime Distrik Kelila	
68	Gembala Pert Yikwa	Kampung Pekime Distrik Kelila	
69	Gembala Duri Kogoya	Kampung Togirik Distrik Kelila	
70	Pdt. Dines Yikwa	Kampung Togiri Distrik Kelila	
KABUPATEN PUNCAK			
71	Simon Wakerkwa	Kampung Yonggogola Distrik Gome	
72.	Melius Murip	Kampung Kimak Distrik Ilaga	
73.	Kipuruk Kogoya	Kampung Kago Distrik Ilaga	
74	Jembatan Murib	Kampung Kimak Distrik Ilaga	
75	Atisu Kogoya	Kampung Nipuralume Distrik Ilaga	
WIL. ADAT ANIMHA			
KABUPATEN ASMAT			
76	Markus Payage	Kamp. Suru-Suru	
77	Petrus Heluka	Kamp. Suru-Suru	
78	Etius Payage	Kamp. Suru-Suru	

KABUPATEN MAPPI			
79	Petrus Erro	Kamp. Emote Distrik Obaa	
80	Rosa asagi	Jl. Tanjung Kopi Distrik Obaa	
81.	Magdalena Kamkopimu	Kampung Digimo Distrik Obaa	
82	Agustina Yati Manggaimu	Kampung Digimo Distrik Obaa	
KABUPATEN MERAUKE			
83	Theresia Belekubun	Jl. Karang Indah	
84	Deni F Mambor	Dusun Warambak	
85	Matelda Kaise	Dusun Warambak	
86	Yuliana Hariyanto	Jln Polder Dalam III	
87	Aleksius Tonda	Jl. Sayap II	
88	Said Doali	Jl. Garuda Mopa Lama	
KABUPATEN BOVEN DIGOEL			
89	Michael P. Minipko	Kampung Sokanggo Distrik Mandobo	
90	Yosua B. Papey	Kamp. Persatuan Distrik Mandobo	
91	Andi Sopyan	Kamp. Persatuan Distrik Mandobo	
WIL. ADAT SAIRERI			
KABUPATEN WAROPEN			
92	Korinus Sarori	Kampung Nubuai	
93	Aplena Agustina Imbenai	Kampung Mambui	
94	Darius Ruatakurei	Kampung Apainabo	
KABUPATEN SUPIORI			
95.	Mathias Miniber	Kamp. Sauyas Distrik Supiori Timur	
96.	Otniel Amunaw	Kamp. Soredidori Dist. Supiori Timur	
97	Maya yakadewa	Kamp. Waryesi Distrik Supiori Timur	
KAB. KEPULAUAN YAPEN			
98	Elisa Aurai	Kamp. Weawuti Distrik Wadamomi	
99	Agus Dekulates Aurai	Kamp. Weawuti Distrik Wadamomi	



100	Nimbrod Woru	Kamp. Wirari Dis. Yapen Selatan	
101.	Selvia kante	Kamp. Wirari Dis. Yapen Selatan	
102	Yuliana Sapari Dwiri	Kamp. Wainakawini Distrik Anatorei	
KABUPATEN DOGIYAI			
103	Martin Agapa	Kampung Ugapuga	
104	Simon Goo	Kampung Ekimani	
105	Barnabas Dumupa	Kampung Pugatadi	
106	Veronica Goo	Kampung Idakebo	
KABUPATEN DEIYAI			
107	Makalia Adii	Kampung Diyai2	
108	Jeri Giyai	Kampung Ohago 1	
109	Wenas Giyai	Kampung Ohago	
WILAYAH ADAT MEPAGO			
KAB. INTAN JAYA			
110	Esau Kundiau	Kampung Biandoga Distrik Biandoga	
111	Thomas Agimbau	Kampung Biandoga Distrik Biandoga	
112	Albert Sabisani	Kamp. Ndatadi Distrik Ndatadi	
113	Niko Nagapa	Kampung Pagamba Distrik Biandoga	

BIAK KOTA			
114	Ida Krey	Kampung Biak Kota	
115	Katerina Rumaykewy	Kamp. Baru Distrik Samofa	
116	Simon Manggaprouw	Kamp. Wirinfri Distrik Wunin	
117	Antonius Mayor	Kamp. Sambawofuah Distrik Samofa	
KABUPATEN PANIAI			
118	Yulius Magai	Kampung Enarotali	
119	Zet Kudiai	Kampung Dupia	
120	Alomina Muyapa	Kampung Meniyaibutu	
KABUPATEN MIMIKA			
121	Yotom Woru	Kampung Kebun Siri	
122	Pdt. Gimam Magai	Kampung Waa	
123	Margretha Maniakori	Kampung Koprakoka	
124	Korea Wakerwa	Kampung Minibuah	
KABUPATEN NABIRE			
125	Agustina Rumawi	Kampung Kalibobo	
126	Yustina Burdam	Kampung Kalibobo	
127	Yokbet Aduari	Kampung Kalibobo	
JUMLAH RUMAH YG DIBANGUN			133 UNIT
Sumber : Laporan kinerja (LKj) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Papua Tahun 2018			

Sasaran 19 : Meningkatnya pemenuhan air bersih

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran “**meningkatnya pemenuhan air bersih**” adalah 78,58 persen atau dalam skala ordinal adalah “**Berhasil**” Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut ini :

Tabel 3.67 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 19


INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase RT Yang Terlayani Air Bersih	Persen	55,00	50,00	90,91	55,00	43,82	79,67	55,00	43,19	78,53
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN											78,53

Fokus perhatian Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2018 yang menitik beratkan pada persiapan pelaksanaan PON XX tahun 2020 yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua sangat mempengaruhi capaian kinerja dalam sektor ini, di mana capaian kinerjanya hanya 43,22 persen dari target 55,00 persen.

Hal ini disebabkan adanya pengalihan kegiatan kepada mempersiapkan jaringan air bersih pada venue yang ada di sekitar Stadion Papua Bangkit, sehingga sebagian besar anggaran dialokasikan pada kegiatan tersebut. Kegiatan yang terkait pada capaian pemenuhan air bersih hanya dilakukan pada kampung Kalkhote yang melayani 190 KK atau Sambungan Rumah (SR).

Meskipun realisasi Rumah Tangga (RT) yang terlayani air bersih hingga tahun 2018 baru mencapai 281.749 RT/KK dari jumlah RT/KK yang membutuhkan sebanyak 651.889 atau hanya 43,22 persen dari target 55,00 persen, dengan demikian capaian kinerja adalah 78,58 persen, termasuk dalam kategori “**Berhasil**”.

Capaian jumlah RT/KK yang terlayani sebesar 281.749 adalah akumulasi dari capaian tahun 2016 jumlah RT/KK sebanyak 281.229, tahun 2017 jumlah RT/KK sebanyak 330 RT/KK, dan tahun 2018 sebanyak 190 RT/KK. Hal ini juga dipengaruhi oleh program prioritas yang dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya sebelum tahun



2016 lebih terfokus kepada Pembangunan Rumah Layak Huni, sehingga baru setelah tahun 2016 diprogramkan pelayanan air bersih tersebut.

Tabel 3.68
Persentase Rumah Tangga (RT) yang terlayani Air Bersih

No.	Uraian	Tahun (KK)		
		2015	2016	2017
1	Persentase RT yang terlayani air bersih	257.587	281.229	281.559

Sasaran 20 : Meningkatnya Pemenuhan Energi Murah Dan Ramah Lingkungan

Capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan”** sebesar 0 persen. Hal ini disebabkan oleh karena proses pelelangan yang dilakukan oleh Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa batas akhir transfer dana DAK 2018 jatuh pada tanggal 23 juli 2018, sedangkan sesuai dengan perhitungan waktu maka kontrak baru bisa ditandatangani pada tanggal 27 juli 2018 sehingga proses lelang tidak dapat dilanjutkan, karena akan mendapatkan **“finalti waktu”** sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas.

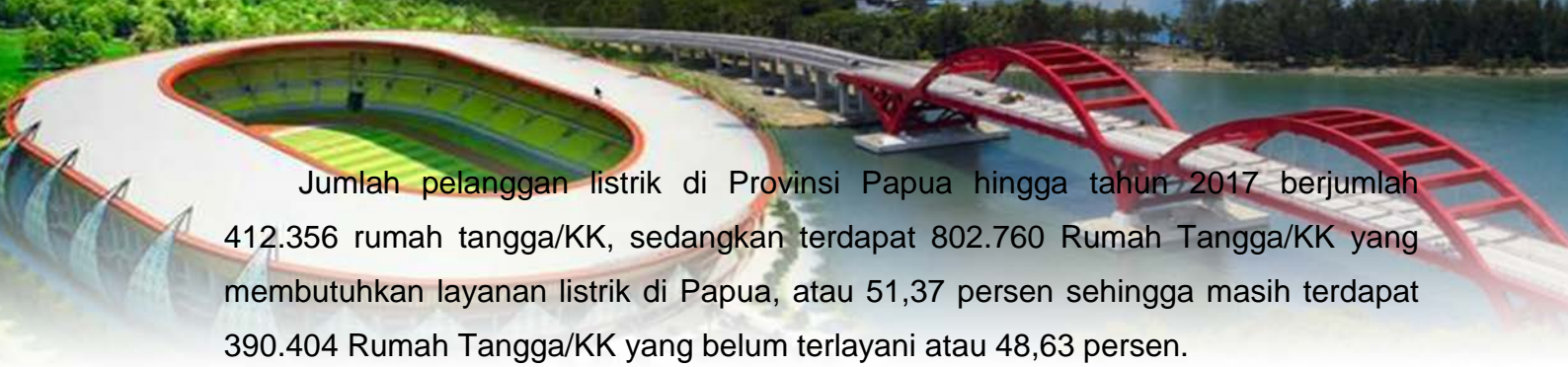
Terdapat 20 (dua puluh) unit PLTS Terpusat dan PLTMH yang seharusnya terbangun pada tahun 2018 dengan kapasitas terpasang sebesar 870.000 watt, sehingga bila diasumsikan per Rumah Tangga/Kepala Keluarga sebesar 300 watt, maka akan dapat melayani 2.900 RT/KK.

Selain karena lelang yang tidak dapat dilanjutkan, juga karena koordinasi yang kurang baik dengan pihak PT. PLN Persero maka terdapat 12 (dua belas) pekerjaan PLS Terpusat dan 1 (satu) pekerjaan PLTMH yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena terdapat **“tumpang tindih”** lokus pembangunan.

Capaian **“Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan”** diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.69 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	37,00	38,44	103,89	40,00	50,97	127,42	50,00	50,97	101,94
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					103,89			127,42			101,94

An aerial photograph of a large, modern stadium with a distinctive red, curved roof structure. The stadium is situated on a grassy area next to a body of water. A red, arched bridge spans across the water, connecting the stadium area to the opposite shore. The surrounding landscape is lush with green trees and vegetation.

Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Papua hingga tahun 2017 berjumlah 412.356 rumah tangga/KK, sedangkan terdapat 802.760 Rumah Tangga/KK yang membutuhkan layanan listrik di Papua, atau 51,37 persen sehingga masih terdapat 390.404 Rumah Tangga/KK yang belum terlayani atau 48,63 persen.

Sasaran 21 : Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten**” sebesar 100,00 persen dengan predikat “**sangat berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.70 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 21

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Penerbitan Ijin Penggunaan Lahan Skala Luas Yang Sesuai Dengan Peruntukannya	Persen	70,00	100,00	142,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN				142,86		100,00		100,00		100,00		100,00		

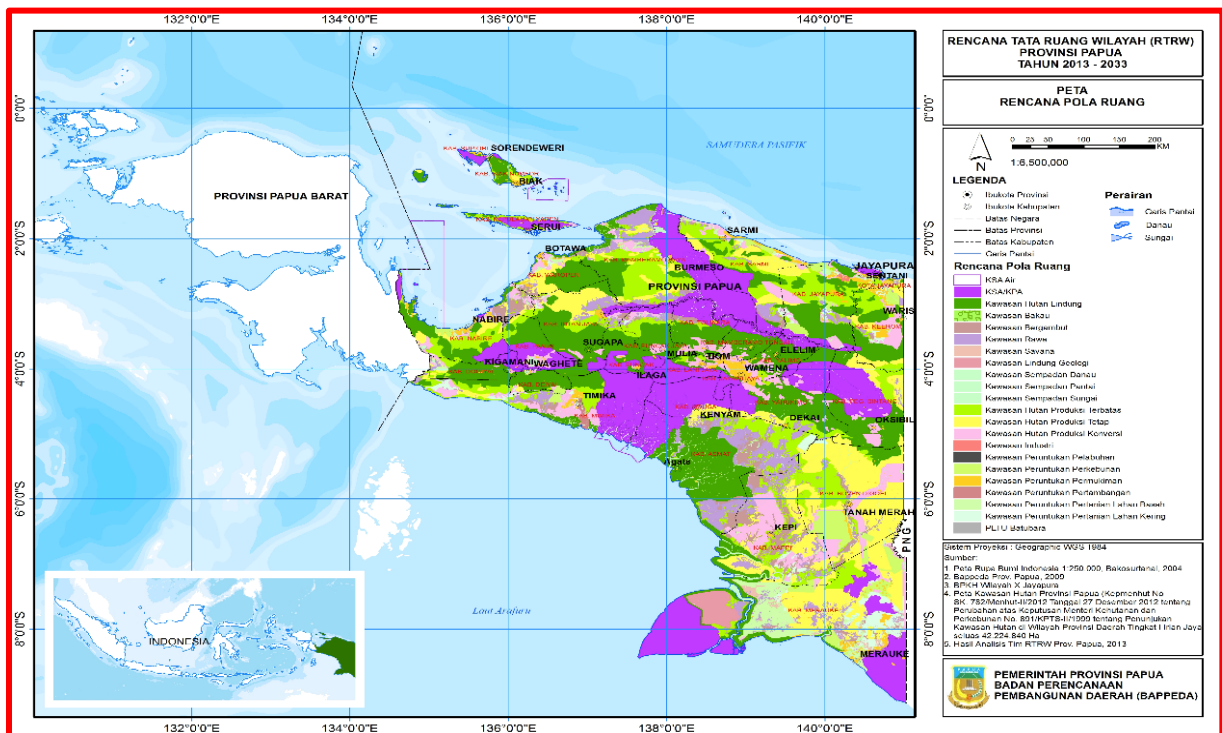
Indikator kinerja sasaran Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten tahun 2018 target kinerja ijin penggunaan lahan skala luas yang diterbitkan sebanyak 50.190 ha dengan realisasi sebanyak 50.190 ha atau 100 persen.

Papua adalah daerah yang unik dari segi keberagaman ekosistem. Papua juga kaya dengan dinamika hubungan antara masyarakat dan alamnya. Hal tersebut membuat alam Papua – tanah dan hutan, menjadi identitas budaya asli masyarakat Papua. Dimana hubungan manusia dan alamnya sangat erat, bahkan sebagian besar masyarakat asli Papua masih sangat bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 84,00 persen kampung juga masih terdapat di kawasan hutan, hal ini menggambarkan hubungan yang erat antara masyarakat dengan alam di sekitarnya. Arah pembangunan saat ini dan kecenderungannya di masa yang akan datang, ternyata mengarah pada jalur yang akan memisahkan masyarakat Papua dengan alamnya, kemudian melikuidasi alamnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Kesadaran ini diperoleh lewat penelaahan dan pemahaman terhadap struktur-struktur yang telah membuat berbagai peristiwa dan kondisi saat ini, serta kecenderungan- kecenderungan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Proses perencanaan tak lagi berfokus pada apa yang diinginkan untuk terjadi di masa yang akan datang, tapi juga mulai menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dampak atau konsekuensi yang tak diinginkan (*unintended consequences*) di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dapat mengendalikan penggunaan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dalam rangka menjaga ruang hidup masyarakat Papua.

Dalam RTRW Provinsi Papua telah ditetapkan kawasan-kawasan yang biasa disebut Pola Ruang yang mengarahkan peruntukan atau penggunaannya dasar inilah menjadi alat dalam melakukan pengendalian Ruang Daerah, sehingga calon Investor sebelum mengurus ijin penggunaan lahan dapat melihat lahan yang ingin digunakan berdasarkan arah pola ruang Papua.

Gambar 3.28 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua



Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan Instrumen yang mendukung Pelaksanaan RTRW Papua, yaitu membangun sistem tata ruang (SIMTARU), sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 3.29 Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) Provinsi Papua



Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan PTSP mengalami kenaikan yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebabnya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan nonperizinan kepada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal. Sebanyak 390 (tiga ratus Sembilan puluh) izin dan nonizin yang tersebar pada 19 (Sembilan belas) sektor bidang usaha yang telah dilimpahkan.

Sasaran 22 : Terwujudnya Papua Sebagai Paru - Paru Dunia

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia**” mencapai 73,56 persen dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Keberhasilan pencapaian sasaran ini, diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :


Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.71 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 22

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2015		CAPAIAN KINERJA	2016		CAPAIAN KINERJA	2017		CAPAIAN KINERJA	2018		CAPAIAN KINERJA	
		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		TAR GET	REALI SASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Area Hutan Mangrove Yang Kondisi Baik	Persen	85,00	82,64	97,22	85,00	82,64	97,22	85,00	82,64	97,22	85,00	82,64	97,22
2	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	2,00	3,00	150,00	2,00	2,20	90,91	2,00	22,35	22,35	5,00	17,71	28,23
3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	Persen	30,00	26,61	88,70	30,00	25,72	85,73	27,00	25,71	95,22	27,00	25,71	95,22
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					111,97			91,29			71,59			73,56

Capaian kinerja sasaran **Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia** pada tahun 2018 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2017 yaitu 1,97 persen. Dimana pada tahun 2017 rata-rata capaian kinerja sasaran 71,59 persen bila dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 73,56 persen. Capaian kinerja sasaran ini dipengaruhi oleh tiga (3) indikator yang terdiri dari:

1. Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik tercapai 82,64 persen dari target 85,00 persen yang terdiri dari luas kawasan hutan mangrove yang kondisi baik 832.861 ha dan total luas area kawasan hutan mangrove 1.007.817 ha, bila dibandingkan dengan tahun 2018 maka tidak ada perubahan capaian kinerja yaitu 97,22 persen.

- 
2. Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 17,71 persen dari target 5,00 persen yang terdiri dari luas kerusakan kawasan hutan 5.281.458,77 Ha dari luas kawasan hutan keseluruhan 30.387.499 Ha, bila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan capaian kinerja pada kawasan hutan lindung, dimana pada tahun tersebut kerusakan kawasan hutan lindung mencapai 2.721.725 Ha sedangkan pada tahun 2018 hanya 800.624,47 Ha. Sedangkan kerusakan kawasan hutan di luar hutan lindung seluas 4.580.834,30 Ha.

Tabel 3.72 Sebaran Kerusakan Hutan Lindung Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas HL (Ha)	Kerusakan (Ha)	%
1	Asmat	1.088.231,08	15.977,26	1,47
2	Biak Numfor	121.444,44	23.485,15	19,34
3	Boven Digoel	72.229,55	8.285,72	11,47
4	Deiyai	163.094,15	11.533,02	7,07
5	Dogiyai	291.467,84	97.449,36	33,21
6	Intan Jaya	362.265,48	41.501,11	11,46
7	Jayapura	531.892,58	5.328,93	1,00
8	Jayawijaya	24.685,86	5.673,63	22,98
9	Keerom	340.010,35	3.892,36	1,14
10	Kepulauan Yapen	18.942,14	1.840,81	9,72
11	Lanny Jaya	62.884,65	11.896,10	18,92
12	Mamberamo Raya	381.954,71	6.414,28	1,68
13	Mamberamo Tengah	216.443,95	14.307,90	6,61
14	Mappi	222.935,75	98.459,50	44,16
15	Merauke	246.548,29	126.837,05	51,45
16	Mimika	295.472,08	24.283,31	8,22
17	Nabire	377.248,26	15.552,77	4,12
18	Paniai	181.047,49	20.321,75	11,22
19	Pegunungan Bintang	500.057,65	75.576,06	14,51
20	Puncak	348.605,52	17.470,78	5,01
21	Puncak Jaya	217.261,99	22.203,61	10,22
22	Sarmi	191.886,09	574,63	0,30
23	Supiori	7.379,30	29,17	0,40
24	Tolikara	260.125,20	17.958,23	6,90
25	Waropen	434.002,46	1.344,44	0,31
26	Yahukimo	611.336,51	110.345,60	18,05
27	Yalimo	241.838,04	25.081,94	10,37
JUMLAH		7.813.292,41	800.624,47	10,25



Capaian kinerja pada jumlah kerusakan kawasan hutan lindung disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perubahan parameter atau definisi tentang kriteria kerusakan hutan, yang mana pada tahun 2018 lahan kritis berupa lahan terbuka savana dan sejenisnya tidak dimasukkan lagi kategori rusak.

3. Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan hanya tercapai 25,71 persen terdiri dari luas area hutan lindung 7.815.283 ha dan total luas area kawasan hutan 30.387.499 ha, bila dibandingkan dengan tahun 2017 tidak terjadi perubahan capaian kinerja 25,71 persen. Untuk itu rata-rata capaian juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 95,22 persen.

Hutan di Papua mencapai 30.387.499ha, terdiri atas hutan lindung 7.815.283ha , hutan produksi tetap 4.739.327ha , hutan produksi terbatas 5.998.424ha , dan hutan yang dapat dikonversi 4.116.365ha. Ditambah areal penggunaan lainnya 1.712.591ha . Hasil hutan di Provinsi Papua ini cukup besar manfaatnya yaitu hasil hutan non hph dan hasil hutan bukan kayu. Untuk hasil hutan non hph sebesar 39.569.055,99 M³ yang terdiri dari kayu bulat sebesar 31.208,08 M³ dan kayu olahan sebesar 39.537.847,91 M³ sedangkan hasil hutan bukan kayu sebesar 81.106 M³ yang terdiri dari kulit masohi sebesar 80.556 M³ dan kulit gambir sebesar 550 M³. Selama ini manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya hutan telah menempatkan hutan dalam peranan yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pembukaan isolasi daerah, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan rakyat di Papua tetapi juga masyarakat dunia internasional yaitu menempatkan hutan tropis sebagai paru-paru dunia, sumber bahan baku kayu serta sebagai sumber plasma nutfah dunia.

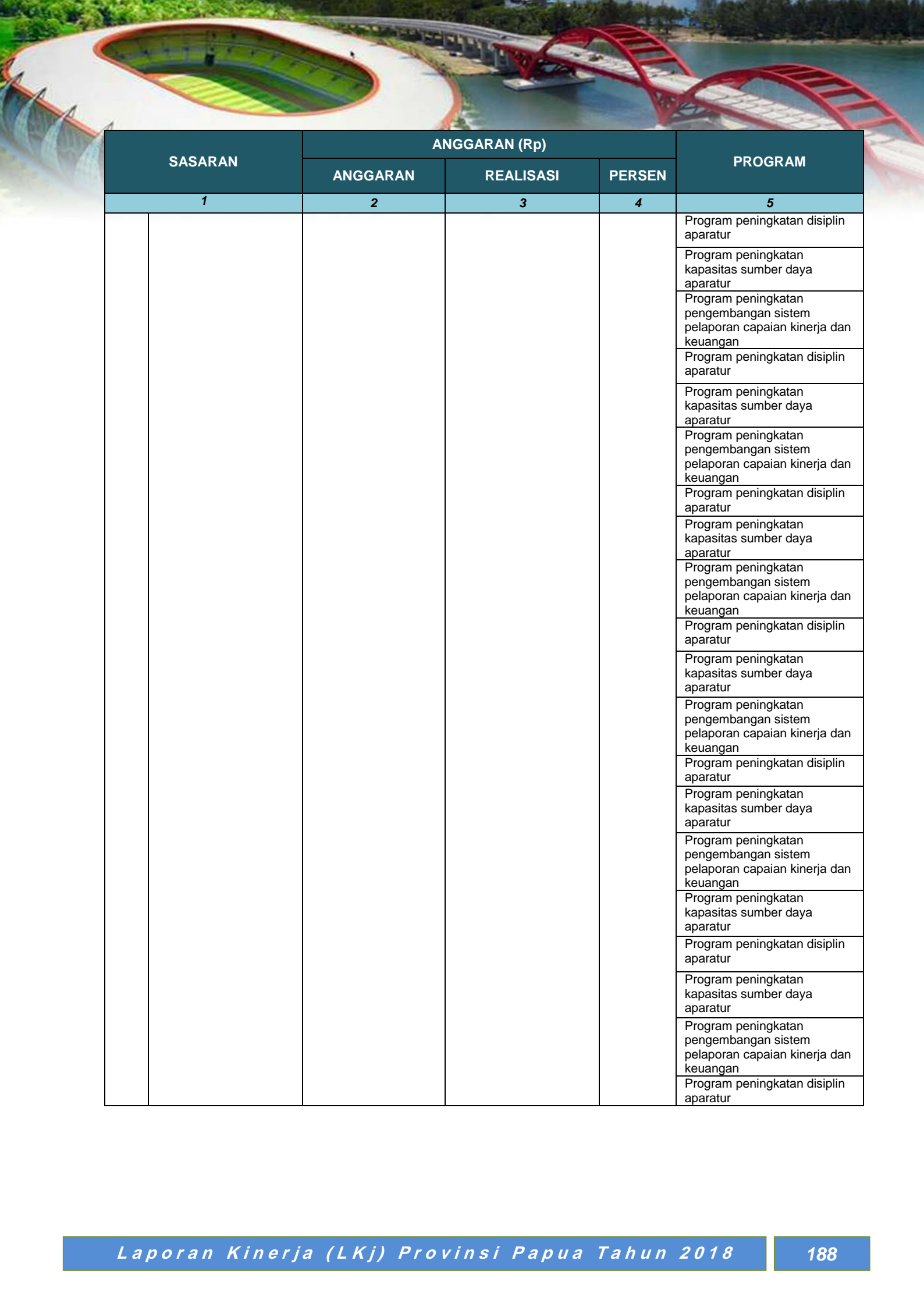
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel Akuntabilitas Keuangan

SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	127,341,635,198.00	125,301,968,655.00		<p>Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Pembahasan rancangan peraturan daerah)</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Peningkatan Peran dan Fungsi Pengawasan PERDASI/ PERDASUS Provinsi Papua)</p> <p>Pembahasan Ranperda mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, APBD 2016, dan Perubahan APBD 2017 dan Penyusunan APBD 2018</p> <p>Monitoning, Evaluasi dan Pengawasan Peraturan serta Kebijakan Lainnya</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP (Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah)</p> <p>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda</p> <p>Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum</p> <p>Program Peningkatan Koordinasi, Singkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan</p> <p>Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan</p> <p>Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA))</p> <p>Perlindungan dan Jaminan Sosial (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam)</p> <p>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</p> <p>Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial</p> <p>Porgram Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
					Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
					Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
					Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
					Program pengembangan wawasan kebangsaan
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
					Program Pendidikan Politik Masyarakat
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	158,436,797,137.00	142,306,507,660.00		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
					Penyusunan LAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
					Diklat Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)
					Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Penyusunan LKPJ Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018)
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
					Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan disiplin aparatur
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan disiplin aparatur
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan disiplin aparatur
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan disiplin aparatur
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
					Program peningkatan disiplin aparatur
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparat
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program peningkatan disiplin aparatur
				Program peningkatan kapasitas sumber daya
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
				Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3	495,939,789,888.00	474,619,975,154.32		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan (Fasilitasi Penerapan Rencana Standart Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua)
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
				Program kerjasama informasi dengan mas media
				Program Dokumentasi dan Informasi Hukum
				Program Pengembangan Data dan Informasi
				Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Pengelolaan Situs Web dan Penyebarluasan informasi Publik)
				Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
				Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
					Program kerjasama informasi dengan mas media
					Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
					Program pengembangan data informasi
					Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
					Program Pelayanan Informasi
					Program Pelayanan Informasi
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	28,935,740,000.00	23,756,679,370.00		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
					Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
					Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
					Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	46,836,365,427.00	45,241,374,151.20		Program Pembinaan Mental Spritual
					Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spritual dan Bina Kemasyarakatan
					Program Pemberdayaan Keagamaan
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
					Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti
					Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial

SASARAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	PROGRAM
		ANGGARAN (Rp)			
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	641,417,115,323.00	457,150,956,343.70		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat (2 keg.) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program upaya kesehatan perorangan Program Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Program Pengembangan Data/Informasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Program upaya kesehatan perorangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

SASARAN		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	PROGRAM
		ANGGARAN (Rp)			
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Program upaya kesehatan perorangan Program Sumber Daya Kesehatan
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	152,054,700,000	131,760,574,059		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Non Formal (1 keg.) Program Pendidikan Luar Biasa (5 keg.) Program Pendidikan Anak Usia Dini (3 keg.) Program Pendidikan Menengah Kejuruan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Layanan Khusus Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi (2 keg.) Program Pendidikan Menengah Atas (11 keg.) Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1,262,960,489,982.00	1,114,456,975,857.26		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga
					Pengembangan Prasarana PON
					Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional
					Pengawasan Persiapan PON XX Tahun 2020
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Mandala)
					Program peningkatan pelayanan angkutan (Pengadaan Bus Penunjang Kegiatan PON XX)
					Program perencanaan pembangunan daerah (Fasilitasi Perencanaan Persiapan PON XX Tahun 2020)
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	6,995,003,000.00	5,752,476,850.00		Program peningkatan peran serta kepemudaan
					Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1,500,000,000.00	1,452,503,765.00		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
					Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	12,388,691,301.00	11,754,304,876.00		Penataan Struktur Industri
					Pengembangan industri kecil dan menengah
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1,732,053,405.00	1,716,934,405.00		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan
					Program Pengembangan Produktivitas Kerja
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	15,606,400,000.00	12,798,778,507.00		Program pengembangan pemasaran pariwisata
					Program pengembangan destinasi pariwisata
					Program pengembangan Kemitraan
					program pengembangan kapasitas
					Program Pengembangan Nilai Budaya
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya
					Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	158,499,561,856.00	142,087,059,584.51		Program perencanaan pembangunan ekonomi
					Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Papua
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
					Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
					Program Perencanaan Pembangunan
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
					Program peningkatan produksi hasil peternakan



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1	2	3	4	5
				Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan
				Program Perencanaan Pembangunan
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan
				Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
				Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengolah dan Pemasaran
				Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap
				Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
				Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
				Program Perencanaan Pembangunan
				Program Pengembangan Agribisnis
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
				Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian
				Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
				Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
					Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral
					Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara
					Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
					Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
					Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH
					Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH)
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	20,478,709,454.00	18,862,604,454.00		Program perencanaan pembangunan ekonomi
					Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	964,999,176,828.00	597,861,353,563.83		Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas
					Program pembangunan jalan dan jembatan
					Program Pembangunan turap/talud/brojong
					Peningkatan Jalan dan Jembatan
					Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
					Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
					Program pembangunan infrastruktur pedesaan (Penataan Kawasan Tugu Patung Yesus)



SASARAN	ANGGARAN (Rp)			PROGRAM	
	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN		
1	2	3	4	5	
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
				Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
				Program peningkatan pelayanan angkutan (Pengadaan Angkutan Pedesaan)	
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	134,044,380,333.00	52,266,852,095.94		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
					Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
					Program Pengendalian Banjir
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	88,600,000,000.00	69,069,469,752.70		Program Pengembangan Perumahan
					Program Lingkungan Sehat Perumahan
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	473,125,000.00	467,402,000.00		Program Pelayanan Air Bersih
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	127,772,850,000.00	966,591,200.00		Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
					Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan
					Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	2,850,000,000.00	2,624,675,439.00		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal 1,472,373,900.00
					Program Perencanaan Tata Ruang



SASARAN		ANGGARAN (Rp)			PROGRAM
		ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	
1		2	3	4	5
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	58,391,094,500.00	54,242,000,846.00		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
					Program rehabilitasi hutan dan lahan
					Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
Anggaran Prioritas IKU		4.508.253.678.632,00	3.486.518.018.589,46	77,34	
Belanja Langsung		5.482.535.212.242,30	4.412.167.169.482,52	80,48	
Belanja Tidak Langsung		9.225.375.400.442,70	8.896.078.375.501,00	96,43	
TOTAL BL + BTL		14.707.910.612.685,00	13.308.245.544.983,50	90,48	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2018 adalah Rp14.707.910.612.685,00 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp9.225.375.400.442,70 dan Belanja Langsung Rp5.482.535.212.242,30. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp4.508.253.678.632,00 atau 82,23 persen dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp3.486.518.018.589,46 dari realisasi belanja langsung atau 79,02 persen. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 77,34 persen. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 77,34 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB IV PENUTUP


A. SIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua.

Akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam tahun 2018 adalah :

Keterangan	Jumlah
➤ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	22 sasaran
>Kategori "Sangat Berhasil"	13 sasaran
>Kategori "Berhasil"	5 sasaran
>Kategori "Cukup Berhasil"	1 sasaran
>Kategori "Kurang Berhasil"	0 sasaran
>Kategori "Tidak Berhasil"	3 sasaran
➤ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	Rp3.486.518.018.589,46
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	77,34%
➤ Realisasi Belanja Langsung	Rp 4.412.167.169.482,53
> Prosentase realisasi belanja langsung terhadap anggaran belanja langsung	80,48%



Realisasi keuangan tahun 2018 yang digunakan untuk melaksanakan 22 (dua puluh dua) sasaran tersebut adalah sebesar Rp3.486.518.018.589,46 atau 77,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.508.253.678.632,00.

Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

1. Kategori “Sangat Berhasil”, terdiri dari 13 (Tiga belas) Sasaran yaitu:

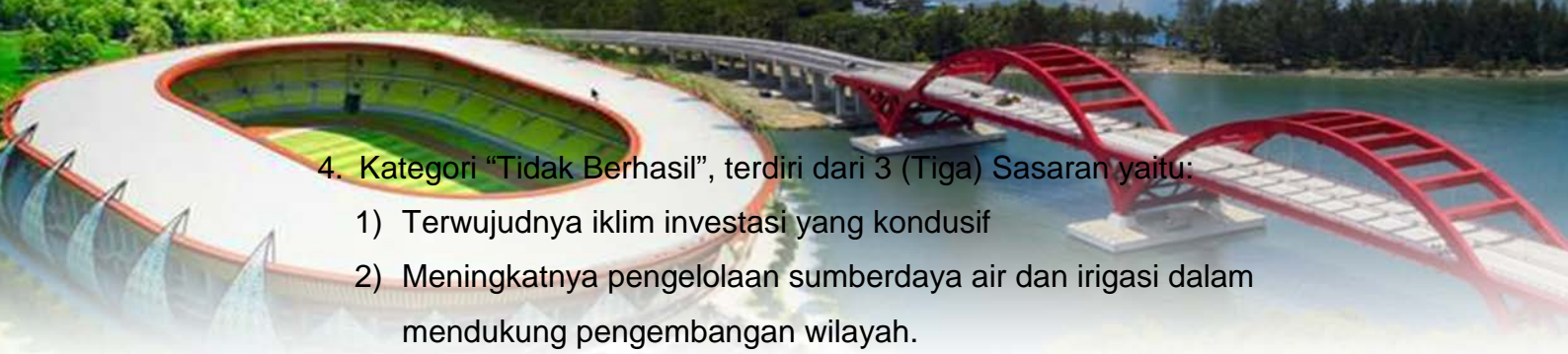
- 1) Meningkatnya Rasa Aman, Tenang, Nyaman dan Ketaatan Terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua.
- 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.
- 4) Peningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.
- 5) Terwujudnya Masyarakat yang Sehat.
- 6) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil.
- 7) Meningkatnya Prestasi Olahraga.
- 8) Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan.
- 9) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.
- 10) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah.
- 11) Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah.
- 12) Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni
- 13) Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten

2. Kategori “Berhasil”, terdiri dari 5 (Lima) Sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
- 2) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
- 3) Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah.
- 4) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat.
- 5) Meningkatnya Pemenuhan Air Bersih.

3. Kategori “Cukup Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran yaitu:

- 1) Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia

- 
4. Kategori “Tidak Berhasil”, terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran yaitu:
 - 1) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
 - 2) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.
 - 3) Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target kinerja, pengukuran dan evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan sasaran dan indicator kinerja sasaran.



B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan isi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dengan Gubernur sebagai Pimpinan Tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki target kinerja yang ditetapkan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai kinerja yang ditetapkan sesuai Visi Misi SKPD dan Visi Misi Gubernur.
4. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan program kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan
7. Mendorong Kepala SKPD untuk memanfaatkan Hasil pengukuran capaian kinerja sebagai dasar pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*).



GUBERNUR PAPUA

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

**BIRO ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2014**



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Provinsi dalam suatu Peraturan Gubernur Papua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

**BAB II
INDIKATOR KINERJA
Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. penyampaian rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPEDA, Inspektorat Provinsi Papua dan Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur SETDA Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan Indikator Kinerja Utama pada tingkat Provinsi Papua dan tingkat SKPD;
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- c. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 31 Desember 2014
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 33 Tahun 2014
 Tanggal : 30 Desember 2014

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA
 TAHUN 2014 – 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI			
1. Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua Jumlah peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	1. Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	$\frac{\text{Jumlah Perda yg ditetapkan melalui uji publik}}{\text{Jumlah Perda Provinsi yg diusulkan}} \times 100 \%$	Biro Hukum
	2. konflik horisontal berdasarkan SARA	$\frac{\text{Jumlah konflik berdasarkan SARA (tahun sebelumnya - tahun sekarang)}}{\text{Jumlah konflik horisontal berdasarkan SARA tahun sekarang}} \times 100 \%$	Badan KesbangPol
	3. Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam yang tertangani}}{\text{Jumlah korban bencana alam seluruhnya}} \times 100 \%$	BPBD
	4. Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang tertangani selama satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100 \%$	Badan KesbangPol
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus			
1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1. Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan struktural}}{\text{Jumlah seluruh Pejabat struktural di Pem. Provinsi Papua}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Daerah
	2. Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jenis jabatan fungsional yang telah diisi}}{\text{jumlah kebutuhan jenis jabatan fungsional}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Daerah

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
		3.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	sesuai rumusan penilaian evaluasi Akuntabilitas KEMENPAN dan RB RI		Biro ORPA
		4.	Opini BPK atas LKPD	sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI		BPKAD
		5.	Rata-rata kehadiran pegawai	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang hadir selama setahun}}{\text{jumlah hari kerja}} \times 100\%$		Biro ORPA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Jumlah responden yang menyatakan setuju/puas terhadap pelayanan publik}}{\text{Jumlah Responden yang ditetapkan}} \times 100\%$		Biro ORPA
		2.	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)}}{\text{Jumlah Seluruh SKPD}} \times 100\%$		Biro ORPA
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1.	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$		Inspektorat
		2.	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$		Inspektorat
4.	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	(100 % - % Angka Kemiskinan)		Dinas NAKERDUK
		2.	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah kelompok PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah kelompok PMKS}} \times 100\%$		Dinas Kessos dan Pemukiman
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia						
1.	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1.	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Asli Papua yang terjangkau dalam KPS}}{\text{Jumlah penduduk Asli Papua di Provinsi Papua}} \times 100\%$		Dinas Kesehatan
		2.	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	$\frac{\text{jumlah kematian ibu melahirkan}}{100.000 \text{ ibu melahirkan}} \times 100\%$		Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR		SUMBER DATA
	3.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	$\frac{\text{jumlah kematian bayi yang lahir}}{1.000 \text{ kelahiran hidup}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan		
	4.	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	$\frac{\text{Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatka ARV}}{\text{Jumlah Penderita HIV/AIDS yang ditemukan}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan		
	5.	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	$\frac{\text{Jumlah kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis}}{\text{Jumlah kelahiran (partus)}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan		
	6.	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi buruk yg ditemukan dan mendapat perawatan}}{\text{Jumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan		
	7.	Angka usia harapan hidup	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua	Dinas Kesehatan		
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1.	Persentase angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk yg melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2.	Rata-rata lama sekolah	$\frac{(\text{jumlah siswa SD X 6 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMP X 9 tahun}) + (\text{jumlah Siswa SMA X 12 tahun}) + (\text{jumlah Mahasiswa X 5 tahun})}{\text{jumlah Penduduk usia 7 tahun ke atas}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		3.	APK PAUD/TK	$\frac{\text{Jumlah siswa PAUD usia 4-6 thn}}{\text{Jumlah penduduk/anak usia 4-6}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SD/MI}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
	5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa SMU/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn di tingkat SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SD/MI}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn di tingkat SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	9. Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn di tingkat SMU/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah SMU/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	10. Angka putus sekolah SD/MI	$\frac{\text{Jumlah anak yang putus sekolah SD/MI}}{\text{Jumlah murid SD/MI saat pertama kali mengikuti pendidikan}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	11. Angka putus sekolah SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah anak yang putus sekolah SMP/MTs}}{\text{Jumlah Murid SMP/MTs saat pertama kali mengikuti pendidikan}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	12. Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah anak yang putus sekolah SMU/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa SMA/MA saat pertama kali mengikuti pendidikan}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	13. Persentase guru yang telah bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah guru yang telah lulus sertifikasi nasional}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
		14.	Persentase angka kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		15.	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		16.	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMU/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Meningkatnya prestasi olahraga	1.	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	$\frac{\text{Jumlah atlet/klub olahraga yang menerima penghargaan tingkat nasional}}{\text{Jumlah klub olahraga yang dibina}} \times 100 \%$	Dinas Olah Raga dan Pemuda
4.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1.	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda asli Papua tahun sekarang} - \text{jumlah wirausaha muda Tahun lalu}}{\text{Jumlah wirausaha muda asli Papua tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Peridutrian dan Perdagangan
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal					
1.	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1.	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs} - \text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}} \times 100 \%$	Badan PTPM
		2.	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	$\frac{\text{Nilai investasi PMA tahun yang ybs} - \text{Nilai investasi PMA tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMA tahun lalu}} \times 100 \%$	Badan PTPM
2.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1.	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat/menghasilkan laba tahun ybs}}{\text{Jumlah Koperasi di Papua}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM
		2.	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah IKM tahun ybs} - \text{Jumlah IKM tahun lalu}}{\text{Jumlah IKM di Papua tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Peridutrian dan Perdagangan

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
		3.	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah UKM tahun ybs} - \text{Jumlah UKM tahun lalu}}{\text{Jumlah UKM di Papua tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Koperasi dan UKM
3.	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1.	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas NAKERDUK
		2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas NAKERDUK
4.	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perkonomian daerah	1.	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	$\frac{\text{PDRB sub sektor pariwisata tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		2.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatwan ke Papua tahun sekarang} - \text{tahun lalu}}{\text{jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5.	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1.	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Perkebunan
		2.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor peternakan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor Perikanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
		4.	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		5.	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor Kehutanan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan
		6.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor pertambangan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas ESDM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
6.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1.	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	$\frac{\text{PDRB (t+1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$	BAPPEDA
		2.	PDRB per Kapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk pertengahan tahun}} \times 100 \%$	BAPPEDA
		3.	Inflasi	$\frac{\text{Inflasi (n+1)} - \text{Inflasi (n)}}{\text{Inflasi (n)}} \times 100 \%$	BAPPEDA
		4.	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	BAPPEDA
		5.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor pengolahan tahun ybs}}{\text{Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs}} \times 100 \%$	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		6.	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$	Dinas Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) 2. Persentase jembatan dalam kondisi baik 3. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 4. Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	$\frac{\text{Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Panjang Jembatan Provinsi dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang Jembatan (Provinsi)}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Total jumlah kendaraan di wilayah Provinsi}}{\text{Total Panjang Jalan di wilayah Provinsi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah arus penumpang angkutan umum (angkutan laut dan angkutan udara) yang masuk dan keluar selama satu tahun}}{\text{Total Panjang Jalan di wilayah Provinsi}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1. Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi 2. Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik 3. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi 4. Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	$\frac{\text{Luas lahan budidaya pertanian yg mendapat layanan irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Panjang jaringan irigasi di wilayah Provinsi yg berfungsi baik}}{\text{Total panjang jaringan irigasi di wilayah Provinsi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Rata2 ketersediaan air irigasi per tahun}}{\text{Kebutuhan air baku untuk irigasi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Daerah banjir dan abrasi yang tertangani}}{\text{daerah yang berpotensi banjir dan abrasi yang harus tertangani}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum
3. Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1. Jumlah rumah layak huni yang dibutuhkan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni yang dibangun}}{\text{Jumlah yang KK yang membutuhkan layak huni}} \times 100 \%$	Dinas Kessos dan Pemukiman

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1.	Persentase RT yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih}}{\text{Jumlah RT/KK yang membutuhkan air bersih}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum
5.	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1.	Rumah Tangga pengguna listrik	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pengguna listrik}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga yang membutuhkan listrik}} \times 100 \%$	Dinas ESDM
6.	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1.	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	$\frac{\text{ijin penggunaan lahan skala luas yang diterbitkan yang sesuai ketentuan}}{\text{Ijin penggunaan lahan skala luas yang diterbitkan}} \times 100 \%$	Badan PTPM
7.	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1.	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	$\frac{\text{Luas area kawasan hutan mangrove yang kondisi baik}}{\text{Total luas area kawasan hutan mangrove}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan
		2.	Kerusakan Kawasan Hutan	$\frac{\text{Luas kerusakan kawasan hutan lindung yang kondisi baik}}{\text{Luas kawasan hutan lindung}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan
		3.	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	$\frac{\text{Luas area hutan lindung}}{\text{Total luas area kawasan hutan}} \times 100 \%$	Dinas Kehutanan

GUBERNUR PAPUA,

**CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP,MH**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOEDARMO

Jabatan : Pjs. Gubernur Papua

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, 15 Maret 2018

Pjs. GUBERNUR PAPUA

A purple circular official seal of the Governor of Papua, featuring a Garuda bird in the center and the words "GUBERNUR PAPUA" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

SOEDARMO

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram, nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100.00
		2	Penurunan konflik horisontal berdasarkan SARA	%	35.00
		3	Persentase jumlah bencana korban yang tertangani	%	100.00
		4	Angka kriminalitas	%	10.00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100.00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	70.00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	BB
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	95.00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80.00
		2	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	75.00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100.00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	65.00
5	Peningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Angka	71.00
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	35.00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100.00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	280.00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	6.50

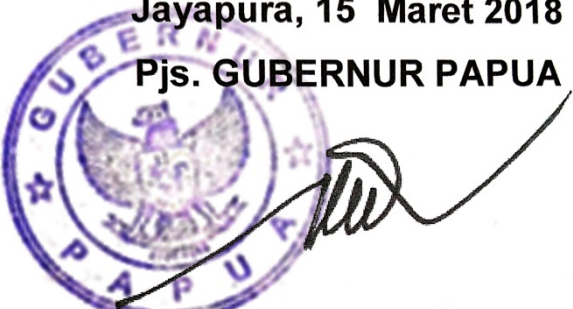
SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
		4	Penanganan Penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100.00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70.00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100.00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67.00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85.00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6.00
		3	APK PAUD/TK	%	55.00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	95.00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70.00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	55.00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	80.00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48.00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	40.00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0.10
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1.00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0.15
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	25.00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100.00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100.00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100.00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase atlet/klub olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	50.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	25.00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	40.00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA	%	2.00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	13.00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	35.00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	100.00
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.00
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	80.00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	13.00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	8.00
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1,00
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1.00
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	5.00
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	6,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2.00
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	40.00
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	5.00
		2	PDRB per Kapita		60 Juta
		3	Inflasi	%	2.00
		4	Indeks Gini		0.35
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2.50

		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10,00
SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	95.00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	30.00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	1 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	80.00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	20.00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	10.00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	26.00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	100.00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55.00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	55.00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100.00
22	Terwujudnya Papua sebagaiparu-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85.00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	5.00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	27.00

Jayapura, 15 Maret 2018

Pjs. GUBERNUR PAPUA



SOEDARMO

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA 2014, 2015 dan 2016

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
				2014				2015				2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipasif	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100,00	100	%	100,00
		2	Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	28,50	(28,50)	-100	%	15,00	19,00	78,95	%	18,00
		3	Angka kriminalitas	%	34,50	32,72	105,16	%	33,00	84,42	105,16	%	33,00
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	80,00	80,83	101,04	%	100,00	99,32	99,32	%	100,00
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	100,00	26,35	26,35	%	63,67	70,79	111,18	%	71,00
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	C	C	100	Angka	B	C	66,67	Angka	CC
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WDP	WDP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90,00	84,33	93,7	%	90,00	87,76	97,51	%	90,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100,00	30,61	30,61	%	41,00	31,00	76,60	%	50,00
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	60,00	100,00	166,67	%	100,00	100,00	100	%	100,00
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	40,00	82,14	205,35	%	55,00	55,36	100,65	%	55,00
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	70,00	30,05	157,07	%	72,00	71,60	157,07	%	70,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
				2014				2015				2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Dasar Orang Asli Papua.	2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4,00	4,02	100,5	%	5,00	0,95	100,5	%	4,00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	235,00	422,00	55,69	Angka	422,00	422,00	55,69	Angka	400,00
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54,00	8,00	675,00	Angka	44,00	44,00	100,00	Angka	54,00
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100,00	44,00	44,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	39,90	47,30	118,55	%	48,00	53,94	112,38	%	70,00
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	68,00	68,80	101,18	Angka	69,90	65,10	93,13	Angka	67,00
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	75,83	75,92	100,12	Angka	76,00	84,84	111,63	%	85,00
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6,87	6,87	100	%	6,90	5,76	83,48	%	6,00
		3	APK PAUD/TK	%	29,54	12,19	41,2	%	12,19	10,93	84,73	%	10,00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,72	99,72	100	%	100,00	90,67	90,67	%	90,00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	55,17	55,17	100	%	63,00	71,02	112,73	%	70,00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	41,69	41,69	100	%	42,00	61,53	146,50	%	60,00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	70,80	75,84	107,12	%	79,00	78,36	99,19	%	79,00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	43,40	38,52	88,76	%	58,00	53,68	92,55	%	48,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
		2014				2015				2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30,02	30,02	100	%	30,00	43,11	143,70	%	40,00	
	10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,77	0,77	100	%	0,30	1,46	20,55	%	1,00	
	11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,36	0,20	104,44	%	0,15	1,68	8,93	%	1,00	
	12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,84	2,22	-64,29	%	0,32	1,58	17,98	%	1,00	
	13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60,05	24,88	158,57	%	60,00	60,00	100,00	%	60,00	
	14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	99,80	99,92	100,12	%	100,00	99,92	99,92	%	100,00	
	15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	99,50	99,11	99,61	%	100,00	99,98	99,98	%	100,00	
	16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	98,00	98,05	100,05	%	100,00	99,79	99,79	%	100,00	
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	15,00	17,00	113,33	%	17,00	24,87	146,29	%	25,00
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	7,50	7,09	105,33	%	7,00	7,71	110,18	%	8,00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	30,00	79,19	263,97	%	80,00	143,76	179,71	%	85,00
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	%	30,00	59,41	198,03	%	60,00	60,31	100,52	%	60,00
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	45,00	13,57	30,16	%	20,00	10,47	51,20	%	11,00
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	3,00	19,40	646,67	%	20,00	18,75	93,75	%	19,00
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	5,90	11,68	197,97	%	10,00	24,51	245,10	%	25,00
12	Terwujudnya	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,86	5,51	192,66	%	3,5	3,44	98.296	%	3,50

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
				2014				2015				2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	peningkatan penyediaan lapangan kerja	2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	79,98	96,77	120,99	%	81	78,90	119,47	%	83,00
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	10,35	9,10	87,92	%	10,00	9,75	97,30	%	10,00
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	3,00	0,56	18,67	%	3,00	3,30	110		%
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	0,74	0,95	128,38	%	0,90	1,11	123,33	%	1,30
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,82	1,28	156,10	%	1,20	0,91	75,83	%	1,20
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,00	4,40	110,00	%	4,50	4,40	97,7	%	4,50
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	5,45	8,54	156,70	%	8,50	9,56	112,47	%	10,00
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,57	2,20	140,13	%	2,0	2,20	110,00	%	2,20
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	45,92	32,05	69,80	%	35,00	28,87	82,49	%	30,00
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	7% - 8%	14,84	185,50	%	8,00	7,97	89,63	%	8,00
		2	PDRB per Kapita	Juta	26	24.616.649,43	94,68	Juta	25,00	30,97	123,88	Juta	31,00
		3	Inflasi	%	4,50	4,33	103,78	%	5,50	5,63	102,36	%	5,00
		4	Indeks Gini	%	0,35	0,41	82,86	%	0,35	0,41	117,14	%	0,41
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,54	2,50	70,62	%	3,54	2,17	61,30	%	2,5
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	7,30	8,22	112,60	%	7,30	8,22	112,60	%	10,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET
				2014				2015				2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	61,50	23,26	37,82	%	30,00	27,51	91,70	%	30,00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	24,00	49,28	205,33	%	50,00	45,15	90,30	%	50,00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:18	1:91	500,56	Rasio	1:100	1:96	96,00	Rasio	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	3,1 juta	3.850.112	124,20	Per Tahun	3,8 juta	3,88	102,11	Per Tahun	4,00
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	60,00	63,80	106,33	%	65,00	63,80	98,15	%	65,00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	50,00	56,70	113,40	%	60,00	58,78	97,97	%	60,00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	60,00	68,64	114,40	%	65,00	6,78	10,43	%	15,00
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	45,00	23,56	52,36	%	30,00	0,05	2,17	%	2,00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	%	40,00	1,36	3,40	%	5,00	5,00	100,00	%	40,00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	34,00	50,00	147,06	%	55,00	50,00	90,91	%	55,00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	36,00	36,46	101,28	%	37,00	38,44	103,89	%	40,00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	70,00	30,52	103	%	70,00	100,00	142,86	%	100,00
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	80,00	82,64	103	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	10,00	3,00	130,00	%	2,00	3,00	150,00	%	2,00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	60,00	26,61	26,61	%	30,00	26,61	88,70	%	30,00

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA 2016

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100
		2	Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	18
		3	Angka kriminalitas	%	33
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	71
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	CC
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	50
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	70
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	400

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	70
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	67
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	85
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6
		3	APK PAUD/TK	%	10
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	90
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	70
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	60
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	48
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	40
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	1
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	1
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	1
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	25
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	8
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	85
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	%	60
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	11
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	19
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	25
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,5
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	83
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan	%	10
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	5
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	1,3
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1,2
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,5
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	10

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2,2
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	30
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	8
		2	PDRB per Kapita	Juta	31
		3	Inflasi	%	5
		4	Indeks Gini	%	0,41
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	2,5
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	10
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	30
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:'110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	4
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	65
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	60
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	15
		4	Persentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	2
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibutuhkan	%	40
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	40

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	100
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	2
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	30

Jayapura, Maret 2016

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP., MH

|

TARGET, REALISASI dan CAPAIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA (PK) PROVINSI PAPUA 2014, 2015, 2016 dan 2017
TAHUN 2014, 2015, 2016 dan 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET		
				2014				2015				2016				2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	14		
1	Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100	100	100		
		2	Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	28,50	(28,50)	-100	%	15,00	19,00	78,95	%	18,00	65,22	27,59	18,00		
		3	Angka kriminalitas	%	34,50	32,72	105,16	%	33,00	84,42	84,18	%	33,00	38,19	86,41	33,00		
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	80,00	80,83	101,04	%	100,00	99,32	99,32	%	100,00	96,63	96,63	100,00		
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	100,00	26,35	26,35	%	63,67	70,79	111,18	%	71,00	31	43,66	71,00		
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	C	C	100	Angka	B	C	66,67	Angka	CC	CC	100,00	B		
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WDP	WDP	100	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100,00	WTP		
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90,00	84,33	93,7	%	90,00	87,76	97,51	%	90,00	97,94	108	95		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	100,00	30,61	30,61	%	41,00	31,00	76,60	%	50,00	10,4	20,8	70		
				%	100,00	30,61	30,61	%										
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	60,00	100,00	166,67	%	100,00	100,00	100	%	100,00	100	100	100,00		
				2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	40,00	82,14	205,35	%	55,00	55,36	100,65	%	55,00	55,4	97,09	55,00
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	70,00	30,05	157,07	%	72,00	71,60	157,07	%	70,00	71,46	102,08	71		
				2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4,00	4,02	100,5	%	5,00	0,95	100,5	%	4,00	3,33	83,25	4,00
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100	100	100,00		
				2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	235,00	422,00	55,69	Angka	422,00	422,00	55,69	Angka	400,00	313	127,8	300
				3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	54,00	8,00	675,00	Angka	44,00	44,00	100,00	Angka	54,00	7	771,43	7

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET		
				2014				2015				2016			2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
	4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100,00	44,00	44,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	48	48	100,00	
	5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	39,90	47,30	118,55	%	48,00	53,94	112,38	%	70,00	28,1	40,14	70,00	
	6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100	100	100,00	
	7	Angka usia harapan hidup	Angka	68,00	68,80	101,18	Angka	69,90	65,10	93,13	Angka	67,00	65,1	97,16	67,00	
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	75,83	75,92	100,12	Angka	76,00	84,84	%	85,00	84,84	99,81	85,00	
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6,87	6,87	100	%	6,90	5,76	83,48	%	6,00	5,99	99,83	6,00
		3	APK PAUD/TK	%	29,54	12,19	41,2	%	12,19	10,93	84,73	%	10,00	37,82	378,20	20,00
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	99,72	99,72	100	%	100,00	90,67	90,67	%	90,00	93,14	103,49	92,00
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	55,17	55,17	100	%	63,00	71,02	112,73	%	70,00	60,96	87,09	70,00
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	41,69	41,69	100	%	42,00	61,53	146,50	%	60,00	54,04	90,07	55,00
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	70,80	75,84	107,12	%	79,00	78,36	99,19	%	79,00	82,69	104,67	80,00
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	43,40	38,52	88,76	%	58,00	53,68	92,55	%	48,00	41,58	86,63	48,00
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30,02	30,02	100	%	30,00	43,11	143,70	%	40,00	44,81	112,03	42,00
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,77	0,77	100	%	0,30	1,46	20,55	%	1,00	0,88	133,63	0,88
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,36	0,20	104,44	%	0,15	1,68	8,93	%	1,00	1,51	66,23	1,00
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,84	2,22	-64,29	%	0,32	1,58	17,98	%	1,00	1,04	96,15	1,00
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60,05	24,88	158,57	%	60,00	60,00	100,00	%	60,00	31,00	51,67	31,00
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	99,80	99,92	100,12	%	100,00	99,92	99,92	%	100,00	99,98	99,98	100,00
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	99,50	99,11	99,61	%	100,00	99,98	99,98	%	100,00	100	100	100,00
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	98,00	98,05	100,05	%	100,00	99,79	99,79	%	100,00	100	100	100,00
8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	15,00	17,00	113,33	%	17,00	24,87	146,29	%	25,00	74,29	294,16	30
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	7,50	7,09	105,33	%	7,00	7,71	110,18	%	8,00	7,71	96,37	8,00
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	30,00	79,19	263,97	%	80,00	143,76	179,71	%	85,00	47,24	55,58	85,00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1		2		2014				2015				2016				2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14		
	konektivitas antar wilayah	1	dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	61,50	23,26	37,82	%	30,00	27,51	91,70	%	30,00	21,08	70,27	30,00
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	24,00	49,28	205,33	%	50,00	45,15	90,30	%	50,00	25,45	50,90	50,00
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:18	1:91	500,56	Rasio	1:100	1:96	96,00	Rasio	1:110	1,106	103,77	1:110
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	3,1 juta	3.850.112	124,20	Per Tahun	3,8 juta	3,88	102,11	Per Tahun	4 Juta	3.501.758	87,54	4 Juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	60,00	63,80	106,33	%	65,00	63,80	98,15	%	65,00	67,33	103,58	70,00
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	50,00	56,70	113,40	%	60,00	58,78	97,97	%	60,00	88,19	146,98	89,00
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	60,00	68,64	114,40	%	65,00	6,78	10,43	%	15,00	28,50	190,00	28,50
		4	Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	45,00	23,56	52,36	%	30,00	0,05	2,17	%	2,00	37,79	1889,50	2,00
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	%	40,00	1,36	3,40	%	5,00	5,00	100,00	%	40,00	52,51	131,28	50,00
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	34,00	50,00	147,06	%	55,00	50,00	90,91	%	55,00	43,82	79,67	55,00
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	36,00	36,46	101,28	%	37,00	38,44	103,89	%	40,00	50,97	127,42	50,00
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	70,00	30,52	103	%	70,00	100,00	142,86	%	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	80,00	82,64	103	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00	82,64	97,22	85,00
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	10,00	3,00	130,00	%	2,00	3,00	150,00	%	2,00	2,20	90,91	2,00
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	60,00	26,61	26,61	%	30,00	26,61	88,70	%	30,00	25,72	85,73	27,00

PERJANJIAN KINERJA PROVINSI PAPUA 2015

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya rasa aman, tenteram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1	Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100
		2	Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	15
		3	Angka kriminalitas	%	33
2	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1	Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100
		2	Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	63,67
		3	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	B
		4	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP
		5	Rata-rata kehadiran pegawai	%	90
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1	Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	41
4	Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1	Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100
		2	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55
5	Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	72
		2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5
6	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1	Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100
		2	Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	422

		3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	44
		4	Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100
		5	Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	48
		6	Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100
		7	Angka usia harapan hidup	Angka	69,9
7	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1	Persentase angka melek huruf	%	76
		2	Rata-rata lama sekolah	%	6,9
		3	APK PAUD/TK	%	12,19
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	63
		6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	42
		7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79
		8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	58
		9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30
		10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,3
		11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,05
		12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,32
		13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60
		14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100
		15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100
		16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100

8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	17
9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	7
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	80
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	%	60
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	20
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	60
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	10
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,5
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	81
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan	%	10
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	3
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	0,9
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1,2
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,5
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	8,5
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2,2
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	35

15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	8
		2	PDRB per Kapita	Juta	25
		3	Inflasi	%	5,5
		4	Indeks Gini	%	0,35
		5	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,54
		6	Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	7,3
16	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	%	30
		2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50
		3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:100
		4	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	3,8 juta
17	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1	Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	65
		2	Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	60
		3	Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi	%	65
		4	Persentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	30
18	Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibutuhkan	%	5
19	Meningkatnya pemenuhan air bersih	1	Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55
20	Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1	Rumah Tangga pengguna listrik	%	37
21	Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1	Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	70
22	Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1	Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85
		2	Kerusakan Kawasan Hutan	%	2
		3	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	30

Jayapura, 6 April 2015

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, SIP., MH

|

TABEL CAPAIAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2018

TARGET, REALISASI dan CAPAIAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA 2015, 2016, 2017 dan 2018

didasarkan pada INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penetapan IKU

di Lingkungan Pemerintah Prov.Papua

dan PERJANJIAN KINERJA (PK) Gubernur Papua setiap Tahun Anggaran 2015-2018

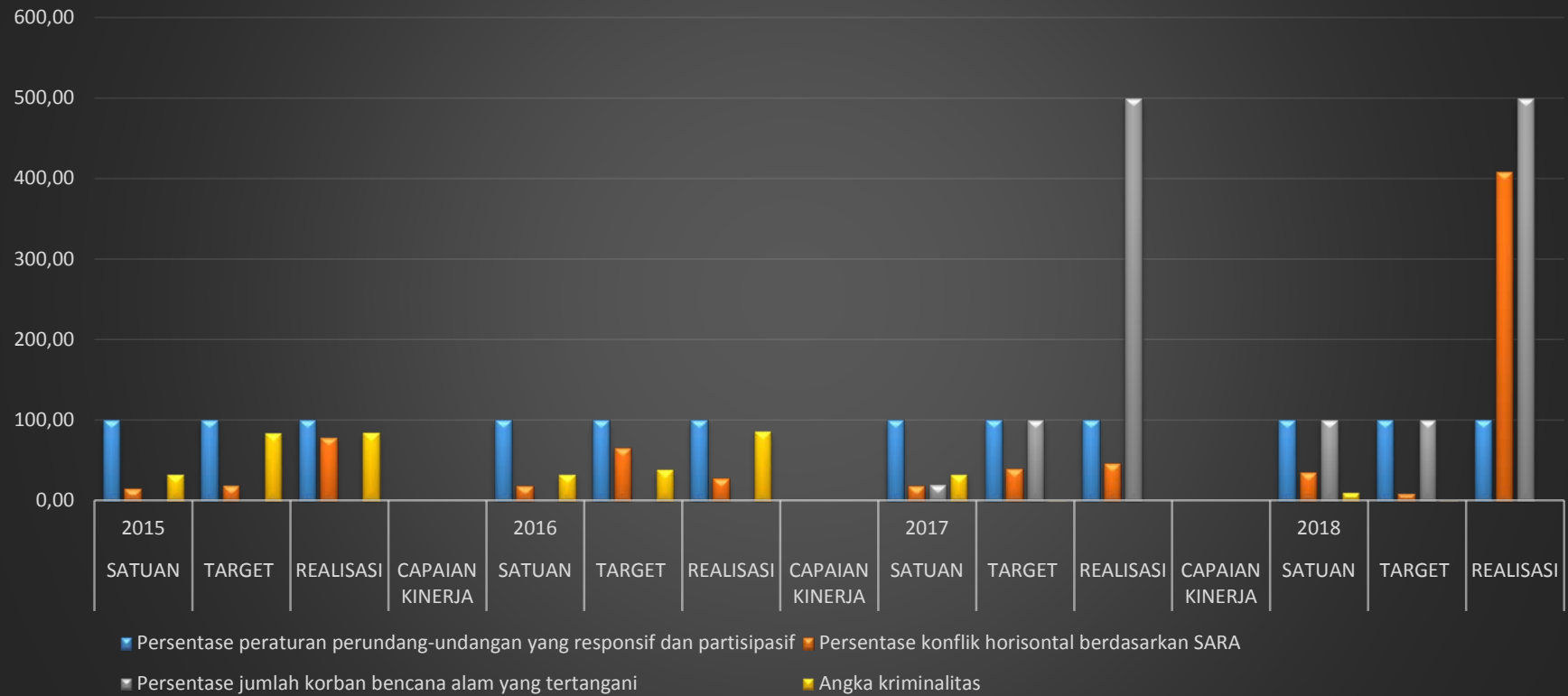
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2015	2016			2017	2018								
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1 Meningkatkan rasa aman, tenang dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua	1 Persentase peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00
	2 Persentase konflik horisontal berdasarkan SARA	%	15,00	19,00	78,95	%	18,00	65,22	27,590	%	18,00	39,47	45,60	%	35,00	8,571	408,35
	3 Persentase jumlah korban bencana alam yang tertangani	-	-	-	-	%	-	-	-	%	20,00	100,00	500,00	%	100,00	100,00	500,00
	4 Angka kriminalitas	%	33,00	84,42	84,18	%	33,00	38,19	86,41	%	33,00	0,14	23.571.43	%	10,00	0,17	5.883.35
2 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	1 Persentase pejabat struktural yang memenuhi syarat jabatan	%	100,00	99,32	99,32	%	100,00	96,63	96,63	%	100,00	97,58	97,58	%	100,00	98,11	98,11
	2 Persentase pemenuhan jabatan fungsional sesuai kebutuhan	%	63,67	70,79	111,18	%	71,00	31,00	43,66	%	71,00	63,63	89,62	%	70,00	69,09	98,07
	3 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Angka	B	C	66,67	Angka	CC	CC	100,00	Angka	B	BB	100	Angka	BB	B	62,59
	4 Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100,00	Opini	WTP	WTP	100	Opini	WTP	WTP	100
	5 Rata-rata kehadiran pegawai	%	90,00	87,76	97,51	%	90,00	97,94	108,00	%	95,00	93,00	97,89	%	95,00	74,07	77,97
3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	%	-	-	-	%	25,00	65,18	260,72	%	80,00	78,67	98,34
	2 Persentase SKPD yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	41,00	31,00	76,6	%	50,00	10,40	20,80	%	70,00	58,82	84,03	%	75,00	94,12	125,49
4 Meningkatkan Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN	1 Persentase pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00
	2 Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	%	55,00	55,36	100,65	%	55,00	55,40	97,09	%	55,00	65,53	119,15	%	65,00	60,84	93,6
5 Meningkatkan pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.	1 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	72,00	71,6	157,07	%	70,00	71,46	102,08	%	71,00	71,06	100,08	%	71,00	72,26	101,77
	2 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	5,00	0,95	100,5	%	4,00	3,33	83,25	%	4,00	36,36	900,09	%	35,00	30,76	87,88
6 Terwujudnya Masyarakat yang Sehat	1 Persentase penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00
	2 Angka kematian ibu per 100.000 ibu melahirkan	Angka	422,00	236,00	178,81	Angka	400,00	380,00	105,26	Angka	300,00	289,00	103,81	Angka	280,00	175,00	160,00
	3 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	44,00	44,00	100,00	Angka	54,00	8,00	675,000	Angka	7,00	7,00	100,00	Angka	6,50	9,00	72,22
	4 Persentase penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan dan mendapatkan ARV	%	100,00	51,40	51,40	%	100,00	51,40	51,40	%	100,00	56,40	56,40	%	100,00	100,00	100,00
	5 Persentase kelahiran (partus) yang ditangani tenaga medis	%	48,00	53,94	112,38	%	70,00	38,10	54,43	%	70,00	51,00	72,86	%	70,00	51,00	72,86
	6 Persentase Balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00
	7 Angka usia harapan hidup	Angka	69,9	65,1	97,16	Angka	67,00	65,10	97,16	Angka	67,00	65,10	97,16	Angka	67,00	65,10	97,16
7 Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	1 Persentase angka melek huruf	Angka	76,00	84,84	111,63	%	85,00	84,84	99,81	%	85,00	84,84	99,81	%	85,00	73,89	86,93
	2 Rata-rata lama sekolah	%	6,9	5,76	83,48	%	6,00	5,99	99,83	%	6,00	5,99	99,83	%	6,00	6,33	105,5

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA			
				2015	2016			2017	2018											
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	3	APK PAUD/TK	%	12,19	10,93	84,73	%	10,00	37,82	378,2	%	20,00	52,13	260,65	%	55,00	52,34	95,16		
	4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	%	100,00	90,67	90,67	%	90,00	93,14	103,49	%	92,00	94,24	102,43	%	95,00	94,28	99,24		
	5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	63,00	71,02	112,73	%	70,00	60,96	87,09	%	70,00	67,83	96,9	%	70,00	73,4	104,86		
	6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA	%	42,00	61,53	146,5	%	60,00	54,04	90,07	%	55,00	53,85	97,91	%	55,00	56,7	103,09		
	7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	79,00	78,36	99,19	%	79,00	82,69	104,67	%	80,00	75,85	94,81	%	80,00	74,8	93,5		
	8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	58,00	53,68	92,55	%	48,00	41,58	86,63	%	48,00	44,47	92,65	%	48,00	48,63	101,31		
	9	Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA	%	30,00	43,11	143,7	%	40,00	44,81	112,03	%	42,00	33,88	80,67	%	40,00	42,78	106,95		
	10	Angka putus sekolah SD/MI	%	0,3	1,46	20,55	%	1,00	0,88	133,630	%	0,88	0,18	488,89	%	0,1	0,04	250		
	11	Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,15	1,68	8,93	%	1,00	1,51	66,23	%	1,00	1,51	66,23	%	1,00	0,11	909,09		
	12	Angka putus sekolah SMU/SMK/MA	%	0,32	1,58	17,98	%	1,00	1,04	96,15	%	1,00	0,18	555,56	%	0,15	0,07	214,29		
	13	Persentase guru yang telah bersertifikasi	%	60,00	60,00	100,00	%	60,00	31,00	51,67	%	31,00	21,23	68,48	%	25,00	28,31	113,24		
	14	Persentase angka kelulusan SD/MI	%	100,00	99,92	99,92	%	100,00	99,98	99,98	%	100,00	99,84	99,84	%	100,00	99,85	99,85		
	15	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	%	100,00	99,98	99,98	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	99,95	99,95	%	100,00	99,96	99,96		
	16	Persentase angka kelulusan SMU/SMK/MA	%	100	99,79	99,79	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	99,19	99,19	%	100,00	99,83	99,83		
	8	Meningkatnya prestasi olahraga	1	Persentase olah raga yang menerima penghargaan tingkat nasional	%	17,00	24,87	146,29	%	25,00	74,29	294,16	%	30,00	56,52	188,04	%	50,00	60,86	121,72
	9	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Peningkatan wirausaha muda asli Papua	%	7,00	7,71	110,18	%	8,00	7,71	96,37	%	8,00	25	312,5	%	25,00	150	600
10	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1	Persentase peningkatan nilai Investasi PMDN dari tahun ke tahun	%	80,00	143,76	179,71	%	85,00	47,24	55,58	%	85,00	36,98	43,5	%	40,00	0	0	
		2	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA dari tahun ke tahun	%	60,00	60,31	100,52	%	60,00	28,26	47,1	%	60,00	1,33	2,21	%	2,00	0	0	
11	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1	Persentase jumlah koperasi sehat (berkualitas)	%	20,00	10,47	51,20	%	11,00	4,73	43,00	%	11,00	12,24	111,27	%	13,00	17,35	133,46	
		2	Persentase peningkatan jumlah Industri Kecil Menengah	%	20,00	18,75	93,75	%	19,00	18,00	94,73	%	19,00	33,33	175,42	%	35,00	5	14,28	
		3	Persentase peningkatan jumlah Usaha Kecil Menengah	%	10,00	24,51	245,1	%	25,00	37,7	150,8	%	38,00	153,04	510,13	%	100,00	96,92	96,92	
12	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja	1	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,5	3,44	983	%	3,5	2,97	117,85	%	3,00	3,23	92,88	%	3,00	3,2	106,67	
		2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	81	78,9	119,47	%	83,00	78,28	94,31	%	83,00	76,93	92,67	%	80,00	79,11	98,88	
13	Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah	1	Persentase Jumlah PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran	%	10,00	9,75	97,3	%	10,00	12,92	129,00	%	13,00	12,92	99,38	%	13,00	9,72	74,77	
		2	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Provinsi Papua	%	3,00	3,3	110	%	5,00	7,75	155,00	%	8,00	7,75	96,87	%	8	7,75	96,88	
14	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat	1	Kontribusi sub sektor perkebunan dan hasilnya terhadap PDRB (%)	%	0,9	1	111,11	%	1,3	0,95	73,08	%	1,5	0,94	62,66	%	1	0,95	95,00	
		2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	1,2	0,91	75,83	%	1,2	0,89	74,17	%	1,2	0,87	72,50	%	1	0,87	87,00	
		3	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	4,5	5,57	123,78	%	4,5	5,06	112,44	%	5,5	4,78	86,91	%	5	4,78	95,6	
		4	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	%	8,5	2,95	34,71	%	10,00	2,57	25,70	%	21,00	5,30	25,24	%	6,00	2,46	41,00	
		5	Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	2	1,82	91,00	%	2,2	1,65	75	%	3,00	1,55	51,66	%	2,00	1,55	77,5	
		6	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	35,00	32,22	92,507	%	30,00	34,078	113,592	%	35,5	36,07	101,60	%	40,00	36,716	91,79	

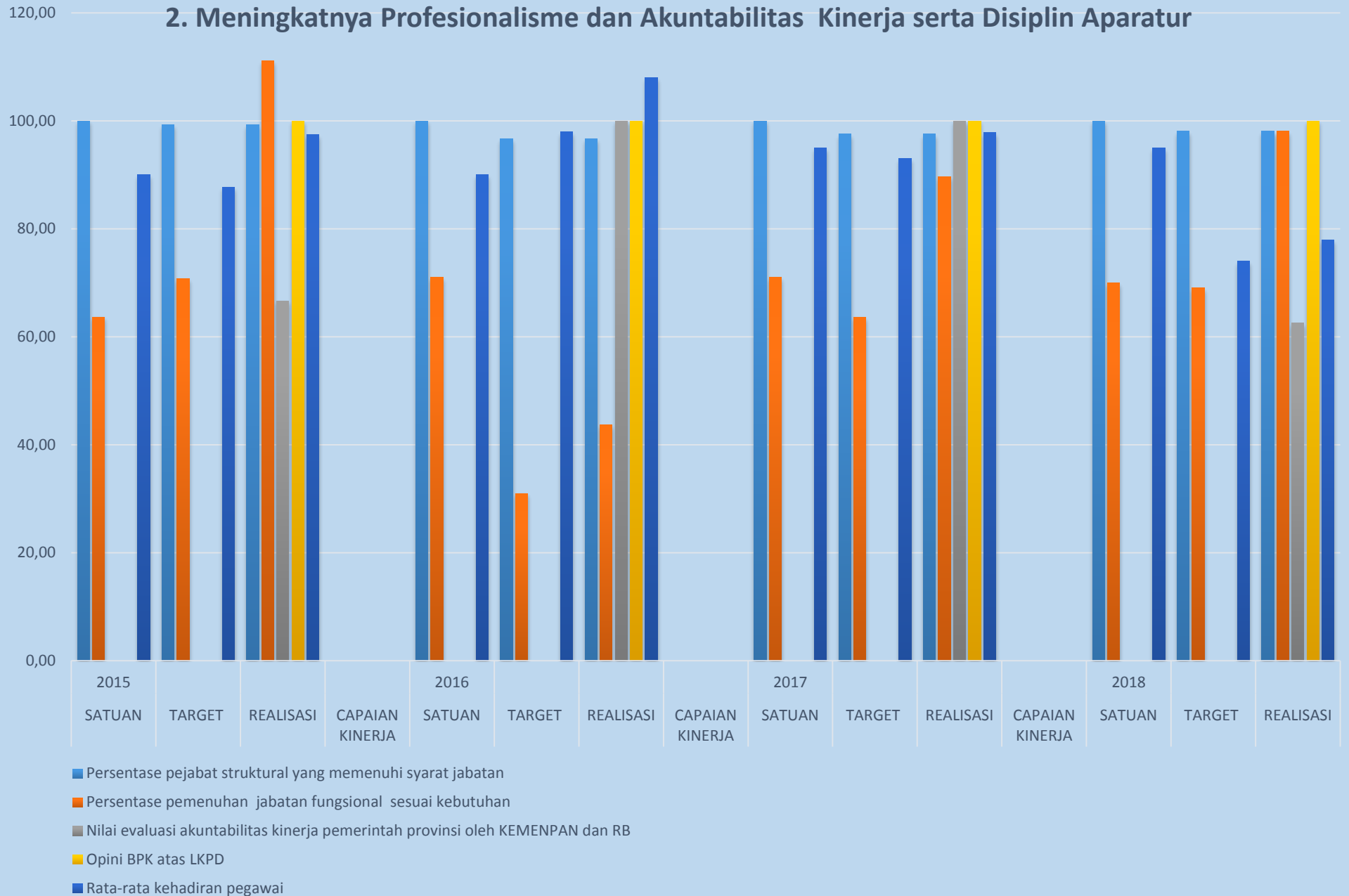
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018						
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
15 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	1 Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	%	8,00	7,35	91,88	%	8,00	9,14	114,25	%	9,5	4,64	48,84	%	5	7,33	146,6
	2 PDRB per Kapita	Juta	25,00	47,73	190,92	Juta	31,00	54	174,19	Juta	56,00	57,87	103,34	Juta	60,00	63,4	105,67
	3 Inflasi	%	5,5	2,79	197,13	%	5,00	4,13	121,07	%	4,00	2,41	165,98	%	2,00	2,41	82,99
	4 Indeks Gini	%	0,35	0,42	82,94	%	0,41	0,4	102,76	%	0,35	0,40	87,94	%	0,35	0,38	91,15
	5 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	3,54	2,2	62,15	%	2,5	2,09	83,59	%	2,5	2,1	84,09	%	2,5	3,2	128,00
	6 Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	7,3	8,2	112,33	%	10,00	7,95	79,5	%	10,00	7,65	76,5	%	10,00	8	80,00
16 Meningkatkan konektivitas antar wilayah	1 Persentase panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	%	30,00	27,51	91,7	%	30,00	21,08	70,27	%	30,00	97,58	325,28	%	95,00	37,39	39,35
	2 Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	50,00	45,15	90,3	%	50,00	25,45	50,9	%	50,00	27,45	54,9	%	30,00	60,3	200,99
	3 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1:100	1:96	96,00	Rasio	1:110	1,106	103,77	Rasio	1:110	1:104	94,54	Rasio	1:110	1:167	65,87
	4 Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun	Per Tahun	3,8 juta	3,88	102,11	Juta	4	3.501.758	87,54	Juta	4	736,594	18,41	Juta	1	4.238.562	423,86
17 Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah	1 Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi	%	65,00	63,8	98,15	%	65,00	67,33	103,58	%	70,00	80,16	114,51	%	80,00	4,35	5,44
	2 Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik	%	60,00	58,78	97,97	%	60,00	88,19	146,98	%	89,00	18,04	20,27	%	20,00	0	0
	3 Meningkatkan ketersediaan air baku untuk irigasi	%	65,00	6,78	10,43	%	15,00	28,5	190,00	%	28,5	6,83	23,96	%	10,00	0	0
	4 Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi	%	30,00	0,05	2,17	%	2,00	37,79	1889,5	%	2,00	26,70	1335,13	%	26,00	40,00	153,85
18 Meningkatkan pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni	1 Jumlah Rumah Layak Huni yang di butuhkan	%	5,00	5,00	100,00	%	40,00	52,51	131,28	%	50,00	217,645	434,09	%	100,00	133,00	133,00
19 Meningkatkan pemenuhan air bersih	1 Persentase RT yang terlayani air bersih	%	55,00	50,00	90,91	%	55,00	43,82	79,67	%	55,00	43,19	78,53	%	55,00	43,22	78,58
20 Meningkatkan pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan	1 Rumah Tangga pengguna listrik	%	37,00	38,44	103,89	%	40,00	50,97	127,42	%	50,00	50,97	101,94	%	55,00	0	0
21 Implementasi Rencana Tata Ruang Secara Konsisten	1 Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya	%	70,00	100,00	142,86	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00
22 Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia	1 Persentase area hutan mangrove yang kondisi baik	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00	82,64	97,22	%	85,00	82,64	97,22
	2 Kerusakan Kawasan Hutan	%	2,00	3,00	150,00	%	2,00	2,2	90,91	%	2,00	8,92	22,35	%	5,00	17,71	28,23
	3 Persentase Area Hutan Lindung Terhadap Seluruh Kawasan	%	30,00	26,61	88,7	%	30,00	25,72	85,73	%	27,00	25,71	95,22	%	27,00	25,71	95,22

Sumber : Laporan Kinerja (LKj/LAKIP) Pemerintah Provinsi Papua 2015-2018 (Data Series)

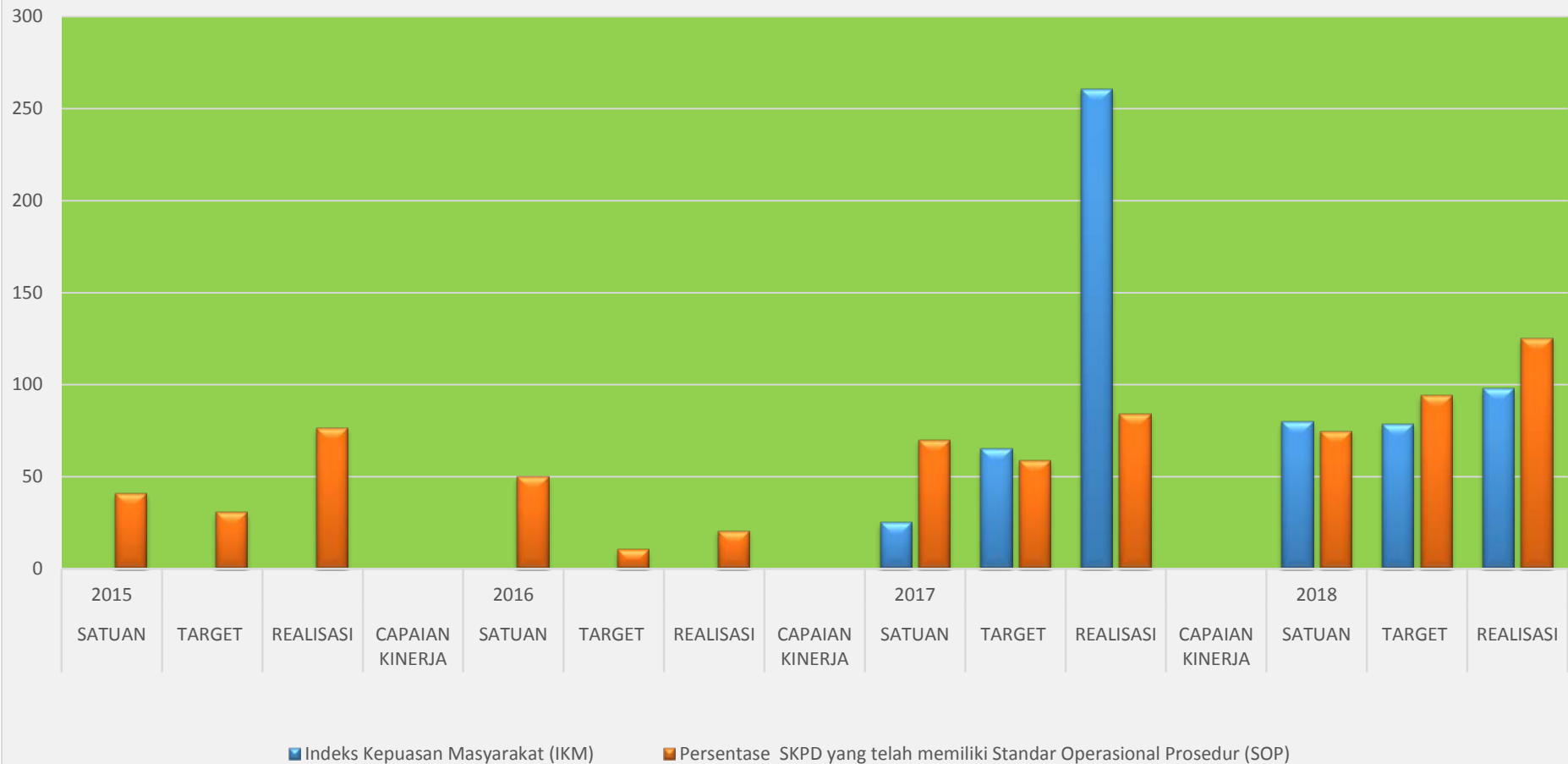
1. Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua



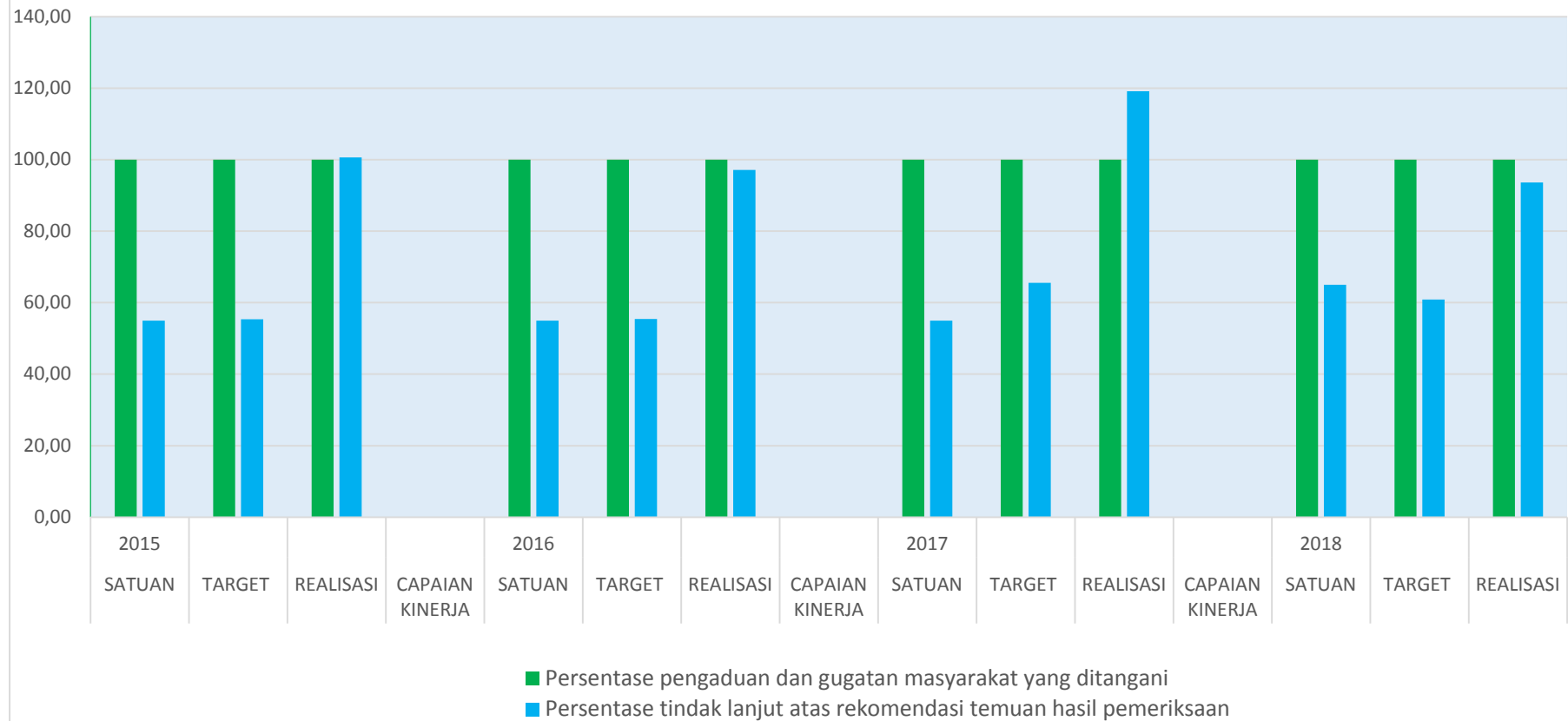
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur



3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi



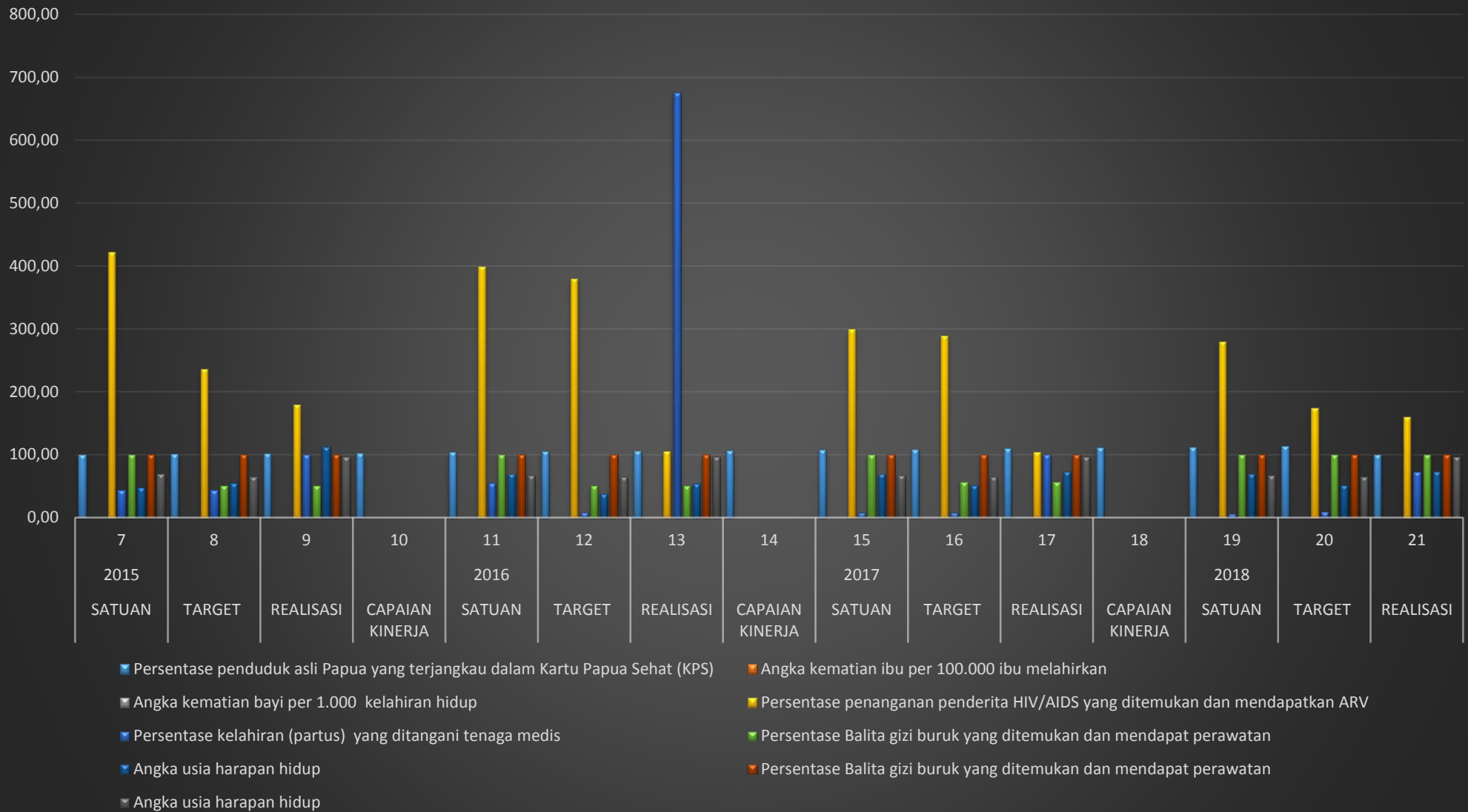
4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN



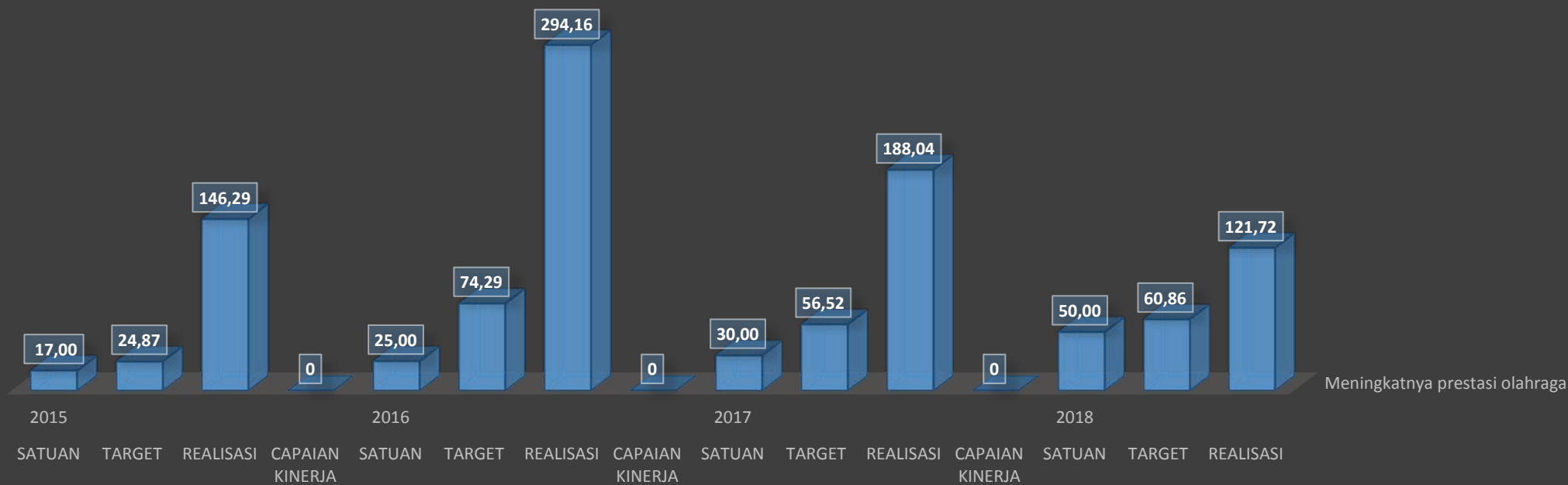
5. Meningkatnya pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.



6. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat

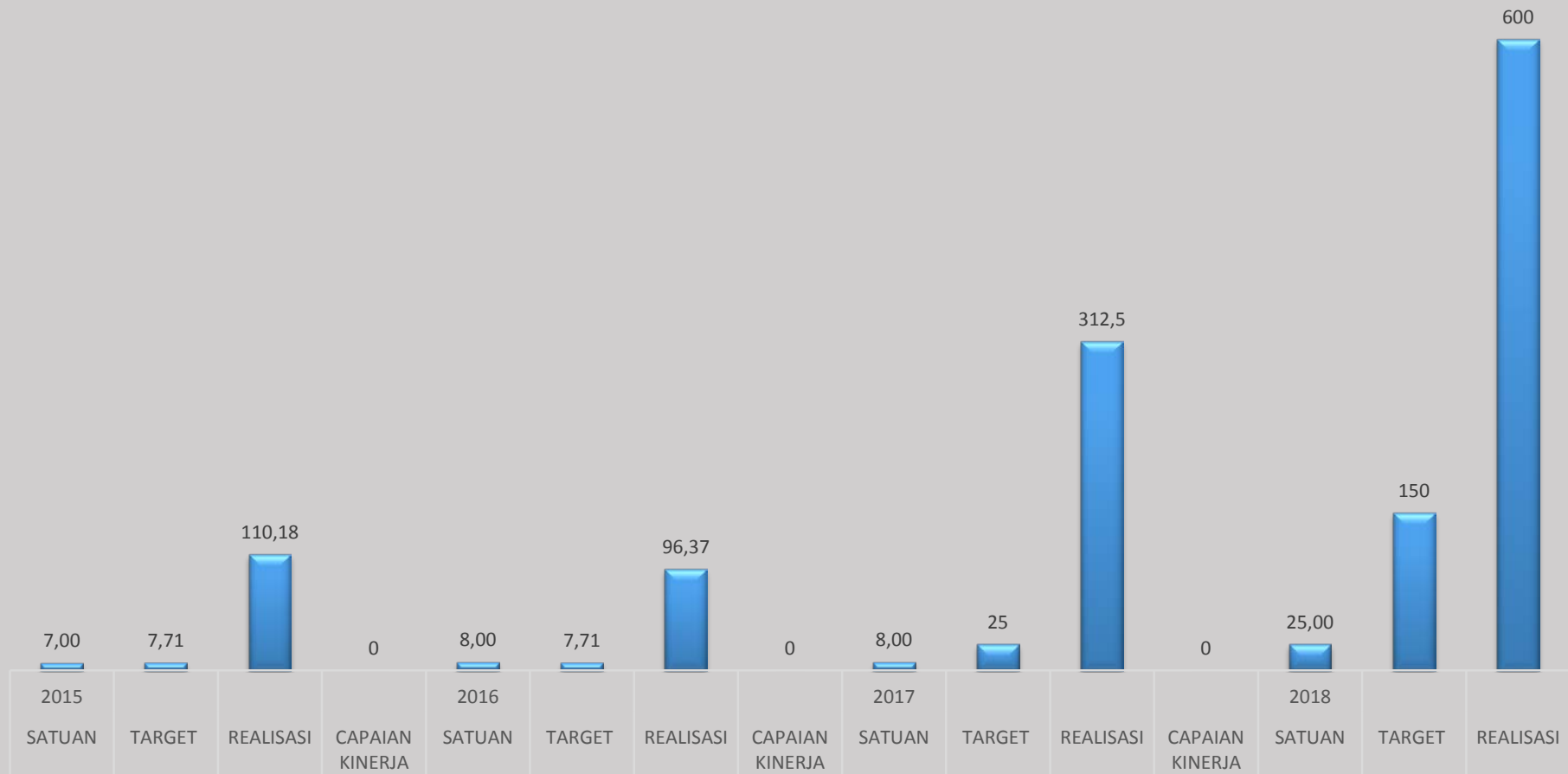


8. MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA

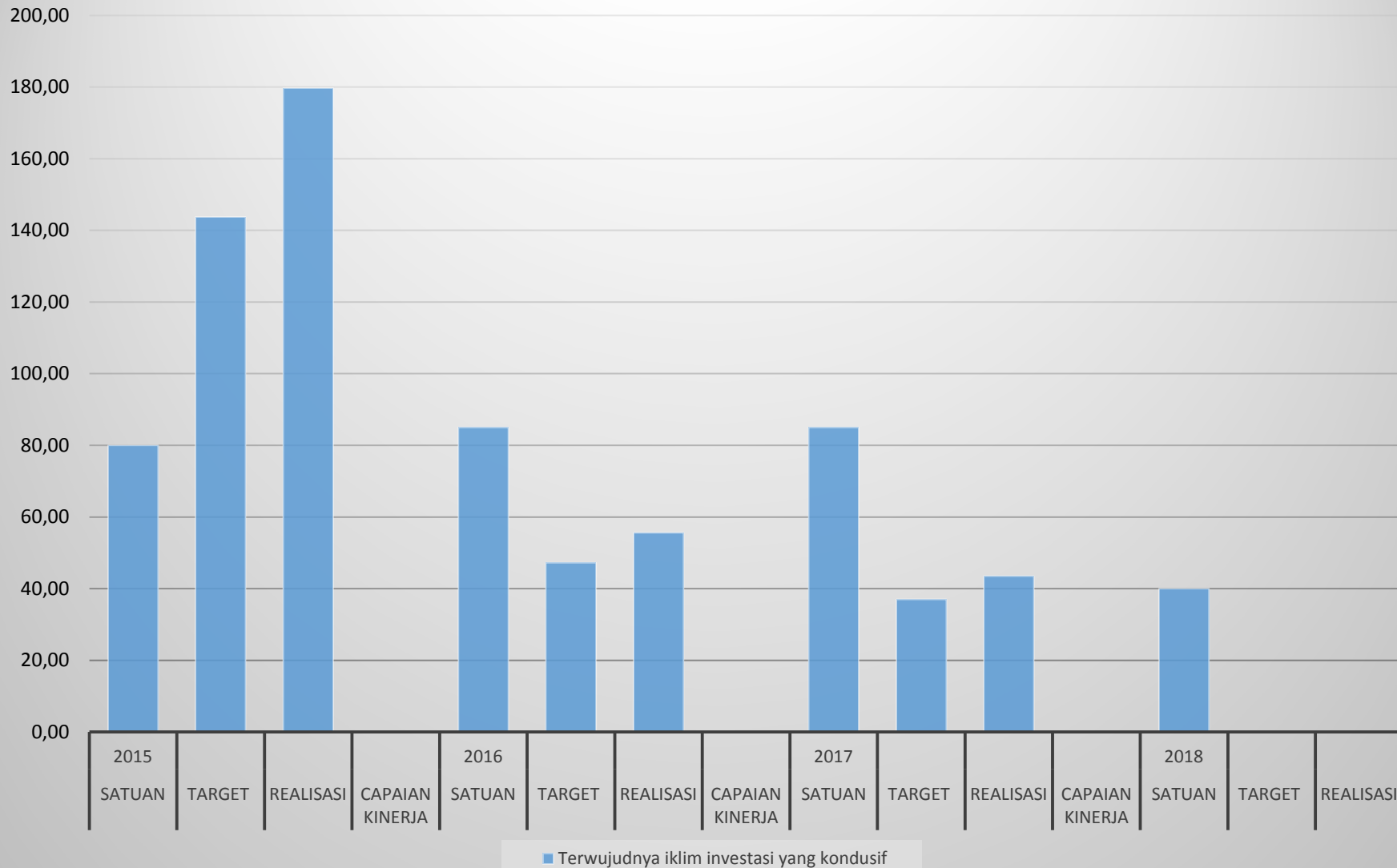


9. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

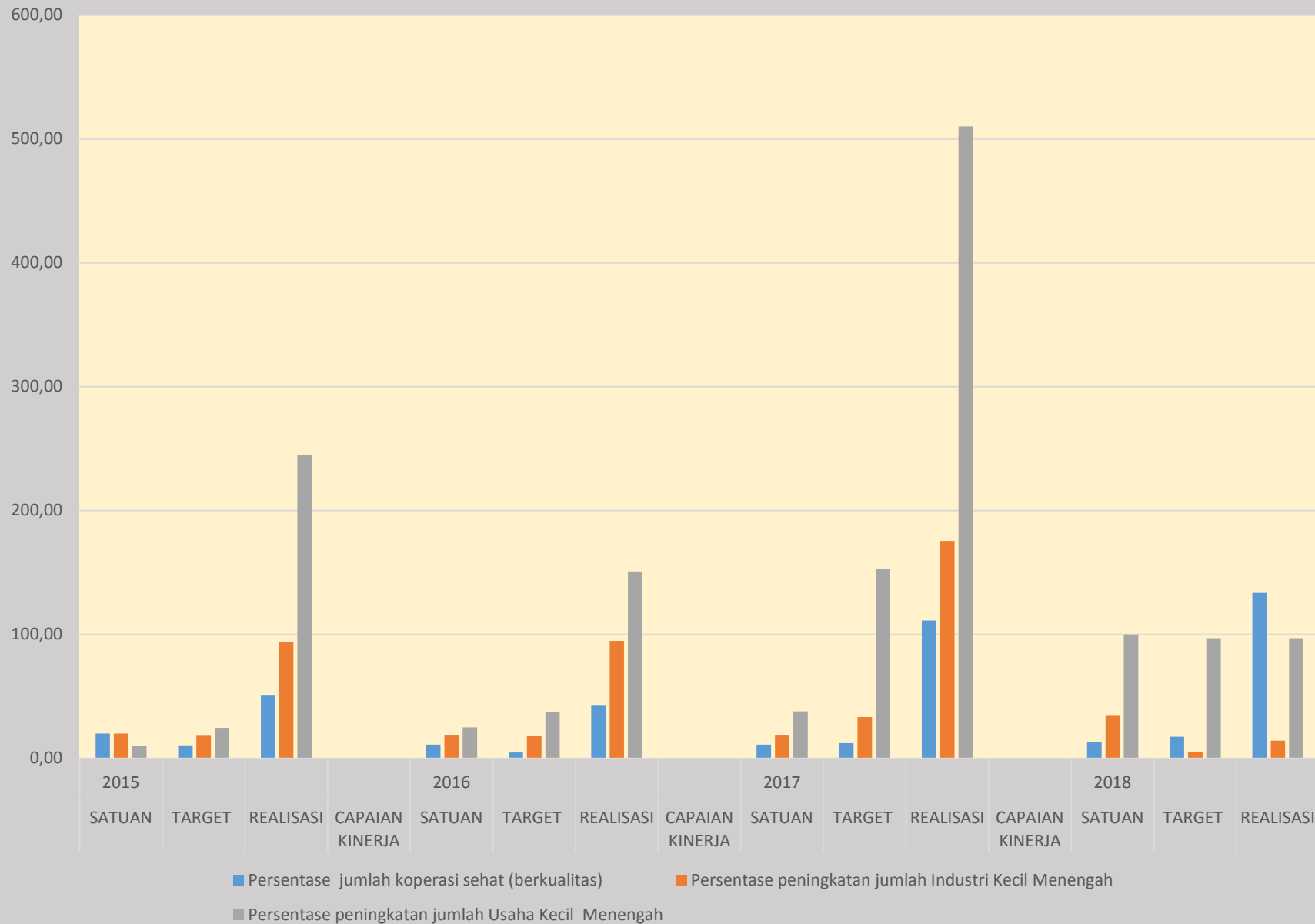
■ Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan



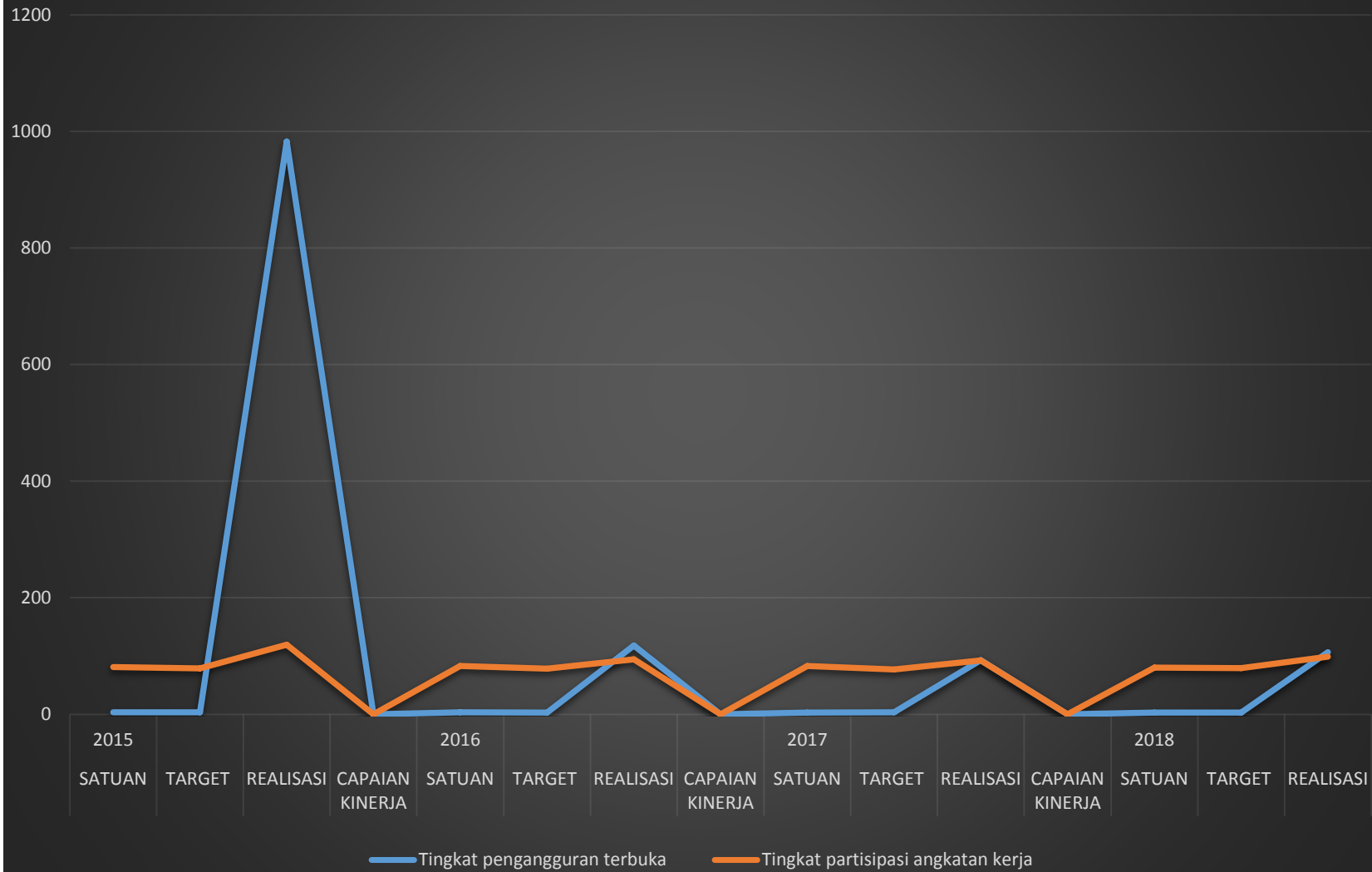
10. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif



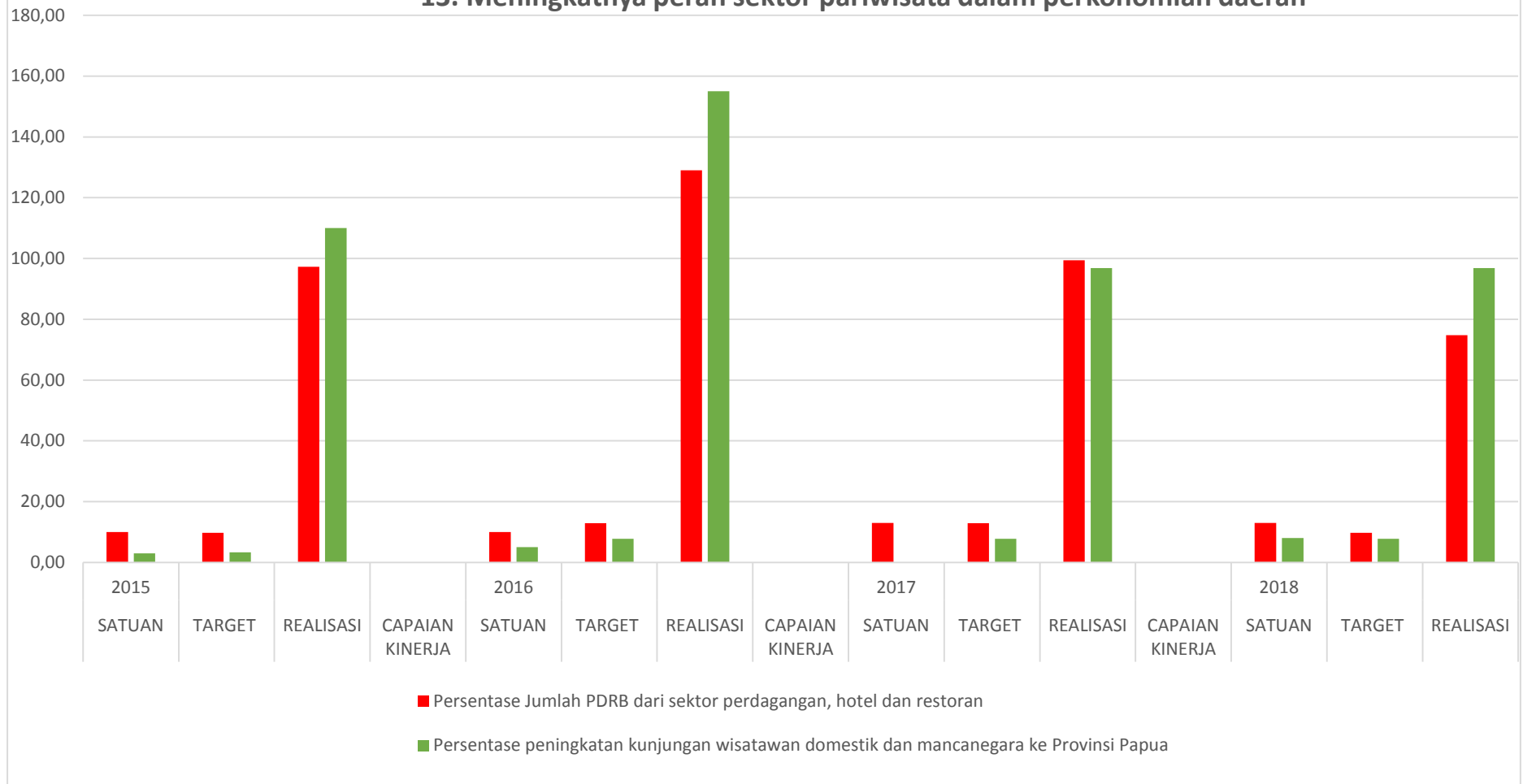
11. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)



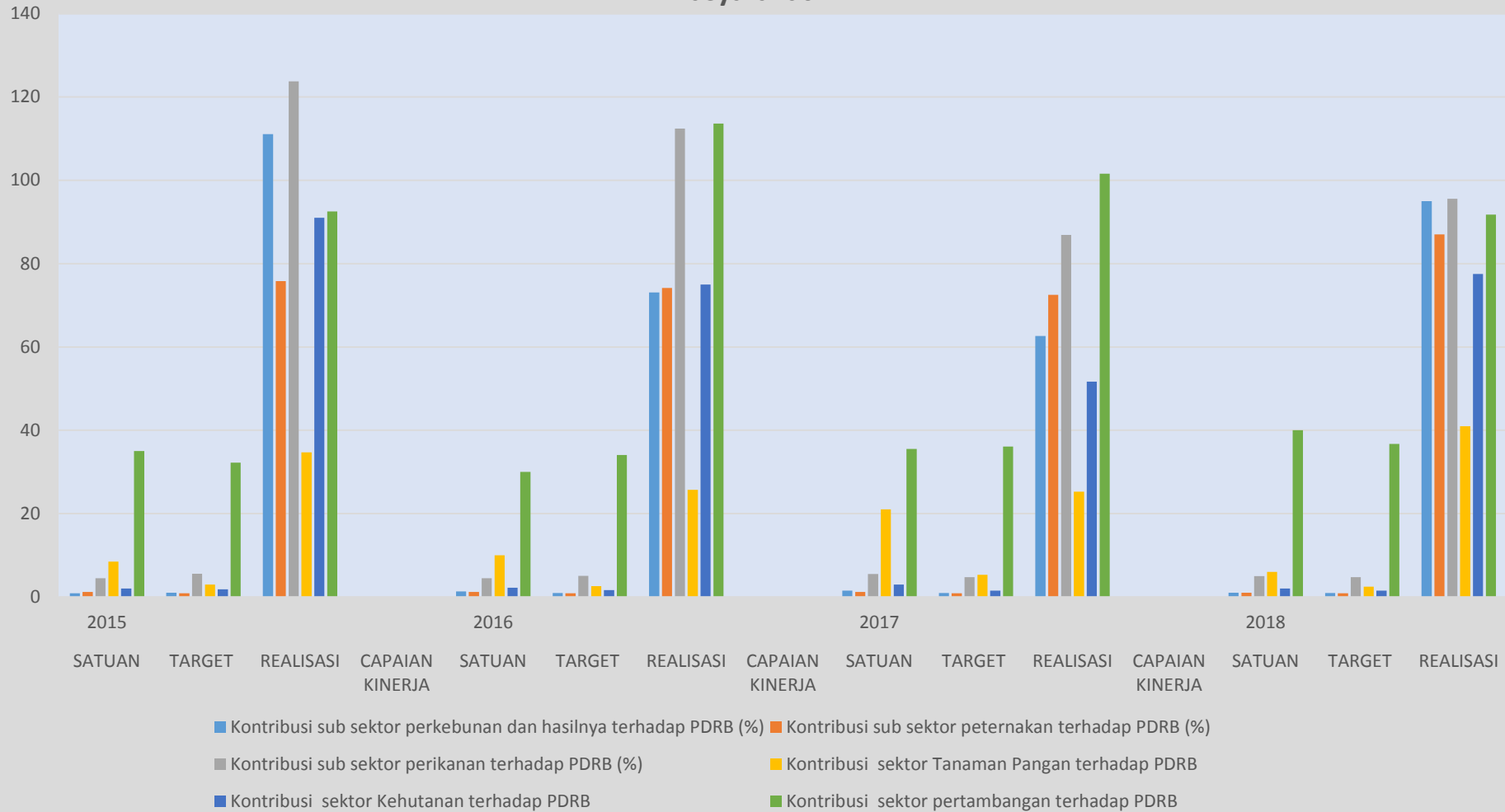
12. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja



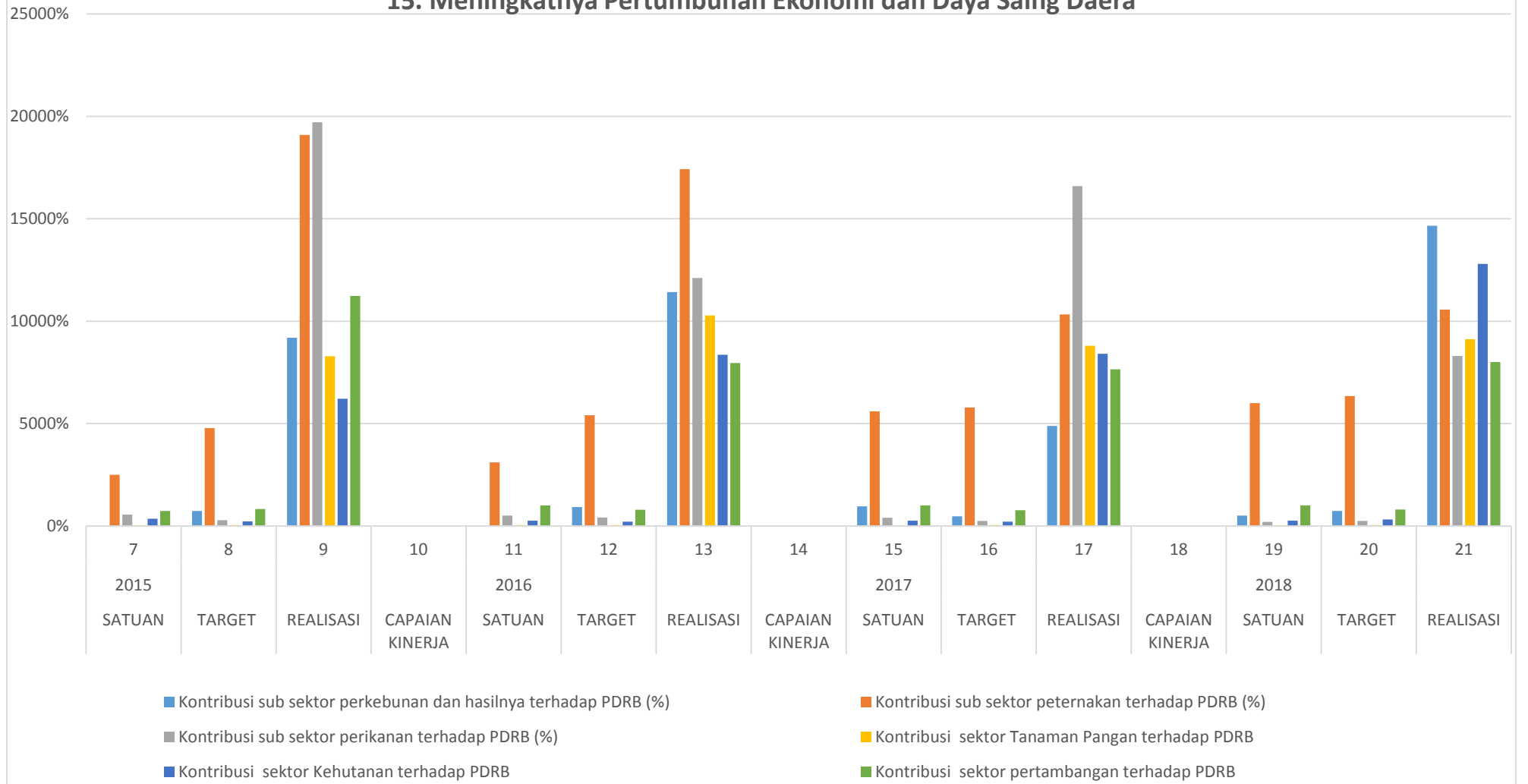
13. Meningkatnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian daerah



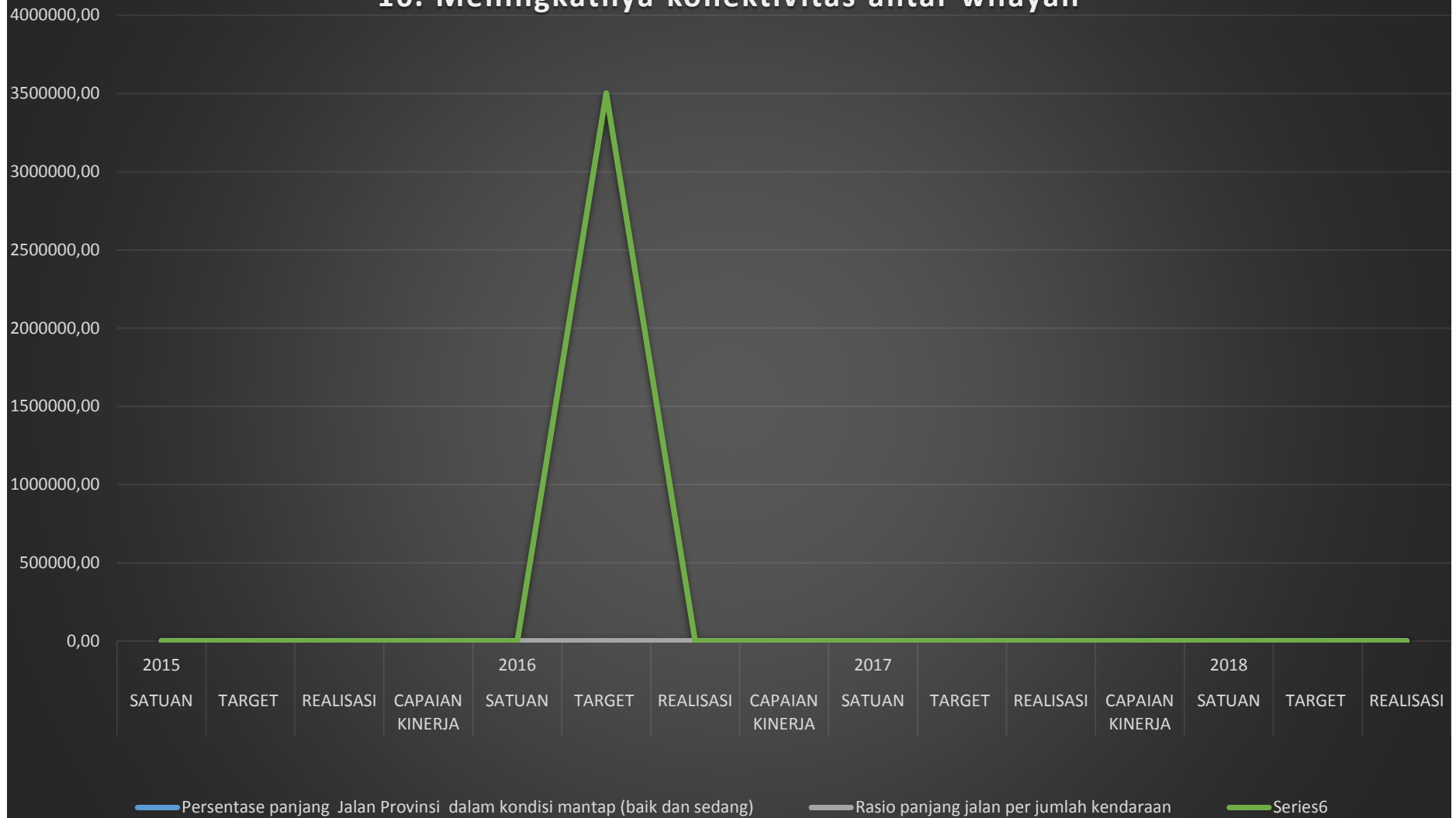
14. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat



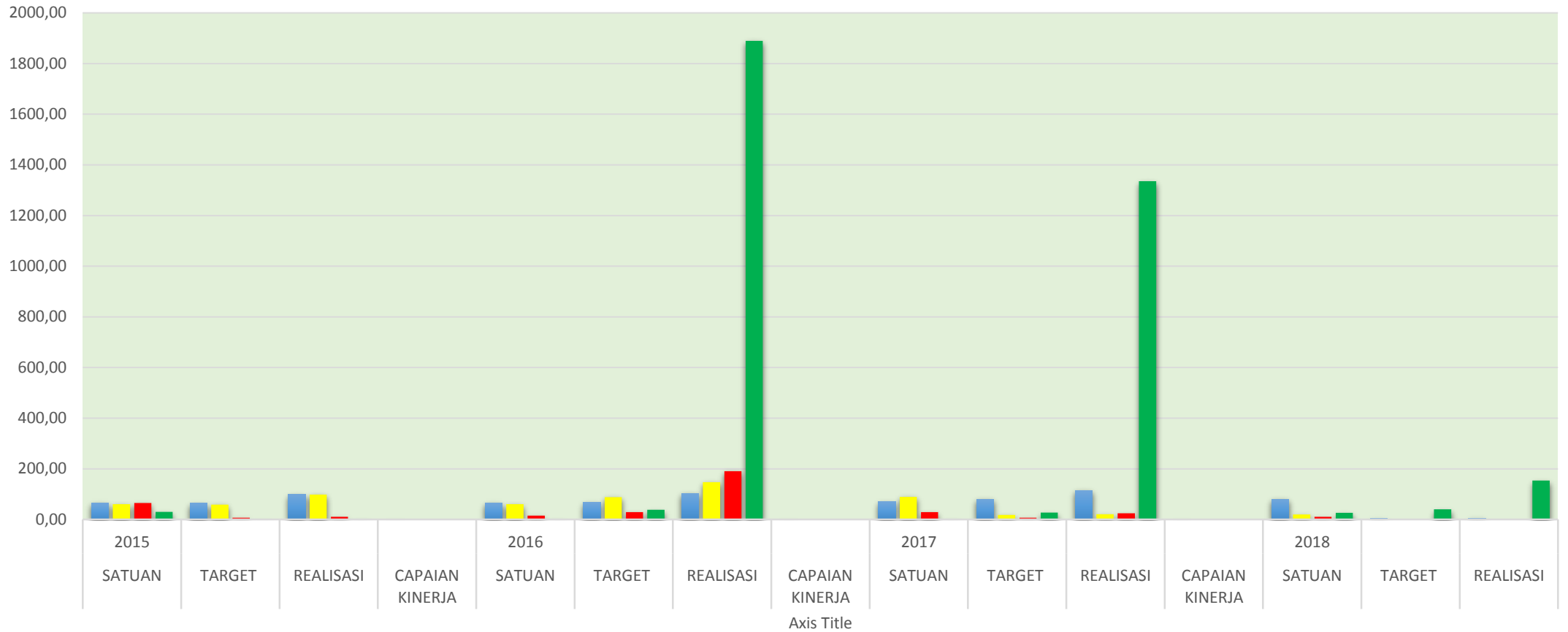
15. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah



16. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

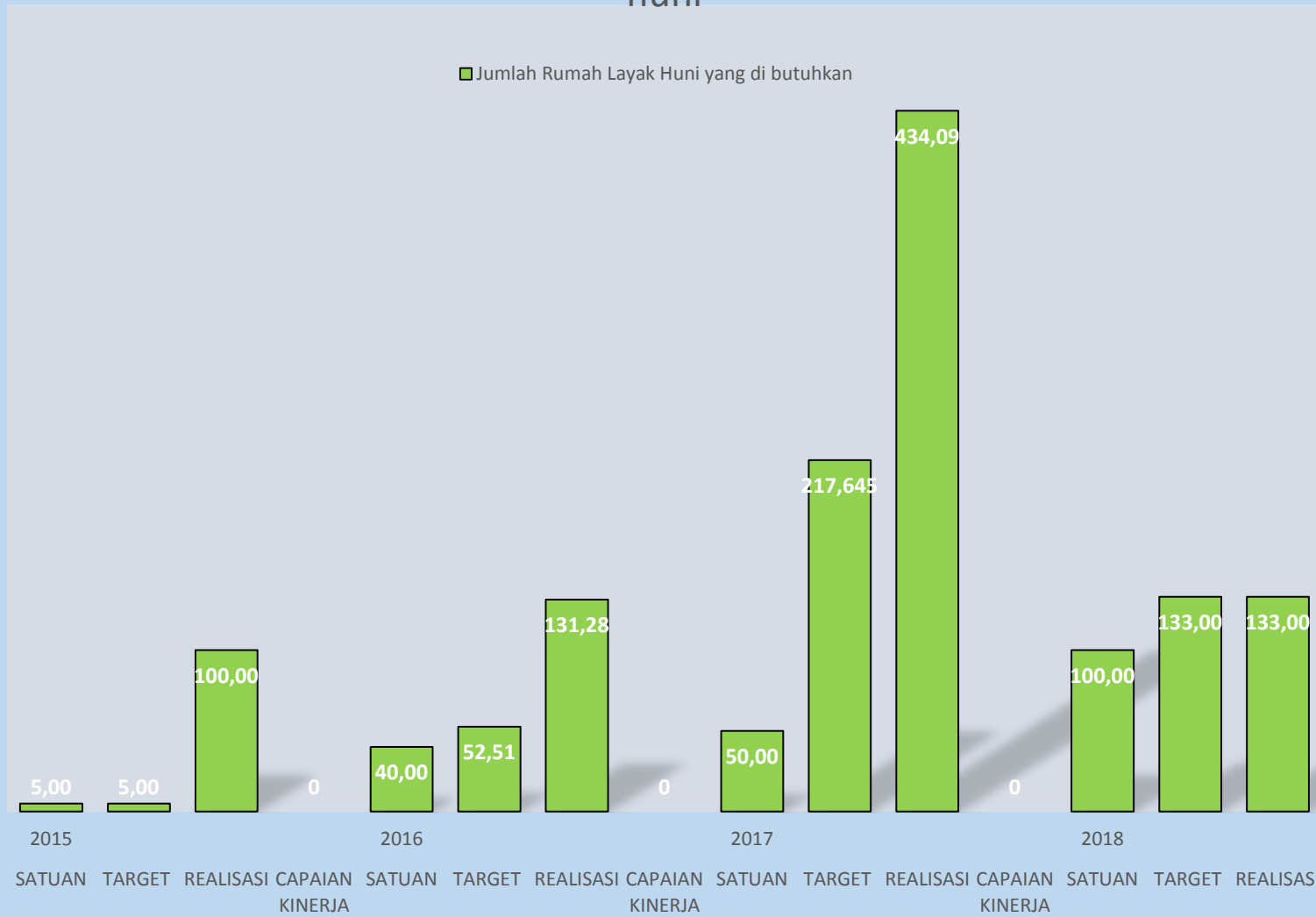


17. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah



- Persentase lahan budidaya pertanian yang mendapatkan layanan irigasi
- Panjang jaringan irigasi yang kondisinya baik
- Meningkatnya ketersediaan air baku untuk irigasi
- Prosentase cakupan sistem pengendalian banjir dan abrasi

18. Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni



19. Meningkatnya pemenuhan air bersih

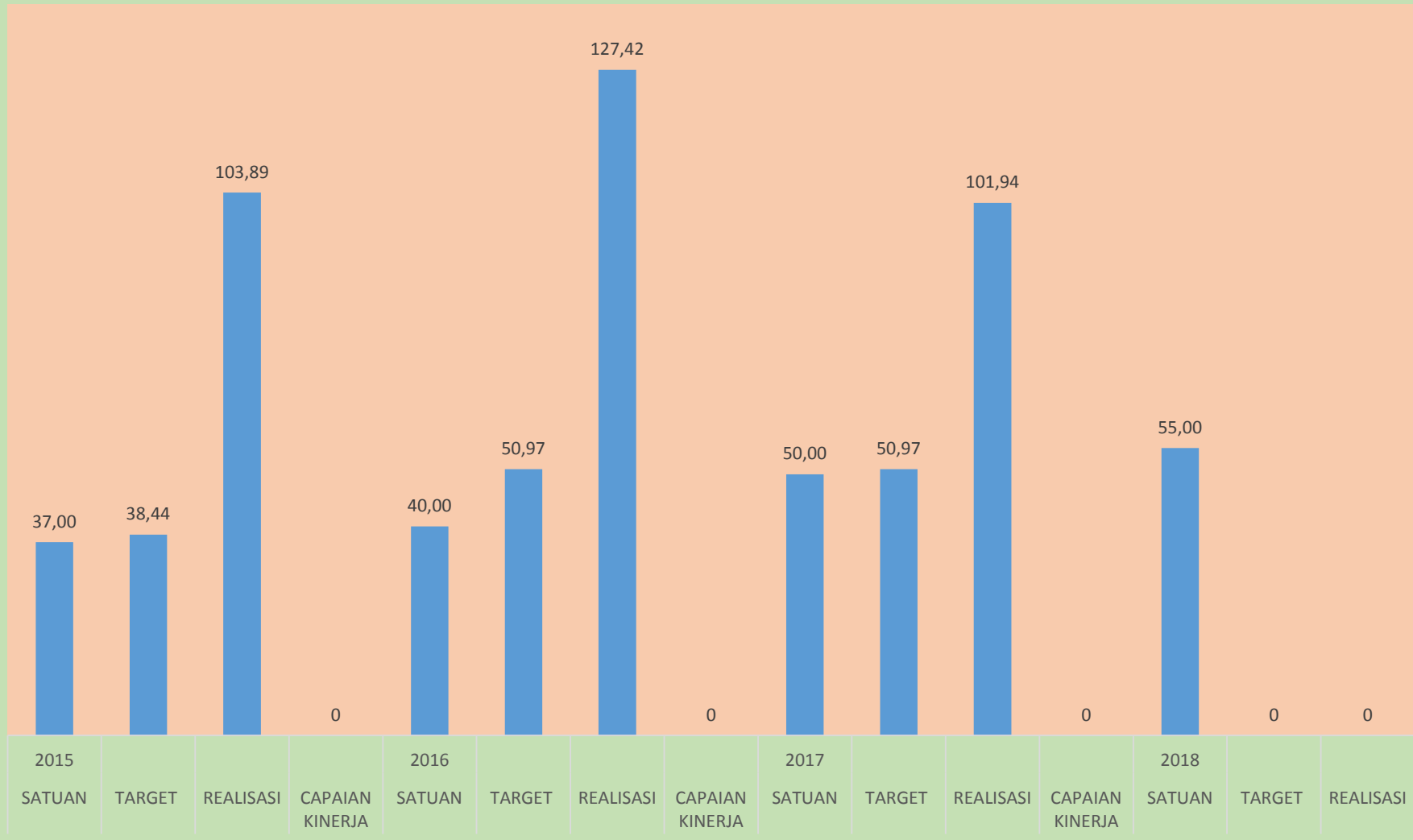
■ Persentase RT yang terlayani air bersih



2015				2016				2017				2018		
SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI

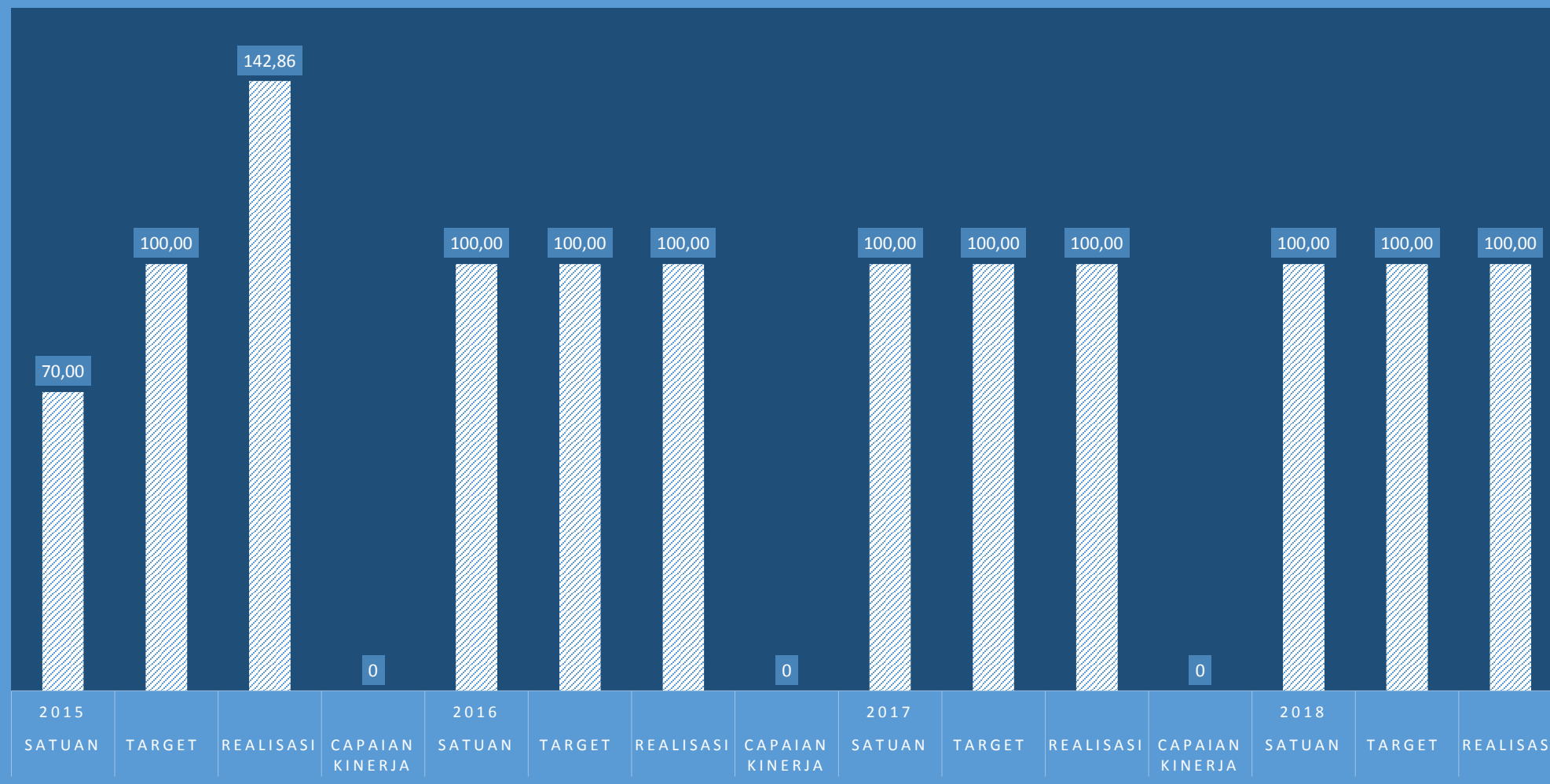
20. Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

■ Rumah Tangga pengguna listrik

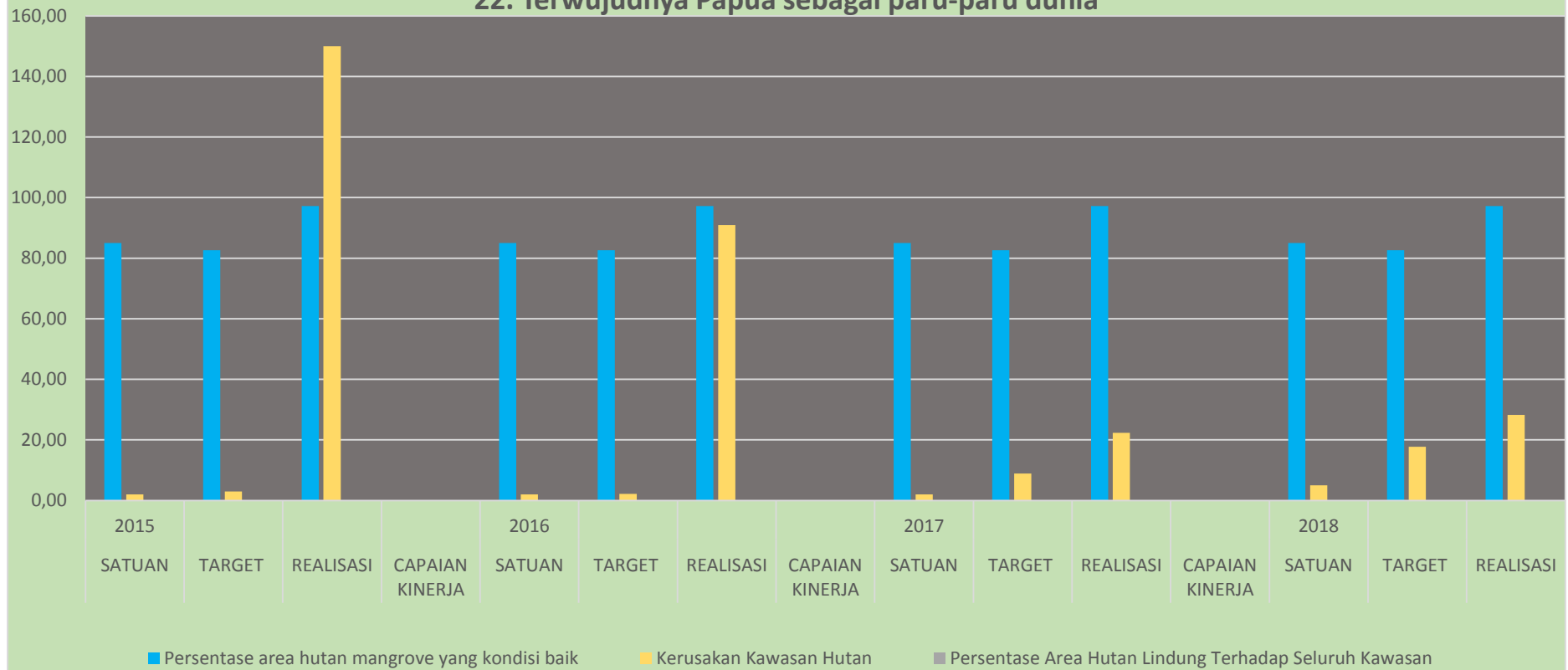


21. PERSENTASE PENERBITAN IJIN PENGGUNAAN LAHAN SKALA LUAS YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA

▨ Persentase penerbitan ijin penggunaan lahan skala luas yang sesuai dengan peruntukannya



22. Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia





SURABAYA, - Peduli Olahraga, Gubernur Papua Dianugerahi Golden Award Siwo PWI 2019 Penghargaan Golden Award diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen mewakili Gubernur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/2/2019



Penghargaan APPSI diserahkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan HAM Setda Papua Doren Wakerkwa, SH di Hotel Shangri - la Surabaya Senin malam (28/01/2019)



Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN dan RI) kepada Pemerintah Provinsi Papua atas prestasi dalam akuntabilitas kinerja tahun 2018 Dengan predikat B, nilai 62.59 di Makassar, 19 Februari 2019.



Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal SE. MM Ketika Menerima Penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Kepada Pemerintah Provinsi Papua, atas hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi penyelenggara Sesuai Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan predikat kepatuhan tertinggi (Zona Hijau), Nilai 86.69 di Jakarta, 10 Desember 2018



Jakarta - Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sebagai salah satu badan publik dengan kualifikasi cukup informatif. Penghargaan itu, diserahkan Ketua KI Pusat, Gede Narayana kepada Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH di sela-sela Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden RI, yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo para gubernur dan pimpinan lembaga dan instansi, Senin (5/11/2018) siang.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA



LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2018